



KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019
(Audited)

BAB I
PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diterima secara umum. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 (dua) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja. Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal adalah salah satu entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA); Laporan Operasional (LO); Neraca; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL); Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); Laporan Arus Kas (LAK); dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan, yang mencakup unsur pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan, yang mencakup unsur pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit-LO. Neraca menyajikan aset, utang, dan ekuitas dana yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya. Sedangkan Laporan Arus Kas menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan, arus kas dari aktivitas pembiayaan, dan



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

arus kas dari aktivitas non anggaran yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya.

Guna menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan, perlu dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal yang meliputi semua laporan dan berbagai penjelasannya yang mengikuti laporan tersebut adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal selama satu periode Tahun Anggaran 2019.

Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan adalah untuk dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna, berupa posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan (Tahun Anggaran 2019).

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2019 disusun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keeempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133);
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 4400);
- 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 8) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 10) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5584) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Kesebelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ;
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4575);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 22) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 23) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 24) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 25) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
- 26) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- 27) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 28) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 29) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
- 30) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

- Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 31) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/ 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 899);
 - 32) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 - 33) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/ 2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1.974);
 - 34) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
 - 35) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 - 36) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 92);
 - 37) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 51) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 80);
 - 38) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 52) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 130);

- 39) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 110);
- 40) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 8);
- 41) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 6);
- 42) Peraturan Bupati Tegal Nomor 18 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 18) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 58 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 18 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 58);
- 43) Peraturan Bupati Tegal Nomor 72 tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 72)
- 44) Peraturan Bupati Tegal Nomor 36 tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 36);
- 45) Peraturan Bupati Tegal Nomor 41 tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 41);

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2019 memuat penjelasan dan atau catatan atas laporan keuangan dalam periode Tahun Anggaran 2019 yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab I berisi Pendahuluan, yang menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan;
2. Bab II berisi Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD, yang menyajikan diskripsi ekonomi



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

makro/ekonomi regional, kebijakan keuangan, dan indikator pencapaian target kinerja APBD;

3. Bab III berisi Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, yang menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, serta hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan;
4. Bab IV berisi Kebijakan Akuntansi, yang menjelaskan tentang entitas pelaporan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan, dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP, serta kebijakan akuntansi tertentu;
5. Bab V berisi Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan, yang merinci dan menjelaskan masing-masing pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Laporan Arus Kas (LAK);
6. Bab VI, berisi Penjelasan Atas Informasi-informasi non keuangan, yang menjelaskan tentang gambaran umum daerah;
7. Bab VII, berisi Penutup.



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

Selama kurun waktu tiga tahun berturut-turut yaitu dari tahun 2016 hingga tahun 2018, besarnya PDRB Kabupaten Tegal mengalami peningkatan. Dilihat dari penghitungan atas dasar harga berlaku pada tahun 2016 sebesar 28.025,64 milyar rupiah meningkat pada tahun 2018 menjadi sebesar 33.079,23 milyar rupiah. Sedangkan menurut harga konstan pada tahun 2017 sebesar 22.322,10 milyar rupiah dan tahun berikutnya meningkat menjadi sebesar 23.552,55 milyar rupiah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal tahun 2018 sebesar 5,51 persen melaju landai dibanding tahun 2017 sebesar 5,38 persen.

Struktur perekonomian sebagian masyarakat Kabupaten Tegal telah bergeser dari kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan ke kategori ekonomi lainnya yang terlihat dari besarnya peranan masing-masing kategori terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tegal. Sumbangan terbesar masih dari kategori Industri Pengolahan sebesar 33,34%. Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 14,84%. Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor berada pada posisi kedua penyumbang kontribusi PDRB memberikan kontribusi sebesar 16,49%.

Sektor industri pengolahan berkembang dengan adanya klaster logam di Kecamatan Talang dan Adiwerna utamanya meliputi komponen kapal, komponen alat mesin pertanian, komponen otomotif, komponen alat berat, dan peralatan rumah tangga. Produk IKM Kabupaten Tegal telah banyak dipakai di banyak daerah di Indonesia, bahkan di beberapa negara tetangga. Industri pengolahan makanan juga berkembang dengan baik di Kabupaten Tegal utamanya minuman dan makanan kecil khas Kabupaten Tegal diantaranya adalah teh, tahu aci, pilus, anthor, olos, dan kacang bogares. Kuliner lain selain makanan kecil adalah sate kambing muda yang terkenal gurih dan lezat danteh poci yang tidak dapat dipisahkan dari kedua kuliner khas Tegal di atas dan sangat mendukung perkembangan industri berbasis makanan ini. Industri konfeksi juga menyumbang kontribusi yang cukup besar utamanya industri batik tegalan sebagai identitas budaya khas Kabupaten Tegal. Upaya yang telah dilakukan diantaranya adalah peningkatan kualitas batik, introduksi pewarna alami, pelatihan manajemen, promosi melalui pameran, dan kebijakan untuk mengenakan batik tegalan sebagai pakaian resmi daerah yang dikenakan setiap hari Kamis.

Secara umum, industri pengolahan merupakan kontributor yang signifikan karena selain sumbangsuhnya yang besar pada perekonomian Kabupaten Tegal, sifat industrinya adalah padat karya sehingga dapat memberikan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Selain itu, kontribusinya



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

relatif stabil - hampir mencapai 30% dari total perekonomian wilayah - serta tren pertumbuhannya juga cenderung meningkat selama lima tahun terakhir. Sebagai sektor ekonomi yang memiliki potensi bagus serta *backward* dan *forward linkage* yang kuat, sudah seharusnya sektor industri pengolahan dijadikan prioritas pembangunan. Perkembangan yang terjadi pada sektor ini akan menarik sektor ekstraktif untuk maju dan mendorong sektor *tersier* untuk berkembang.

Kontribusi sektor perdagangan juga sangat signifikan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya *outlet* penjualan di sepanjang jalur regional yang ada. Berkembangnya sektor ini dilatarbelakangi dengan berkembangnya sektor lain, mengingat perkembangan perdagangan merupakan muara dari sistem produksi. Kawasan pusat ekonomi di Kabupaten Tegal adalah Kecamatan Adiwerna dan Slawi. Pusat-pusat perdagangan muncul dengan pesat serta membentuk satu koridor ekonomi yang utuh. Hampir semua titik penjualan hasil produksi di Kabupaten Tegal berada di area Adiwerna dan Slawi.

Sektor perdagangan juga mengalami tren yang menaik dari tahun ke tahun, serta kontribusinya juga mengalami peningkatan. Selain karena lokasi Kabupaten Tegal yang relatif baik, perkembangan sektor ini dipengaruhi perkembangan kawasan perkotaan kecamatan, dan tumbuhnya sektor industri pengolahan. Peningkatan aktifitas sektor perdagangan dan industri memberi pengaruh terhadap ketahanan perekonomian daerah. Perkembangan kawasan perkotaan di kecamatan juga memiliki pengaruh yang signifikan dimana perkembangan fisik dan ekonomi tidak lagi terpusat pada kawasan Slawi-Adiwerna, tetapi juga pada kawasan perkotaan kecamatan, yang berfungsi sebagai pusat pelayanan lokal untuk kawasan sekitarnya. Selain itu, pertumbuhan sektor industri pengolahan yang bagus akan secara langsung mendorong perkembangan sektor perdagangan. Setiap barang yang diproduksi pasti akan dijual, dan setiap penjualan akan meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan.

Sementara, kontribusi sektor pertanian juga relatif besar meskipun tidak terlalu signifikan. Meskipun demikian, sektor ini tetap harus menjadi perhatian karena merupakan sektor yang sangat strategis. Kondisi ketahanan pangan Kabupaten Tegal sangat bergantung pada performa sektor pertanian. Selain itu, jumlah masyarakat yang bekerja pada sektor ini sangat besar dan merupakan kontributor terbesar pada jenis pekerjaan yang ditekuni masyarakat Kabupaten Tegal. Sayangnya, perkembangan sektor pertanian cenderung mengalami penurunan. Hal ini karena fokus usaha di sektor ini masih berfokus pada cara ekstraktif. Cara ini sangat bergantung pada kondisi alam, dimana ketika hasil yang didapat berkualitas bagus maka sektor pertanian akan tumbuh. Sebaliknya, jika hasil yang didapat berkualitas kurang baik, maka sektor pertanian akan cenderung turun. Di samping itu, luas lahan pertanian yang semakin berkurang (termasuk infrastruktur pendukungnya) juga ikut mendorong turunnya kontribusi sektor pertanian. Kedua hal tersebut menjadikan sektor pertanian hanya menghasilkan nilai tambah yang kecil dalam perekonomian. Kondisi ini diperburuk dengan lemahnya industri pengolahan di Kabupaten Tegal yang



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

berbasis pada produk pertanian yang dihasilkan dari daerah sendiri. Industri pengolahan makanan yang memiliki kontribusi besar yaitu industri teh, mengambil bahan baku bukan dari Kabupaten Tegal. Industri pengolahan makanan kecil juga kebanyakan berbahan dasar terigu yang merupakan bahan impor. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tegal perlu mendorong industrialisasi pertanian yang berbasis produk pertanian di Kabupaten Tegal. Jika hal ini dapat dilakukan dengan baik, maka sektor industri akan berkembang, dan sektor perdagangan juga akan ikut terdorong.

Pada sektor ketenagakerjaan, Jumlah Pencari Kerja Terdaftar di Kabupaten Tegal Pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal pada Tahun 2018 sebesar 15.464 pekerja terdiri dari 7.698 laki-laki dan 7.766 perempuan. Proporsi terbesar pencari kerja yang mendaftar pada dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja berpendidikan terakhir SMK yaitu sebesar 64,14 persen (9.919 pekerja). Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, angkatan kerja di Kabupaten Tegal tahun 2018 mencapai 688.796 orang, dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 65,26 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 8,45 persen.

Situasi perekonomian yang semakin membaik menyebabkan berkurangnya penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Hal ini ditunjukkan dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin sebesar 144,20 ribu jiwa atau sekitar 10,10 persen dari total penduduk Kabupaten Tegal. Tahun 2017 turun menjadi 141,80 ribu jiwa atau sekitar 9,90 persen, dan tahun 2018 juga mengalami penurunan menjadi 114,10 ribu jiwa atau 7,94 persen dari total penduduk Kabupaten Tegal.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM Kabupaten Tegal selama kurun waktu 4 tahun mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dari tahun 2015 s.d 2018 nilai IPM berturut-turut sebesar 65,04; 65,84; 66,44; dan 67,33.

2.2. Kebijakan Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tegal tahun 2019 disusun berdasarkan pada Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tegal tahun 2019 yang merupakan nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tegal dengan DPRD Kabupaten Tegal Nomor : $\frac{900/16/3855/2018}{170/07/2018}$ tentang Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2019 dan nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tegal dengan DPRD Kabupaten Tegal Nomor : $\frac{900/16/3856/2018}{170/18/2018}$ tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2019.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Tegal Tahun 2019 merupakan dokumen kebijakan daerah yang



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

menjadi petunjuk dan ketentuan umum, memuat kondisi ekonomi makro daerah, kebijakan pendapatan, belanja, pembiayaan dan strategi pencapaiannya yang disepakati sebagai pedoman penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2019. KUA disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2019 yang merupakan dokumen rencana kerja tahunan daerah yang disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014-2019.

2.2.1. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya. Kebijakan umum pendapatan daerah tahun 2019, adalah sebagai berikut :

a. Kebijakan Umum Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1) Meningkatkan target penerimaan Pendapatan Pajak Daerah antara lain melalui :

1. Pajak Hotel, di Kota Slawi sudah berdiri Hotel Bintang 3 dan tingkat hunian kamar hotel mulai dari Hotel Bintang 3 sampai dengan Hotel Melati terutama di lokasi OW Guci setiap akhir minggu semakin tinggi yang dipengaruhi adanya kemudahan akses jalan tol sehingga banyak wisatawan dari Jakarta yang berlibur di Kabupaten Tegal yang tentunya diperkirakan akan meningkatkan pendapatan Pajak Daerah dari Pajak Hotel;
2. Peningkatan Pajak Restoran, dengan perhitungan belanja makan minum dari APBD Kabupaten Tegal Tahun 2018 yang sekitar Rp. 15 milyar, maka bisa didapat Pajak Restoran dari penyedia jasa katering sebesar 10% atau sebesar Rp. 1,5 Milyar, termasuk perlu upaya intensifikasi pendapatan Pajak Restoran dari Restoran dan Rumah Makan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tegal;
3. Peningkatan Pajak Reklame, dengan terbangunnya beberapa ruang terbuka hijau di Kota Kecamatan dan semakin banyaknya terpasang spot spot untuk pemasangan reklame, dan terbangunnya dua Videotron di Kota Slawi serta adanya penyelenggaraan pesta demokrasi berupa Pemilihan Kepala Daerah di Tahun 2018 maka penerimaan dari Pajak Reklame diperkirakan akan meningkat;
4. Pajak Bumi dan Bangunan, masih ada pengalihan piutang pajak dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten Tegal dari Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2012 yang belum tertagih, perlu ada upaya dari instansi yang terkait agar dapat



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

- meningkatkan penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan, selain itu juga dengan naiknya NJOP Tanah di beberapa wilayah yang berpotensi di Kabupaten Tegal dan peralihan status tanah dari tanah kosong menjadi tanah dengan bangunan, tentunya akan meningkatkan pula penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan;
5. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), peningkatan penerimaan diperkirakan dari naiknya NJOP Tanah PBB dan intensitas peralihan hak atas tanah dan bangunan.
 - 2) Target penerimaan Pendapatan Pajak Daerah dari Pajak Minerba Bukan Logam dan Batuan di Tahun 2018 diperkirakan menurun disebabkan sudah selesainya pekerjaan proyek Jalan Tol Trans Jawa yang kebutuhannya selama ini disuplai dari tanah urug yang berasal dari Kabupaten Tegal.
 - 3) Pendapatan Retribusi Daerah ada yang mengalami peningkatan tetapi ada pula yang mengalami penurunan yaitu :
 1. Retribusi Pasar Los, dengan adanya ketentuan baru nilai retribusi pasar los yang dikenakan kepada pedagang pasar, maka diperkirakan ada peningkatan penerimaan pendapatan;
 2. Retribusi Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi LRA tidak lagi dikenakan retribusi, sehingga penerimaan dari retribusi pos ini tidak ada;
 3. Retribusi Tempat Rekreasi diperkirakan akan meningkat karena ada kenaikan tarif masuk obyek wisata;
 4. Retribusi Perizinan tertentu untuk Izin Gangguan Tepat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi tidak lagi dikenakan, maka tidak ada lagi penerimaan pendapatan dari pos retribusi ini.
 - 4) Mengoptimalkan penerimaan PAD melalui perolehan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Badan Usaha Milik Daerah yaitu PDAM, BPR-BKK dan Bank Jateng berupa perolehan laba maupun penyertaan modal karena adanya penambahan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah.
 - 5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dari Pendapatan BLUD diperkirakan akan meningkat dengan pertimbangan semakin tersedia dan terlengkapi sarana dan prasarana di RSUD dan Puskesmas-Puskemas.
 - 6) Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penyediaan barang publik yang mampu meningkatkan kapasitas masyarakat melalui penyempurnaan sistem pemungutan, peningkatan profesionalisme pegawai, dan lain-lain.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

- 7) Penguatan sistem manajemen dan koordinasi sinergis antar bidang SKPD yang berwenang melaksanakan pemungutan pendapatan daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan daerah.
 - 8) Mengalokasikan tambahan penerimaan daerah berupa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan mengoptimalkan manajemen kas daerah dan pengelolaan aset-aset daerah yang berpotensi memberikan sumber-sumber penerimaan bagi pendapatan asli daerah.
- b. Kebijakan Umum Dana Perimbangan
- 1) Memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat sebagaimana yang tercantum dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF), bahwa untuk penguatan kualitas desentralisasi fiskal dalam jangka menengah akan ditempuh dalam beberapa langkah utama, antara lain.
 1. Penyempurnaan payung hukum pelaksanaan desentralisasi fiskal dengan melakukan revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah melalui Rancangan Undang Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga perlu dilakukan untuk memperkuat *local taxing power*.
 2. Memperkuat Dana Insentif Daerah (DID) sebagai instrumen insentif dalam sistem transfer, yaitu diberikan sebagai *reward* atas pencapaian kinerja daerah di bidang tata kelola keuangan daerah, pencapaian pembangunan di bidang tertentu, serta inovasi dan keunggulan spesifik yang dimiliki oleh daerah dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat.
 3. Meningkatkan kualitas belanja APBD dengan mengatur penggunaan sebagian DTU (*earmarking*) untuk belanja infrastruktur yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan pelayanan publik antar daerah, meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja pegawai, menerbitkan peraturan tentang standar biaya yang berlaku bagipusat dan daerah, mendorong penyerapan belanja daerah dan mengurangi penumpukandana daerah di perbankan melalui kebijakan konversi Dana Bagi Hasil (DBH) dan/atau Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi bentuk non tunai.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

- 2) Mempedomani Arah Kebijakan Fiskal Pemerintah Pusat terkait Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yaitu:
 1. Implementasi kebijakan desentralisasi fiskal utamanya ditujukan untuk mendorong perbaikan pelayanan dasar publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 2. Kebijakan TKDD diarahkan pada sinkronisasi perencanaan/penganggaran TKDD agar sejalan dengan perencanaan/penganggaran K/L dan perbaikan mekanisme penyaluran TKDD berdasarkan pada kinerja pelaksanaan di daerah. Di samping itu, penggunaan sebagian Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan untuk belanja infrastruktur yang berorientasi pada pembangunan fasilitas layanan publik dan ekonomi, pengurangan kemiskinan, peningkatan kesempatan kerja, dan pengurangan kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah. Sedangkan Pengalokasian Dana Transfer Khusus (DTK) diarahkan untuk percepatan peningkatan pelayanan dasar publik dan pencapaian prioritas nasional, serta afirmasi kepada daerah tertinggal dan perbatasan.
 3. Kebijakan penguatan pelaksanaan desentralisasi fiskal tahun 2018 akan dilakukan melalui peningkatan alokasi TKDD sesuai kemampuan keuangan negara yang diikuti dengan perbaikan distribusi dan peningkatan kualitas belanja di daerah.
 4. Penguatan pelaksanaan desentralisasi fiskal merupakan hal penting sebagai kebijakan alokasi TKDD karena memiliki peran strategis dalam mengurangi ketimpangan fiskal vertikal (pusat-daerah) dan horizontal (antar daerah), mendorong peningkatan kemandirian fiskal daerah dalam kerangka negara kesatuan, meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mengurangi ketimpangan pelayanan publik antar daerah, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Mempedomani pokok-pokok kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD):
 1. *Pertama*, meningkatkan alokasi TKDD secara proporsional serta meningkatkan sinkronisasi perencanaan/penganggaran alokasi TKDD dengan perencanaan/penganggaran alokasi belanja K/L.
 2. *Kedua*, memperkuat implementasi kebijakan Dana Transfer Umum (DTU) dalam mendanai kewenangan desentralisasi, dengan:
 - (a) mengoptimalkan alokasi, penyaluran, dan penggunaan DBH, serta penyelesaian kurang/lebih bayar DBH;



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

- (b) pagu DAU Nasional bersifat tidak final mengikuti dinamika PDN neto, menyempurnakan formulasi perhitungan PDN neto agar lebih mencerminkan kapasitas PDN yang sebenarnya, mengalokasikan DAU dengan memperhitungkan pengalihan kewenangan antar tingkat pemerintahan, dan memberikan informasi alokasi DAU kepada daerah kepulauan, tertinggal, dan perbatasan;
 - (c) melanjutkan pengaturan penggunaan 25 persen DTU untuk belanja infrastruktur, yang berupa belanja modal dan belanja pemeliharaan non aparatur, sehingga fokus pada belanja infrastruktur yang berorientasi pada peningkatan kuantitas dan kualitas layanan publik guna meningkatkan perekonomian daerah, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesempatan kerja, dan mengurangi kesenjangan layanan publik antar daerah.
3. *Ketiga*, memperkuat implementasi DTK dalam mengurangi kesenjangan layanan public antar daerah melalui pendanaan kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah yang selaras dengan prioritas nasional, serta afirmasi kepada daerah tertinggal, kepulauan dan perbatasan antarnegara, diantaranya melalui:
- (a) meningkatkan alokasi DTK dalam rangka mempercepat penyediaan infrastruktur dasar dan pencapaian standard pelayanan minimal;
 - (b) penyempurnaan dan *refocusing* bidang/sub bidang DAK Fisik agar lebih fokus pada upaya mengatasi ketimpangan layanan publik antardaerah dan pengalokasian DAK Fisik berdasarkan proposal dari daerah;
 - (c) peningkatan kualitas DAK Non Fisik melalui penerapan *performance based* untuk seluruh jenis DAK Non Fisik, peningkatan efektivitas pemantauan atas penggunaan, dan peningkatan akurasi data dasardan *unit cost* pengalokasian DAK Non Fisik;
 - (d) peningkatan kualitas DAK Non Fisik melalui penerapan *performance based* untuk seluruh jenis DAK Non Fisik, peningkatan efektivitas pemantauan atas penggunaan, dan peningkatan akurasi data dasar dan *unit cost* pengalokasian DAK Non Fisik;
 - (e) penguatan penyaluran DTK berdasarkan kinerja penyerapan dan pencapaian *output*.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

4. *Keempat*, melakukan penguatan DID sebagai instrument insentif dalam TKDD, melalui peningkatan alokasi dan penyempurnaan kriteria DID dengan berdasarkan pada prestasi daerah, yang dihubungkan dengan penilaian atas inovasi, kreativitas, keunggulan spesifik dan output/outcome yang dihasilkan, dalam bentuk kategori tertentu antara lain di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.
 5. *Kelima*, distribusi Dana Desa dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan. *Ketujuh*, penguatan Dana Desa sebagai instrumen peningkatan dan pemerataan kesejahteraan serta pengentasan kemiskinan.
- c. Kebijakan Umum Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
- 1) Mengupayakan adanya penerimaan dana hibah dari pemerintah pusat sebagai sumber penerimaan daerah.
 - 2) Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk upaya penjaminan ketersediaan penerimaan sumber-sumber dana penyesuaian berupa alokasi dana pendidikan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Tunjangan Profesi Guru.
 - 3) Melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi sebagai upaya penjaminan ketersediaan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi dan dana bantuan keuangan dari provinsi.

2.2.2. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja. Pendanaan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap OPD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan umum belanja daerah Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan Umum Belanja Tidak Langsung

Struktur Belanja Daerah adalah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Kebijakan umum untuk Belanja Tidak Langsung adalah sebagai berikut :

- 1) Belanja Pegawai
Belanja pegawai diprioritaskan untuk pemenuhan gaji PNS dan tunjangan PNS.
- 2) Belanja Hibah
Belanja hibah diprioritaskan untuk pencairan dana cadangan Pilkada, bantuan pada lembaga pendidikan swasta, dan bantuan kepada organisasi sosial kemasyarakatan guna mendukung Misi 3 RPJMD yaitu mewujudkan kehidupan paseduluran dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
- 3) Belanja Bantuan Sosial
Belanja bantuan sosial diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Madrasah dan TPQ dalam bentuk tambahan kesejahteraan untuk pendidik.
- 4) Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes
Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes diprioritaskan untuk mendukung kelancaran tugas Pemerintahan Desa.
- 5) Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota, Pemdes dan Parpol
 1. Bantuan Keuangan Umum, diprioritaskan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pengembangan infrastruktur fisik dan sosial ekonomi, serta penanggulangan kemiskinan.
 2. Bantuan Keuangan Khusus, diprioritaskan untuk menanggulangi kemiskinan dalam bentuk Program Rehab RTLH dan mencapai kondisi 100% akses sanitasi dalam bentuk Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) dengan fokus pembangunan jamban sehat.
- 6) Belanja Tidak Terduga
Belanja Tak Terduga diprioritaskan untuk penanggulangan bencana dan hal-hal yang bersifat mendesak.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

b. Kebijakan Umum Belanja Langsung

Belanja Langsung diarahkan untuk memenuhi prioritas pembangunan yang sudah ditetapkan, yaitu: (1) Pemenuhan layanan dasar pada masyarakat yang sesuai dengan SPM, (2) Peningkatan kondisi perekonomian masyarakat, dan (3) Pembangunan infrastruktur, dengan memperhatikan afirmasi pada wilayah tertinggal dan terluar.

Belanja Langsung juga diarahkan untuk mengefisienkan belanja pegawai (karena sudah diwadahi dalam TPP), melakukan penghematan barang habis pakai pada belanja barang dan jasa, serta meningkatkan proporsi belanja modal dari total Belanja Langsung.

2.2.3. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran adalah penerimaan Sisa Lebih Perhitungan anggaran Tahun yang lalu (SiLPA), sedangkan yang kedua berasal dari penerimaan piutang daerah. Penggunaan SiLPA adalah sebagai sumber penerimaan pembiayaan dalam tahun anggaran berikutnya dalam rangka mendanai kegiatan-kegiatan yang belum selesai pada tahun anggaran berkenaan maupun penggunaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Apabila terjadi defisit anggaran riil maka diupayakan untuk menutup defisit melalui :

- a. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa pelepasan saham ataupun penjualan aset pemerintah daerah lainnya pada BUMD maupun lembaga usaha lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. penerimaan pinjaman daerah dari pihak lain baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun lembaga donor yang dimanfaatkan untuk



keperluan pendanaan kegiatan jangka pendek maupun jangka panjang sesuai dengan perturan perundangan yang berlaku.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun anggaran berikutnya. Kebijakan umum Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2019 adalah penyertaan modal pada BUMD maupun lembaga usaha lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

a. Anggaran Pendapatan

Pendapatan daerah tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp2.860.327.632.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp449.974.699.000,00 terdiri dari:
 - a) Pendapatan pajak daerah Rp114.078.000.000,00 yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan umum, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan perdesaan, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
 - b) Hasil retribusi daerah Rp31.010.744.000,00 yang terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu.
 - c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp21.704.000.000,00 berupa bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
 - d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Rp283.181.955.000,00 berupa hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga deposito, pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan BLUD, hasil dari pengelolaan dana bergulir, lain-lain PAD yang sah lainnya, hasil penjualan aset lainnya, pendapatan dari sumber mata air, pendapatan sewa BLK dan pendapatan sewa LPK Nelayan.
- 2) Pendapatan Transfer sebesar Rp2.268.506.133.000,00, yang terdiri dari :
 - a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp1.660.218.941.000,00 yang berasal dari dana bagi hasil pajak Rp68.162.897.000,00, dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam) Rp9.890.367.000,00, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp1.198.561.641.000,00 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp383.604.036.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

- b) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya Rp44.577.009.000,00 yang berasal dari dana penyesuaian.
 - c) Pendapatan Transfer pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp191.496.814.000,00 yang berupa pendapatan bagi hasil pajak.
 - d) Bantuan Keuangan Rp31.255.000,00 yang berasal dari Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi lainnya.
- 3) Lain-lain pendapatan yang sah Rp482.805.169.000,00 yang berasal dari Pendapatan Hibah.

Anggaran pendapatan berdasarkan urusan pemerintahan ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1. Anggaran Pendapatan berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2019

No	URUSAN	ANGGARAN (Rp)
	PENDAPATAN	2.860.327.632.000,00
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	256.708.635.000,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	7.418.101.000,00
3	Urusan Pilihan	22.966.144.141,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	2.573.234.751.859,00

Rincian anggaran pendapatan berdasarkan urusan dapat dilihat pada lampiran 2.1.

b. Anggaran Belanja

Anggaran belanja daerah tahun 2019 adalah sebesar Rp2.910.822.912.000,00. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka belanja daerah diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan daerah dan berdasarkan kelompok belanja. Berdasarkan klasifikasi urusan pemerintahan daerah maka belanja daerah terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar Rp1.694.358.890.919,00, urusan wajib bukan pelayanan dasar Rp141.003.500.000,00, urusan pilihan Rp147.022.146.000,00 dan urusan pemerintahan fungsi penunjang Rp928.438.375.081,00.

Penjelasan secara keseluruhan dari alokasi belanja daerah berdasarkan urusan pemerintahan daerah tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.2. Anggaran Belanja berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2019

NO	URUSAN	ANGGARAN (Rp)
	BELANJA	2.910.822.912.000,00
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1.694.358.890.919,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	141.003.500.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

NO	URUSAN	ANGGARAN (Rp)
3	Urusan Pilihan	147.022.146.000,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	928.438.375.081,00

Rincian anggaran belanja berdasarkan urusan dapat dilihat pada *lampiran 2.2*.

Berdasarkan kelompok belanja, maka belanja daerah diklasifikasikan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Berdasarkan klasifikasi tersebut, jumlah anggaran belanja tidak langsung Rp1.649.883.584.000,00 terdiri dari belanja pegawai Rp1.066.159.961.000,00, belanja hibah Rp44.102.565.000,00, belanja bantuan sosial Rp25.582.650.000,00, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa Rp10.029.933.000,00, belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Rp501.008.475.000,00, dan belanja tidak terduga Rp3.000.000.000,00.

Anggaran belanja langsung Rp1.260.939.328.000,00 terdiri dari belanja pegawai Rp122.675.895.000,00, belanja barang dan jasa Rp658.352.926.000,00 dan belanja modal Rp479.910.507.000,00.

Dalam Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) maka anggaran belanja daerah diklasifikasikan dalam (1) Belanja Operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan (2) Belanja Modal (3) Belanja tak terduga yang dialokasikan dalam rangka penanganan bencana alam dan bencana sosial yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya (4) Transfer (Transfer bagi hasil ke desa).

Berdasarkan klasifikasi tersebut belanja operasi dianggarkan sebesar Rp1.916.873.997.000,00 yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp1.188.835.856.000,00, belanja barang dan jasa sebesar Rp624.008.212,00 belanja hibah sebesar Rp78.333.079.000,00 dan belanja bantuan sosial sebesar Rp25.696.850.000,00.

Belanja modal dianggarkan sebesar Rp479.910.507.000,00 yang terdiri dari belanja peralatan dan mesin Rp57.054.923.250,00, belanja bangunan dan gedung Rp165.828.051.750,00, belanja jalan, irigasi dan jaringan Rp226.814.239.000,00, serta belanja aset tetap lainnya sebesar Rp30.213.293.000,00.

Belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp3.000.000.000,00

Untuk Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp511.038.408.000,00 yaitu Transfer Bagi Hasil ke Kab/Kota/Desa sebesar Rp10.029.933.000,00 yang terdiri dari Transfer Bagi Hasil Pajak Rp7.804.975.000,00 dan Transfer Bagi Hasil Retribusi sebesar Rp2.224.958.000,00, serta Transfer Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp501.008.475.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Untuk anggaran pembiayaan daerah tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Penerimaan pembiayaan daerah Rp59.844.280.000,00 yang merupakan Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.
- 2) Pengeluaran pembiayaan daerah Rp9.349.000.000,00 yang merupakan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut maka anggaran pembiayaan netto adalah Rp50.495.280.000,00 dan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun berkenaan Rp0,00.



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan

a. Anggaran Pendapatan

Anggaran pendapatan daerah dalam perubahan APBD tahun 2019 direncanakan sebesar Rp2.860.327.632.000,00 sedangkan realisasinya adalah Rp2.755.677.484.152,29, sehingga terdapat kekurangan sebesar Rp104.650.147.847,71 atau 3,66%, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggarkan sebesar Rp449.974.699.000,00 dengan realisasi sebesar Rp436.003.392.413,29, sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp13.971.306.586,71 atau 3,10%, terdiri dari :
 - a) Pendapatan pajak daerah dianggarkan Rp114.078.000.000,00 yang terealisasi sebesar Rp122.808.450.157,00 sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp8.730.450.157,00 atau 7,65%.
 - b) pendapatan retribusi daerah Rp31.010.744.000,00 yang terealisasi sebesar Rp25.207.739.921,00, sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp5.803.004.079,00 atau 18,71%.
 - c) pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp21.704.000.000,00 yang terealisasi sebesar Rp22.395.196.773,00 sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp691.196.773,00 atau 3,18%.
 - d) lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Rp283.181.955.000,00 yang terealisasi sebesar Rp265.592.005.562,29, sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp17.589.949.437,71 atau 6,21%.
- 2) Pendapatan transfer dianggarkan sebesar Rp Rp2.268.506.133.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.178.562.532.180,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp89.943.600.820,00 atau 3,96%, terdiri dari :
 - a) Transfer pemerintah pusat-dana perimbangan Rp1.660.218.941.000,00 yang terealisasi sebesar Rp1.586.668.848.339,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp73.550.092.661,00 atau 4,43%, yang berasal dari :
 - i. Dana bagi hasil pajak dianggarkan sebesar Rp68.162.897.000,00, terealisasi sebesar Rp13.414.727.205,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp54.748.169.795,00 atau 80,32%.
 - ii. Dana bagi hasil SDA dianggarkan sebesar Rp9.890.367.000,00, terealisasi sebesar Rp8.746.844.857,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp1.143.522.143,00 atau 11,56%



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

- iii. Dana Alokasi Umum (DAU) dianggarkan sebesar Rp1.198.561.641.000,00 terealisasi sebesar Rp1.198.561.641.000,00 atau 100%.
 - iv. Dana Alokasi Khusus dianggarkan Rp383.604.036.000,00. Terealisasi sebesar Rp365.945.635.277,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp17.658.400.723,00 atau 4,60%.
 - b) Transfer pemerintah pusat - lainnya dianggarkan sebesar Rp44.577.009.000,00 yang berupa dana penyesuaian, terealisasi sebesar Rp44.577.009.000,00 atau 100%.
 - c) Transfer pemerintah provinsi yang berasal dari pendapatan bagi hasil pajak sebesar Rp191.496.814.000,00 terealisasi sebesar Rp173.568.253.580,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp17.928.560.420,00 atau 9,36%.
 - d) Bantuan Keuangan yang berasal dari Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya sebesar Rp31.255.000.000,00 terealisasi sebesar Rp32.790.052.264,00 sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp1.535.052.264,00 atau 4,91%.
- 3) Lain-lain pendapatan yang sah, yang berasal dari pendapatan hibah Rp482.805.169.000,00, terealisasi sebesar Rp482.069.928.556,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp735.240.444,00 atau 0,15%

Realisasi pencapaian target kinerja pendapatan menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat dilihat pada *lampiran 3.1*.

b. Anggaran Belanja

Berdasarkan klasifikasi urusan pemerintahan daerah maka belanja daerah terdiri dari belanja urusan wajib pelayanan dasar dengan anggaran sebesar Rp1.694.358.890.919,00 dan realisasi Rp1.569.292.529.833,15 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp125.066.361.085,85 atau 7,38%, belanja urusan wajib bukan pelayanan dasar dengan anggaran sebesar Rp141.003.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp128.446.415.046,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp12.557.084.954,00 atau 8,91%, belanja urusan pilihan dengan anggaran sebesar Rp147.022.146.000,00 dan realisasi sebesar Rp133.068.263.615,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp13.953.882.385,00 atau 9,49%, serta belanja urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang dengan anggaran sebesar Rp928.438.375.081,00 dan realisasi sebesar Rp886.624.390.360,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp41.813.984.721,00 atau 4,50%. Rincian anggaran belanja berdasarkan



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

urusan pemerintahan pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat dilihat pada *lampiran 3.2*.

Dalam Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah maka anggaran belanja daerah pada APBD tahun 2019 sebesar Rp2.399.784.504.000,00 dengan realisasi Rp 2.210.463.202.698,15 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp189.321.301.301,85 atau 7,89% yang diklasifikasikan ke dalam belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga.

- 1) Belanja operasi dianggarkan sebesar Rp1.916.873.997.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.776.068.220.040,15 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp140.805.776.959,85 atau 7,35%, yang terdiri dari :
 - a) Belanja pegawai dianggarkan sebesar Rp1.188.835.856.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.133.760.553.898,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp55.075.302.102,00 atau 4,63%,
 - b) Belanja barang dianggarkan sebesar Rp658.238.726.000,00, dengan realisasi sebesar Rp578.593.810.142,15 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp79.644.925.857,85 atau 12,20%,
 - c) Belanja hibah dianggarkan sebesar Rp44.102.565.000,00, dengan realisasi sebesar Rp39.818.765.000,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp4.283.800.000,00 atau 9,71%,
 - d) Belanja Bantuan sosial dianggarkan sebesar Rp25.696.850.000,00 dengan realisasi sebesar Rp23.895.091.000,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp1.801.759.000,00 atau 7,01%.
- 2) Belanja modal dianggarkan sebesar Rp479.910.507.000,00 dengan realisasi sebesar Rp434.393.482.658,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp45.517.024.342,00 atau 9,48%, yang terdiri dari :
 - a) Belanja modal peralatan dan mesin dianggarkan sebesar Rp57.054.923.250,00 dengan realisasi sebesar Rp60.198.204.329,00 sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp3.143.281.079,00 atau 5,51%.
 - b) Belanja modal bangunan dan gedung dianggarkan sebesar Rp165.828.051.750,00 dengan realisasi sebesar Rp149.596.577.668,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp16.231.474.082,00 atau 9,79%.
 - c) Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dianggarkan sebesar Rp226.814.239.000,00 dengan realisasi sebesar Rp198.602.231.366,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp28.212.007.634,00 atau 12,44%



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

d) Belanja modal aset tetap lainnya dianggarkan sebesar Rp30.213.293.000,00 dengan realisasi sebesar Rp25.996.469.295,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp4.216.823.705,00 atau 13,96%.

3) Belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp3.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.500.000,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp2.998.500.000,00 atau 99,95%.

c. Anggaran Transfer

Transfer dalam APBD Kabupaten Tegal tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp511.038.408.000,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp506.968.396.156,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp4.070.011.844,00 atau 0,80%. Transfer merupakan transfer bagi hasil ke kabupaten yang terdiri dari transfer bagi hasil pajak, transfer bagi hasil retribusi dan transfer bantuan keuangan.

1) Transfer bagi hasil pajak dianggarkan sebesar Rp7.804.975.000,00 dengan realisasi sebesar Rp6.857.836.340,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp947.138.660,00 atau 12,14%.

2) Transfer bagi hasil pendapatan lainnya dianggarkan sebesar Rp2.224.958.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.385.277.400,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp839.680.600,00 atau 37,74%.

3) Transfer bantuan keuangan dianggarkan sebesar Rp501.008.475.000,00 dengan realisasi sebesar Rp498.725.282.416,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp2.283.192.584,00 atau 0,46%.

d. Anggaran Pembiayaan

Untuk realisasi anggaran pembiayaan daerah tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar Rp59.844.280.000,00 dengan realisasi sebesar Rp60.034.997.598,82 sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp190.717.598,82 atau 0,32%, yang terdiri dari :

a) Penggunaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp59.844.280.000,00 dengan realisasi sebesar Rp59.879.097.965,82 sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp34.817.965,82 atau 0,06%,

b) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp155.899.633,00



- 2) Pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp9.349.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp9.349.000.000,00 atau 100%, yang merupakan penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, yang terdiri dari :
- a) Penyertaan Modal pada Bank Jateng Cabang Slawi sebesar Rp6.349.000.000,00, dan
 - b) Penyertaan Modal pada PDAM sebesar Rp3.000.000.000,00

Berdasarkan kondisi tersebut maka anggaran pembiayaan netto yang dianggarkan sebesar Rp50.495.280.000,00 terdapat realisasi sebesar Rp50.685.997.598,82 sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp190.717.598,82 atau 0,38%.

Sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tahun 2019 sebesar Rp88.931.882.896,96 yang merupakan selisih antara realisasi surplus / defisit sebesar Rp38.245.885.298,14 dengan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp50.685.997.598,82.

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan secara umum adalah sebagai berikut :

- a. Adanya ketentuan yang mengatur persyaratan bagi penerima bansos/hibah adalah organisasi yang telah berbadan hukum dengan legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM, sehingga dana bansos/hibah tidak dapat terserap secara maksimal.
- b. Dalam persiapan pelaksanaan kegiatan fisik ditemui banyak kendala, diantaranya adanya perubahan standar analisis pekerjaan, RAB dan Gambar yang penyelesaiannya belum tepat waktu dikarenakan terbatasnya jumlah SDM yang ada di Dinas PU.
- c. Dalam pelaksanaan lelang, terdapat beberapa paket pekerjaan yang harus dilaksanakan lelang ulang, bahkan ada yang gagal lelang.
- d. Keterbatasan peralatan-peralatan berat, sementara kegiatan yang harus dilaksanakan jumlahnya cukup banyak.
- e. Adanya pekerjaan yang belum terbayarkan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, dikarenakan belum lengkapnya persyaratan administrasi dalam mengajukan pembayaran, keterlambatan pengajuan persyaratan pembayaran, serta adanya pekerjaan yang belum terselesaikan.
- f. Adanya penyetoran kembali ke kas daerah oleh bendaharawan pengeluaran yang melebihi tahun anggaran.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

- g. Penyampaian SPJ dana Bos yang tidak tepat waktu dari sekolah penerima dana BOS.
- h. Penyampaian pertanggungjawaban penggunaan dana desa yang tidak tepat waktu dari desa penerima dana desa.



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Dalam hal ini yang dimaksud entitas akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum. Dalam hal ini yang dimaksud entitas pelaporan adalah pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya (SKPD, SKPKD, BLUD).

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Daerah.

Penyusunan Laporan Keuangan Daerah menggunakan 2 (dua) basis akuntansi, yaitu Basis Kas dan Basis Akrual.

Basis kas dipergunakan untuk menyusun laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary report*) yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL). Penggunaan basis kas dikarenakan anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas. Penyusunan LRA menggunakan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah, sedangkan selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran disebut sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran, sehingga tidak menggunakan istilah laba.

Basis akrual dipergunakan untuk menyusun laporan finansial yang terdiri dari Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Laporan Arus Kas (LAK). Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Untuk mengungkapkan pos-pos yang disajikan pada laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial, maka disusun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintah, serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2016 berpedoman pada :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan beserta lampirannya,
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah,
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah,
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,
- g. Peraturan Bupati Tegal Nomor 18 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 18) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 58 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Peraturan Bupati Tegal Nomor 18 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.

- h. Peraturan Bupati Tegal Nomor 36 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 36)



BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. LRA

5.1.1. Pendapatan – LRA

Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Anggaran dan realisasi pendapatan dalam Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.1 Pendapatan Daerah TA 2019 dan TA 2018

Pendapatan Daerah	TA 2019		TA 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	449.974.699.000,00	436.003.392.413,29	372.282.676.054,62
b. Pendapatan Transfer	1.927.547.764.000,00	1.837.604.163.183,00	2.008.586.726.208,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	482.805.169.000,00	482.069.928.556,00	143.496.517.552,00
Jumlah Pendapatan Daerah	2.860.327.632.000,00	2.755.677.484.152,29	2.524.365.919.814,62

Dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun 2018 sebesar Rp2.524.365.919.814,62 maka realisasi pendapatan daerah tahun 2019 sebesar Rp2.755.677.484.152,29 mengalami kenaikan sebesar Rp231.311.564.337,67 atau 9,16%. Realisasi masing-masing Pendapatan Daerah dapat dijelaskan pada uraian dibawah ini.

a. Pendapatan Asli Daerah

Akun ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp436.003.392.413,29 dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp372.282.676.054,62 dengan rincian PAD disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.2 Pendapatan Asli Daerah TA 2019 dan TA 2018

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	TA 2019		TA 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1) Pendapatan Pajak Daerah	114.078.000.000,00	122.808.450.157,00	107.035.473.258,00
2) Pendapatan Retribusi Daerah	31.010.744.000,00	25.207.739.921,00	17.833.906.345,00
3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	21.704.000.000,00	22.395.196.773,00	12.576.924.389,00
4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	283.181.955.000,00	265.592.005.562,29	234.836.372.062,62
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	449.974.699.000,00	436.003.392.413,29	372.282.676.054,62

Dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018, maka realisasi Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 17,12%. Untuk Pendapatan Pajak Daerah mengalami kenaikan sebesar 14,74%, Retribusi Daerah mengalami kenaikan sebesar 41,35%, Pendapatan Hasil



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Pengelolaan Kekayaan Daerah mengalami kenaikan sebesar 78,07% dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah mengalami kenaikan sebesar 13,10%. Realisasi masing-masing jenis PAD TA 2019 dan 2018, tersaji sebagai berikut:

1) Pajak Daerah

Tarif pajak daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012. Pendapatan pajak daerah Kabupaten Tegal dikelola oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BP2D), realisasi TA 2019 sebesar Rp122.808.450.157,00 dan TA 2018 sebesar Rp107.035.473.258,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Table 5.3 Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah		TA 2019		TA 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
a)	Pajak Hotel	700.000.000,00	603.842.624,00	610.644.058,00
b)	Pajak Restoran	4.600.000.000,00	6.792.691.413,00	5.395.788.141,00
c)	Pajak Hiburan	300.000.000,00	522.518.511,00	398.127.550,00
d)	Pajak Reklame	2.500.000.000,00	2.537.367.643,00	2.337.877.616,00
e)	Pajak Penerangan Jalan	48.500.000.000,00	50.609.467.174,00	47.443.862.691,00
f)	Pajak Parkir	75.000.000,00	72.540.250,00	65.292.250,00
g)	Pajak Air Tanah	350.000.000,00	404.626.840,00	351.565.000,00
h)	Pajak Sarang Burung Walet	3.000.000,00	3.200.000,00	3.000.000,00
i)	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	550.000.000,00	712.254.574,00	1.154.324.950,00
j)	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	33.500.000.000,00	35.411.948.381,00	25.443.644.371,00
k)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	23.000.000.000,00	25.137.992.747,00	23.831.346.631,00
Jumlah pendapatan pajak daerah		114.078.000.000,00	122.808.450.157,00	107.035.473.258,00

Dibandingkan dengan realisasi pendapatan pajak daerah Tahun 2018, maka realisasi Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 14,74% atau Rp15.772.976.899,00.

2) Retribusi Daerah

Tarif retribusi daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012. Pendapatan retribusi daerah dikelola oleh masing-masing OPD penghasil, dengan realisasi selama TA 2019 sebesar Rp25.207.739.921,00 dan TA 2018 sebesar Rp17.833.906.345,00 Rincian pendapatan retribusi dapat dilihat pada lampiran 5.1.

Dibandingkan dengan realisasi pendapatan retribusi daerah Tahun 2018, maka realisasi Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 41,35% atau sebesar Rp7.373.833.576,00.



3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah merupakan PAD yang berasal dari kegiatan pembiayaan/investasi berupa penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan lembaga keuangan bank. Pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp22.395.196.773,00 dan TA 2018 sebesar Rp12.576.924.389,00 dengan rincian sebagai mana tabel berikut ini.

Tabel 5.4 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah :		TA 2019		TA 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
a)	Bank Jateng	15.849.000.000,00	15.809.496.323,00	7.291.565.543,00
b)	PDAM	2.000.000.000,00	5.158.063.067,00	1.859.257.641,00
c)	BPR BKK Talang	1.000.000.000,00	764.649.623,00	820.119.791,00
d)	BPR BKK Slawi	2.100.000.000,00	0,00	1.896.665.995,00
e)	Bank TGR	755.000.000,00	662.987.760,00	709.315.419,00
Jumlah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah		21.704.000.000,00	22.395.196.773,00	12.576.924.389,00

Dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Tahun 2018, maka realisasi Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 78,07% atau Rp9.818.272.384,00.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah merupakan PAD dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap/rutin, dengan realisasi selama TA 2019 sebesar Rp265.592.005.562,29 dan TA 2018 sebesar Rp234.836.372.062,62 dengan rincian pada lampiran 5.2

Dibandingkan dengan realisasi pendapatan lain-lain PAD yang Sah Tahun 2018, realisasi Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp30.755.633.499,67 atau 13,10%.

a) Rincian Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan TA 2019 sebesar Rp134.175.280,00 dan TA 2018 sebesar Rp306.856.280,00 dengan rincian pada tabel berikut ini.

Tabel 5.5 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan :		TA 2019		TA 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Hasil Penjualan Peralatan/mesin	29.000.000,00	24.300.000,00	230.989.000,00
(2)	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	-	77.725.280,00	41.247.280,00
(3)	Hasil Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	6.100.000,00
(4)	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	15.000.000,00	32.150.000,00	28.520.000,00
Jumlah		44.000.000,00	134.175.280,00	306.856.280,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

- b) Penerimaan Hasil penjualan aset lainnya tahun anggaran 2019 sebesar Rp677.033.000,00 dan Tahun 2018 adalah sebesar Rp238.520.000,00.
- c) Pendapatan Jasa Giro TA 2019 sebesar Rp4.560.452.080,00 dan 2018 sebesar Rp4.650.582.910,00.
- d) Realisasi pendapatan bunga deposito Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp13.184.908.079,00 dari total Penempatan Deposito pada Bank Jateng Cabang Slawi sebesar Rp400.000.000.000,00 dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp16.830.238.549,00.
- e) Realisasi pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp8.000.000,00 dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp10.290.000,00.
- f) Realisasi pendapatan Denda atas keterlambatan Pekerjaan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.666.728.424,00 dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp717.191.571,00.
- g) Realisasi pendapatan Denda Pajak Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.214.033.185,00 dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.005.760.695,00 dengan rincian disajikan dalam table berikut ini

Table 5.6 Pendapatan Denda Pajak

Pendapatan Denda Pajak		TA 2019		TA 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Denda Pajak Hotel		10.539.751,00	10.488.600,00
(2)	Denda Pajak Restoran		13.214.412,00	
(3)	Denda Pajak Hiburan		540.517,00	
(4)	Denda Pajak Reklame		1.488.214,00	
(5)	Denda Pajak Parkir		1.254.520,00	
(6)	Denda Pajak Air Tanah		5.196.972,00	
(7)	Denda Pajak Sarang Burung Walet		54.000,00	
(8)	Denda Pajak Minerba		25.979.244,00	347.490,00
(9)	Denda Pajak PBB		1.155.765.555,00	994.924.605,00
Jumlah		0,00	1.214.033.185,00	1.005.760.695,00

- h) Realisasi penerimaan pendapatan Denda Retribusi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp745.850.000,00 merupakan penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp873.171.400,00.
- i) Realisasi penerimaan dari pendapatan denda atas pelanggaran Perda Tahun Anggaran 2019 tidak ada dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp55.500.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

- j) Realisasi penerimaan dari Pendapatan Hasil Eksekusi atas jaminan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp116.005.600,00 dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp686.800.500,00.
- k) Rincian penerimaan dari pendapatan pengembalian Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp6.931.254.609,00 dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp4.448.535.803,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Table 5.7 Pendapatan dari Pengembalian

Pendapatan dari Pengembalian	TA 2019		TA 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1) Pengembalian Pajak Penghasilan pasal 21	3.000.000.000,00	5.813.292.030,00	3.073.711.948,00
(2) Kelebihan Pembayaran Askes		855.703,00	
(3) Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	-	369.746.041,00	218.737.087,00
(4) kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas		-	2.300.000,00
(5) Pengembalian Uang Muka	-	162.489.685,00	113.249.142,00
(6) Pengembalian Kewajiban yang Harus Dibayarkan		584.871.150,00	1.040.537.626,00
Jumlah	3.000.000.000,00	6.931.254.609,00	4.448.535.803,00

- l) Realisasi penerimaan dari pendapatan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp719.800.800,00.
- m) Realisasi Pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp235.346.709.753,29 dan Tahun Anggaran 2018 Rp203.467.756.069,62 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Table 5.8 Pendapatan BLUD

Pendapatan BLUD	TA 2019		TA 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1) Dinkes (puskesmas)	82.924.701.000,00	81.331.955.910,20	70.937.761.245,60
(2) RSUD dr Soeselo Slawi	150.000.000.000,00	135.067.843.263,00	114.804.330.710,02
(3) RSUD Suradadi	22.502.846.000,00	18.946.910.580,09	17.725.664.114,00
Jumlah	255.427.547.000,00	235.346.709.753,29	203.467.756.069,62

- n) Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Lainnya Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp87.458.692,00 dan Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp29.858.005,00.
- o) Realisasi pendapatan dari Fasilitas sosial dan Fasilitas umum TA 2019 sebesar Rp414.847.453,00 dan TA 2018 sebesar Rp237.843.300,00.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

- p) Realisasi Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp25.452.100,00 dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp11.867.700,00.
- q) Realisasi pendapatan dari Penerimaan Sumber Mata Air Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp455.375.240,00 dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp545.798.480,00 dengan rincian disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.9 Pendapatan dari Penerimaan Sumber Mata Air

Penerimaan Sumber Mata Air:		TA 2019		TA 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	PDAB	136.500.000,00	313.738.120,00	394.241.640,00
(2)	PDAM	89.250.000,00	91.099.360,00	57.287.800,00
(3)	PDAM Kota Tegal	42.000.000,00	50.537.760,00	94.269.040,00
Jumlah		267.750.000,00	455.375.240,00	545.798.480,00

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer berasal dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, meliputi Transfer Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, Transfer Pemerintah Provinsi dan Bantuan Keuangan. Realisasi pendapatan transfer dalam TA 2019 sebesar Rp1.837.604.163.183,00 dan TA 2018 sebesar Rp2.008.586.726.208,00 dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.10 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer :		TA 2019		TA 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1)	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.660.218.941.000,00	1.586.668.848.339,00	1.513.203.330.274,00
2)	Transfer Pemerintah Pusat lainnya (Dana Penyesuaian Otda)	44.577.009.000,00	44.577.009.000,00	317.703.162.997,00
3)	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	191.496.814.000,00	173.568.253.580,00	167.207.542.937,00
4)	Bantuan Keuangan	31.255.000.000,00	32.790.052.264,00	10.472.690.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer		1.927.547.764.000,00	1.837.604.163.183,00	2.008.586.726.208,00

1) Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Realisasi transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan TA 2019 sebesar Rp1.586.668.848.339,00 dan TA 2018 sebesar Rp1.513.203.330.274,00 dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Tabel 5.11 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		TA 2019		TA 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
a)	Bagi Hasil Pajak	68.162.897.000,00	13.414.727.205,00	21.232.470.187,00
b)	Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	9.890.367.000,00	8.746.844.857,00	8.188.805.102,00
c)	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.198.561.641.000,00	1.198.561.641.000,00	1.144.494.182.000,00
d)	Dana Alokasi Khusus (DAK)	383.604.036.000,00	365.945.635.277,00	339.287.872.985,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan		1.660.218.941.000,00	1.586.668.848.339,00	1.513.203.330.274,00

Dibandingkan dengan realisasi pendapatan dana perimbangan Tahun 2018, realisasi Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 4,85% atau Rp73.465.518.065,00. Rincian pendapatan dana perimbangan TA 2019 dan TA 2018 adalah sebagai berikut:

a) Bagi Hasil Pajak

Realisasi pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp13.414.727.205,00 dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp21.232.470.187,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.12. Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Bagi Hasil Pajak :		TA 2019		TA 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan	36.534.466.000,00	5.691.662.600,00	7.053.583.951,00
(2)	Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan	0,00	58.547.327,00	113.862.539,00
(3)	Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan	0,00	873.458.678,00	1.744.555.802,00
(4)	PPh ps 25 dan ps 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh ps 21	31.628.431.000,00	6.791.058.600,00	12.320.425.594,00
(5)	Bea Pemungutan Pertambangan	0,00	0,00	42.301,00
Jumlah Bagi Hasil Pajak		68.162.897.000,00	13.414.727.205,00	21.232.470.187,00

b) Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)

Realisasi pendapatan bagi hasil bukan pajak (SDA) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp8.746.844.857,00 dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp8.188.805.102,00 dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.13. Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)

Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)		TA 2019		TA 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	836.162.000,00	501.697.200,00	463.795.684,00
(2)	Pungutan Hasil Perikanan	983.593.000,00	590.155.800,00	701.234.591,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	TA 2019		TA 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(3) Pertambangan Minyak Bumi	-		36.346.929,00
(4) Pertambangan Gas Bumi	-	-	291.237.025,00
(5) Pertambangan Panas Bumi	124.008.000,00	86.805.600,00	85.408.015,00
(6) Penerimaan Cukai Hasil tembakau	7.010.068.000,00	7.016.271.111,00	6.608.140.000,00
(7) SDA Mineral dan Batu Bara	196.000,00	137.200,00	2.642.858,00
(8) Sumber Daya Migas	936.340.000,00	551.777.946,00	
Jumlah Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	9.890.367.000,00	8.746.844.857,00	8.188.805.102,00

c) Dana Alokasi Umum (DAU)

Realisasi penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.198.561.641.000,00 dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.144.494.182.000,00. Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 166/PMk.07/2019 Kabupaten Tegal pada Tahun Anggaran 2019 mendapat DAU tambahan Bantuan selisih Perubahan Iuran Jaminan Kesehatan Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp5.052.195.000,00.

d) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp365.945.635.277,00 dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp339.287.872.985,00 dengan rincian pada lampiran 5.3.

2) Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Realisasi transfer dari Pemerintah Pusat lainnya berupa Dana Penyesuaian otonomi daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp44.577.009.000,00 Berupa Dana Insentif Daerah dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp317.703.162.997,00 berupa Dana Insentif Daerah sebesar Rp35.000.000.000,00 dan Dana Desa sebesar Rp282.703.162.997,00.

3) Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi . Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp173.568.253.580,00 dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp167.207.542.937,00 dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2018 maka realisasi Tahun Anggaran 2019 mengalami kenaikan sebesar 3,80% atau Rp6.360.710.643,00. Rincian pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya pada tabel sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Tabel 5.14. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Bagi Hasil Pajak :		TA 2019		TA 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Pajak Kendaran Bermotor	26.908.693.240,00	34.639.814.050,00	29.946.041.484,00
(2)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	45.505.585.140,00	33.511.777.595,00	33.957.373.172,00
(3)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	67.015.639.887,00	52.739.643.196,00	48.270.727.814,00
(4)	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	66.895.733,00	154.669.937,00	115.275.429,00
(5)	Bagi Hasil Pajak Rokok dari Propinsi	52.000.000.000,00	52.522.348.802,00	54.918.125.038,00
Jumlah		191.496.814.000,00	173.568.253.580,00	167.207.542.937,00

4) Bantuan Keuangan

Realisasi Bantuan Keuangan TA 2019 sebesar Rp32.790.052.264,00 dan TA 2018 sebesar Rp10.472.690.00,00 dengan rincian pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.15. Bantuan Keuangan

Bantuan Keuangan		TA 2019		TA 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
a)	FEDEP	0,00	0,00	100.000.000,00
b)	TMMD	600.000.000,00	600.000.000,00	501.600.000,00
c)	Profil Daerah	0,00	0,00	50.000.000,00
d)	Pendidikan untuk semua (PUS)	0,00	0,00	50.000.000,00
e)	Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY)	0,00	0,00	40.000.000,00
f)	NANGKIS	0,00	0,00	50.000.000,00
g)	Pengembangan Sistem Informasi Desa	0,00	0,00	62.790.000,00
h)	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD)	525.000.000,00	525.000.000,00	
i)	Bantuan Sarana Prasarana	30.130.000.000,00	31.665.052.264,00	9.618.300.000,00
JUMLAH		31.255.000.000,00	32.790.052.264,00	10.472.690.000,00

c. Lain- Lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah penerimaan daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer, realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah berupa Pendapatan Hibah dan pendapatan lainnya. Realisasi lain-lain Pendapatan yang sah TA 2019 adalah sebesar Rp482.069.928.556,00 dan TA 2018 sebesar Rp143.496.517.552,00. Realisasi Lain-lain Pendapatan yang sah TA 2019 sebesar Rp482.069.928.556,00 terdiri dari realisasi Pendapatan Hibah sebesar Rp141.111.559.559,00 dan realisasi Pendapatan Lainnya sebesar Rp340.958.368.997,00.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Realisasi pendapatan Hibah TA 2019 sebesar Rp141.111.559.559,00 dan TA 2018 sebesar Rp143.496.517.552,00 dengan rincian pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.16. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah :		TA 2019		TA 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1)	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	3.000.000.000,00	-	6.178.000.000,00
2)	Hibah Dana BOS	138.846.800.000,00	141.111.559.559,00	137.318.517.552,00
Jumlah pendapatan Hibah		141.846.800.000,00	141.111.559.559,00	143.496.517.552,00

Realisasi Pendapatan lainnya Tahun Anggaran 2019 adalah Sebesar Rp340.958.368.997,00 dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp340.958.369.000,00 yaitu berupa Pendapatan Dana Desa.

5.1.2. Belanja

Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga (BTT) . Dalam TA 2019 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal terdapat sebanyak 48 OPD yang merupakan pengguna anggaran.

Anggaran dan realisasi belanja daerah TA 2019 adalah sebesar Rp2.399.784.504.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.210.463.202.698,15 serta realisasi TA 2018 sebesar Rp2.127.372.729.068,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.17. Belanja Daerah

Belanja Daerah :		TA 2019		TA 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
a.	Belanja Operasi	1.916.873.997.000,00	1.776.068.220.040,15	1.705.253.631.133,00
b.	Belanja Modal	479.910.507.000,00	434.393.482.658,00	417.983.021.935,00
c.	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	1.500.000,00	4.136.076.000,00
Jumlah		2.399.784.504.000,00	2.210.463.202.698,15	2.127.372.729.068,00

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi Kabupaten Tegal meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bunga, Belanja Hibah dan Bantuan Sosial. Anggaran pada TA 2019 adalah sebesar Rp1.916.873.997.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.776.068.220.040,15 serta realisasi TA 2018 sebesar Rp1.705.253.631.133,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Tabel 5.18. Belanja Operasi

Belanja Operasi	TA 2019		TA 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1) Belanja Pegawai	1.188.835.856.000,00	1.133.760.553.898,00	1.108.018.481.665,00
2) Belanja Barang	658.238.726.000,00	578.593.810.142,15	484.444.957.020,00
3) Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
4) Belanja Hibah	44.102.565.000,00	39.818.765.000,00	92.525.895.948,00
5) Belanja Bantuan Sosial	25.696.850.000,00	23.895.091.000,00	20.264.296.500,00
Jumlah	1.916.873.997.000,00	1.776.068.220.040,15	1.705.253.631.133,00

1) Belanja Pegawai

Anggaran Belanja Pegawai TA 2019 sebesar Rp1.188.835.856.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.133.760.553.898,00 dan realisasi TA 2018 sebesar Rp1.108.018.481.665,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.19. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai	TA 2019		TA 2018
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi Rp
a) Gaji dan Tunjangan	942.363.450.000,00	902.539.312.611,00	881.149.734.192,00
b) Tambahan Penghasilan	107.560.000.000,00	104.745.316.976,00	108.118.575.026,00
c) Operasional dan KI DPRD	9.490.000.000,00	9.420.000.000,00	6.679.500.000,00
d) Biaya Pemungutan PBB	200.000.000,00	163.123.418,00	197.364.969,00
e) Insentif Pemungutan Pajak Daerah	5.241.400.000,00	4.803.371.020,00	3.237.345.887,00
f) Insentif pemungutan Retribusi Daerah	1.305.111.000,00	701.200.779,00	580.112.180,00
g) Uang Lembur	3.589.789.000,00	2.909.738.200,00	2.608.756.600,00
h) Honorarium PNS	26.935.662.000,00	24.399.232.950,00	24.782.046.075,00
i) Honorarium Non PNS	42.606.848.000,00	40.032.040.113,00	43.472.695.394,00
j) Belanja Pegawai BLUD	28.716.576.000,00	24.650.759.753,00	18.190.661.066,00
k) Belanja Pegawai BOS	20.827.020.000,00	19.396.458.078,00	19.001.690.276,00
Jumlah	1.188.835.856.000,00	1.133.760.553.898,00	1.108.018.481.665,00

a) Belanja Gaji dan tunjangan

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan TA 2019 sebesar Rp902.539.312.611,00 dan TA 2018 sebesar Rp881.149.734.192,00 dengan rincian disajikan dalam lampiran 5.4.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

b) Belanja Tambahan Penghasilan PNS

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan PNS TA 2019 sebesar Rp104.745.316.976,00 dan TA 2018 sebesar Rp108.118.575.026,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Table 5.20. Belanja Tambahan Penghasilan PNS

Belanja Pegawai		TA 2019		TA 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	107.250.000.000,00	104.546.516.976,00	107.929.125.026,00
(2)	Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas	50.000.000,00	40.200.000,00	37.500.000,00
(3)	Tambahan penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja	260.000.000,00	158.600.000,00	151.950.000,00
Jumlah		107.560.000.000,00	104.745.316.976,00	108.118.575.026,00

c) Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH

Realisasi Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH TA 2019 sebesar Rp9.420.000.000,00 dan TA 2018 sebesar Rp6.679.500.000,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Table 5.21. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH		TA 2019		TA 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Belanja Penunjang Komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00	8.820.000.000,00	6.289.500.000,00
(2)	Belanja Tunjangan Operasional KDH/WKDH	670.000.000,00	600.000.000,00	390.000.000,00
Jumlah		9.490.000.000,00	9.420.000.000,00	6.679.500.000,00

d) Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Realisasi Belanja Biaya Pemungutan Pajak PBB TA 2019 sebesar Rp163.123.418,00 dan TA 2018 sebesar Rp197.364.969,00.

e) Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah

Realisasi Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah TA 2019 sebesar Rp4.803.371.020,00 dan TA 2018 sebesar Rp3.237.345.887,00.

f) Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

Realisasi Belanja Realisasi Insentif Pemungutan Retribusi



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Daerah TA 2019 Rp701.200.779,00 dan TA 2018 sebesar Rp580.112.180,00.

g) Belanja Uang Lembur

Realisasi Belanja Uang Lembur TA 2019 sebesar Rp2.909.738.200,00 dan TA 2018 sebesar Rp2.608.756.600,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.22. Belanja Uang Lembur

Uang lembur		TA 2019		TA 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Uang Lembur PNS	2.799.727.500,00	2.292.928.500,00	2.205.869.600,00
(2)	Uang Lembur Non PNS	790.061.500,00	616.809.700,00	402.887.000,00
Jumlah		3.589.789.000,00	2.909.738.200,00	2.608.756.600,00

h) Belanja Honorarium PNS

Realisasi Belanja Honorarium PNS TA 2019 sebesar Rp24.399.232.950,00 dan TA 2018 sebesar Rp24.782.046.075,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.23. Belanja Honorarium PNS

Honorarium PNS		TA 2019		TA 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	670.931.000,00	574.749.000,00	4.918.776.125,00
(2)	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang /Jasa	3.025.942.000,00	2.671.662.171,00	3.018.701.500,00
(3)	Honorarium PNS Lainnya	23.238.789.000,00	21.152.821.779,00	16.844.568.450,00
Jumlah		26.935.662.000,00	24.399.232.950,00	24.782.046.075,00

i) Belanja Honorarium Non PNS

Realisasi Belanja Honorarium Non PNS TA 2019 sebesar Rp40.032.040.113,00 dan TA 2018 sebesar Rp43.472.695.394,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.24. Belanja Honorarium Non PNS

Honorarium Non PNS		TA 2019		TA 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Pegawai Honorer/Tidak Tetap	16.445.353.000,00	15.503.942.128,00	18.706.002.500,00
(2)	Honorarium Non PNS Lainnya	26.161.495.000,00	24.528.097.985,00	24.766.692.894,00
Jumlah		42.606.848.000,00	40.032.040.113,00	43.472.695.394,00

j) Belanja Pegawai BLUD



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Realisasi belanja Belanja Pegawai BLUD TA 2019 sebesar Rp24.650.759.753,00 dan TA 2018 sebesar Rp18.190.661.066,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.25. Belanja Pegawai BLUD

Belanja Pegawai BLUD		TA 2019		TA 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Dinkes	12.705.102.000,00	11.559.900.820,00	10.545.843.510,00
(2)	RSUD dr Soeselo Slawi	10.318.234.000,00	7.896.808.933,00	7.644.817.556,00
(3)	RSUD Suradadi	5.693.240.000,00	5.194.050.000,00	-
Jumlah		28.716.576.000,00	24.650.759.753,00	18.190.661.066,00

k) Belanja Pegawai BOS

Realisasi belanja Pegawai BOS TA 2019 sebesar Rp19.396.458.078,00 dan TA 2018 adalah sebesar Rp19.001.690.276,00.

2) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2019 sebesar Rp578.593.810.142,15 dari jumlah Anggaran sebesar Rp658.238.726.000,00 dan realisasi TA 2018 sebesar Rp484.444.957.020,00 dengan rincian disajikan dalam lampiran 5.5.

a) Belanja Bahan Pakai Habis

Realisasi Belanja Bahan Pakai Habis TA 2019 sebesar Rp13.767.261.331,00 dan TA 2018 sebesar Rp11.986.380.548,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.26. Belanja Bahan Pakai Habis

Belanja Bahan Pakai Habis		TA 2019		TA 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Alat tulis kantor	3.947.040.520,00	3.740.345.401,00	3.512.669.669,00
(2)	Dokumen/administrasi tender	16.323.600,00	12.989.600,00	4.198.200,00
(3)	Alat listrik dan elektronik	2.387.125.600,00	2.337.910.250,00	1.379.885.269,00
(4)	Perangko, materai dan benda pos lainnya	268.515.900,00	241.482.200,00	173.244.600,00
(5)	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.360.603.050,00	1.309.685.925,00	980.695.010,00
(6)	Bahan Bakar Minyak/Gas	4.250.593.440,00	3.211.565.845,00	3.305.486.589,00
(7)	Pengisian tabung pemadam kebakaran	45.300.000,00	31.404.000,00	33.881.000,00
(8)	Pengisian tabung gas	55.168.500,00	42.294.500,00	42.079.000,00
(9)	Bahan Pakai Habis Lainnya			2.554.241.211,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

	Belanja Bahan Pakai Habis	TA 2019		TA 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(10)	Belanja Perlengkapan Komputer dan Printer	2.976.846.660,00	2.839.583.610,00	
Jumlah		15.307.517.270,00	13.767.261.331,00	11.986.380.548,00

b) Belanja Bahan/Material

Realisasi belanja Bahan/Material TA 2019 sebesar Rp21.643.404.676,00 dan TA 2018 sebesar Rp21.511.226.943,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.27. Belanja Bahan Material

	Belanja Bahan/Material	TA 2019		TA 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Bahan baku bangunan	2.705.768.400,00	2.606.126.970,00	3.478.410.750,00
(2)	Bahan/Bibit tanaman	1.394.498.000,00	1.346.162.000,00	636.227.500,00
(3)	Bibit ternak/ikan	373.524.000,00	345.381.000,00	136.360.000,00
(4)	Bahan obat-obatan	10.061.811.810,00	9.650.120.686,00	11.093.369.077,00
(5)	Bahan kimia	1.191.260.000,00	1.089.452.851,00	858.477.665,00
(6)	Belanja Persediaan Makanan Pokok	466.955.000,00	368.214.000,00	322.540.000,00
(7)	Belanja Bahan/peralatan pelatihan	1.644.615.700,00	1.556.295.750,00	1.109.591.850,00
(8)	Belanja Bahan/ Material lainnya	4.441.494.300,00	3.835.233.219,00	3.876.250.101,00
(9)	Belanja Peralatan Kantor/ Rumah Tangga	968.579.800,00	837.418.200,00	
Jumlah		23.248.507.010,00	21.634.404.676,00	21.511.226.943,00

c) Belanja Jasa Kantor

Realisasi Belanja Jasa kantor TA 2019 sebesar Rp111.234.430.145,00 dan TA 2018 sebesar Rp82.899.821.165,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.28. Belanja Jasa Kantor

	Belanja Jasa Kantor	TA 2019		TA 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Telepon	1.187.060.000,00	857.963.719,00	810.805.068,00
(2)	Air	1.191.290.000,00	831.832.584,00	777.798.929,00
(3)	Listrik	43.022.849.800,00	101.455.634.490,00	40.714.767.942,00
(4)	Surat kabar/majalah	745.582.000,00	640.545.500,00	562.401.175,00
(5)	Kawat/faksimili/internet	2.677.393.200,00	2.246.218.162,00	1.571.695.807,00
(6)	Paket/pengiriman	2.300.000,00	260.000,00	11.053.900,00
(7)	Sertifikasi	803.050.000,00	318.251.180,00	356.259.100,00
(8)	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	18.000.000,00	12.863.416,00	



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Belanja Jasa Kantor		TA 2019		TA 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(9)	Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Penerangan Jalan Umum	300.000,00	-	
(10)	Jasa Kantor Lainnya	71.492.068.076,00	4.870.861.094,00	38.095.039.244,00
Jumlah		121.139.893.076,00	111.234.430.145,00	82.899.821.165,00

d) Belanja Premi Asuransi

Realisasi Belanja Premi Asuransi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.310.543.553,00 dan TA 2018 Sebesar Rp1.219.039.089,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.29. Belanja Premi Asuransi

Belanja Premi Asuransi		TA 2019		TA 2018
		Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi Rp
(1)	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	1.529.605.000,00	1.104.534.525,00	1.024.553.897,00
(2)	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	210.000.000,00	206.009.028,00	194.485.192,00
Jumlah		1.739.605.000,00	1.310.543.553,00	1.219.039.089,00

Pada Tahun anggaran 2019 Pemerintah Kabupaten Tegal mendapat DAU Tambahan Bantuan Pembayaran selisih perubahan iuran jaminan Kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah yang langsung ditransfer pada BPJS Kesehatan sebesar Rp5.052.195.000,00

e) Belanja Jasa Perawatan Kendaraan Bermotor

Realisasi Belanja Jasa Perawatan Kendaraan Bermotor TA 2019 sebesar Rp7.259.984.380,00 dan TA 2018 sebesar Rp6.609.632.391,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.30. Belanja Jasa Perawatan Kendaraan Bermotor

Belanja Jasa Perawatan Kendaraan Bermotor		TA 2019		TA 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Jasa Service	1.810.626.900,00	1.662.003.367,00	1.204.091.355,00
(2)	Penggantian Suku Cadang	1.695.154.000,00	1.582.637.178,00	1.417.174.273,00
(3)	Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	4.452.772.250,00	3.583.619.406,00	3.529.073.310,00
(4)	Jasa KIR	23.660.000,00	6.110.000,00	10.503.075,00
(5)	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	342.083.000,00	246.939.579,00	232.085.828,00
(6)	Surat Tanda Nomor Kendaraan	233.221.900,00	178.674.850,00	216.704.550,00
Jumlah		8.557.518.050,00	7.259.984.380,00	6.609.632.391,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

f) Belanja Cetak dan Penggandaan

Realisasi belanja cetak dan penggandaan TA 2019 sebesar Rp10.358.957.411,00 dan TA 2018 sebesar Rp9.297.612.783,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.31. Belanja Cetak dan Penggandaan

Belanja Cetak dan Penggandaan		TA 2019		TA 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Belanja Cetak	7.918.836.750,00	7.324.229.868,00	6.580.046.768,00
(2)	Belanja Penggandaan	3.514.743.626,00	3.034.727.543,00	2.717.566.015,00
Jumlah		11.433.580.376,00	10.358.957.411,00	9.297.612.783,00

g) Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

Realisasi belanja sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.454.041.370,00 dan tahun anggaran 2018 sebesar Rp1.949.951.881,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.32. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah		TA 2019		TA 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Sewa rumah jabatan/rumah dinas	4.000.000,00	3.000.000,00	15.000.000,00
(2)	Sewa gedung/kantor/tempat	1.098.343.700,00	939.016.370,00	1.620.224.681,00
(3)	Sewa ruang rapat/pertemuan	582.730.000,00	471.485.000,00	314.727.200,00
(4)	Sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas	41.220.000,00	40.540.000,00	
Jumlah		1.726.293.700,00	1.454.041.370,00	1.949.951.881,00

h) Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Realisasi belanja sewa sarana mobilitas Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.547.432.500,00 dan tahun anggaran 2018 sebesar Rp1.319.035.550,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.33. Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Belanja Sewa Sarana Mobilitas		TA 2019		TA 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.695.938.500,00	1.544.432.500,00	1.314.885.550,00
(2)	Belanja sewa Sarana Mobilitas air	3.300.000,00	3.000.000,00	4.150.000,00
Jumlah		1.699.238.500,00	1.547.432.500,00	1.319.035.550,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

i) Belanja Sewa Alat Berat

Anggaran Belanja Sewa Alat Berat TA 2019 adalah sebesar Rp1.000.000,00 dengan Realisasi tidak ada.

j) Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Realisasi belanja sewa peralatan dan perlengkapan kantor TA 2019 sebesar Rp3.201.876.800,00 dan TA 2018 sebesar Rp2.236.841.000,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.34. Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		TA 2019		TA 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Belanja Sewa Meja Kursi	916.156.000,00	847.236.300,00	755.635.000,00
(2)	Belanja Sewa Komputer dan Printer	41.000.000,00	9.000.000,00	
(3)	Belanja Sewa Generator	269.752.000,00	249.197.000,00	9.650.000,00
(4)	Belanja Sewa Tenda	1.883.599.000,00	1.785.194.200,00	335.270.000,00
(5)	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	112.616.000,00	107.311.000,00	56.625.000,00
(6)	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	265.097.300,00	203.938.300,00	1.079.661.000,00
Jumlah		3.488.220.300,00	3.201.876.800,00	2.236.841.000,00

k) Belanja Makanan dan Minuman

Realisasi belanja makanan dan minuman TA 2019 sebesar Rp24.843.567.951,00 dan TA 2018 sebesar Rp22.422.912.890,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.35. Belanja Makanan dan Minuman

Belanja Makanan dan Minuman		TA 2019		TA 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Makanan dan minuman harian pegawai	3.088.750.500,00	2.925.473.072,00	2.362.890.115,00
(2)	Makanan dan minuman rapat	14.388.948.300,00	12.665.521.944,00	11.275.186.600,00
(3)	Makanan dan minuman tamu	2.136.831.000,00	1.933.554.775,00	1.028.044.150,00
(4)	Makanan dan Minuman Pelatihan	5.705.989.400,00	5.317.435.300,00	3.862.453.450,00
(5)	Makanan dan Minuman Lainnya	2.318.781.250,00	2.001.582.860,00	3.894.338.575,00
Jumlah		27.639.300.450,00	24.843.567.951,00	22.422.912.890,00

l) Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

Realisasi belanja pakaian dinas dan atributnya TA 2019 sebesar Rp569.066.500,00 dan TA 2018 sebesar Rp2.969.170.900,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Tabel 5.36. Pakaian Dinas dan Atributnya

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya		TA 2019		TA 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Pakaian Dinas KDH dan Wakil KDH	96.200.000,00	93.990.600,00	116.712.000,00
(2)	Pakaian Sipil Harian (PSH)	40.912.000,00	40.662.000,00	58.135.000,00
(3)	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	171.000.000,00	161.925.000,00	136.170.000,00
(4)	Pakaian Dinas Harian (PDH)	107.608.600,00	105.453.700,00	2.364.270.500,00
(5)	Pakaian Dinas Upacara (PDU)	161.077.200,00	154.535.200,00	142.708.400,00
(6)	Belanja Pakain Sipil Resmi (PSR)	12.500.000,00	12.500.000,00	95.044.000,00
(7)	Belanja Pakain Dinas/Seragam Lainnya			56.131.000,00
Jumlah		589.297.800,00	569.066.500,00	2.969.170.900,00

m) Belanja Pakaian Kerja

Realisasi Belanja Pakaian Kerja TA 2019 sebesar Rp1.040.336.100,00 dari jumlah anggaran Rp1.077.022.400,00 dan realisasi pada TA 2018 sebesar Rp752.875.350,00.

n) Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu

Realisasi belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu TA 2019 sebesar Rp1.620.012.150,00 dan TA 2018 sebesar Rp1.261.747.299,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.37. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu		TA 2019		TA 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Pakaian adat daerah	102.463.350,00	99.413.300,00	134.250.000,00
(2)	Pakaian batik tradisional	576.355.900,00	524.791.800,00	139.594.999,00
(3)	Pakaian Olah raga	1.033.528.000,00	995.807.050,00	714.832.900,00
(4)	Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu			273.069.400,00
Jumlah		1.712.347.250,00	1.620.012.150,00	1.261.747.299,00

o) Belanja Perjalanan Dinas

Realisasi Belanja perjalanan dinas TA 2019 sebesar Rp33.170.455.634,00 dan TA 2018 sebesar Rp28.947.885.047,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.38. Belanja Perjalan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas		TA 2019		TA 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Perjalanan dinas dalam daerah	7.724.924.800,00	5.828.596.301,00	4.485.035.687,00
(2)	Perjalanan dinas luar daerah	34.207.673.418,00	27.292.128.333,00	24.462.849.360,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Belanja Perjalanan Dinas	TA 2019		TA 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(3) Perjalanan dinas luar negeri	50.000.000,00	49.731.000,00	0,00
Jumlah	41.982.598.218,00	33.170.455.634,00	28.947.885.047,00

p) Belanja Pemeliharaan

Realisasi belanja pemeliharaan TA 2019 sebesar Rp22.299.108.333,00 dan TA 2018 sebesar Rp27.563.435.028,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.39. Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan	TA 2019		TA 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1) Pemeliharaan Peralatan dan mesin	3.617.404.850,00	3.293.295.503,00	2.705.862.509,00
(2) Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.992.894.550,00	4.698.953.128,00	4.292.799.576,00
(3) Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	13.700.000.000,00	13.156.037.709,00	20.399.962.443,00
(4) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.187.717.500,00	1.150.821.993,00	164.810.500,00
Jumlah	23.498.016.900,00	22.299.108.333,00	27.563.435.028,00

q) Belanja Jasa Konsultasi

Realisasi belanja jasa konsultan TA 2019 sebesar Rp5.200.071.130,00 dan TA 2018 sebesar Rp6.116.322.675,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.40. Belanja Jasa Konsultasi

Belanja Jasa Konsultasi	TA 2019		TA 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1) Jasa Konsultasi Penelitian	952.456.000,00	898.035.500,00	364.921.000,00
(2) Jasa Konsultasi Perencanaan	4.393.212.900,00	3.541.384.950,00	2.897.673.625,00
(3) Jasa Konsultasi Pengawasan	86.395.500,00	56.210.900,00	188.015.000,00
(4) Jasa Konsultasi Lainnya	737.691.500,00	704.439.780,00	2.665.713.050,00
Jumlah	6.169.755.900,00	5.200.071.130,00	6.116.322.675,00

r) Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis

Realisasi belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis TA 2019 sebesar Rp6.353.337.495,00 dan TA 2018 sebesar Rp4.600.738.699,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.41. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	TA 2019		TA 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1) Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	4.771.592.000,00	4.623.525.095,00	2.955.502.199,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis		TA 2019		TA 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(2)	Belanja sosialisasi	33.267.000,00	22.551.600,00	34.507.000,00
(3)	Bintek	1.950.523.600,00	1.686.790.800,00	1.583.859.500,00
(4)	Biaya Ujian	21.000.000,00	20.470.000,00	26.870.000,00
Jumlah		6.776.382.600,00	6.353.337.495,00	4.600.738.699,00

s) Belanja Uang untuk diberikan kepada Pihak ketiga/masyarakat

Realisasi belanja yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.888.050.000,00 dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp2.239.760.000,00 dengan rician disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.42. Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

Belanja Uang untuk diberikan kepada Pihak ketiga/masyarakat		TA 2019		TA 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak ketiga	88.450.200,00	86.650.000,00	91.100.000,00
(2)	Belanja uang untuk Diberikan kepada Masyarakat	1.855.485.000,00	1.801.400.000,00	2.148.660.000,00
Jumlah		1.943.935.200,00	1.888.050.000,00	2.239.760.000,00

t) Belanja Barang Jasa BLUD

Realisasi Belanja BLUD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp186.994.407.780,15 dan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp159.387.603.522,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.43. Belanja Barang dan Jasa BLUD

Belanja Barang dan Jasa BLUD		TA 2019		TA 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Dinkes	68.476.793.000,00	64.819.044.696,00	56.658.822.177,00
(2)	RSUD dr Soeselo Slawi	148.405.886.000,00	107.549.310.320,00	102.728.781.345,00
(3)	RSUD Suradadi	16.042.106.000,00	14.626.052.764,15	-
Jumlah		232.924.785.000,00	186.994.407.780,15	159.387.603.522,00

u) Belanja Barang dan Jasa Dana BOP PAUD

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dana BOP PAUD Tahun Anggaran 2019 tidak ada dan realisasi Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp148.800.000,00.

v) Belanja Barang Jasa BOS

Realisasi Belanja Barang Jasa BOS Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp86.615.899.978,00 dari jumlah Anggaran sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Rp85.395.522.000,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp84.100.464.260,00. Realisasi Belanja Barang Jasa BOS TA 2019 sebesar Rp 86.615.899.978,00 terdiri dari Belanja Barang Jasa BOS untuk SD sebesar Rp63.164.925.891,00 dari jumlah anggaran Rp62.375.779.000,00 sehingga terdapat belanja Barang Jasa yang melebihi realisasi sebesar Rp789.146.891,00 dan Realisasi Belanja Barang Jasa BOS untuk SMP sebesar Rp23.450.974.087,00 dari jumlah anggaran sebesar Rp23.019.743.000,00 sehingga terdapat belanja Barang Jasa yang melebihi anggaran sebesar Rp431.231.087,00.

w) Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli

Realisasi belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp5.244.973.500,00 dari jumlah Anggaran sebesar Rp5.867.875.000,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp4.903.700.000,00.

x) Belanja Barang untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak ketiga

Realisasi belanja Barang untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak ketiga Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp30.985.591.425,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.44. Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

NO	SKPD	Belanja Hibah Barjas yang akan diserahkan ke masyarakat (Rp)	Belanja Hibah Barjas yang akan diserahkan ke pihak ketiga (Rp)	Total (Rp)
(1)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	879.657.314,00		879.657.314,00
(2)	Dinas Kesehatan	20.000.000,00		20.000.000,00
(3)	Dinas Perkimtaru	8.095.304.350,00		8.095.304.350,00
(4)	Kantor Kesbangpollinmas		419.897.500,00	419.897.500,00
(5)	Dinas Sosial	35.950.000,00		35.950.000,00
(6)	Dinas P2AP3KB	398.380.200,00		398.380.200,00
(7)	Sekretariat Daerah		199.820.000,00	199.820.000,00
(8)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	20.198.929.861,00		20.198.929.861,00
(9)	Dinas Parpora	180.787.200,00		180.787.200,00
(10)	Kecamatan Slawi	556.865.000,00		556.865.000,00
	Jumlah	30.365.873.925,00	619.717.500,00	30.985.591.425,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

3) Belanja Hibah

Realisasi belanja hibah TA 2019 sebesar Rp39.818.765.000,00 dan TA 2018 sebesar Rp92.525.895.948,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.45. Belanja Hibah

Belanja Hibah	TA 2019		TA 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
a) Hibah Kepada Pemerintah	2.188.565.000,00	2.188.565.000,00	10.557.557.342,00
b) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	41.914.000.000,00	37.630.200.000,00	52.100.809.800,00
c) Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak ketiga			29.867.528.806,00
Jumlah	44.102.565.000,00	39.818.765.000,00	92.525.895.948,00

a) Hibah Kepada Pemerintah

Realisasi belanja Hibah Kepada Pemerintah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.188.565.000,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.46. Hibah Kepada Pemerintah

No	Uraian	Jumlah (Rp)
(1)	Hibah Kepada Polres	1.442.540.000,00
(2)	Hibah Kepada Kodim	302.025.000,00
(3)	Hibah Kepada LPPL (Lembaga Penyiaran Publik Lokal)	300.000.000,00
(4)	Hibah Kepada UNSOED, UNNES, IPB	144.000.000,00
	Jumlah	2.188.565.000,00

b) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan

Realisasi hibah kepada organisasi kemasyarakatan tahun anggaran 2019 sebesar Rp37.630.200.000,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.47. Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan

No	Uraian	Jumlah (Rp)
(1)	Hibah BOP Kesetaraan Paket A,B,C (DAK Non Fisik)	4.339.950.000,00
(2)	Hibah BOP PAUD (DAK Non Fisik)	21.271.500.000,00
(3)	Hibah kepada Pramuka	300.000.000,00
(4)	Hibah kepada KONI	1.500.000.000,00
(5)	Hibah Kepada Politeknik Purbaya	100.000.000,00
(6)	Hibah kepada PKK	500.000.000,00
(7)	Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi kemasyarakatan Kab Tegal Lainnya	6.475.000.000,00
(8)	Hibah Bantuan Penuntasan Anak Putus Sekolah	1.993.750.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Uraian	Jumlah (Rp)
(9)	Hibah Peningkatan Pendidikan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	180.000.000,00
(10)	Hibah Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH)	220.000.000,00
(11)	Hibah Fasilitasi Teknis Taman Bacaan Masyarakat (TBM)	75.000.000,00
(12)	Hibah Pengembangan Manajemen Desa Vokasi	150.000.000,00
(13)	Hibah Kepada Satuan Koordinasi Cabang Barisan Ansor Serbaguna Kab. Tegal	200.000.000,00
(14)	Hibah Kepada Masjid/mushola	125.000.000,00
(15)	Hibah Kepada Ikatan Pecaksilat Indonesia Setia Hati Cab. Tegal	200.000.000,00
Jumlah		37.630.200.000,00

4) Belanja Bantuan Sosial

Realisasi belanja bantuan sosial TA 2019 sebesar Rp23.895.091.000,00 dan TA 2018 sebesar Rp20.264.296.500,00 dengan rincian rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.48. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial		TA 2019		TA 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
a)	Bantuan Sosial Organisasi Sosial kemasyarakatan	3.406.250.000,00	2.882.500.000,00	150.000.000,00
b)	Bantuan Sosial kepada Masyarakat	22.176.400.000,00	20.899.400.000,00	19.914.800.000,00
c)	Bantuan Sosial Barang/Jasa yang diserahkan kepihak ketiga	114.200.000,00	113.191.000,00	199.496.500,00
Jumlah		25.696.850.000,00	23.895.091.000,00	20.264.296.500,00

a) Bantuan Sosial Organisasi Sosial kemasyarakatan

Realisasi belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan tahun anggaran 2019 sebesar Rp2.882.500.000,00 yang terdiri dari Bantuan Sosial Kepada Anak Yatim Piatu sebesar Rp150.000.000,00 dan Bantuan sosial Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) (DAK Fisik Perumahan dan Pemukiman) sebesar Rp2.712.500.000,00.

b) Bantuan Sosial Kepada Masyarakat

Realisasi Bantuan Sosial kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp20.899.400.000,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.49. Bantuan Sosial Kepada Masyarakat

No	Uraian	Jumlah (Rp)
(1)	Bansos kepada Badko TPQ	6.504.000.000,00
(2)	Bansos Kepada Forum Komunikasi Madrasah Diniyah	5.505.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Uraian	Jumlah (Rp)
(3)	Bansos Kepada Forum Komunikasi Hafidz Hafidzoh	400.000.000,00
(4)	Bantuan Sosial Kepada FKKM, FKIR, FKPAID Kab. Tegal .	1.030.000.000,00
(5)	Bansos Kepada HIMPAUDI	1.933.200.000,00
(6)	Bansos Kepada Forum Pendidik dan Tenaga Kependidikan	429.000.000,00
(7)	Bansos Kepada Ikatan Guru TK Indonesia (IGTKI)	1.213.200.000,00
(8)	Bansos Kepada Ikatan Guru RA (IGRA)	676.200.000,00
(9)	Bansos Kepada Persatuan Guru RI (PGRI) Kab Tegal	587.400.000,00
(10)	Bansos Kepada Persatuan Guru Seluruh Indonesia(PGSI)	2.068.800.000,00
(11)	Bantuan Sosial Kepada Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU)	552.600.000,00
Jumlah		20.899.400.000,00

c) Bantuan Sosial Barang/Jasa yang diserahkan kepada Pihak Ketiga

Realisasi Bantuan Sosial Barang/Jasa yang diserahkan kepada Pihak Ketiga tahun anggaran 2019 sebesar Rp113.191.000,00 yang berada pada Dinas Sosial.

b. Belanja Modal

Belanja Modal Kabupaten Tegal meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya dan Belanja Aset Lainnya. Realisasi Belanja Modal TA 2019 sebesar Rp434.393.482.658,00 dan TA 2018 sebesar Rp417.983.021.935,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut

Tabel 5.50. Belanja Modal

Belanja Modal :	TA 2019		TA 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1) Belanja Tanah	0,00	0,00	3.148.086.385,00
2) Belanja Peralatan Mesin	57.054.923.250,00	60.198.204.329,00	96.724.967.692,00
3) Belanja Gedung dan Bangunan	165.828.051.750,00	149.596.577.668,00	109.978.782.599,00
4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	226.814.239.000,00	198.602.231.366,00	206.618.577.009,00
5) Belanja Aset Tetap Lainnya	30.213.293.000,00	25.996.469.295,00	1.512.608.250,00
Jumlah Belanja Modal	479.910.507.000,00	434.393.482.658,00	417.983.021.935,00

1) Belanja Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2019 tidak ada dan TA 2018 sebesar Rp3.148.086.000,00 dengan Rincian Pengadaan Tanah Perkampungan sebesar Rp1.004.071.125,00, realisasi pengadaan Tanah untuk Bangunan Gedung adalah sebesar Rp2.133.528.340,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

dan realisasi Realisasi Belanja Modal pengadaan Tanah untuk Bangunan bukan Gedung adalah sebesar Rp10.486.920,00. Pengadaan Tanah untuk Bangunan bukan Gedung

2) **Belanja Peralatan dan Mesin**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2019 sebesar Rp60.198.204.329,00 dan TA 2018 sebesar Rp96.724.967.692,00 dengan rincian disajikan dalam *lampiran 5.6*.

- a) Realisasi Belanja Modal Alat-alat besar Darat TA 2019 tidak ada dan TA 2018 adalah sebesar Rp1.697.086.450,00 berupa Pengadaan Excavator.
- b) Realisasi belanja modal Alat Bantu TA 2019 sebesar Rp225.146.450,00 dan Realisasi TA 2018 sebesar Rp418.730.000,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.51. Belanja Modal Alat-alat Bantu

BM - Alat Bantu		TA 2019		TA 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Electric Generating set	220.068.000,00	216.626.450,00	414.880.000,00
(3)	Pompa	31.000.000,00	8.520.000,00	990.000,00
(4)	Unit Pemeliharaan Lapangan	-	-	2.860.000,00
Jumlah		251.068.000,00	225.146.450,00	418.730.000,00

- c) Rincian belanja Alat Angkutan Darat Bermotor TA 2019 sebesar Rp12.905.444.117,00 dan realisasi TA 2018 sebesar Rp6.460.698.314,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.52. Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor

BM - Alat Angkutan Darat Bermotor		TA 2019		TA 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	5.004.230.000,00	4.782.507.991,00	1.842.043.000,00
(2)	Kendaraan Bermotor Penumpang	1.948.900.000,00	1.726.828.620,00	788.663.526,00
(3)	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	4.965.597.000,00	3.940.210.700,00	0,00
(4)	Kendaraan Bermotor Khusus	2.401.600.000,00	1.959.387.906,00	2.957.128.788,00
(5)	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	530.970.000,00	496.508.900,00	818.220.000,00
(6)	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	0,00	0,00	54.643.000,00
Jumlah		14.851.297.000,00	12.905.444.117,00	6.460.698.314,00

- d) Realisasi belanja modal pengadaan Alat angkutan darat Tak Bermotor TA 2019 tidak ada dan TA 2018 sebesar Rp3.800.000,00 berupa Kendaraan bermotor Angkutan Barang.
- e) Realisasi belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin TA 2019 adalah sebesar Rp76.874.250,00 dengan rincian Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam yang Bepindah sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Rp65.624.250,00 dan Pengadaan Perkakas Bengkel Kayu sebesar Rp11.250.000,00.

- f) Realisasi belanja modal Pengadaan Alat bengkel Tak Bermesin TA 2019 tidak ada dan TA 2018 sebesar Rp9.590.000,00 berupa Perkakas Standar (*Standar Tool*).
- g) Realisasi belanja modal Pengadaan Alat Ukur TA 2019 tidak ada dan TA 2018 sebesar Rp783.447.400,00 berupa Alat Ukur Lainnya
- h) Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan TA 2019 tidak ada dan realisasi TA 2018 sebesar Rp106.267.000,00 berupa Alat penyimpan sebesar Rp13.310.000,00 dan Alat Laboratorium sebesar Rp92.957.000,00.
- i) Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor TA 2019 sebesar Rp3.309.278.340,00 dan realisasi TA 2018 sebesar Rp2.649.466.050,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.53. Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor

BM - Alat Kantor		TA 2019		TA 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Mesin Ketik	0,00	0,00	11.380.000,00
(2)	Alat Reproduksi (pengganda)	0,00	0,00	56.440.000,00
(3)	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	653.164.000,00	581.091.000,00	465.199.600,00
(4)	Alat Kantor Lainnya	2.946.939.700,00	2.728.187.340,00	2.116.446.450,00
Jumlah		3.600.103.700,00	3.309.278.340,00	2.649.466.050,00

- j) Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga TA 2019 sebesar Rp7.060.750.232,00 dan realisasi TA 2018 sebesar Rp22.944.134.329,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.54. Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga

BM - Alat Rumah Tangga		TA 2019		TA 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Meubelair	5.244.647.000,00	4.795.616.047,00	2.753.125.025,00
(2)	Alat Pembersih	24.173.000,00	20.075.000,00	508.470.000,00
(3)	Alat Pendingin	740.809.950,00	642.403.050,00	790.027.700,00
(4)	Alat Dapur	37.920.000,00	32.633.000,00	316.518.400,00
(5)	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.882.177.300,00	1.543.754.390,00	18.520.627.204,00
(6)	Alat Pemadam Kebakaran	26.930.000,00	26.268.745,00	55.366.000,00
Jumlah		7.956.657.250,00	7.060.750.232,00	22.944.134.329,00

- k) Realisasi Belanja Modal Pengadaan Komputer TA 2019 sebesar Rp15.895.028.856,00 dan realisasi TA 2018 sebesar Rp5.377.626.879,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Tabel 5.55. Belanja Modal Pengadaan Komputer

BM – Komputer	TA 2019		TA 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1) komputer Unit Jaringan	2.042.405.580,00	1.959.279.050,00	1.235.458.449,00
(2) Personal Komputer	2.842.744.750,00	2.468.017.150,00	2.627.324.639,00
(3) Peralatan Mini Komputer	62.422.350,00	55.115.500,00	104.463.275,00
(4) Peralatan Personal Komputer	9.244.174.620,00	11.250.438.156,00	1.067.003.276,00
(5) Peralatan Jaringan	169.443.600,00	162.179.000,00	343.377.240,00
Jumlah	14.361.190.900,00	15.895.028.856,00	5.377.626.879,00

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Komputer berupa Pengadaan Peralatan Personal Komputer sebesar Rp11.250.438.156,00 terdapat realisasi yang berasal dari Belanja Modal BOS. Realisasi Belanja Modal Tersebut adalah sebesar Rp9.024.249.256,00. Realisasi Belanja Modal BOS untuk SD sebesar Rp6.529.509.326,00 dari jumlah anggaran sebesar Rp5.109.640.000,00 sehingga terdapat belanja modal yang melebihi anggaran sebesar Rp1.419.869.326,00. Realisasi Belanja Modal BOS untuk SMP sebesar Rp2.494.739.930,00 dari jumlah anggaran sebesar Rp1.832.700.000,00 sehingga terdapat belanja modal yang melebihi anggaran sebesar Rp662.039.000,00.

- l) Realisasi Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat TA 2019 sebesar Rp696.564.300,00 dan realisasi TA 2018 sebesar Rp924.731.500,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5. 56. Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

BM - Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	TA 2019		TA 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1) Meja Kerja Pejabat	158.587.000,00	154.971.800,00	457.836.000,00
(2) Meja Rapat Pejabat	0,00	0,00	43.530.000,00
(3) Kursi Kerja Pejabat	139.689.000,00	131.612.500,00	124.466.500,00
(4) kursi Rapat Pejabat	210.487.000,00	181.638.000,00	24.852.000,00
(5) Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	21.830.000,00	21.410.000,00	29.760.000,00
(6) Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	149.631.000,00	145.430.000,00	97.969.000,00
(7) Lemari dan Arsip Pejabat	64.944.000,00	61.502.000,00	146.318.000,00
Jumlah	745.168.000,00	696.564.300,00	924.731.500,00

- m) Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat Studio TA 2019 sebesar Rp612.145.175,00 dan realisasi TA 2018 sebesar Rp702.646.500,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Tabel 5.57. Belanja Modal Pengadaan Alat Studio

BM - Alat Studio		TA 2019		TA 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Peralatan Studio Visual	521.907.500,00	496.414.175,00	518.442.500,00
(2)	Peralatan Studi Video dan Film	77.000.000,00	77.000.000,00	184.204.000,00
(3)	Peralatan Studi Video dan Film A	30.000.000,00	29.986.000,00	0,00
(4)	Peralatan Cetak	9.001.750,00	8.745.000,00	
Jumlah		637.909.250,00	612.145.175,00	702.646.500,00

n) Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi TA 2019 sebesar Rp804.959.300,00 dan realisasi TA 2018 sebesar Rp516.580.000,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.58. Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi

BM - Alat Komunikasi		TA 2019		TA 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Telephone	718.824.150,00	714.845.000,00	500.740.000,00
(2)	Alat Komunikasi Sosial	50.000.000,00	49.414.300,00	15.840.000,00
(3)	Alat-alat Sandi	42.000.000,00	40.700.000,00	0,00
Jumlah		810.824.150,00	804.959.300,00	516.580.000,00

o) Realisasi Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar TA 2019 tidak ada dan TA 2018 sebesar Rp33.247.500,00 berupa pengadaan Peralatan Antena SHF/Parabola.

p) Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran TA 2019 sebesar Rp897.527.940,00 dan realisasi TA 2018 sebesar Rp3.085.170.163,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.59. Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran

BM - Alat Kedokteran		TA 2019		TA 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Alat Kedokteran Umum	832.886.000,00	722.799.940,00	3.020.718.040,00
(2)	Alat Kedokteran Gigi	18.230.000,00	10.410.000,00	41.634.750,00
(3)	Alat Farmasi	-	-	1.800.000,00
(4)	Alat-alat Kedokteran Jantung	-	-	21.017.373,00
(5)	Alat Kesehatan kebidanan dan Penyakit Kandungan	121.910.000,00	53.400.000,00	-
(6)	Alat Kedokteran Hewan	115.000.000,00	110.918.000,00	
Jumlah		1.088.026.000,00	897.527.940,00	3.085.170.163,00

q) Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan TA 2019 sebesar Rp16.486.413.885,00 dan realisasi TA 2018 sebesar Rp13.503.131.990,00 dengan rincian disajikan dalam tabel



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

berikut.

Tabel 5.60. Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan

BM - Alat kesehatan		TA 2019		TA 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Alat Kesehatan Perawatan	11.269.902.000,00	16.486.413.885,00	5.070.275.198,00
(2)	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	-	-	8.432.856.792,00
Jumlah		11.269.902.000,00	16.486.413.885,00	13.503.131.990,00

Realisasi Belanja Modal Alat Kesehatan Perawatan terdapat pelampaun anggaran sebesar Rp5.216.511.885,00 karena terjadinya pergeseran anggaran setelah perubahan APBD sesuai Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 41 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Tegal TA 2019 yang disebabkan karena Penambahan Dana Bantuan Provinsi sesuai surat Gubernur Jawa tengah No 900/0021686 tanggal 1 Oktober 2019 tentang penyampaian alokasi belanja bantuan keuangan Perubahan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.

- r) Realisasi Belanja Modal Pengadaan Unit-unit Laboratorium TA 2019 sebesar Rp742.509.180,00 dan realisasi TA 2018 sebesar Rp1.056.252.195,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.61 Belanja Modal Pengadaan Unit-unit Laboratorium

BM - Unit-unit Laboratorium		TA 2019		TA 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	340.000.000,00	319.439.120,00	173.401.195,00
(2)	Alat Laboratorium Umum	444.730.000,00	414.574.060,00	403.820.500,00
(3)	Alat Laboratorium Makanan	-	-	321.200.500,00
(4)	Alat Laboratorium Kedokteran	8.700.000,00	7.986.000,00	-
(5)	Alat Laboratorium kimia	-	-	157.830.000,00
(6)	Alat Laboratorium Hematologi	1.750.000,00	510.000,00	-
Jumlah		795.180.000,00	742.509.180,00	1.056.252.195,00

- s) Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah TA 2019 sebesar Rp96.740.000,00 dan realisasi TA 2018 sebesar Rp35.601.808.177,00 berupa Pengadaan bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain. Reliasasi belanja modal alat peraga/paraktik sekolah berupa pengadaan bidang pendidikan/ketrampilan lain-lain sebesar Rp35.601.808.177,00 terdapat realisasi dari yang berasal dari Belanja Modal BOS. Realisasi belanja BOS tersebut adalah sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Rp35.161.302.177,00. Realisasi belanja modal BOS untuk SD adalah sebesar Rp26.261.460.359,00 dari jumlah anggaran Rp20.861.752.000,00 sehingga terdapat belanja modal yang melebihi anggaran sebesar Rp5.399.708.359,00. Realisasi Belanja Modal BOS untuk SMP adalah sebesar Rp8.899.841.818,00 dari jumlah anggaran Rp7.512.168.000,00 sehingga terdapat belanja modal yang melebihi anggaran sebesar Rp1.387.673.818,00.

- t) Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan TA 2019 tidak ada dan TA2018 sebesar Rp392.275.000,00 dari jumlah Anggaran sebesar Rp394.000.000,00 berupa Pengadaan Proteksi Lingkungan.
- u) Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan TA 2019 sebesar Rp232.821.554,00 dan realisasi TA 2018 sebesar Rp458.278.245,00 dengan rincian sebagai disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.62. Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan

BM - Alat Keamanan dan Perlindungan		TA 2019		TA 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Alat Bantu Keamanan	255.780.000,00	232.821.554,00	49.275.000,00
(2)	Alat Perlindungan	0,00	0,00	409.003.245,00
Jumlah		255.780.000,00	232.821.554,00	458.278.245,00

3) Belanja Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2019 sebesar Rp149.596.577.668,00 dan TA 2018 sebesar Rp109.978.782.599,00 dengan rician disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.63. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan		TA 2019		TA 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
a)	Bangunan Gedung Tempat Kerja	160.320.927.750,00	144.398.105.202,00	108.264.239.437,00
b)	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	741.124.000,00	735.720.000,00	146.625.000,00
c)	Bangunan Bersejarah	175.000.000,00	171.629.842,00	822.133.532,00
d)	Bangunan Candi	-	-	199.511.900,00
e)	Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah Lainnya	100.000.000,00	98.759.375,00	-
f)	Bangunan Rambu-rambu	4.491.000.000,00	4.192.363.249,00	546.272.730,00
Jumlah		165.828.051.750,00	149.596.577.668,00	109.978.782.599,00

- a) Realisasi Belanja Pengadaan Bangunan Tempat Kerja TA 2019 sebesar Rp144.398.105.202,00 dan realisasi TA 2018 sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Rp108.264.239.437,00 dengan rincian disajikan dalam *lampiran 5.7*.

- b) Realisasi Belanja Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal TA 2019 sebesar Rp735.720.000,00 dari jumlah anggaran sebesar Rp741.124.000,00 berupa Bangunan Rumah Negara Golongan III dan realisasi TA 2018 sebesar Rp146.625.000,00 Bangunan Rumah Negara Golongan I.
- c) Realisasi Belanja Pengadaan Bangunan Bersejarah TA 2019 sebesar Rp171.629.842,00 dari jumlah anggaran sebesar Rp175.000.000,00 dan TA 2018 sebesar Rp822.133.532,00 berupa pengadaan Bangunan Makam Sejarah.
- d) Realisasi Belanja Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah Lainnya TA 2019 sebesar Rp98.759.375,00 dari jumlah anggaran sebesar Rp100.000.000,00 berupa Pengadaan Bangunan Bersejarah.
- e) Realisasi Belanja Modal Pengadaan Candi TA 2019 tidak ada dan TA 2018 sebesar Rp199.511.900,00 berupa pengadaan Bangunan Candi Lainnya.
- f) Realisasi Belanja Pengadaan Bangunan Rambu-rambu TA 2019 sebesar Rp4.192.363.249,00 dan realisasi TA 2018 sebesar Rp546.272.730,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.64. Belanja Modal Pengadaan Rambu-rambu

BM - Bangunan Rambu-rambu		TA 2019		TA 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Bangunan Bersuar Lalu lintas Darat	4.406.000.000,00	4.108.622.049,00	390.846.530,00
(2)	Bangunan Ranbu Tidak Bersuar	85.000.000,00	83.741.200,00	155.426.200,00
Jumlah		4.491.000.000,00	4.192.363.249,00	546.272.730,00

4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2019 sebesar Rp198.602.231.366,00 dan TA 2018 sebesar Rp206.618.577.009,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.65. Belanja Modal Jalan, Irigasai dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		TA 2019		TA 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
a)	Pengadaan Jalan	157.631.731.000,00	135.449.592.127,00	168.301.857.517,00
b)	Pengadaan Jembatan	11.034.175.000,00	9.801.860.300,00	6.348.509.900,00
c)	Pangadaan Bangunan Air Irigasi	4.200.420.000,00	3.840.101.530,00	8.906.501.660,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		TA 2019		TA 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
d)	Bangunan pengaman sungai dan Penanggulangan BA	2.100.000.000,00	2.078.335.075,00	199.400.000,00
e)	Bangunan Air Kotor	11.798.313.000,00	11.520.926.001,00	-
f)	Pengadaan Instalasi Air Minum/Bersih	12.000.000,00	6.684.000,00	44.500.000,00
g)	Pengadaan Instalasi Air kotor	-	-	13.878.672.321,00
h)	Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	-	-	2.635.279.500,00
i)	Instalasi Pembangkit Listrik	250.000.000,00	243.677.750,00	-
j)	Instalasi gardu Listrik	71.830.000,00	71.091.000,00	9.500.000,00
k)	Pengadaan Jaringan Listrik	39.715.770.000,00	35.589.963.583,00	6.294.356.111,00
Jumlah		226.814.239.000,00	198.602.231.366,00	206.618.577.009,00

a) Realisasi Belanja Modal Jalan TA 2019 sebesar Rp135.449.592,00 dan realisasi TA 2018 sebesar Rp168.301.857.517,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.66. Belanja Modal Pengadaan Jalan

BM - Pengadaan Jalan		TA 2019		TA 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Jalan Kabupaten/Kota	152.903.921.000,00	130.742.673.777,00	165.064.092.317,00
(2)	Jalan Desa	4.522.810.000,00	4.508.289.600,00	0,00
(3)	Jalan Khusus	205.000.000,00	198.628.750,00	3.237.765.200,00
Jumlah		157.631.731.000,00	135.449.592.127,00	168.301.857.517,00

b) Realisasi Belanja Modal Jembatan TA 2019 sebesar Rp9.801.860.300,00 dan realisasi TA 2018 sebesar Rp6.348.509.900,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.67. Belanja Modal Pengadaan Jembatan

BM - Pengadaan Jembatan		TA 2019		TA 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Jembatan Kabupaten/Kota	11.034.175.000,00	9.801.860.300,00	6.230.665.900,00
(2)	Jembatan Khusus	0,00	0,00	117.844.000,00
Jumlah		11.034.175.000,00	9.801.860.300,00	6.348.509.900,00

c) Realisasi Belanja Modal Bangunan Air Irigasi TA 2019 sebesar Rp3.840.101.530,00 dan realisasi TA 2018 sebesar Rp8.906.501.660,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.68. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi

BM - Bangunan Air irigasi		TA 2019		TA 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

BM - Bangunan Air irigasi		TA 2019		TA 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi			738.216.460,00
(2)	Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi			6.441.760.700,00
(3)	Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi	4.200.420.000,00	3.840.101.530,00	1.726.524.500,00
Jumlah		4.200.420.000,00	3.840.101.530,00	8.906.501.660,00

- d) Realisasi Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA TA 2019 sebesar Rp2.078.335.075,00 dan TA 2018 sebesar Rp199.400.000,00 dengan rincian disajikan dalam table berikut .

Tabel 5.69. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA

BM - Bangunan pengaman sungai dan Penanggulangan BA		TA 2019		TA 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	BangunanPembuang pengaman Sungai			199.400.000,00
(2)	Bangunan pengaman Sungai	2.100.000.000,00	2.078.335.075,00	-
Jumlah		2.100.000.000,00	2.078.335.075,00	199.400.000,00

- e) Realisasi Belanja Modal Bangunan Air Kotor TA 2019 sebesar Rp11.520.926.001,00 berupa Pengadaan Bangunan Pemabawa Air Kotor sebesar Rp10.674.343.801,00 dan Pengadaan Bangunan Waduk Air Kotor sebesar Rp846.582.200,00.
- f) Realisasi Belanja Modal Instalasi Air Minum/Bersih TA 2019 sebesar Rp6.684.000,00 dari jumlah anggaran sebesar Rp12.000.000,00 berupa Pengadaan Air Sumber/Mata Air dan TA 2018 sebesar Rp44.500.000,00 berupa air bersih/air baku lainnya.
- g) Realisasi Belanja Modal Instalasi Air Kotor TA 2019 tidak ada dan TA 2018 sebesar Rp13.878.672.321,00 berupa Instalasi air kotor.
- h) Realisasi Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah TA 2019 tidak ada dan TA 2018 sebesar Rp2.635.279.500,00 berupa Pengadaan Instalasi pengolahan Sampah Organik sebesar Rp599.697.900,00 dan Pengadaan Instalasi pengolahan Sampah non Organik sebesar Rp2.035.581.600,00.
- i) Realisasi Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik TA 2019 sebesar Rp243.677.750,00 dari jumlah anggaran sebesar Rp250.000.000,000
- j) Realisasi Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik TA 2019 sebesar Rp71.091.000,00 dan TA 2018 sebesar Rp9.500.000,00 denagn rincian disajikan dalam tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Tabel 5.70. Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik

BM - Instalasi Gardu Listrik		TA 2019		TA 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Instalasi Gardu Listrik Distribusi	26.830.000,00	26.830.000,00	9.500.000,00
(2)	Instalasi Pusat Pengatur Listrik	45.000.000,00	44.261.000,00	
Jumlah		71.830.000,00	71.091.000,00	9.500.000,00

k) Realisasi Belanja Modal Jaringan Listrik TA 2019 sebesar Rp35.589.963.583,00 dan realisasi TA 2018 sebesar Rp6.294.356.111,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.71. Belanja Modal Jaringan Listrik

BM - Jaringan Listrik		TA 2019		TA 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Jaringan Transmisi	39.657.970.000,00	35.538.739.483,00	6.235.816.531,00
(2)	Jaringan Distribusi	57.800.000,00	51.224.100,00	58.539.580,00
Jumlah		39.715.770.000,00	35.589.963.583,00	6.294.356.111,00

5) Belanja Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2019 sebesar Rp25.996.469.295,00 dan TA 2018 sebesar Rp1.512.608.250,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.72. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		TA 2019		TA 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
a)	Pengadaan Buku	29.944.903.000,00	25.740.513.795,00	401.451.200,00
b)	Pengadaan Barang-barang Perpustakaan	6.222.000,00	3.769.500,00	193.005.000,00
c)	Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	-	-	19.551.800,00
d)	Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	4.508.000,00	4.500.000,00	-
e)	Pengadaan Tanaman	3.000.000,00	3.000.000,00	13.602.000,00
f)	Pengadaan Aset Tetap Renovasi	254.660.000,00	244.686.000,00	884.998.250,00
Jumlah		30.213.293.000,00	25.996.469.295,00	1.512.608.250,00

Rincian realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya diatas sebagai berikut:

a) Belanja Modal Pengadaan Buku TA 2019 sebesar Rp25.740.513.795,00 dan realisasi TA 2018 sebesar Rp401.451.200,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.73. Belanja Modal Pengadaan Buku

BM - Pengadaan Buku		TA 2019		TA 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Buku Ilmu Pengetahuan Umum	29.924.903.000,00	25.724.428.795,00	381.451.200,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

BM - Pengadaan Buku		TA 2019		TA 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(2)	Buku Ilmu Sosial	20.000.000,00	16.085.000,00	0,00
(3)	Buku Ilmu Pengetahuan praktis	0,00	0,00	20.000.000,00
Jumlah		29.944.903.000,00	25.740.513.795,00	401.451.200,00

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Buku berupa Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Umum terdapat realisasi yang berasal dari Belanja BOS. Realisasi Belanja Modal yang berasal dari Belanja BOS SD yaitu sebesar Rp18.728.612.575,00 dari jumlah anggaran sebesar Rp20.438.560.000,00 dan realisasi Belanja Modal yang berasal Dari Belanja BOS SMP sebesar Rp4.903.750.567,00 dari jumlah anggaran sebesar Rp7.330.800.000,00.

- b) Realisasi Belanja Modal Pengadaan Barang-barang perpustakaan TA 2019 sebesar Rp3.769.500,00 dari jumlah anggaran sebesar Rp6.222.000,00 berupa Pengadaan Barang-brang Perpustakaan Naskah(Manuskrip) dan TA 2018 sebesar Rp193.005.000,00 berupa pengadaan Berkas Komputer (*computer Files*).
- c) Realisasi Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak kebudayaan TA 2019 tidak ada dan TA 2018 sebesar Rp19.551.800,00 berupa pengadaan Barang bercorak Kebudayaan Barang Kerajinan.
- d) Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya TA 2019 sebesar Rp4.500.000,00 dari jumlah anggaran sebesar Rp4.508.000,00.
- e) Realisasi Belanja Modal Pengadaan Tanaman TA 2019 sebesar Rp3.000.000,00 dan realisasi TA 2018 sebesar Rp13.602.000,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut,

Tabel 5.74. Belanja Modal Pengadaan Tanaman

BM - Pengadaan Buku		TA 2019		TA 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Pengadaan Tanaman Hias	3.000.000,00	3.000.000,00	1.782.000,00
(2)	Pengadaan Tanaman Obat dan Kosmetika	0,00	0,00	11.820.000,00
Jumlah		3.000.000,00	3.000.000,00	13.602.000,00

- f) Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Renovasi TA 2019 sebesar Rp244.686.000,00 dari jumlah anggaran Rp254.660.000,00 dan realisasi TA 2018 sebesar Rp884.998.250,00.

c. Belanja Tak Terduga (BTT)

Belanja Tak Terduga (BTT) dialokasikan dalam APBD dalam rangka penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Pelaksanaan kegiatan belanja tak terduga Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.500.000,00 yaitu Pembayaran



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Pengembalian Pembayaran Pajak BPTHB yang telah disetor Ke Rekening Umum Kas Daerah Kabupaten Tegal berdasarkan SK Bupati Nomor 973/2885/2019 tanggal 27 Mei 2019 ditransfer ke rek Bank Jateng Cabang Slawi Nomor 2-035-24545-9 atas nama Untung Raharjo.

5.1.3. Transfer

Realisasi Transfer TA 2019 sebesar Rp506.968.396.156,00 dan TA 2018 sebesar Rp448.247.773.974,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.75. Transfer

Transfer :		TA 2019		TA 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
a.	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	10.029.933.000,00	8.243.113.740,00	9.012.448.100,00
b.	Transfer Bantuan Keuangan	501.008.475.000,00	498.725.282.416,00	439.235.325.874,00
Jumlah		511.038.408.000,00	506.968.396.156,00	448.247.773.974,00

a. Transfer Bagi Hasil Pendapatan Ke Desa

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan ke Desa TA 2019 sebesar Rp8.243.113.740,00 dan realisasi TA 2018 sebesar Rp9.012.448.100,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.76. Transfer Bagi Hasil Pendapatan ke Desa

Transfer Bagi Hasil Pendapatan		TA 2019		TA 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1)	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	7.804.975.000,00	6.857.836.340,00	7.385.046.100,00
2)	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	2.224.958.000,00	1.385.277.400,00	1.627.402.000,00
Jumlah		10.029.933.000,00	8.243.113.740,00	9.012.448.100,00

b. Transfer Bantuan Keuangan

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan TA 2019 sebesar Rp498.725.282.416,00 dan TA 2018 sebesar Rp439.235.325.874,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.77. Transfer Bantuan Keuangan

Transfer Bantuan Keuangan		TA 2019		TA 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1)	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	499.892.571.000,00	497.610.130.000,00	438.166.422.010,00
2)	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.115.904.000,00	1.115.152.416,00	1.068.903.864,00
Jumlah		501.008.475.000,00	498.725.282.416,00	439.235.325.874,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Rincian Transfer bantuan Keuangan ke desa sebesar Rp497.610.130,00 adalah sebagai berikut:

- a) Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa untuk Pemilihan Kepala Desa adalah sebesar Rp3.775.000.000,00 dari jumlah anggaran sebesar Rp3.775.000.000,00.
- b) Realisasi belanja Alokasi Dana Desa sebesar Rp122.510.452.000,00 dari jumlah anggaran sebesar Rp122.510.452.000,00
- c) Realisasi Belanja Dana Desa sebesar Rp339.459.678.000,00 dari jumlah anggaran Rp340.958.369.000,00, realisasi belanja dana desa ini tidak terserap sepenuhnya yaitu sebesar Rp1.498.691.000,00 karena desa masih mempunyai sisa Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya di RKD lebih dari 30% sehingga tidak memenuhi syarat untuk penyaluran dana tahap II sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Perbup No. 4 Th 2019 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Pelaksanaan dan Penetapan Lokasi Serta Besaran Dana Desa. Sisa dana desa yang belum terserap yaitu terdapat pada Desa Pagedangan Kecamatan Dukuhwaru sebesar Rp416.564.800,00, desa Pamiritan kecamatan Balapulung sebesar Rp647.312.400,00 dan desa Kendalserut Kecamatan Pangkah sebesar Rp434.810.800,00
- d) Realisasi belanja PDPM sebesar Rp21.075.000.000,00 dari jumlah anggaran sebesar Rp21.075.000.000,00
- e) Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Khusus pada Desa sebesar Rp200.000.000,00 dari jumlah anggaran Rp830.000.000,00 sehingga realisasi yang belum terserap sebesar Rp630.000.000,00 hal ini disebabkan karena dari desa yang menerima bantuan keuangan khusus sampai tahun anggaran 2019 desa yang mengajukan permohonan dana hanya desa Traju kecamatan Bumijawa.
- f) Realisasi Transfer Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni sebesar Rp7.990.000.000,00 dari jumlah anggaran sebesar Rp8.143.750.000,00 sehingga terdapat anggaran yang belum terserap sebesar Rp153.750.000,00 yaitu pada desa Kertayasa Kecamatan Kramat sebesar Rp140.000.000,00 karena tidak mengajukan permohonan penyaluran karena tidak terdaftar di PDBT (Data Base RTLH) dan dalam mengajukan persyaratan lambat.
- g) Realisasi Transfer Belanja Bantuan Keuangan PAMSIMAS (APBD) sebesar Rp2.600.000.000,00 dari jumlah anggaran sebesar Rp2.600.000.000,00.



5.1.4. Pembiayaan

Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dengan anggaran Pembiayaan Neto TA 2019 sebesar Rp50.495.280.000,00 dan realisasi sebesar Rp50.685.997.598,82 dan TA 2018 sebesar Rp111.098.862.486,80 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.78. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan		TA 2019		TA 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
a.	Penerimaan Pembiayaan	59.844.280.000,00	60.034.997.598,82	119.976.862.486,80
b.	Pengeluaran Pembiayaan	9.349.000.000,00	9.349.000.000,00	8.878.000.000,00
Pembiayaan Neto		50.495.280.000,00	50.685.997.598,82	111.098.862.486,80

a. Penerimaan Pembiayaan

Realisasi penerimaan pembiayaan TA 2019 sebesar Rp60.034.997.598,82 dan TA 2018 sebesar Rp119.976.862.486,80 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.79. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan:		TA 2019		TA 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1)	Penggunaan SiLPA	59.844.280.000,00	59.879.097.965,82	106.925.093.495,80
2)	Pencairan dana cadangan	-	-	12.840.541.100,00
3)	Penerimaan Kembali Piutang		155.899.633,00	211.227.891,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		59.844.280.000,00	60.034.997.598,82	119.976.862.486,80

b. Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2019 sebesar Rp9.349.000.000,00 dan TA 2018 sebesar Rp8.878.000.000,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5. 80 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan:		TA 2019		TA 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1)	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	9.349.000.000,00	9.349.000.000,00	8.849.000.000,00
2)	Pengembalian Biaya Administrasi Pembukaan Rekening BLUD Puskesmas	0,00	0,00	29.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		9.349.000.000,00	9.349.000.000,00	8.878.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

5.1.5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Perhitungan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2019 sebesar Rp88.931.882.896,96 dan TA 2018 sebesar Rp59.744.279.259,42 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.81. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) :	2019	2018
	Realisasi	Realisasi
1) Pendapatan dan Belanja :		
a) Realisasi Pendapatan	2.755.677.484.152,29	2.524.365.919.814,62
b) Realisasi Belanja	2.210.463.202.698,15	2.127.372.729.068,00
c) Transfer	506.968.396.156,00	448.247.773.974,00
Surplus (Defisit) Anggaran : a) – b) – c)	38.245.885.298,14	(51.254.583.227,38)
2) Pembiayaan :		
a) Penerimaan Daerah	60.034.997.598,82	119.976.862.486,80
b) Pengeluaran Daerah	9.349.000.000,00	8.878.000.000,00
Pembiayaan Neto : a) – b)	50.685.997.598,82	111.098.862.486,80
3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran : (1 + 2)	88.931.882.896,96	59.844.279.259,42

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp88.931.882.896,96 dan Rp59.844.279.259,42 rincian masing-masing disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5. 82 Rincian SiLPA

Rincian SiLPA :	2019	2018
1) Rekening Giro BUD	51.565.336.774,00	41.645.810.899,00
2) Deposito	-	-
3) Saldo kas RSU Dr Soesilo pada BankJateng Cabang Slawi	29.424.850.029,02	12.403.163.875,02
4) Kas BLUD Dinkes	3.676.723.824,00	3.633.482.849,80
5) Kas BLUD RSUD Suradadi	1.044.539.529,94	2.845.471,00
6) Kas BOS	4.548.989.792,00	2.087.440.687,00
7) Kas di Bendahara Pengeluaran	77.466.492,00	20.199.984,00
8) Kas Bendahara Penerimaan	67.378.256,00	205.696.500,00
9) Utang PFK BLUD Dinkes yang belum disetor		(29.000.000,00)
10) Koreksi Kas		(3.818.706,40)
11) Lebih Salur Dana BOS	(22.720.000,00)	(5.760.000,00)
12) Utang BOK Dinkes		(115.782.300,00)
13) Utang BLUD RSUD SURADADI	(1.450.681.800,00)	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	88.931.882.896,96	59.844.279.259,42

Rincian SiLPA BUD TA 2019 sebesar Rp51.565.336.774,00 terdiri dari SiLPA terikat berupa Tunjangan Profesi Guru tahun 2019 sebesar Rp3.606.925.860,00, Tambahan Penghasilan Guru tahun 2019 sebesar Rp481.023.120,00, Tunjangan Khusus Guru tahun 2019 sebesar



Rp50.831.100,00, Sisa DAK Fisik tahun 2019 sebesar Rp593.417.693, Sisa DAK Non Fisik tahun 2019 sebesar Rp4.204.070.786,00, Sisa DBHCHT tahun 2019 sebesar Rp1.823.588.569,00, Dana Desa sebesar Rp1.498.690.997,00 dan Silpa lainnya yang belum teridentifikasi sebesar Rp39.306.788.649,00.

5.2. Laporan Perubahan SAL

5.2.1. Perubahan SAL

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan SAL tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya, yaitu sebesar Rp59.844.279.259,42.

2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL merupakan SiLPA Tahun 2018 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2019 sebesar Rp59.879.097.965,82.

3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun 2019 sebesar Rp88.931.882.896,96 dapat diuraikan sebagai berikut:

- Surplus / Defisit Anggaran	Rp38.245.885.298,14
- Pembiayaan Netto	Rp50.685.997.598,82
SiLPA/SiKPA Tahun berjalan	Rp88.931.882.896,96

4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya Tahun 2019 sebesar Rp34.818.706,40.

5. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp88.931.882.896,96



5.3. Neraca

5.6.1. Aset

5.3.1.1. Aset Lancar

a. Kas di Kas Daerah

Akun ini menggambarkan saldo Kas Daerah yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang ditempatkan di Bank Jateng Cabang Slawi berupa rekening giro 1-035-00501-7 untuk menampung penerimaan dan pengeluaran rutin maupun yang berasal dari transfer dan bagi hasil dengan saldo kas per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp51.565.336.774,00 dan 2018 sebesar Rp41.645.810.899,00

b. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas ini merupakan sisa kas yang masih dipegang oleh bendahara pengeluaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) per 31 Desember 2019 sebesar Rp100.899.992,00 dan tahun 2018 sebesar Rp20.199.984,00, dengan rincian masing-masing disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.83. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

No.	Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)
1)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	46.629.816,00	0,00
2)	Kecamatan Warureja	30.836.676,00	20.184.479,00
3)	Kecamatan Lebaksiu	0,00	15.505,00
4)	Kecamatan Kramat	23.433.500,00	
Jumlah		100.899.992,00	20.199.984,00

c. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas ini merupakan sisa kas yang masih dipegang oleh bendahara penerimaan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) per 31 Desember 2019 sebesar Rp67.378.256,00 dan tahun 2018 sebesar Rp282.728.100,00, dengan rincian masing-masing disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.84. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

No.	Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)
a.	Dinas Perhubungan	48.665.000,00	9.644.500,00
b.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	227.528.600,00
c.	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	18.713.256,00	45.555.000,00
Jumlah		67.378.256,00	282.728.100,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Rincian Kas Bendahara penerimaan Tahun anggaran 2018 Pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp277.528,600,00 terdiri dari pendapatan per 31 Desember yang belum disetor ke Kas Daerah sebesar Rp205.696.500,00 dan asuransi kepada Jasa Raharja yang belum disetor sebesar Rp77.031.600,00

d. Kas di BLUD

Kas ini merupakan kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD dr. Soeselo, RSUD Suradadi dan Puskesmas. Sebagai BLUD, diberi wewenang untuk menggunakan dana yang bersumber dari pendapatan jasa pelayanan rumah sakit atau puskesmas untuk pembiayaan/pembayaran kegiatan rumah sakit atau puskesmas secara langsung. Saldo kas di BLUD per 31 Desember 2019 adalah sejumlah Rp34.146.113.382,96 dan 2018 sejumlah Rp16.039.492.195,82 rincian masing-masing disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5. 85. Rincian Kas BLUD

No	Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)
A	RSUD dr Soeselo Slawi	29.424.850.029,02	12.403.163.875,02
B	RSUD Suradadi	1.044.539.529,94	2.845.471,00
C	Dinkes (Kas di BLUD Puskesmas)	3.676.723.824,00	3.633.482.849,80
Jumlah Total Kas di BLUD		34.146.113.382,96	16.039.492.195,82

Rincian lebih lanjut atas kas BLUD dapat dilihat pada *lampiran 5.8*.

Rincian Posisi Kas BLUD RSUD dr Soeselo disajikan dalam tabel berikut

Tabel 5.86. Rincian Posisi Kas BLUD RSUD dr. Soeselo

No	Uraian	Nomor Rekening	Jumlah (Rp)
1	Giro Bank Jateng	1-035-00150-8	14.424.850.029,02
2	Deposito Bank Jateng	A249677	5.000.000.000,00
3	Deposito Bank Jateng	A250239	10.000.000.000,00
Jumlah Total Kas di BLUD RSUD dr Soeselo			29.424.850.029,02

Saldo Rekening Kas BLUD RSUD Suradadi per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.044.539.529,94 merupakan rekening giro di Bank Jateng dengan nomor rekening 1-035-00724-1 dengan saldo sebesar Rp148.998.952,00 dan rekening giro di Bank Mandiri dengan nomor rekening 139-00-1928057-1 dengan saldo sebesar Rp895.540.577,94.

Untuk rincian nomor rekening kas BLUD Puskesmas dapat dilihat pada *lampiran 5.9*

e. Kas di Bendahara BOS

Kas di Bendahara BOS Merupakan Kas yang berasal dari Dana BOS yang ditransfer dari pemerintah Propinsi saldo per 31 desember 2019



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

adalah Rp4.548.989.792,00 sedangkan saldo per 31 desember 2018 adalah Rp2.087.440.687,00. Saldo kas di bendahara BOS saldo per 31 desember 2019 adalah Rp4.548.989.792,00 terdiri dari Saldo Kas di Bendahara BOS untuk SD Negeri sebesar Rp1.910.945.241,00 dan saldo Kas di Bendahara BOS untuk SMP Negeri sebesar Rp2.638.044.551,00 untuk rincian persekolah dapat dilihat pada Lampiran Dana BOS.

f. Kas Lainnya di Bendahara (Selaian BUD)

Saldo Kas lainnya di Bendahara (selain BUD) sebesar Rp21.210.117,00 merupakan nilai pajak tahun 2019 atas realisasi belanja Bantuan Operasional sekolah yang belum disetorkan oleh Bendahara BOS. Nilai pajak tersebut terdiri dari pajak pusat sebesar Rp14.356.698,00 dan pajak daerah sebesar Rp6.853.419,00.

g. Piutang Pendapatan

Piutang pendapatan sampai dengan akhir Desember 2019 sebesar Rp137.411.387.460,00 sedangkan tahun 2018 sebesar Rp128.743.618.730,00 akun ini menggambarkan hak pemerintah daerah yang berasal dari piutang pajak, piutang retribusi, piutang lain-lain PAD dan piutang lainnya dengan rincian disajikan dalam tabel berikut

Tabel 5.87. Rincian Piutang Pendapatan

No.	Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)
1	Piutang Pajak Daerah	60.090.301.416,00	55.152.841.939,00
2	Piutang Retribusi	1.157.549.225,00	1.062.922.654,00
3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		6.349.000.000,00
4	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	62.354.266.761,00	57.908.112.523,00
5	Piutang Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan	10.228.207.286,00	
6	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	3.581.062.772,00	8.270.741.614,00
	Jumlah	137.411.387.460,00	128.743.618.730,00

1) Piutang Pajak

Piutang pajak berada pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Akun ini menggambarkan hak Pemerintah Daerah yang berasal dari penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) 2019 dan sisa piutang tahun sebelumnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp60.090.301.416,00 dan saldo per 31 Desember 2018 Rp55.152.841.939,00 belum diterima Pemerintah Kabupaten Tegal, dengan rincian disajikan dalam tabel berikut

Tabel 5.88. Rincian Piutang Pajak

No.	Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)
1	Piutang Pajak Hiburan	608.675,00	608.675,00
2	Piutang Pajak Reklame	24.308.374,00	22.226.643,00
3	Piutang Pajak Air Bawah Tanah	38.097.090,00	65.048.470,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No.	Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)
4	Piutang Penerangan Jalan	4.507.700.366,00	4.254.697.299,00
5	Piutang Pajak Sarang Burung Walet	21.924.000,00	21.924.000,00
6	Piutang PBB	55.497.662.911,00	50.788.336.852,00
Jumlah		60.090.301.416,00	55.152.841.939,00

Rincian piutang pajak berdasarkan umur piutang dapat dilihat dalam lampiran 5.10. Rincian piutang pajak berdasarkan umur piutang

2) Piutang Retribusi

Akun ini merupakan piutang pada Sekretariat Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Piutang pada Sekretariat Daerah merupakan piutang Ijin Usaha Konstruksi pada Bagian Ekbang Sekretariat Daerah yang telah ditetapkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)nya namun belum dilunasi oleh Wajib Retribusi. Piutang pada Dinas Perhubungan terdiri dari piutang retribusi Parkir Tepi Jalan Umum dan piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang telah ditetapkan SKRDnya namun belum dilunasi oleh Wajib Retribusi, piutang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan piutang Izin IMB, Izin Gangguan dan pelayanan kesehatan, sedangkan piutang pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan Sewa Kantin dan Sewa Bangunan milik Pemda. Saldo per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp1.157.549.225,00 dan Rp1.062.922.654,00. Rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.89. Rincian Piutang Retribusi

No.	Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)
1	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	238.037.674,00	238.037.674,00
2	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.350.000,00	1.400.000,00
3	Piutang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	478.425.000,00	479.125.000,00
4	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	169.828.451,00	121.185.780,00
5	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	246.866.550,00	199.289.650,00
6	Piutang Retribusi Izin Gangguan	4.735.550,00	4.763.550,00
7	Piutang Retribusi Izin Trayek	406.000,00	371.000,00
8	Piutang Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	900.000,00	900.000,00
9	Piutang Retribusi Pengolahan Limbah Cair	11.000.000,00	7.500.000,00
10	Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir	6.000.000,00	10.350.000,00
Jumlah		1.157.549.225,00	1.062.922.654,00



3) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Saldo piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2018 adalah sebesar Rp6.349.000.000,00 berupa piutang penyertaan modal pada Bank Jateng.

4) Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Akun ini merupakan piutang pada BLUD RSUD dr. Soeselo, RSUD Suradadi, Dinas Perhubungan dan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM. Piutang pada Dinas Perdagangan merupakan Piutang Sewa Shelter TRASA, sedangkan pada Dinas Perhubungan berupa piutang denda retribusi parkir tepi jalan umum Saldo per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp62.354.266.761,00 dan Rp57.908.112.523,00 Rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.90. Rincian Piutang lain – lain Pendapatan Asli Daerah

No.	Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)
1	Piutang BLUD RSUD dr. Soeselo	35.076.929.764,00	33.126.516.340,00
2	Piutang BLUD RSUD Suradadi	4.865.399.630,00	3.934.232.598,00
3	Piutang Denda Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	2.179.506,00	2.179.506,00
4	Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum (Sewa Shelter TRASA)	24.250.000,00	34.750.000,00
5	Piutang Denda PBB	22.358.641.948,00	20.800.509.785,00
6	Piutang Denda Pajak Air Tanah	4.377.737,00	4.094.540,00
7	Piutang Denda Reklame	1.998.976,00	0
8	Piutang Sumber mata air (PDAM)	20.489.200,00	0
10	Piutang Budep Bank Jateng	0	5.829.754,00
Jumlah		62.354.266.761,00	57.908.112.523,00

Rincian piutang BLUD RSUD dr Soeselo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.91. Rincian piutang BLUD RSUD dr Soeselo

No.	Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)
Piutang BLUD RSUD dr.SOESELO			
1	-Piutang BPJS Perawatan	34.031.526.540,00	31.266.084.350,00
2	-Piutang Ambulan BPJS	57.616.650,00	181.933.250,00
3	-Piutang Alat Kesehatan RTJL	2.238.600,00	11.902.000,00
4	-Piutang Obat Kronis BPJS	977.447.974,00	1.658.496.740,00
5	-Piutang Parkir	8.100.000,00	8.100.000,00
JUMLAH		35.076.929.764,00	33.126.516.340,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Rincian piutang BLUD RSUD Suradadi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.92. Rincian piutang BLUD RSUD Suradadi

No.	Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)
	Piutang BLUD RSUD Suradadi		
1	-Piutang BPJS Perawatan	4.499.327.500,00	3.349.805.794,00
2	-Piutang Ambulan BPJS	9.191.700,00	6.065.000,00
3	-Piutang Jasa Raharja	3.664.800,00	41.986.400,00
4	-Piutang Obat Kronis BPJS	353.215.630,00	511.008.304,00
5	-Piutang BPJS Ketenagakerjaan	0	25.367.100,00
	JUMLAH	4.865.399.630,00	3.934.232.598,00

5) Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Akun ini merupakan piutang transfer pemerintah pusat yang berasal dari dana perimbangan saldo piutang per 31 desember 2019 adalah sebesar Rp10.228.207.286,00 yaitu berdasarkan PMK20/PMK.07/2020 tentang penyaluran dana bagi hasil yang terdiri dari Kurang Bayar DBH PPH pasal 21 dan PPH pasal 25/29 sebesar Rp1.700.205.078,00, DBH PBB tahun 2018 sebesar Rp2.309.527.593,00, DBH CHT tahun 2018 sebesar Rp209.030.790,00, DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar Rp271.668.725,00, DBH SDA Kehutanan sebesar Rp351.422.719,00, DBH SDA Perikanan sebesar Rp3.677.289,00 dan berdasarkan PMK 36/PMK.07/2020 tentang penetapan alokasi sementara kurang bayar dana bagi hasil tahun 2019 yang terdiri dari PPH pasal 21 dan PPH pasal 25/29 tahun sebesar Rp3.505.981.755,00, DBH PBB tahun 2019 sebesar Rp1.501.508.185,00, DBH SDA Kehutanan Tahun 2019 sebesar Rp167.232.512,00, DBH SDA Mineral dan Batubara Tahun 2019 sebesar Rp448.095,00, DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar Rp36.876.642,00, DBH SDA perikanan sebesar Rp170.627.903,00

6) Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah

Akun ini merupakan piutang transfer pemerintah yang berasal dari pemerintah propinsi berupa bagi hasil pajak propinsi saldo piutang per 31 desember 2019 adalah sebesar Rp3.581.062.772,00 dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp8.270.741.614,00.



h. Piutang Lainnya

Akun ini menggambarkan hak Pemerintah Daerah selain dari pajak dan retribusi daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, yang berasal dari pemberian pinjaman. Pemberian pinjaman diberikan kepada petani, koperasi maupun pengrajin yang disalurkan melalui empat Dinas, yaitu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan. Penerima dana pinjaman harus mengembalikan pokok pinjaman ke kas daerah dan jasa pinjaman. Pemberian pinjaman semula diklasifikasikan sebagai investasi non permanen berupa dana bergulir, namun berdasarkan pola dan karakteristik penyalurannya, dana tersebut tidak memenuhi karakteristik dana bergulir. Hal tersebut telah diungkapkan dalam LHP BPK RI atas LKPD Pemkab Tegal tahun 2009 dan 2010 atas penyajian investasi non permanen pada Neraca Pemkab Tegal dan Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan Investasi Non Permanen berupa Dana Bergulir kepada masyarakat yang dianggap tidak memadai. Dengan melakukan kajian berdasarkan Buletin Teknis 06 tentang Akuntansi Piutang maka pemberian pinjaman dana tersebut lebih mendekati karakteristik sebagai Piutang Berdasarkan Perikatan berupa Pemberian Pinjaman, sehingga kemudian disajikan dalam kelompok piutang lainnya dalam neraca tahun 2013 s.d 2019 berdasarkan pembukuan yang ada pada masing-masing OPD teknis pelaksana. Jumlah Piutang Lainnya pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp10.313.531.368,00. dan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp10.303.269.051,00 yang terdiri dari Piutang yang berasal dari dana bergulir dijelaskan secara rinci dapat dilihat pada lampiran 5.11.

1) Piutang dari Pemberian Pinjaman

Akun ini merupakan piutang yang berasal dari Pemberian Pinjaman dengan rincian sebagai berikut:

a) Dana Pinjaman Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Merupakan sisa pokok atas pinjaman yang diberikan kepada Petani Kecil maupun Koperasi Petani yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 belum dibayar oleh para peminjam, dengan rincian masing-masing pinjaman dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.93. Rincian Pokok Pinjaman Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

No	Uraian	2019
1	Pinjaman Koperasi Tani Th 2000-2004	115.676.172,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Uraian	2019
2	Pinjaman Petani Alsintan Th 2001,2003,2004	100.046.526,00
3	Pinjaman P4K Tahun 2003,2004	100.778.664,00
4	Pinjaman Petani Cluster Jagung Hib. 2003	34.901.699,00
5	Pinjaman Petani Cluster Jagung Hib. 2004	26.850.070,00
6	Pinjaman Petani Pingkat. Mutu Intes. Padi Th.2004	102.938.255,00
7	Pinjaman Penagkar Benih Tanaman Pangan 2001	10.227.000,00
8	Pinjaman Sentra Bawang Putih Tahun 2002	3.020.000,00
9	Pinjaman Petani Sentra Kentang Th. 2003	36.620.000,00
10	Pinjaman Petani Melati Tahun 2004	1.638.092,00
	Jumlah	532.696.478,00

Sisa bunga atas pinjaman yang diberikan kepada Petani Kecil maupun Koperasi Petani yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 belum dibayar oleh para peminjam, rincian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.94. Rincian Bunga Pinjaman Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

No	Uraian	2019
1	Pinjaman. Koperasi Tani Th 2000-2004	12.194.037,00
2	Pinjaman Petani Alsintan Th 2001,2003,2004	42.472.959,00
3	Pinjaman P4K Tahun 2003,2004	6.008.281,00
4	Pinjaman Petani Cluster Jagung Hib. 2003	6.150,00
5	Pinjaman Petani Cluster Jagung Hib. 2004	-
6	Pinjaman Petani Pingkat. Mutu Intes. Padi Th.2004	12.440.991,00
7	Pinjaman. Penagkar Benih Tanaman Pangan 2001	1.200.000,00
8	Pinjaman Sentra Bawang Putih Tahun 2002	2.700.000,00
9	Pinjaman Petani Sentra Kentang Th. 2003	2.100.000,00
10	Pinjaman Petani Melati Tahun 2004	0,00
	Jumlah	79.122.418,00

b) Dana Pinjaman pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Merupakan sisa pokok atas pinjaman yang diberikan kepada Industri Kecil maupun Pengrajin yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 belum dibayar oleh para peminjam dengan rincian masing-masing pinjaman dapat dilihat pada *lampiran 5.12*.

Sisa bunga atas pinjaman yang diberikan kepada UKM, dan Pengrajin yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 belum dibayar oleh para peminjam, dengan rincian dapat dilihat pada *lampiran 5.13*.



c) Dana Pinjaman Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Merupakan sisa pokok atas pinjaman yang diberikan kepada koperasi yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 belum dibayar oleh para peminjam, dengan rincian masing-masing pinjaman dapat dilihat pada *lampiran 5.13*.

Sisa bunga atas pinjaman yang diberikan kepada Koperasi yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 belum dibayar oleh para peminjam, dengan rincian dapat dilihat pada *lampiran 5.14*.

d) Dana Pinjaman Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan

Merupakan sisa pokok atas pinjaman yang diberikan kepada peternak, petani dan nelayan yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 belum dibayar oleh para peminjam, rincian dapat dilihat pada *lampiran 5.16*.

Sisa bunga atas pinjaman yang diberikan kepada peternak, petani dan nelayan yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 belum dibayar oleh para peminjam, dengan rincian dapat dilihat pada *lampiran 5.17*.

Piutang lainnya tersebut di atas sudah dikoordinasikan dengan KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) oleh BPKAD untuk proses penyerahannya.

2) Piutang Cadangan Pangan

Merupakan saldo gabah untuk cadangan pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan Saldo Tahun anggaran 2019 sebesar Rp191.614.050,00.

i. Penyisihan Piutang

Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 36 tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal maka Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Saldo penyisihan piutang Tahun Anggaran 2019 sebesar (75.083.870.450,72) dan Tahun Anggaran 2018 sebesar (61.433.213.106,04), rincian dapat dilihat pada tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Tabel 5.95. Rincian Penyisihan Piutang

No.	Uraian	2019(Rp)	2018 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(37.533.769.939,80)	(30.457.827.317,18)
2	Penyisihan Piutang Retribusi	(910.225.794,25)	(693.805.839,00)
3	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		(634.900.000,00)
4	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	(26.447.952.978,13)	(19.302.057.190,79)
5	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	(51.141.036,43)	
6	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	(17.905.313,86)	(41.353.708,07)
7	Penyisihan Piutang Lainnya	(10.122.875.388,25)	(10.303.269.051,00)
Jumlah		(75.083.870.450,72)	(61.433.213.106,04)

j. Persediaan

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Satuan Kerja. Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodic, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukkn berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar. Jumlah persediaan tahun 2019 sebesar Rp27.924.682.592,13 dan tahun 2018 sebesar Rp29.118.837.940,25. Tabel Jenis persediaan secara terinci dapat dilihat pada *lampiran 5.18*.

1) Persediaan Alat Tulis Kantor

Merupakan saldo Persediaan Alat Tulis Kantor per 31 Desember 2019 sebesar Rp986.177.909,00 dan tahun 2018 sebesar Rp1.067.890.032,00. Rincian persediaan alat kantor OPD dapat dilihat pada *lampiran 5.19*.

2) Persediaan Alat Listrik dan Elektronik

Merupakan Saldo Alat-alat Listrik Per 31 Desember 2019 sebesar Rp428.848.547,00 dan tahun 2018 sebesar Rp71.512.128,00 rincian dapat dilihat pada tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Tabel. 5.96. Persediaan Alat Listrik dan Elektronik

No.	Uraian	2019 (Rp.)	2018 (Rp.)
1	RSUD Dr.Soeselo	159.263.875,00	51.850.198,00
2	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	3.465.880,00	957.680,00
3	Satuan Polisi Pamong Praja	541.000,00	608.000,00
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.501.300,00	4.560.400,00
5	Dinas Perhubungan	215.682.400,00	0,00
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.379.000,00	1.251.800,00
7	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	719.000,00	0,00
8	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	30.419.100,00	0,00
9	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	1.455.000,00	0,00
10	Sekretariat DPRD	10.166.892,00	11.282.850,00
11	Kecamatan Balapulang	490.000,00	
12	Kecamatan Margasari	64.400,00	274.000,00
13	Kecamatan Slawi	197.400,00	0,00
14	Inspektorat	91.000,00	0,00
15	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	978.700,00	727.200,00
16	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	1.433.600,00	0,00
JUMLAH		428.848.547,00	71.512.128,00

3) **Persediaan Materai**

Merupakan saldo persediaan Perangko, Materai per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00 dan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp60.000,00 rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 5.97. Rincian Persediaan Materai

No.	Uraian	2019 (Rp.)	2018 (Rp.)
1	Kecamatan Balapulang	0,00	60.000,00
JUMLAH		0,00	60.000,00

4) **Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih**

Merupakan Saldo Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp154.861.362,00 dan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp295.923.390,00 rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 5.98. Rincian Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

No.	Uraian	2019 (Rp.)	2018 (Rp.)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	36.086.613,00	15.707.500,00
2	RSUD Suradadi	1.718.750,00	34.887.000,00
3	Badan Kesbang Dan Linmas	64.200,00	0,00
4	Dinas Sosial	1.992.350,00	280.600,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	95.922.200,00	221.215.790,00
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	744.500,00
7	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	8.060.360,00	4.034.700,00
8	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	874.600,00	0,00
9	Sekretariat Daerah	0,00	5.805.200,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No.	Uraian	2019 (Rp.)	2018 (Rp.)
10	Sekretariat DPRD	7.407.989,00	11.856.600,00
11	Kecamatan Balapulang	88.600,00	
12	Kecamatan Margasari	173.900,00	0,00
13	Kecamatan Kedungbanteng	0,00	30.000,00
14	Kecamatan Slawi	101.000,00	0,00
15	Kecamatan warureja	24.100,00	0,00
16	Inspektorat	180.400,00	147.200,00
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	2.166.300,00	1.214.300,00
JUMLAH		154.861.362,00	295.923.390,00

5) Persediaan Bahan Bakar Minyak/ Gas

Merupakan saldo bahan bakar minyak/gas per 31 Desember 2019 sebesar Rp81.464.600,00 yang berada pada Dinas Lingkungan Hidup dan saldo per 31 Desember 2018 yang sebesar Rp31.199.500,00.

6) Persediaan Isi Tabung Gas

Merupakan Saldo persediaan isi tabung gas yang berada di RSUD dr. Soeselo Slawi Per 31 Desember 2019 sebesar Rp88.110.730,00 dan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp22.362.500,00.

7) Persediaan Bahan Baku Bangunan

Merupakan saldo persediaan Bahan Baku Bangunan per 31 Desember 2019 sebesar Rp381.875.200,00 dan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp298.961.900,00 rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 5.99. Rincian Persediaan Bahan Baku Bangunan

No.	Uraian	2019 (Rp.)	2018 (Rp.)
1	Dinas Pekerjaan Umum	375.961.200,00	295.541.400,00
2	Dinas Lingkungan Hidup	5.914.000,00	3.420.500,00
JUMLAH		381.875.200,00	298.961.900,00

8) Persediaan Bahan/Bibit Tanaman

Merupakan saldo persediaan bibit tanaman yang berada pada Dinas Pertanian, dan Ketahanan Pangan per 31 Desember 2019 sebesar Rp10.707.000,00 dan tahun 2018 sebesar Rp20.799.750,00

9) Persediaan Bibit Ternak

Merupakan saldo persediaan bibit ternak yang berada pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.500.000,00 dan tahun 2018 sebesar Rp702.900.000,00

10) Persediaan Bahan Obat-Obatan



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Merupakan persediaan obat yang berada di gudang farmasi Dinas Kesehatan, Puskesmas, RSUD dr Soeselo, RSUD Suradadi, Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan dan Dinas Pembebrdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana per 31 Desember 2019 sebesar Rp13.962.777.470,59 dan tahun 2018 sebesar Rp15.489.166.536,51.

Tabel persediaan bahan obat-obatan dapat dilihat dalam lampiran tabel.5.20.

Selain persediaan tersebut terdapat persediaan Obat *Expired Date* yang berada pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.720.600,00, RSUD dr Soeselo Slawi sebesar Rp3.021.392,00 dan RSUD Suradadi sebesar Rp293.309.422,43.

11) Persediaan Bahan Kimia

Merupakan saldo persediaan bahan kimia yang berada di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp128.908.824,00 dan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp59.698.211,00 yang merupakan saldo persediaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

12) Persediaan Bahan Makanan Pokok

Merupakan Saldo Bahan Makanan Pokok per 31 Desember 2019 sebesar Rp64.544.914,00 dan tahun 2018 sebesar Rp323.395.560,00 rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 5.100. Rincian Persediaan Bahan Makanan Pokok

No.	Uraian	2019 (Rp.)	2018 (Rp.)
1	RSUD Dr.Soeselo	50.230.838,00	23.940.000,00
2	RSUD Suradadi	14.314.076,00	19.507.560,00
3	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	0,00	279.948.000,00
JUMLAH		64.544.914,00	323.395.560,00

13) Persediaan Suku Cadang Sarana Mobilitas

Merupakan saldo persediaan suku cadang sarana mobilitas yang berada per 31 Desember 2019 sebesar Rp126.982.540,00 dan tahun 2018 sebesar Rp165.859.392,00 rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 5.101. Rincian Persediaan Suku Cadang Sarana Mobilitas

No.	Uraian	2019 (Rp.)	2018 (Rp.)
1	Dinas Lingkungan Hidup	101.957.540,00	146.856.342,00
2	Sekretariat Daerah	0,00	19.003.050,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	25.025.000,00	0,00
JUMLAH		126.982.540,00	165.859.392,00

14) Persediaan Bahan dan Alat Kesehatan Habis Pakai

Merupakan saldo Persediaan Bahan dan alat kesehatan habis pakai per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.081.023.081,00 tahun 2018 sebesar Rp2.081.023.081,29 rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 5.102. Rincian Persediaan Bahan dan Alat Kesehatan Habis Pakai

No.	Uraian	2018 (Rp.)	2018 (Rp.)
1	RSUD Dr.Soeselo	1.271.077.555,00	1.066.485.376,00
2	RSUD Suradadi	809.945.526,29	962.471.047,74
JUMLAH		2.081.023.081,29	2.028.956.423,74

15) Persediaan Bahan Radiologi

Merupakan Saldo Bahan Radiologi Per 31 Desember 2019 sebesar Rp294.596.403,00 dan tahun 2018 sebesar Rp51.423.000,00 rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 5.103. Rincian Persediaan Bahan Radiologi

No.	Uraian	2019 (Rp.)	2018 (Rp.)
1	RSUD Dr.Soeselo	172.707.603,00	28.252.500,00
2	RSUD Suradadi	121.888.800,00	23.170.500,00
JUMLAH		294.596.403,00	51.423.000,00

16) Persediaan Bahan Laboratorium

Merupakan Saldo Bahan Laboratorium Per 31 Desember 2019 sebesar Rp927.338.908,00 dan tahun 2018 sebesar Rp943.219.285,00 rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 5.104. Rincian Persediaan Bahan Laboratorium

No.	Uraian	2019 (Rp.)	2018 (Rp.)
1	RSUD Dr.Soeselo	921.269.734,00	915.837.825,00
2	RSUD Suradadi	6.069.174,00	2.501.460,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	24.880.000,00
JUMLAH		927.338.908,00	943.219.285,00

17) Persediaan Bahan Pemeliharaan Air Bersih

Merupakan saldo bahan pemeliharaan air bersih per 31 Desember 2019 sebesar Rp26.017.535,00 yang berada di RSUD dr Soeselo Slawi dan tahun 2018 sebesar Rp7.583.000,00.

18) Persediaan Alat Kebersihan

Merupakan Saldo Bahan Alat Kebersihan Per 31 Desember 2019 sebesar Rp123.543.150,00 dan tahun 2018 sebesar Rp108.404.062,00 rincian dapat dilihat pada tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Tabel. 5.105. Rincian Persediaan Alat Kebersihan

No.	Uraian	2019 (Rp.)	2018 (Rp.)
1	RSUD Dr.Soeselo	123.543.150,00	108.404.062,00
JUMLAH		123.543.150,00	108.404.062,00

19) Persediaan Plakat

Merupakan Saldo Persediaan Plakat di Sekretariat Daerah per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp51.884.800,00 dan tahun 2018 sebesar Rp17.198.500,00.

20) Persediaan Blanko

Merupakan saldo persediaan Blanko per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.747.401.024,00 dan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.129.196.516,00 yang berada pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

21) Persediaan Bank Darah Rumah Sakit

Merupakan Saldo Persediaan Bank Darah yang berada di RSUD dr. Soeselo Slawi Per 31 Desember 2019 sebesar Rp91.975.360,00 dan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp40.949.950,00

22) Persediaan Hemodialisa

Merupakan Saldo Persediaan Haemodialisa yang berada pada RSUD dr. Soeselo Slawi per 31 Desember 2019 sebesar Rp111.061.500,00 dan tahun 2018 sebesar Rp56.280.400,00

23) Persediaan Alat Kontrasepsi

Merupakan Saldo Persediaan kontrasepsi yang berada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana per 31 Desember 2019 sebesar Rp810.756.172,00 dan tahun 2018 sebesar Rp1.104.554.081,00

24) Persediaan Cetakan

Merupakan Saldo Persediaan Barang Cetakan per 31 Desember 2019 Rp898.733.215,00 dan tahun 2018 sebesar Rp850.619.383,00 rincian persediaan cetakan per OPD dapat dilihat pada lampiran 5.21.

25) Persediaan Perlengkapan Ruang Pasien

Merupakan Saldo Persediaan Perlengkapan Ruang Pasien per 31 Desember 2019 sebesar Rp192.500,00 dan saldo per 31 Desember 2018 yang berada pada RSUD dr. Soeselo Slawi sebesar Rp145.000,00.



26) Persediaan Perlengkapan Farmasi

Merupakan saldo Persediaan Perlengkapan Farmasi per 31 Desember 2019 sebesar Rp378.996.994,00 dan Tahun 2018 sebesar Rp421.014.589,00 rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 5.106. Rincian Persediaan Perlengkapan Farmasi

No.	Uraian	2019 (Rp.)	2018 (Rp.)
1	RSUD Dr.Soeselo	91.679.800,00	110.789.000,00
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	287.317.194,00	310.225.589,00
JUMLAH		378.996.994,00	421.014.589,00

27) Persediaan Buku Uji dan Plat Uji

Merupakan saldo persediaan buku uji dan plat uji pada Dinas Perhubungan per 31 Desember 2019 sebesar Rp121.941.710,00 dan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp242.134.145,00.

28) Persediaan Papan IMB

Merupakan saldo persediaan Papan IMB per 31 Desember 2019 sebesar Rp21.960.000,00 dan tahun 2018 sebesar Rp19.228.670,00 rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 5.107. Rincian Persediaan Papan IMB

No.	Uraian	2019 (Rp.)	2018 (Rp.)
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	21.510.000,00	18.512.670,00
2	Kecamatan Dukuhwaru	0,00	66.000,00
3	Kecamatan Jatinegara	410.000,00	410.000,00
4	Kecamatan Kedungbanteng	40.000,00	240.000,00
JUMLAH		21.960.000,00	19.228.670,00

29) Persediaan Logistik Bencana

Merupakan saldo persediaan logistik bencana yang berada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah per 31 Desember 2019 sebesar Rp127.543.600,00 dan tahun 2018 sebesar Rp6.494.250,00.

30) Persediaan Karcis

Merupakan saldo persediaan karcis per 31 Desember 2019 sebesar Rp672.115.769,25 dan per 31 Desember 2018 Rp667.973.555,00 rincian dapat dilihat pada tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Tabel. 5.108. Rincian Persediaan Karcis

No.	Uraian	2019 (Rp.)	2018 (Rp.)
1	Dinas Perhubungan	41.060.250,00	41.332.500,00
2	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	560.316.269,25	543.573.555,00
3	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	70.739.250,00	83.067.500,00
JUMLAH		672.115.769,25	667.973.555,00

31) Persediaan Aspal

Merupakan saldo persediaan aspal per tanggal 31 Desember 2019 dan per tanggal 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp1.440.191.500,00 dan Rp652.152.209,00 rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 5.109. Rincian Persediaan Aspal

No.	Uraian	2019 (Rp.)	2018 (Rp.)
1	Dinas Pekerjaan Umum	963.160.000,00	6.622.709,00
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	477.031.500,00	645.529.500,00
JUMLAH		1.440.191.500,00	652.152.209,00

32) Persediaan Perlengkapan Komputer

Merupakan saldo persediaan Perlengkapan Komputer yang berada per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.294.025.029,00 dan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp868.974.361,00 rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 5.110. Rincian Persediaan Perlengkapan Komputer

No.	Uraian	2019 (Rp.)	2018 (Rp.)
1	Dinas Sosial	1.037.500,00	0,00
2	Dinas Lingkungan Hidup	100.000,00	0,00
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.268.663.179,00	825.443.011,00
4	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.525.400,00	1.047.800,00
5	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	19.367.950,00	39.492.550,00
6	Kecamatan Slawi	321.000,00	264.000,00
7	Kecamatan Warureja	134.000,00	0,00
8	Inspektorat	1.876.000,00	0,00
9	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	2.727.000,00
JUMLAH		1.294.025.029,00	868.974.361,00

33) Persediaan Alat-Alat Rumah Tangga

Merupakan saldo persediaan alat-alat rumah tangga yang berada per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.985.600,00 dan saldo per 31



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Desember 2018 sebesar Rp12.734.800,00 rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 5.111. Rincian Persediaan Alat – alat Rumah Tangga

No.	Uraian	2019 (Rp.)	2018 (Rp.)
1	Dinas Sosial	1.921.500,00	0,00
2	Dinas Perhubungan	238.100,00	0,00
3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	6.729.800,00
4	Kecamatan Dukuhturi	0,00	625.000,00
5	Kecamatan Kedungbanteng	826.000,00	826.000,00
6	Kecamatan Warurejo	0,00	4.554.000,00
JUMLAH		2.985.600,00	12.734.800,00

34) Persediaan Barang Yang akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga

Merupakan saldo persediaan barang yang akan Diserahkan kepada pihak ketiga per 31 Desember 2019 sebesar Rp149.139.645,00 dan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp339.872.861,00 rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 5.112. Rincian Persediaan Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat

No.	Uraian	2019 (Rp.)	2018 (Rp.)
1	Dinas Sosial	2.400.000,00	4.800.000,00
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	70.881.005,00	310.430.861,00
3	Dinas Perhubungan	75.858.640,00	24.642.000,00
JUMLAH		149.139.645,00	339.872.861,00

35) Persediaan Smartcard

Merupakan saldo persediaan Smartcard Pada Dinas Perhubungan Saldo per 31 desember 2019 adalah sebesar Rp132.500.000,00.

5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang

Akun ini menggambarkan jumlah Investasi Permanen dan Non Permanen untuk tahun 2019 sebesar Rp201.362.819.011,09 dan tahun 2018 sebesar Rp187.420.693.303,04 yaitu berupa Investasi Permanen.

Akun ini menggambarkan jumlah dana milik Pemerintah Kabupaten Tegal yang ditempatkan untuk jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi, dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) Kabupaten Tegal pada Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah (BUMD/PD),



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

BPR/BKK dan lainnya. Saldo dinilai dengan metode biaya untuk kepemilikan kurang dari 20% dan metode ekuitas untuk metode kepemilikan lebih dari 20%. Jumlah saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp201.362.819.011,09 dan 2018 sebesar Rp187.420.693.303,04.

1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2019 sebesar Rp201.362.819.011,09 dan 2018 sebesar Rp187.420.693.303,04 berupa penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMD.

a) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD/PD per 31 Desember 2019 sebesar Rp201.362.819.011,09 dan Tahun 2018 sebesar Rp187.420.693.303,04 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.113. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD

NO	Uraian	2018 (Rp)	Penyertaan Modal 2019	Metode Ekuitas	2019 (Rp)
(1)	Bank Jateng	41.736.000.000,00	6.349.000.000,00		48.085.000.000,00
(2)	PDAM	103.875.898.171,00	3.000.000.000,00	4.906.089.320,00	111.781.987.491,00
(3)	PRPP Jateng, Semarang	407.200.000,00			407.200.000,00
(4)	PD BPR BKK Kabupaten Tegal	10.885.275.264,52		389.685.698,57	11.274.960.963,09
(5)	PT BKK JATENG CABANG KAB TEGAL	13.418.563.832,52		(1.168.563.832,52)	12.250.000.000,00
(6)	Bank TGR	17.097.756.035,00		465.914.522,00	17.563.670.557,00
	Jumlah	187.420.693.303,04	9.349.000.000,00	4.593.125.708,05	201.362.819.011,09

(1)PMPD Kabupaten Tegal pada Bank Jateng merupakan penyertaan saham biasa dan dinilai dengan metode biaya karena kepemilikannya kurang dari 20%. Saldo per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp48.085.000.000,00 atau 1,33% dan saldo Per 31 Desember 2018 sebesar Rp41.736.000.000,00.

(2)PMPD pada PDAM Kabupaten Tegal merupakan penyertaan saham, yang dinilai dengan metode ekuitas karena kepemilikannya 100%. Saldo per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp111.678.396.491,03 dan Per 31 Desember 2018 sebesar Rp103.875.898.171,00. Jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal pada PDAM Kabupaten Tegal sampai dengan 31 Desember adalah sebesar Rp55.942.639.127,00.

(3)PMPD pada PRPP Jateng, Semarang merupakan penyertaan saham Kabupaten Tegal kepada PT. PRPP Jateng, dinilai dengan



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

metode biaya karena kepemilikannya kurang dari 20%. Saldo per 31 Desember 2019 tidak mengalami perubahan dari jumlah penyertaan Tahun 2018 sebesar Rp407.200.000,00

- (4) PMPD pada PD BPR-BKK Kabupaten Tegal merupakan penyertaan saham, yang Tahun 2019 dinilai dengan metode ekuitas karena kepemilikannya lebih dari 20%. Saldo per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp11.274.960.963,09 dan Rp10.885.275.264,52. Nilai Modal disetor Pemerintah Kabupaten Tegal Pada PD BPR-BKK Kabupaten Tegal sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp7.350.000.000,00. Perhitungan nilai penyertaan pada BPR BKK Kabupaten Tegal per 31 Desember 2019 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.114. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BPR-BKK Kabupaten Tegal

No.	Investee	Modal Disetor	Cadangan	Laba (Rugi)	Jumlah	Hak Pemkab Tegal	
						%	Rp
1	BPR BKK Kabupaten Tegal	14.730.000.000,00	4.856.087.172,00	3.009.855.003,00	22.595.942.175,00	49,90	11.274.960.963,09
	Jumlah	14.730.000.000,00	4.856.087.172,00	3.009.855.003,00	22.595.942.175,00		11.274.960.963,09

- (5) PMPD pada BKK Slawi merupakan penyertaan saham, yang Tahun 2018 dinilai dengan metode ekuitas karena kepemilikannya lebih dari 20%, saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp13.418.563.832,52 . Pada Tahun 2019 PD BKK Slawi melakukan merger dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi PT BKK Jawa Tengah Cabang Kabupaten Tegal dengan demikian kepemilikan penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal menjadi 3,62%. Penyertaan Modal Pada PT BKK Jawa Tengah cabang Kabupaten Tegal kurang dari 20% dinilai dengan metode biaya sehingga Penyertaan Modal Pada PT BKK Jawa Tengah cabang Kabupaten Tegal adalah sebesar Rp12.250.000.000,00.

- (6) Penyertaan pada Bank TGR merupakan penyertaan Pemerintah Daerah kepada Bank TGR, yang Tahun 2019 dinilai dengan metode ekuitas karena kepemilikannya 100%. Saldo per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp17.563.670.557,00 dan Rp17.097.756.035,00. Nilai Modal disetor Pemerintah Kabupaten pada PD BPR Bank TGR adalah sebesar Rp15.000.000.000,00.

Perhitungan nilai penyertaan pada Bank TGR per 31 Desember 2019 disajikan dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Tabel 5.115. Investasi pada Bank TGR

No.	Investee	Modal Disetor	Cadangan	Laba (Rugi)	Jumlah	Hak Pemkab Tegal	
						%	Rp
1	Bank TGR	15.000.000.000,00	1.084.758.431,00	1.478.912.126,00	17.563.670.557,00	100	17.563.670.557,00
	Jumlah	15.000.000.000,00	1.084.758.431,00	1.478.912.126,00	17.563.670.557,00		17.563.670.557,00

5.3.1.3. Aset Tetap

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan milik Pemerintah Kabupaten Tegal berupa aset tetap yang dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Penyajian Nilai Aset Tetap dalam Neraca LKPD Tahun 2019 menggunakan metode kapitalisasi atas realisasi belanja modal Tahun 2019 ditambah dengan nilai administratif Aset Tetap yang ada dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2018. Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal. Pada Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Tegal telah melakukan penyusutan terhadap aset tetap dengan pengecualian tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, sedangkan untuk metode penyusutan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan Per Periode} : \frac{\text{Nilai Yang Disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Berdasarkan catatan dari Organisasi Perangkat Daerah nilai Aset Tetap untuk Tahun 2019 sebesar Rp2.884.627.435.209,18 dan Tahun 2018 sebesar Rp2.711.651.573.752,72 yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.116 Aset Tetap

Uraian		2019 (Rp)	2018 (Rp)
a.	Tanah	632.032.486.448,00	658.586.320.676,00
b.	Peralatan dan mesin	651.845.319.992,80	549.694.166.077,80
c.	Gedung dan Bangunan	1.236.209.273.796,00	1.109.711.114.618,00
d.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.026.763.797.255,00	1.851.964.429.286,00
e.	Aset Tetap Lainnya	138.350.549.563,42	111.580.782.721,46
f.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.832.453.031,00	14.898.078.786,00
g.	Akumulasi Penyusutan	(1.803.406.444.877,04)	(1.584.783.318.412,54)
Jumlah Aset Tetap		2.884.627.435.209,18	2.711.651.573.752,72

Mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap dalam Tahun Anggaran 2019 disajikan dalam tabel sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Tabel 5.117 Mutasi Aset Tetap

Aktiva Tetap	Saldo	Mutasi Tahun 2019		Saldo
	Per 31 Desember 2018	Penambahan	Pengurangan	Per 31 Desember 2019
Tanah	658.586.320.676,00	533.703.872,00	27.087.538.100,00	632.032.486.448,00
Peralatan dan Mesin	549.694.166.077,80	133.231.632.342,00	31.080.478.427,00	651.845.319.992,80
Gedung dan Bangunan	1.109.711.114.618,00	195.910.834.838,00	69.412.675.660,00	1.236.209.273.796,00
Jalan, Jembatan dan Irigasi	1.851.964.429.286,00	266.649.876.477,00	91.850.508.508,00	2.026.763.797.255,00
Aset Tetap lainnya	111.580.782.721,46	27.409.917.180,00	640.150.338,04	138.350.549.563,42
Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	14.898.078.786,00	2.832.453.031,00	14.898.078.786,00	2.832.453.031,00
Akumulasi Penyusutan	(1.584.783.318.412,54)	245.415.346.647,78	26.792.220.183,28	(1.803.406.444.877,04)
Jumlah	2.711.651.573.752,72	871.983.764.387,78	261.761.650.002,32	2.884.627.435.209,18

a. Tanah

Nilai Aktiva Tetap Tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal per 31 Desember 2018 dan 2019 masing-masing sebesar Rp658.586.320.676,00 dan Rp632.032.486.448,00,00. Adapun rincian penambahan dan pengurangan aset tetap tanah pemerintah daerah Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

- Penambahan aset tetap tanah dari Belanja Bantuan Operasional BOS Rp19.600,00
- Penambahan aset tetap tanah dari Pengakuan Aset Tetap Rp220.320.000,00
- Penambahan aset tetap tanah dari koreksi pencatatan sebesar Rp1,00
- Penambahan aset tetap tanah dari kapitalisasi biaya pensertifikatan tanah pada Dinas Perumahan, dan Kawasan Permukiman sebesar Rp118.392.271,00
- Penambahan aset tetap tanah dari reklasifikasi KIB sebesar Rp194.972.000,00
- Pengurangan aset tetap tanah dari penghapusan Tanah Rp150.635.000,00
- Pengurangan aset tetap tanah dari Pemanfaatan sebesar Rp300.000.000,00 oleh disewakan kepada Pihak Ketiga yang terdapat pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.
- Pengurangan aset tetap tanah dari Pemanfaatan sebesar Rp26.636.883.500,00 karena tanah tersebut berupa bengkok disewakan kepada masyarakat. Tanah tersebut terdapat pada Kecamatan Slawi dan Kecamatan Kramat.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

i. Pengurangan aset tetap tanah ke Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp19.600,00

Sedangkan untuk rincian akun Aset Tetap Tanah pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Tanah Persil

Saldo Tanah Persil pada tahun 2019 sebesar Rp144.023.117.559,00

2. Tanah Non Persil

Saldo Tanah Non Persil pada tahun 2019 sebesar Rp35.257.240.890,00.

3. Lapangan

Saldo Lapangan pada tahun 2019 sebesar Rp479.570.638.828,00.

b. Peralatan dan Mesin

Aktiva Tetap Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Kabupaten Tegal adalah peralatan dan mesin yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tegal untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp549.694.166.077,80 dan Rp651.845.319.992,80. Adapun rincian penambahan dan pengurangan Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

a. Penambahan Aset tetap Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal sebesar Rp60.198.204.329,00

b. Penambahan Aset tetap Peralatan dan Mesin dari Belanja Barang dan Jasa Rp565.519.246,00

c. Penambahan Aset tetap Peralatan dan Mesin dari Belanja BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Rp473.205.555,00

d. Penambahan Aset tetap Peralatan dan Mesin dari Hibah sebesar Rp2.482.591.980,00

e. Penambahan Aset tetap Peralatan dan Mesin dari Pengakuan Aset tetap sebesar Rp46.270.000,00

f. Penambahan Aset tetap Peralatan dan Mesin dari Mutasi antar OPD sebesar Rp2.194.110.206,00

g. Penambahan Aset tetap Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi Antar KIB sebesar Rp22.251.391.636,00

h. Pengurangan Aset tetap Peralatan dan Mesin dari Penghapusan Aset tetap sebesar Rp1.727.766.508,00

i. Pengurangan Aset tetap Peralatan dan Mesin dari Ekstrakomptabel sebesar Rp6.252.475,00

j. Pengurangan Aset tetap Peralatan dan Mesin dari Mutasi antar OPD sebesar Rp2.194.110.206,00

k. Pengurangan Aset tetap Peralatan dan Mesin dari reklasifikasi antar KIB adalah sebesar Rp21.304.498.696,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

- l. Pengurangan Aset tetap Peralatan dan Mesin dari Belanja Barang dan Jasa adalah sebesar Rp2.719.669.516,00
 - m. Pengurangan Aset tetap Peralatan dan Mesin dari reklasifikasi Aset Tak Berwujud adalah sebesar Rp44.202.400,00
 - n. Pengurangan Aset tetap Peralatan dan Mesin dari Hibah keluar sebesar Rp240.200.000,00
 - o. Pengurangan Aset tetap Peralatan dan Mesin dari Koreksi pencatatan sebesar Rp2.825.561.385,96
Sedangkan untuk rincian akun Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
1. Alat Besar Darat
Saldo Alat Besar Darat pada tahun 2019 sebesar Rp26.711.526.393,00
 2. Alat Besar Apung
Saldo Alat Besar Apung pada tahun 2019 sebesar Rp80.530.500,00.
 3. Alat Bantu
Saldo Alat Bantu pada tahun 2019 sebesar Rp6.626.041.938,92
 4. Alat Angkutan Darat Bermotor
Saldo Alat Angkutan Darat Bermotor pada tahun 2019 sebesar Rp106.154.576.061,28
 5. Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
Saldo Alat Angkutan Darat Tak Bermotor pada tahun 2019 sebesar Rp2.906.373.992,00.
 6. Alat Angkutan Apung Bermotor
Saldo Alat Angkutan Apung Bermotor pada tahun 2019 sebesar Rp41.999.909,00.
 7. Alat Angkutan Apung Tak Bermotor
Saldo Alat Angkutan Apung Tak Bermotor pada tahun 2019 sebesar Rp67.654.881,00
 8. Alat Angkutan Bermotor Udara
Saldo Alat Angkutan Bermotor Udara pada tahun 2019 sebesar Rp685.000,00
 9. Alat Bengkel Bermesin
Saldo Alat Bengkel Bermesin pada tahun 2019 sebesar Rp5.234.475.871,56
 10. Alat Bengkel Tak Bermesin
Saldo Alat Bengkel Tak Bermesin pada tahun 2019 sebesar Rp2.800.126.004,00.
 11. Alat Ukur
Saldo Alat Ukur pada tahun 2019 sebesar Rp3.181.910.930,00.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

12. Alat Pengolahan
Saldo Alat Pengolahan pada tahun 2019 sebesar Rp2.897.269.211,00.
13. Alat Kantor
Saldo Alat Kantor pada tahun 2019 sebesar Rp35.196.151.894,00
14. Alat Rumah Tangga
Saldo Alat Rumah Tangga pada tahun 2019 sebesar Rp104.746.469.572,08
15. Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
Saldo pada 2018 sebesar Rp0,00 dan pada tahun 2019 sebesar Rp9.985.446.134,49
16. Alat Studio
Saldo Alat Studio pada tahun 2019 sebesar Rp14.555.691.671,66
17. Alat Komunikasi
Saldo Alat Komunikasi pada tahun 2019 sebesar Rp4.336.628.200,40
18. Peralatan Pemancar
Saldo Peralatan Pemancar pada tahun 2019 sebesar Rp1.030.248.857,00
19. Alat Kedokteran
Saldo Alat Kedokteran pada tahun 2019 sebesar Rp140.677.890.312,43
20. Alat Kesehatan Umum
Saldo Alat Kesehatan Umum pada tahun 2019 sebesar Rp230.218.739,00
21. Unit Alat Laboratorium
Saldo Unit Alat Laboratorium pada tahun 2019 sebesar Rp Rp32.315.229.789,72
22. Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir
Saldo Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir pada tahun 2019 sebesar Rp73.071.026,00.
23. Alat Peraga Praktek Sekolah
Saldo pada 2018 sebesar Rp0,00 dan pada tahun 2019 sebesar Rp25.700.163.249,93
24. Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika
Saldo Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika pada tahun 2019 sebesar Rp22.097.000,00
25. Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan
Saldo Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan pada tahun 2019 sebesar Rp25.334.500,00
26. Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory
Lainnya
Saldo Radiation Aplication And Destructive Testing Laboratory Lainnya pada tahun 2019 sebesar Rp75.247.000,00



27. Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
Saldo Alat Laboratorium Lingkungan Hidup pada tahun 2019 sebesar Rp1.178.055.492,00
28. Peralatan Laboratorium Hydrodinamica
Saldo Peralatan Laboratorium Hydrodinamika pada tahun 2019 sebesar Rp341.498.500,00
29. Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi
Saldo Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi pada tahun 2019 sebesar Rp76.085.700,00
30. Senjata Api
Saldo Senjata api pada tahun 2019 sebesar Rp17.762.960,00
31. Persenjataan Non Senjata Api
Saldo Persenjataan Non senjata api pada tahun 2019 sebesar Rp536.584.927,00
32. Komputer Unit
Saldo Komputer Unit pada tahun 2019 sebesar Rp54.742.029.703,65
33. Peralatan Komputer
Saldo Peralatan Komputer pada tahun 2019 sebesar Rp21.882.694.153,69
34. Alat Sar
Saldo Alat Sar pada tahun 2019 sebesar Rp1.216.641.375,00
35. Alat Kerja Penerbangan
Saldo pada 2018 sebesar Rp0,00 dan pada tahun 2019 sebesar Rp192.644.000,00
36. Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat
Saldo Rambu-rambu Lalu Lintas Darat pada tahun 2019 sebesar Rp45.665.598.443,00
37. Peralatan Olah Raga
Saldo Peralatan Olah Raga pada tahun 2019 sebesar Rp322.666.100,00

c. Gedung dan Bangunan

Aktiva tetap Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal per 31 Desember 2018 dan 2019 masing-masing sebesar Rp1.109.711.114.618,00 dan Rp1.236.209.273.796,00. Adapun rincian penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

- a. Penambahan Aset tetap gedung dan bangunan dari Belanja Modal sebesar Rp149.596.577.668,00
- b. Penambahan Aset tetap gedung dan bangunan dari Belanja Barang dan jasa Rp318.900.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

- c. Penambahan Aset tetap gedung dan bangunan dari Belanja Bantuan Operasional Sekolah Rp150.669.846,00
- d. Penambahan Aset tetap gedung dan bangunan dari Penerimaan Hibah Rp2.639.441.000,00
- e. Penambahan Aset tetap gedung dan bangunan dari Mutasi OPD Rp4.373.691.531,00
- f. Penambahan Aset tetap gedung dan bangunan dari Reklasifikasi antar KIB Rp14.817.532.885,00
- g. Pengurangan Aset tetap gedung dan bangunan dari Penghapusan Rp1.194.679.000,00
- h. Pengurangan Aset tetap gedung dan bangunan dari ekstrakom Rp197.787.941,00
- i. Pengurangan Aset tetap gedung dan bangunan dari mutasi OPD sebesar Rp4.373.691.531,00
- j. Pengurangan Aset tetap gedung dan bangunan dari reklasifikasi antar KIB sebesar Rp13.860.125.932,00
- k. Pengurangan Aset tetap gedung dan bangunan dari reklas barang habis pakai sebesar Rp2.006.787.400,00
- l. Pengurangan Aset tetap gedung dan bangunan dari reklas aset tak berwujud sebesar Rp47.251.435,00
- m. Pengurangan Aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp44.428.779.208,00 dari reklas migrasi rekening 108
- n. Pengurangan Aset Tetap gedung dan bangunan sebesar Rp2.712.013.031,00 karena reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan

Sedangkan untuk rincian akun aset tetap Gedung dan Bangunan pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Bangunan Gedung Tempat Kerja

Saldo Bangunan Gedung Tempat Kerja pada tahun 2019 sebesar Rp1.173.373.927.197,00

2. Bangunan Gedung Tempat Tinggal

Saldo Bangunan Gedung Tempat Tinggal pada tahun 2019 sebesar Rp26.541.837.940,00

3. Candi/Tugu Peringatan/Prasasti

Saldo Candi/Peringatan/Prasasti pada tahun 2019 sebesar Rp11.927.443.172,00



4. Tugu/Tanda Batas

Saldo Tugu/Tanda Batas pada Tahun 2019 sebesar Rp24.366.065.487,00

d. Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan

Aktiva tetap jalan, jembatan, irigasi dan jaringan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal per 31 Desember 2018 dan 2019 masing-masing sebesar Rp1.851.964.429.286,00 dan Rp2.026.763.797.255,00. Adapun rincian penambahan dan pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebagai berikut:

1. Penambahan Aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari belanja modal sebesar Rp198.602.231.366,00
2. Penambahan Aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja barang dan jasa sebesar Rp19.659.000,00
3. Penambahan Aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Belanja Barang dan jasa sebesar Rp131.569.730,00
4. Penambahan Aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp67.896.416.381,00
5. Pengurangan Aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari penghapusan aset tetap sebesar Rp798.198.000,00
6. Pengurangan Aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp65.026.663.257,00
7. Pengurangan Aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Belanja Barang dan jasa sebesar Rp13.287.180,00

Sedangkan untuk rincian akun aset tetap lainnya pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Jalan

Saldo Jalan pada tahun 2019 sebesar Rp1.359.513.933.908,00

2. Jembatan

Saldo Jembatan pada tahun 2019 sebesar Rp180.738.975.318,00

3. Bangunan Air Irigasi

Saldo Bangunan Air Irigasi pada tahun 2019 sebesar Rp176.510.485.715,00

4. Bangunan Pengairan Pasang Surut

Saldo Bangunan Pengairan Pasang Surut pada tahun 2019 sebesar Rp18.550.947.085,00

5. Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder

Saldo Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder pada tahun 2019 sebesar Rp492.223.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

6. Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam

Saldo Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam pada tahun 2019 sebesar Rp168.526.645.858,00

7. Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah

Saldo Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah pada tahun 2019 sebesar Rp3.608.724.250,00

8. Bangunan Air Bersih/Air Baku

Saldo Bangunan Air Bersih/Air Baku pada tahun 2019 sebesar Rp45.820.199.892,00

9. Bangunan Air Kotor

Saldo Bangunan Air Kotor pada tahun 2019 sebesar Rp16.426.321.001,00

10. Instalasi Air Bersih/Air Baku

Saldo Instalasi Air Bersih/Air Baku pada tahun 2019 sebesar Rp1.944.313.420,00

11. Instalasi Air Kotor

Saldo Instalasi Air Kotor pada tahun 2019 sebesar Rp6.180.424.575,00

12. Instalasi Pengolahan Sampah

Saldo Instalasi Pengolahan Sampah pada tahun 2019 sebesar Rp117.198.000,00

13. Instalasi Pembangkit Listrik

Saldo Instalasi Pembangkit Listrik pada tahun 2019 sebesar Rp16.359.700,00

14. Instalasi Gardu Listrik

Saldo Instalasi Gardu Listrik pada tahun 2019 sebesar Rp7.717.297.853,00

15. Instalasi Gas

Saldo Instalasi Gas pada tahun 2019 sebesar Rp910.614.528,00

16. Instalasi Pengaman

Saldo Instalasi Pengaman pada tahun 2019 sebesar Rp149.049.400,00

17. Jaringan Air Minum

Saldo Jaringan Air Minum pada tahun 2019 sebesar Rp10.578.300,00

18. Jaringan Listrik

Saldo Jaringan Listrik pada tahun 2019 sebesar Rp39.134.337.756,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

19. Jaringan Telepon

Saldo Jaringan Telepon pada tahun 2019 sebesar Rp390.568.298,00

20. Jaringan Gas

Saldo Jaringan gas pada tahun 2019 sebesar Rp4.599.398,00

e. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aktiva milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal per 31 Desember 2018 dan 2019 yang masing-masing bernilai Rp111.580.782.721,46 dan Rp138.350.549.563,42. Adapun rincian penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut :

1. Penambahan Aset Tetap Lainnya dari Belanja Modal sebesar Rp25.996.469.295,00
2. Penambahan Aset Tetap Lainnya dari Belanja Bantuan Operasional Sekolah sebesar Rp181.049.648,00
3. Penambahan Aset Tetap Lainnya dari Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp349.867.500,00
4. Penambahan Aset Tetap Lainnya dari Koreksi Pencatatan sebesar Rp882.530.737,00
5. Pengurangan Aset Tetap Lainnya dari Reklasifikasi Antar KIB sebesar Rp252.955.500,00
6. Pengurangan Aset Tetap Lainnya dari Koreksi pencatatan sebesar Rp387.194.838,00

Sedangkan untuk rincian akun aset tetap lainnya pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Bahan Perpustakaan Tercetak
Saldo Bahan Perpustakaan Tercetak pada tahun 2019 sebesar Rp128.861.231.189,46
2. Bahan Perpustakaan Terekam Dan Bentuk Mikro
Saldo Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro pada tahun 2019 sebesar Rp29.093.050,00
3. Kartografi, Naskah Dan Lukisan
Saldo Kartografi, Naskah dan Lukisan tahun 2019 sebesar Rp436.888.353,00
4. Musik
Saldo Musik pada tahun 2019 sebesar Rp51.270.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

5. Karya Grafika (Graphic Material)

Saldo pada 2018 sebesar Rp0,00 dan pada tahun 2019 sebesar Rp14.052.999,00

6. Barang Bercorak Kesenian

Saldo Barang Bercorak Kesenian pada tahun 2019 sebesar Rp6.860.323.783,00

7. Alat Bercorak Kebudayaan

Saldo Alat Bercorak Kebudayaan pada tahun 2019 sebesar Rp738.435.434,00

8. Tanda Penghargaan

Saldo Tanda Penghargaan pada tahun 2019 sebesar Rp8.132.000,00

9. Hewan Piaraan

Saldo Hewan Piaraan pada tahun 2019 sebesar Rp829.740.000,00

10. Ternak

Saldo Ternak pada tahun 2019 sebesar Rp460.000,00

11. Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)

Saldo Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip) pada tahun 2019 sebesar Rp56.434.037,00

12. Tanaman

Saldo Tanaman pada tahun 2019 sebesar Rp292.397.517,96

13. Aset Tetap Dalam Renovasi

Saldo Aset Tetap Dalam Renovasi pada tahun 2019 sebesar Rp172.091.200,00

e. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah berupa kegiatan yang belum dapat diselesaikan pelaksanaannya. Untuk Tahun Anggaran 2018 Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebesar Rp14.898.078.786,00 yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kesehatan. Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2018 telah dilakukam mutasi sebagai aset tetap pada Tahun 2019 Bangunan Gedung Kesehatan ke Dinas Kesehatan pada Puskesmas Penusupan dan Puskesmas Slawi sebesar Rp4.519.501.072,00. Untuk Tahun Anggaran 2019 Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebesar Rp2.832.453.031,00. Pada Dinas Kesehatan Belanja modal DED pembangunan bangunan



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Gedung kesehatan sebesar Rp49.500.000,00 berdasarkan SPK 050/224/DED-KLBK/PP/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019 senilai Rp49.500.000,00.

Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Tata Ruang dan Pertanahan berupa pembangunan Pondasi Pasar Jatinegara senilai Rp2.712.013.031,00. Adapun rincian pembayarannya adalah sebagai berikut :

- Uang muka 15% berdasarkan SP No.050/07/06/SP/Gedung Kantor BG/IX/2019 tanggal 11 September 2019 senilai Rp592.500.000,00 sesuai SP2D Nomor 1733/LS-BJ/2019 tanggal 16 Oktober 2019;
- Pembayaran Termin I berdasarkan SP No.050/07/06/SP/Gedung Kantor BG/IX/2019 tanggal 11 September 2019 dan Adendum ke 1 No.050/07/17/ADD-1/Geedungkantor.Bg/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 senilai Rp1.007.250.000,00 sesuai SP2D No.2552/LS-BJ/2019 tanggal 9 Desember;
- Pembayaran pengawasan fisik jasa konsultan pengawas pembangunan pasar Jatinegara berdasarkan SPK No.050/07/01.1/SP/Pengawasan.Gedung Kantor.BG/IX/2019 tanggal 11 September 2019 dan Adendum ke 1 No.050/07/17/ADD-I/GedungKantor.BG/XII/2019 tanggal 9 Desember 2019 senilai Rp46.799.220,00 sesuai SP2D Nomor 3287/LS-BJ/2019 tanggal 31 Desember 2019;
- Pembayaran fisik 59,99% pembangunan pasar Jatinegara sesuai SPK 050//07/06/SP/GedunKantor.BG/IX/2019 tanggal 11 September 2019 dan Adendum ke 2 Nomor 050/07/13/ADD-2/GedungKantor.BG/XII/2019 tanggal 9 Desember 2019 senilai Rp947.963.000,00 sesuai SP2D No.3291/LS-BJ/2019 tanggal 31 Desember 2019
- Pembayaran biaya penunjang perolehan Pasar Jatinegara senilai Rp117.500.811,00 melalui proses SP2D GU-Ganti Uang

Sedangkan untuk pasar Bojong senilai Rp10.378.577.714,00 di reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan menjadi aset tetap gedung dan bangunan karena sejak awal tahun 2019 pasar tersebut sudah digunakan oleh masyarakat meskipun belum ada Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dari rekanan.

Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah terdapat belanja modal sebesar Rp70.940.000,00 untuk Penyusunan DED Bangunan Gedung Kantor berdasarkan SPK Nomor 050/24/1838/XI/2019 tanggal 1 November 2019 senilai Rp67.750.000,00 untuk pembayaran kontrak LS-Langsung sedangkan sisanya Rp3.190.000,00 merupakan biaya penunjang perolehan DED tersebut yang pembayarannya melalui proses GU-Ganti Uang



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Rincian Konstruksi Dalam pengerjaan pada tahun 2019 sebesar Rp2.832.453.031,00 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.118 Konstruksi Dalam Pengerjaan

No.	OPD (Organisasi Perangkat Daerah)	Tahun 2018	Tahun 2019
1.	Dinas Kesehatan	4.519.501.072,00	49.500.000,00
2.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	10.378.577.714,00	2.712.013.031,00
3.	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah		70.940.000,00
Jumlah		14.898.078.786,00	2.832.453.031,00

e. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.584.783.318.412,54 dan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp1.803.406.444.877,04 Adapaun rincian akumulasi penyusutan pada masing-masing organisasi perangkat daerah disajikan dalam lampiran 5.22

5.3.1.4. Aset Lainnya

Akun ini menggambarkan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tegal berupa Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset yang tidak dapat digolongkan ke dalam klasifikasi Aset Tetap per 31 Desember 2019 sebesar Rp100.561.561.581,39 dan per 31 Desember 2018 sebesar Rp118.310.028.051,65 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.119 Aset Lainnya

Uraian		2019 (Rp)	2018 (Rp)
a.	Tagihan Jangka Panjang	397.205.000,00	335.147.291,61
b.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	41.395.340.506,00	14.758.457.006,00
c.	Aset Tak Berwujud	2.515.207.575,00	2.413.753.740,00
d.	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(2.073.679.947,28)	(1.594.242.238,58)
e.	Aset Lain-lain	86.535.858.494,67	204.932.698.236,33
f.	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(28.208.370.047,00)	(102.535.785.983,71)
Jumlah		100.561.561.581,39	118.310.028.051,65

a. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Jangka Panjang merupakan Tuntutan Ganti Rugi yang merupakan pengakuan piutang TP/TGR atas kerugian daerah karena hilangnya aset daerah per 31 Desember 2019 sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Rp397.205.000,00 dan 2018 sebesar Rp335.147.291,61 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.120 Tagihan Jangka Panjang

No.	Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
1	Pengakuan Piutang TP/TGR atas hilangnya aset daerah Atas nama Ir. Khaerudin sesuai LHP Bawasda No. 356/619.c tanggal 31-12-2005 dan surat Bupati No. 951/0583/2009 Tentang Pemberitahuan Kerugian Daerah	6.250.000,00	6.250.000,00
2	Pengakuan Piutang TP/TGR atas hilangnya aset daerah Atas nama Waryono sesuai LHP Bawasda No. 356/398 tanggal 01-12-2008 dan surat Bupati No. 951/0520/2009 Tentang Pemberitahuan Kerugian Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00
3	Pengakuan Piutang TP/TGR atas hilangnya aset daerah Atas nama Saefudin sesuai LHP Bawasda No. 356/303/2008 tanggal 31-10-2008 dan surat Bupati No. 951/0518/2009 Tentang Pemberitahuan Kerugian Daerah	2.505.000,00	2.505.000,00
4	Pengakuan Piutang TP/TGR atas hilangnya aset daerah Atas nama Drs. Ali Murtado sesuai LHP Bawasda No. 356/619.c tanggal 31-12-2005 dan surat Bupati No. 951/0519/2009 Tentang Pemberitahuan Kerugian Daerah	6.250.000,00	6.250.000,00
5	Pengakuan Piutang TP/TGR atas hilangnya aset daerah Atas nama Nursidik sesuai LHP Bawasda No. 356/619.d tanggal 31-12-2005 dan surat Bupati No. 951/0522/2009 Tentang Pemberitahuan Kerugian Daerah	6.250.000,00	6.250.000,00
6	Pengakuan Piutang TP/TGR atas hilangnya aset daerah Atas nama Drs. H. Hartanto, MM sesuai LHP Bawasda No. 356/301.a tanggal 29-10-2008 dan surat Bupati No. 951/0521/2009 Tentang Pemberitahuan Kerugian Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00
7	Pengakuan Piutang TP/TGR atas kerugian daerah Atas nama CV Bina Jaya sesuai LHP BPKP dan Bawasprop Jateng	0,00	3.106.340,12
8	Pengakuan Piutang TP/TGR atas kerugian daerah Atas nama CV Purwa Rahayu sesuai LHP BPKP dan Bawasprop Jateng	0,00	4.697.240,00
9	Pengakuan Piutang TP/TGR atas kerugian daerah Atas nama CV Manara Mas sesuai LHP BPKP dan Bawasprop Jateng	0,00	14.638.711,49
10	Pengakuan Piutang TP/TGR atas hilangnya aset daerah Atas nama Abdul Fatah, SIP sesuai LHP Inspektorat No 356/503 tanggal 6 Juli 2010 dan surat Bupati No. 951/2084/2010 tanggal 4 Oktober 2010 Tentang Pemberitahuan Kerugian Daerah	6.300.000,00	6.300.000,00
11	Pengakuan Piutang TP/TGR atas hilangnya aset daerah Atas nama Hariyanto, A.Md sesuai LHP Inspektorat No 356/288/2011 tanggal 31 Maret 2011 dan surat Bupati No. 951/2714/2011 tanggal 10 Juni 2011 Tentang Pemberitahuan Kerugian Daerah	10.300.000,00	10.300.000,00
12	Pengakuan Piutang TP/TGR atas hilangnya aset daerah atas nama Drs. Rosyid	115.000.000,00	115.000.000,00
13	Pengakuan Piutang TP/TGR atas hilangnya aset daerah Atas nama Rustoyo sesuai LHP Inspektorat No 356/187/2012 tanggal 16 Maret 2012 dan surat Bupati No. 951/1865/2012 tanggal 23 April 2012 Tentang Pemberitahuan Kerugian Daerah	32.250.000,00	32.250.000,00
14	Pengakuan Piutang TP/TGR atas hilangnya aset daerah Atas nama Fajar Rokhwidi, SIP sesuai LHP Inspektorat No 356/040/2011 tanggal 9 Januari 2011 dan surat Bupati No. 951/2688/2011 tanggal 8 Juni 2011 Tentang Pemberitahuan Kerugian Daerah	104.000.000,00	104.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No.	Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
15	Pengakuan Piutang TP/TGR atas hilangnya aset daerah atas nama Imam Abadi Soebedjo	8.600.000,00	8.600.000,00
16	Pengakuan Piutang atas hilangnya Aset Daerah an Komsari, SIP sesuai Surat Keputusan Pembebanan Penggantian kerugian Daerah Sementara (SKPPKS) nomor 030/25 /1112/ tahun 2019	17.000.000,00	
17	Pengakuan Piutang atas hilangnya Aset Daerah an Ari DWI CAHYANI, SKm, MKes sesuai Surat Keputusan Pembebanan Penggantian kerugian Daerah Sementara (SKPPKS) nomor 030/25 /1112/ tahun 2019	14.300.000,00	
18	Pengakuan Piutang TP/TGR atas hilangnya aset daerah Atas nama Ir. Astono sesuai LHP Inspektorat No 356/15/264/2015 tanggal 6 Februari 2015 dan surat Bupati No. 721/2015 tanggal 3 desember 2015 Tentang Pemberitahuan Kerugian Daerah	17.100.000,00	
19	Pengakuan Piutang TP/TGR atas hilangnya aset daerah Atas nama Drs. Nurholis Sail	27.900.000,00	
20	Pengakuan Piutang TP/TGR atas hilangnya aset daerah Atas nama Nuridin sesuai LHP Inspektorat No 356/15/420/2012 tanggal 13 Februari 2015 dan surat Bupati No. 720/2015 tanggal 2 desember 2015 Tentang Pemberitahuan Kerugian Daerah	8.200.000,00	
Jumlah		397.205.000,00	335.147.291,61

Selain TP/TGR atas hilangnya aset daerah terdapat juga kerugian dari pihak ketiga yang sedang dalam proses sebesar Rp584.885.804,61, informasi kerugian hasil pemeriksaan BPK sebesar Rp14.033.478.823,71 dan informasi kerugian hasil pemeriksaan APIP sebesar Rp218.532.960,00.

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tegal dengan pihak ketiga dalam rangka pembangunan suatu area yang akan dimanfaatkan dan dikelola bersama selama jangka waktu tertentu. Aset kemitraan dengan pihak ketiga dicatat sebesar nilai investasi yang disertakan Pemerintah Kabupaten Tegal di dalam perjanjian kerjasama. Saldo per 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp41.395.340.506,00 dan saldo tahun Anggaran 2018 sebesar Rp14.758.457.006,00. Adapun rinciannya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.121 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

No.	Uraian	2019(Rp)	2018 (Rp)
1)	Pembangunan Pasar Trayeman	594.342.025,00	594.342.025,00
2)	Pembangunan Pasar Banjaran	2.260.075.000,00	2.260.075.000,00
3)	Pembangunan Pusat Perdagangan dan Rekreasi Slawi	6.295.750.000,00	6.295.750.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No.	Uraian	2019(Rp)	2018 (Rp)
4)	Pembangunan LIK Takaru	300.000.000,00	300.000.000,00
5)	Kerjasama Pemanfaatan Aset Tetap	31.945.173.481,00	5.308.289.981,00
	Jumlah	41.395.340.506,00	14.758.457.006,00

Terdapat Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga *terdapat* aset berupa tanah dengan luas 29.890M² dan gedung bangunan dengan luas 8.024 M² yang dimanfaatkan pihak ketiga untuk obyek wisata diantaranya untuk obyek wisata pemandian air panas guci, Pantai Purwahamba Indah dan Tirta Waduk Cacaban akantetapi pada saat itu obyek wisata masih memprihatinkan. Sehingga ada investor yang ingin mengembangkan di wilayah obyek wisata pemandian air panas guci dan pantai purwahamba indah diantaranya untuk membangun Villa, Hotel, Kolam renang dan Kafe. Investor mengembangkan obyek tersebut dengan BGS maksimal 30 tahun.

1) Pembangunan Pasar Trayeman

Merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tegal dengan PT Karsa Bayu Bangun Persada melalui Perjanjian Nomor 051/03819/1993 tanggal 1 Agustus 1993. Masa Perjanjian kerjasama selama 25 tahun. Penyertaan Pemerintah Daerah berupa tanah seluas 10.000m² yang berada dalam HPL Nomor 1 Desa Trayeman seluas 15.000 m² sesuai dengan Keputusan Kepala BPN Nomor 11/HPL/BPN/94 dengan nilai Rp562.500.000,00 dan Hak Pengelolaan HPL senilai Rp31.842.025,00 sehingga penyertaan Pemda sebesar Rp594.342.025,00. Penyertaan PT Karsa Bayu Bangun Persada sebesar biaya pembangunan kios Pasar Trayeman beserta fasilitas pendukungnya senilai Rp2.811.148.364,00 dan tanah yang terletak di Desa Trayeman seluas 12.390 m² senilai Rp74.340.500,00 sehingga total penyertaan PT Karsa Bayu Bangun Persada adalah Rp2.885.488.864,00.

Perjanjian kerjasama ini telah disetujui oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor 511.234-170 tanggal 8 Maret 1994.

Addendum perjanjian dilakukan tanggal 16 Pebruari 2002 dengan Perjanjian Nomor 573/0669/2002. Perubahan dilakukan pada Pasal 1 dan Pasal 7 yang mengubah nilai penyertaan PT Karsa Bayu Bangun Persada menjadi Rp3.103.468.864,00. Addendum ini telah mendapat persetujuan DPRD dengan Surat Keputusan Nomor 4 Tahun 2002.

Pada tanggal 19 Agustus 2009 terjadi kebakaran di los pasar Trayeman, agar pasar tersebut dapat digunakan maka dilakukan



kegiatan tanggap darurat melalui Belanja Tidak Terduga TA 2009 senilai Rp702.665.000,00 kemudian dilakukan pembangunan kembali dari TA 2010 sampai dengan TA 2012 senilai Rp12.080.000.000,00.

2) Pembangunan Pasar Banjaran

Merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tegal dengan PT Karsa Bayu Bangun Persada melalui Perjanjian Nomor 573/03200 tanggal 4 Juli 1994. Perjanjian Kerjasama selama 25 tahun. Penyertaan Pemerintah Daerah berupa tanah seluas 17.830 m² dengan nilai Rp2.194.225.000,00 dengan Hak Pengelolaan Tanah Nomor 1 Desa Tembok Banjaran sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 80/HPL/BPN/94 dan bekas bangunan Pasar Banjaran senilai Rp65.825.000,00, sehingga penyertaan Pemda sebesar Rp2.260.075.000,00. Penyertaan PT Karsa Bayu Bangun Persada sebesar biaya pembangunan Pasar Banjaran beserta fasilitas pendukungnya senilai Rp6.141.854.719,00.

Perjanjian kerjasama ini telah disetujui oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor 573-33-668 tanggal 7 Oktober 1994.

Adendum perjanjian dilakukan pada tanggal 9 Oktober 1995 dengan melalui Perjanjian Nomor 573/05123. Perubahan dilakukan pada pasal 1 dan pasal 7 yang mengubah nilai penyertaan dari PT Karsa Bayu Bangun Persada menjadi Rp6.915.520.876,00. Adendum ini telah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri Nomor 511.2-802 tanggal 8 Juli 1997.

Pada tahun 2006 terjadi kebakaran di pasar Banjaran kemudian dilakukan kegiatan tanggap darurat melalui belanja tidak terduga senilai Rp463.650.000,00.

3) Pembangunan Pusat Perdagangan dan Rekreasi Slawi

Merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tegal dengan PT Karsa Bayu Bangun Persada melalui Perjanjian Nomor 573/05296/2000, tanggal 19 Oktober 2000. Perjanjian kerjasama selama 30 tahun. Penyertaan Pemerintah Daerah berupa tanah seluas 16.618 m² yang berada dalam HPL Nomor 1/1997 sesuai Keputusan Kepala BPN Nomor 6/HPL/BPN/97 dengan nilai Rp6.231.750.000,00 dan nilai dari HPL sebesar Rp64.000.000,00, sehingga penyertaan Pemda sebesar Rp6.295.750.000,00. Penyertaan PT Karsa Bayu Bangun Persada sebesar biaya pembangunan pusat perdagangan dan rekreasi beserta fasilitas pendukungnya senilai Rp12.900.001.000,00. Perjanjian kerjasama



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

ini telah mendapat persetujuan DPRD dengan Keputusan Nomor 09/DPRD/IX/2000.

Adendum pertama dilakukan tanggal 16 Pebruari 2002 dengan Perjanjian Nomor 573/0670/2002. Perubahan dilakukan pada Pasal 1, Pasal 3, Pasal 6 dan Pasal 7, yang mengubah nilai penyertaan PT Karsa Bayu Bangun Persada menjadi Rp17.593.551.000,00. Adendum ini telah mendapat persetujuan DPRD dengan Keputusan Nomor 4 Tahun 2002.

Adendum kedua dilakukan tanggal 14 Oktober 2002 dengan Perjanjian Nomor 573/05528/2002. Perubahan dilakukan pada Pasal 1, Pasal 3, Pasal 6 dan Pasal 7 adendum pertama yang mengubah nilai penyertaan PT Karsa Bayu Bangun Persada menjadi Rp17.595.717.000,00.

4) Pembangunan LIK Takaru

Merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tegal dengan PT Karsa Bayu Bangun Persada melalui Perjanjian Nomor 573/02405/2002, tanggal 6 Juni 2002. Perjanjian Kerjasama selama 30 tahun. Penyertaan Pemerintah Daerah berupa tanah seluas 2000 m² yang berada dalam HPL Nomor 2 Dampyak sesuai Keputusan Kepala BPN Nomor 10/HPL/BPN/2003 dengan luas tanah 90.600 m² dengan nilai Rp300.000.000,00, sementara penyertaan PT Karsa Bayu Bangun Persada sebesar biaya pembangunan LIK Takaru beserta fasilitas pendukungnya senilai Rp2.101.847.500,00. Perjanjian kerjasama telah mendapat persetujuan DPRD dengan Keputusan Nomor 12 Tahun 2002.

Adendum dilakukan tanggal 4 Oktober 2002 dengan Perjanjian Nomor 573/05531/2002. Perubahan dilakukan pada Pasal 1, Pasal 3, Pasal 6 dan Pasal 7, yang mengubah nilai penyertaan PT Karsa Bayu Bangun Persada menjadi Rp2.134.847.500,00.

Pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja juga terdapat pemanfaatan pada tanah LIK yang belum dicatat sebagai berikut:

1. Kronologis Kios PT. KBBP

Setelah terbangun gedung produksi IKM di dalam LIK Takaru, kemudian dibutuhkan sarana sebagai pusat pemasaran produk unggulan, sebagaimana tertuang dalam dasar (3) perjanjian kerjasama antara Pemda Kab. Tegal dengan PT. Karsa Bayu Bangun Perkasa No. 573/02405/2002, dimana Pemda Kab. Tegal menyertakan modal berupa tanah seluas 2.000 m² dengan penyertaan sebesar Rp. 300.000.000,- sebagaimana tertuang dalam perjanjian dimaksud pasal (6).



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

2. Kronologis Bangunan Blok A01 dan A02

Setelah PT. Dwitunggal selesai membangun 20 gedung produksi tipe C, kemudian PT. Matahari SS mengajukan permohonan untuk dapat bergabung kedalam LIK Takaru. Atas kebutuhan gedung Matahari SS tersebut, maka dibangunlah 2 gedung tipe A01 dan A02 dengan luas tanah 1.800 m2.

3. Kronologis Bangunan Blok B03 dan A03

Seiring perkembangan waktu PT. Matahari SS kembali mengajukan permohonan ijin pembangunan gedung produksi yang pada akhirnya sekitar tahun 1997 dibangunlah gedung produksi pada blok A03 dan B03 dengan luas tanah 1.500 m2.

4. 40 bangunan tipe C yaitu C01 dan C40 sampai sekarang belum ditemukan dokumen pendukung atas kepemilikan bangunan yang dimaksud.

5. Bangunan B01 dan B02 dibangun sekitar akhir tahun 1987 (tanpa dokumen).

6. Bangunan pada blok A06, B06, C41 sampai dengan blok C48 merupakan bangunan yang dibangun diatas tahun 2000.

5) Kerjasama Pemanfaatan Aset Tetap

Saldo aset tetap pemerintah kabupaten Tegal yang dimanfaatkan oleh pihak lain per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp31.945.173.481,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.122 Kerjasama Pemanfaatan Aset Tetap

No.	Nama Organisasi Perangkat Daerah	Saldo 2019	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain yang dimanfaatkan
1	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat	92.534.000,00	92.534.000,00
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	11.063.332,00	11.063.332,00
3	Sekretariat Daerah	2.000.862.625,00	2.000.862.625,00
4	Kecamatan Kramat	828.358.500,00	
5	Kecamatan Slawi	26.431.825.000,00	
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	2.580.530.024,00	737.294.286,00
Jumlah		31.945.173.481,00	2.841.754.243,00

c. Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud pada pemerintah Kabupaten Tegal adalah berupa software dengan masa manfaat terbatas sehingga dilakukan amortisasi.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Amortisasai Aset Tak Berwujud dilakukan dengan Metode Garis Lurus. Untuk Software yang mengalami pengembangan aplikasi dan telah memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Aset Tak Berwujud, maka pengeluarannya akan dicatat sebagai kapitalisasi. Aset Tak berwujud pada tahun 2018 sebesar Rp2.413.753.740,00 sedangkan pada tahun 2019 sebesar Rp2.515.207.575,00 terjadi penambahan aset tak berwujud sebesar Rp101.453.835,00.

Adapun rincian Aset Tak Berwujud yang terdapat pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tegal disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.123 Aset Tak Berwujud

No.	Nama Organisasi Perangkat Daerah	SALDO	
		31 Desember 2019	31 Desember 2018
1.	Dinas Kesehatan	54.967.000,00	54.967.000,00
2.	RSUD Dr.Soeselo	1.666.494.978,00	1.662.992.578,00
3.	RSUD Suradadi	184.622.000,00	184.622.000,00
4.	Satuan Polisi Pamong Praja	3.399.000,00	3.399.000,00
5.	Dinas Perhubungan	57.251.435,00	
6.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	63.745.000,00	63.745.000,00
7.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	40.700.000,00	
8..	Inspektorat	106.667.550,00	106.667.550,00
9.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	337.360.612,00	337.360.612,00
Jumlah		2.515.207.575,00	2.413.753.740,00

d. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Tahun 2018 adalah sebesar Rp1.594.242.238,58 dan saldo tahun 2019 adalah sebesar Rp2.073.679.947,28. Adapun rincian Akumulasi Amortisasi aset Tak Berwujud dapat dilihat dalam lampiran 5.23

e. Aset lain-lain

Hal ini dikarenakan karena adanya reklasifikasi dari aset tetap dan Hal ini dikarenakan karena adanya reklasifikasi dari aset tetap dan Penghapusan Aset Daerah sesuai Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor tanggal 2019 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah. Saldo Aset lain-lain pada tahun 2018 adalah sebesar Rp204.932.698.236,33 dan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp86.535.858.494,67. Adapun rincian aset lain-lain dapat dilihat dalam lampiran 5.24.



f. Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain pada Tahun 2019 sebesar Rp28.208.370.047,00 terdiri dari Saldo Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain (rusak berat) sebesar Rp25.366.615.804,00 dan akumulasi penyusutan aset pemanfaatan sebesar Rp2.841.754.243,00. Pada tahun 2018 akumulasi penyusutan aset lain-lain adalah sebesar Rp102.535.785.983,71. Rincian akumulasi penyusutan aset lain-lain rusak berat dan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp25.366.615.804,00 disajikan dalam lampiran 5.25

5.3.2. Kewajiban

Kewajiban Jangka Pendek

Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang akan jatuh tempo kurang dari satu tahun sejak tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp35.259.186.635,00 dan 2018 sebesar Rp32.495.011.851,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.124 Kewajiban Jangka Pendek

No	Uraian	2019 (Rp.)	2018 (Rp.)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	44.643.617,00	77.031.600,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	4.057.675.610,00	1.756.392.705,00
3	Utang Beban	29.683.465.608,00	30.655.827.546,00
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	1.473.401.800,00	5.760.000,00
Jumlah		35.259.186.635,00	32.495.011.851,00

1. Utang PFK

Merupakan saldo utang yang belum dibayarkan kepada pihak ketiga pada 31 Desember 2019 sebesar Rp44.643.617,00 berupa Utang Pajak yang belum disetor atas realisasi belanja Bantuan Operasional Sekolah sebesar Rp21.210.117,00, Utang Pajak yang belum disetor atas Belanja Ganti Uang pada kecamatan Kramat sebesar Rp23.433.500,00 dan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp77.031.600,00 merupakan kas bendahara penerimaan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang belum disetor kepada Jasa Raharja.

2. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima dimuka merupakan Saldo pendapatan Diterima Dimuka yang berasal dari pembayaran pihak ketiga yang pada 31 Desember 2019 belum digunakan pemanfaatannya sebesar Rp4.057.675.610,00, dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Tabel 5.125 Pendapatan Diterima Dimuka

No.	Uraian	2019 (Rp.)	2018 (Rp.)
1	Pajak Reklame	981.812.596,00	1.026.279.330,00
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.075.863.014,00	730.113.375,00
Jumlah		4.057.675.610,00	1.756.392.705,00

a. Pajak Reklame

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2019 yang berasal dari Pajak Reklame sebesar Rp981.812.596,00 dan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.026.279.330,00 yang berada pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal.

b. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2019 yang berasal dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp3.075.863.014,00 dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp730.113.375,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.126 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

No.	Uraian	2019 (Rp.)	2018 (Rp.)
1	Dinas Perhubungan	180.000.000,00	240.000.000,00
2	Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan	10.648.000,00	10.104.000,00
3	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	2.781.667.014,00	384.598.875,00
4	Kecamatan Slawi	103.548.000,00	95.410.500,00
Jumlah		3.075.863.014,00	730.113.375,00

3. Utang Beban

Utang Beban merupakan Saldo Belanja per 31 Desember 2019 yang belum dibayar oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp29.683.465.608,00 dan saldo per 31 Desember 2018 Rp30.655.827.546,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.127 Utang Beban

No.	Uraian	2019 (Rp.)	2018 (Rp.)
a.	Beban Pegawai (TPP, gaji PTT, Intensif Pajak)	7.878.267.915,00	7.572.061.685,00
b.	Beban Listrik	3.475.473.751,00	3.370.527.320,00
c.	Beban Telepon	46.124.834,00	57.901.747,00
d.	Beban Air	72.471.250,00	85.588.524,00
e.	Beban Internet	72.508.718,00	52.953.151,00
f.	Beban Paket	0,00	395.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No.	Uraian	2019 (Rp.)	2018 (Rp.)
g.	Beban BLUD RSUD dr Soeselo	15.406.984.537,00	14.335.213.030,00
h.	Beban BLUD RSUD Suradadi	1.140.966.981,00	5.020.504.789,00
i.	Beban pada Pihak Ketiga (rekanan)	0,00	44.900.000,00
j.	Beban BLUD Dinkes (Puskesmas)	0,00	115.782.300,00
k.	Beban Perangko	203.000,00	0,00
l.	Beban Koran	210.000,00	0,00
m.	Beban BPJS Kesehatan	91.563.625,00	0,00
n.	Utang Beban Transfer Bantuan Keuangan	1.498.690.997,00	
	Jumlah	29.683.465.608,00	30.655.827.546,00

a. Utang Beban Pegawai

Merupakan saldo utang beban Pegawai sebesar Rp7.878.267.915,00 yaitu Beban tambahan penghasilan PNS sebesar Rp7.206.035.046,00, gaji PTT sebesar Rp2.800.000,00 yang berada pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Intensif Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah bulan Desember 2019 yang dibayarkan pada tahun 2020 sebesar Rp669.432.869,00.

b. Utang Beban Listrik

Merupakan Saldo utang beban listrik per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.475.473.751,00 dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp3.370.527.320,00 . Rincian lengkap utang beban listrik per OPD dapat dilihat *pada lampiran 5.26.*

c. Utang Beban Telepon

Merupakan Saldo utang beban telepon per 31 Desember 2019 sebesar Rp46.124.834,00 dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp57.901.747,00. Rincian lengkap utang beban telepon per OPD dapat dilihat *pada lampiran 5.27.*

d. Utang Beban Air

Merupakan saldo utang beban Air per 31 Desember 2019 sebesar Rp72.471.250,00 dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp85.588.524,00. Rincian lengkap utang beban air per OPD dapat dilihat *pada lampiran 5.28.*

e. Utang Beban Internet

Merupakan Saldo utang beban Internet per 31 Desember 2019 yang belum dibayar sebesar Rp72.508.718,00 dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp52.953.151,00. Rincian lengkap utang beban internet per OPD dapat dilihat *pada lampiran 5.29.*



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

f. Utang Beban paket

Merupakan Saldo utang beban paket per 31 Desember 2019 yang belum dibayar yang berada pada Inspektorat sebesar Rp0,00 dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp395.000,00.

g. Utang Beban BLUD

Merupakan saldo utang beban Barang Jasa BLUD per 31 Desember 2019 yang berada pada SKPD RSUD dr Soeselo dan RSUD Suradadi sebesar Rp16.547.951.518,00 dan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp19.471.500.119,00 dengan rincian sebagai disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.128 Utang Beban BLUD

:No.	Uraian	2019 (Rp.)	2018 (Rp.)
1	RSUD dr Soeselo	15.406.984.537,00	14.335.213.030,00
2	RSUD Suradadi	1.140.966.981,00	5.020.504.789,00
3	Dinkes (Puskesmas)	0,00	115.782.300,00
	Jumlah	16.547.951.518,00	19.471.500.119,00

Utang beban BLUD RSUD dr Soeselo per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 secara lebih rinci dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 5.129. Utang Beban BLUD RSUD dr Soeselo

No.	Uraian	2019(Rp.)	2018 (Rp.)
1	Obat	-	0,00
2	Perlengkapan Obat	-	0,00
3	Bahan Alat Kesehatan dan habis pakai	53.579.168,00	0,00
4	Bank Darah	159.530.000,00	609.275.000,00
5	Laboratorium	328.620.880,00	446.150.104,00
6	Hemodialisa	270.798.000,00	807.721.200,00
7	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	14.657.400,00	76.535.200,00
8	Barang Cetak Rekam Medis	468.324.000,00	438.587.935,00
9	Listrik,Air,Telepon	210.037.413,00	200.796.597,00
10	Jasa Pelayanan Medis	13.651.792.676,00	11.500.406.994,00
11	Perlengkapan Pendaftaran	249.645.000,00	255.740.000,00
	Jumlah	15.406.984.537,00	14.335.213.030,00

Utang beban BLUD RSUD Suradadi per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 secara lebih rinci dijelaskan dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Tabel. 5.130 Utang Beban BLUD RSUD Suradadi

No.	Uraian	2019 (Rp.)	2018 (Rp.)
1	Obat	440.618.461,00	3.185.019.832,00
2	Bahan Cetak	160.000.000,00	0,00
3	Bahan/ Alat Pembersih Sanitasi	14.635.000,00	0,00
4	Laboratorium	7.880.000,00	41.200.000,00
5	Makan dan Minum pasien	18.351.700,00	0,00
6	Bank Darah	40.225.000,00	71.280.000,00
7	Jasa Pelayanan Medis	459.256.820,00	1.682.564.214,00
8	Telepon	0,00	2.343.323,00
9	Listrik	0,00	36.997.420,00
10	Internet	0,00	1.100.000,00
	Jumlah	1.140.966.981,00	5.020.504.789,00

Saldo Utang Beban BLUD Dinkes (puskesmas) 2018 sebesar Rp115.782.300,00 merupakan utang BOK Puskesmas Talang sebesar Rp111.582.300,00, Jampersal Puskesmas Talang sebesar Rp780.000,00 dan Jampersal Puskesmas Jatibogor sebesar Rp3.420.000,00.

h. Utang Beban pada Pihak Ketiga (Rekanan)

Merupakan saldo utang beban pada pihak ketiga (rekanan) berupa jasa konsultasi perencanaan yang belum dibayar per 31 Desember 2018 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang merupakan pembayaran 100% jasa konsultasi perencanaan Kec. Suradadi, Kramat, Adiwerna, Tarub sesuai SPK No. 005/021.A/PL-JITUT/PER/II/2018 tanggal 26 Pebruari 2018 dan BAST No. 050/76.2/PSP-TRB-PERENCANA-JITUT dll tanggal 29 Maret 2018 sebesar Rp44.900.000,00.

i. Utang Beban Perangko

Merupakan Saldo utang beban perangko per 31 Desember 2019 yang belum dibayar yang berada pada Inspektorat sebesar Rp203.000,00 dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp0,00.

j. Utang Beban Koran

Merupakan Saldo utang beban koran per 31 Desember 2019 yang belum dibayar yang berada pada Kec. Dukuhwaru sebesar Rp210.000,00 dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp0,00.



k. Utang Beban BPJS Kesehatan

Merupakan saldo utang beban BPJS Kesehatan per 31 Desember 2019 yang berada pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang merupakan pembayaran BPJS Kesehatan PTT dan THL sebesar Rp91.563.625,00 dan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00.

l. Utang Beban Transfer Bantuan Keuangan

Merupakan saldo utang beban Transfer bantuan Keuangan per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.498.690.997,00 yaitu Beban Transfer Bantuan Keuangan berupa Dana Desa yang terdapat pada desa Desa Pagedangan Kecamatan Dukuhwaru sebesar Rp416.564.800,00, desa Pamiritan kecamatan Balapulang sebesar Rp647.312.400,00 dan desa Kendalserut Kecamatan Pangkah sebesar Rp434.810.800,00 .

4. Utang Jangka Pendek Lainnya

Merupakan Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.473.401.800,00 yang terdiri dari Lebih salur dana BOS yang belum disetor sebesar Rp22.720.000,00 dan dari RSUD Suradadi yang merupakan utang dari pihak ketiga (Bank mandiri) sebesar Rp1.473.401.800,00.

Kewajiban Jangka Panjang

Akun ini menggambarkan jumlah Utang Jangka Panjang-Pemerintah Pusat yang jatuh tempo sampai dengan Tahun 2018. Saldo per 31 Desember 2018 tidak ada karena pada Tahun 2015 utang tersebut lunas.

5.3.3. Ekuitas

Ekuitas adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aset dengan jumlah kewajiban. Ekuitas per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.342.308.288.450,03 meningkat sebesar Rp190.612.820.712,59 (6,05%) jika dibandingkan dengan ekuitas per 31 Desember 2018 sebesar Rp3.151.695.467.737,44.



5.4. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) disajikan sebagai bagian dari laporan keuangan tahun 2019. Laporan Operasional (LO) tahun 2019 disajikan dengan perbandingan Laporan Operasional tahun 2018.

5.4.1. KEGIATAN OPERASIONAL

5.4.1.1. Pendapatan –LO

Pendapatan-LO Kabupaten Tegal adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp2.432.247.246.917,86 dan pada tahun 2018 sebesar Rp2.576.653.719.477,81 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.131 Pandapatan - LO

No.	Uraian	Saldo 2019 (Rp)	Saldo 2018 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah – LO	438.793.991.751,86	407.657.716.953,81
2	Pendapatan Transfer– LO	1.848.194.886.627,00	2.016.857.467.822,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	145.258.368.539,00	152.138.534.702,00
Jumlah		2.432.247.246.917,86	2.576.653.719.477,81

1. Pendapatan Asli Daerah- LO

Pendapatan Asli Daerah – LO Kabupaten Tegal adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp438.793.991.751,86 dan Tahun 2018 sebesar Rp407.657.716.953,81 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.132 Pendapatan Asli Daerah - LO

No.	Uraian	Saldo 2019 (Rp)	Saldo 2018 (Rp)
a.	Pendapatan Pajak Daerah - LO	127.790.376.368,00	115.262.632.351,00
b.	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	22.951.216.853,00	19.400.937.863,00
c.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	21.807.886.313,57	25.010.502.816,19
d.	Lain – lain PAD Yang Sah - LO	266.244.512.217,29	247.983.643.923,62
Jumlah		438.793.991.751,86	407.657.716.953,81

a. Pendapatan Pajak Daerah – LO

Pendapatan Pajak Daerah – LO Kabupaten Tegal adalah Pendapatan Pajak Daerah untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp127.790.376.368,00 dan Tahun 2018 sebesar Rp115.262.632.351,00 dengan disajikan dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Tabel 5.133 Pendapatan Pajak Daerah - LO

No.	Uraian	Saldo 2019 (Rp)	Saldo 2018 (Rp)
1)	Pajak Hotel	603.842.624,00	610.644.058,00
2)	Pajak Restoran	6.792.691.413,00	5.395.788.141,00
3)	Pajak Hiburan	522.518.511,00	398.127.550,00
4)	Pajak Reklame	2.583.916.108,00	1.984.226.060,00
5)	Pajak Penerangan Jalan	50.862.470.241,00	51.698.559.990,00
6)	Pajak Parkir	72.540.250,00	65.292.250,00
7)	Pajak Air Tanah	377.675.460,00	375.132.710,00
8)	Pajak Sarang Burung Walet	3.200.000,00	3.000.000,00
9)	Pajak Minerba	712.254.574,00	1.154.324.950,00
10)	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	40.121.274.440,00	29.746.190.011,00
11)	Pajak BPHTB	25.137.992.747,00	23.831.346.631,00
Jumlah		127.790.376.368,00	115.262.632.351,00

b. Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Pendapatan Retribusi Daerah - LO Kabupaten Tegal adalah Pendapatan Retribusi Daerah untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp22.951.216.853,00 dan Tahun 2018 sebesar Rp19.400.937.863,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.134 Pendapatan Retribusi Daerah - LO

No.	Uraian	Saldo 2019 (Rp)	Saldo 2018 (Rp)
1)	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	187.940.500,00	164.320.500,00
2)	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO	2.048.058.250,00	1.803.798.750,00
3)	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	476.461.000,00	665.750.000,00
4)	Retribusi Pelayanan Pasar - LO	3.331.056.100,00	3.087.717.700,00
5)	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	1.498.720.000,00	1.591.980.000,00
6)	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO	3.777.000,00	3.515.000,00
7)	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO	329.749.500,00	280.221.000,00
8)	Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LO	46.800.000,00	51.600.000,00
9)	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	4.908.656.343,00	2.431.399.553,00
10)	Retribusi Tempat Pelelangan - LO	240.567.850,00	212.988.260,00
11)	Retribusi Terminal - LO	168.144.500,00	166.905.500,00
12)	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO	1.004.178.300,00	871.998.300,00
13)	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga - LO	6.544.162.400,00	7.041.789.450,00
14)	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	2.137.140.110,00	995.603.850,00
15)	Retribusi Izin Trayek - LO	25.805.000,00	31.350.000,00
Jumlah		22.951.216.853,00	19.400.937.863,00



c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Daerah – LO Kabupaten Tegal adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp21.807.886.313,57 dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp25.010.502.816,19 berupa bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD)

d. Lain – lain PAD Yang Sah - LO

Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah – LO Kabupaten Tegal adalah Pendapatan Daerah untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp266.244.512.217,29 dan Tahun 2018 sebesar Rp247.983.643.923,62 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5. 135 Pendapatan lain-lain PAD yang Sah - LO

No.	Uraian	Saldo 2019 (Rp)	Saldo 2018 (Rp)
1)	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO	134.175.280,00	306.856.280,00
2)	Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO	677.033.000,00	238.520.000,00
3)	Penerimaan Jasa Giro - LO	4.560.452.080,00	4.951.111.972,00
4)	Pendapatan Bunga - LO	13.179.078.325,00	14.734.363.612,00
5)	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO	39.300.000,00	10.290.000,00
6)	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	1.666.728.424,00	717.191.571,00
7)	Pendapatan Denda Pajak - LO	51.677.438,00	2.518.578.856,00
8)	Pendapatan Denda Retribusi - LO	745.850.000,00	871.671.400,00
9)	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LO	0,00	55.500.000,00
10)	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO	116.005.600,00	686.800.500,00
11)	Pendapatan dari Pengembalian -LO	6.931.254.609,00	4.448.535.803,00
12)	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO	0,00	719.800.800,00
13)	Pendapatan BLUD - LO	237.151.564.809,29	216.917.373.344,62
14)	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO	87.458.692,00	29.858.005,00
15)	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LO	404.347.453,00	231.393.300,00
16)	Pendapatan dari sumber mata air - LO	475.864.440,00	545.798.480,00
17)	Pendapatan Sewa BLK - LO	23.722.067,00	
Jumlah		266.244.512.217,29	247.983.643.923,62

2. Pendapatan Transfer – LO

Pendapatan Transfer – LO Kabupaten Tegal adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.848.194.886.627,00 dan Tahun 2018 sebesar Rp2.016.857.467.822,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Table 5.136 Pendapatan Transfer - LO

No.	Uraian	Saldo 2019 (Rp)	Saldo 2018 (Rp)
a.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	1.601.949.250.625,00	1.513.203.330.274,00
b.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	44.577.009.000,00	317.703.162.997,00
c.	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	168.878.574.738,00	175.478.284.551,00
d.	Bantuan Keuangan - LO	32.790.052.264,00	10.472.690.000,00
Jumlah		1.848.194.886.627,00	2.016.857.467.822,00

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Kabupaten Tegal adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.601.949.250.625,00 dan Tahun 2018 sebesar Rp1.513.203.330.274,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.137 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO

No.	Uraian	Saldo 2019 (Rp)	Saldo 2018 (Rp)
1)	Bagi Hasil Pajak - LO	22.431.949.816,00	21.232.470.187,00
2)	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO	9.957.829.532,00	8.188.805.102,00
3)	Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	1.203.613.836.000,00	1.144.494.182.000,00
4)	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO	365.945.635.277,00	339.287.872.985,00
Jumlah		1.601.949.250.625,00	1.513.203.330.274,00

b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat lainnya – LO Kabupaten Tegal adalah pendapatan Transfer Dana Penyesuaian. Pendapatan Transfer Dana Penyesuaian -LO untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp44.577.009.000,00 berupa Pendapatan Dana Insentif Daerah dan Tahun 2018 adalah sebesar Rp317.703.162.997,00 berupa Pendapatan Dana Desa sebesar Rp282.703.162.997,00 dan Dana Insentif Daerah sebesar Rp35.000.000.000,00.

c. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah lainnya – LO Kabupaten Tegal adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp168.878.574.738,00 dan Tahun 2018 sebesar Rp175.478.284.551,00 berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi.

d. Bantuan Keuangan – LO

Bantuan Keuangan – LO Kabupaten Tegal adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp32.790.052.264,00 dan Tahun 2018 sebesar Rp10.472.690.000,00 berupa Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah –LO

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO Kabupaten Tegal adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp145.258.368.539,00 dan Tahun 2018 sebesar Rp152.138.534.702,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5. 138 Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO

No.	Uraian	Saldo 2019 (Rp)	Saldo 2018 (Rp)
a.	Pendapatan Hibah - LO	145.258.368.539,00	152.138.534.702,00
b.	Pendapatan Lainnya - LO	0,00	0
Jumlah		145.258.368.539,00	152.138.534.702,00

a. Pendapatan Hibah – LO

Pendapatan Hibah – LO Kabupaten Tegal adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp145.258.368.539,00 dan Tahun 2018 sebesar Rp152.138.534.702,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.139 Pendapatan Hibah - LO

No.	Uraian	Saldo 2019 (Rp)	Saldo 2018 (Rp)
1)	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO	4.146.808.980,00	14.820.017.150,00
2)	Hibah Dana BOS – LO	141.111.559.559,00	137.318.517.552,00
Jumlah		145.258.368.539,00	152.138.534.702,00

b. Pendapatan Lainnya – LO

Pendapatan Lainnya – LO Kabupaten Tegal adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp340.958.368.997,00 berupa Dana Desa dan tidak dicatat dalam pendapatan LO karena merupakan akun transitoris.

5.4.1.2. Beban

Jumlah Beban Daerah untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp2.188.762.725.723,44 dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp2.379.843.433.285,83 dengan rincian disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.140 Beban

No.	Beban	Saldo 2019 (Rp)	Saldo 2018 (Rp)
1.	Beban Pegawai	1.134.053.809.128,00	1.112.695.074.785,00
2.	Beban Barang dan Jasa	564.934.897.295,27	497.685.999.482,73



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No.	Beban	Saldo 2019 (Rp)	Saldo 2018 (Rp)
3.	Beban Hibah	71.201.506.281,00	92.411.137.642,00
4.	Beban Bantuan Sosial	23.895.091.000,00	20.264.296.500,00
5.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	214.676.615.145,14	201.333.648.287,61
6.	Beban Penyisihan Piutang	12.492.088.718,03	7.518.154.624,49
7.	Beban Transfer	167.508.718.156,00	447.935.121.964,00
	Jumlah	2.188.762.725.723,44	2.379.843.433.285,83

1. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp1.134.053.809.128,00 dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.112.695.074.785,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.141 Beban Pegawai

No.	Beban Pegawai	Saldo 2019 (Rp)	Saldo 2018 (Rp)
a.	Beban Gaji dan Tunjangan - LO	902.539.312.611,00	881.149.734.192,00
b.	Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	104.379.290.337,00	108.897.860.726,00
c.	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO	9.420.000.000,00	6.679.500.000,00
d.	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan - LO	163.123.418,00	197.364.969,00
e.	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	5.472.803.889,00	3.237.345.887,00
f.	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	701.200.779,00	580.112.180,00
g.	Beban Uang Lembur - LO	2.904.824.200,00	2.608.756.600,00
h.	Beban Honorarium PNS - LO	24.391.195.950,00	24.801.763.495,00
i.	Beban Honorarium Non PNS - LO	40.034.840.113,00	43.472.695.394,00
j.	Beban Pegawai BLUD - LO	24.650.759.753,00	22.068.251.066,00
k.	Beban Pegawai BOS - LO	19.396.458.078,00	19.001.690.276,00
	Jumlah	1.134.053.809.128,00	1.112.695.074.785,00

a. Beban Gaji dan Tunjangan - LO

Jumlah Beban Gaji dan Tunjangan - LO untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp902.539.312.611,00 dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp881.149.734.192,00 dengan rincian disajikan dalam lampiran 5.30.

b. Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO

Jumlah Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp104.379.290.337,00 dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp108.897.860.726,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.142 Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO

No.	Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	Saldo 2019 (Rp)	Saldo 2018 (Rp)
1)	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja - LO	104.180.490.337,00	108.708.410.726,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No.	Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	Saldo 2019 (Rp)	Saldo 2018 (Rp)
2)	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas - LO	40.200.000,00	37.500.000,00
3)	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja - LO	158.600.000,00	151.950.000,00
Jumlah		104.379.290.337,00	108.897.860.726,00

c. Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH – LO

Jumlah Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH – LO untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp9.420.000.000,00 dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp6.679.500.000,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.143 Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH -LO

No.	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO	Saldo 2019 (Rp)	Saldo 2018 (Rp)
1)	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD - LO	8.820.000.000,00	6.289.500.000,00
2)	Beban Penunjang Operasional KDH/WKDH - LO	600.000.000,00	390.000.000,00
Jumlah		9.420.000.000,00	6.679.500.000,00

d. Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan – LO

Jumlah Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan – LO untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp163.123.418,00 dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp197.364.969,00.

e. Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah

Jumlah Beban Insentif pemungutan Pajak Daerah untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp5.472.803.889,00 dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp3.237.345.887,00.

f. Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

Jumlah Beban Insentif Retribusi Daerah untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp701.200.779,00 dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp580.112.180,00.

g. Beban Uang Lembur – LO

Jumlah Beban Uang Lembur - LO untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp2.904.824.200,00 dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp2.608.756.600,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Tabel 5.144 Beban Uang Lembur -LO

No.	Beban Uang Lembur – LO	Saldo 2019 (Rp)	Saldo 2018 (Rp)
1)	Beban Uang Lembur PNS - LO	2.288.779.500,00	2.205.869.600,00
2)	Beban Uang Lembur Non PNS - LO	616.044.700,00	402.887.000,00
Jumlah		2.904.824.200,00	2.608.756.600,00

h. Beban Honorarium PNS- LO

Jumlah Beban Honorarium PNS - LO untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp24.391.195.950,00 dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp24.801.763.495,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.145 Beban Honorarium PNS -LO

No.	Beban Honorarium PNS – LO	Saldo 2019 (Rp)	Saldo 2018 (Rp)
1)	Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	574.749.000,00	4.918.776.125,00
2)	Beban Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa - LO	2.665.005.171,00	3.029.132.000,00
3)	Beban Honorarium PNS Lainnya - LO	21.151.441.779,00	16.853.855.370,00
Jumlah		24.391.195.950,00	24.801.763.495,00

i. Beban Honorarium Non PNS – LO

Jumlah Beban Honorarium Non PNS - LO untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp40.034.840.113,00 dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp43.472.695.394,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.146 Beban Honorarium Non PNS –LO

No.	Beban Honorarium Non PNS - LO	Saldo 2019 (Rp)	Saldo 2018 (Rp)
1)	Beban Honorarium Pegawai Honororer/tidak tetap - LO	15.506.742.128,00	18.706.002.500,00
2)	Beban Honorarium Non PNS Lainnya	24.528.097.985,00	24.766.692.894,00
Jumlah		40.034.840.113,00	43.472.695.394,00

j. Beban Pegawai BLUD – LO

Jumlah Beban Pegawai BLUD- LO untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp24.650.759.753,00 dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp22.068.251.066,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.147 Beban Pegawai BLUD - LO

No.	Beban Pegawai BLUD – LO	Saldo 2019 (Rp)	Saldo 2018 (Rp)
1)	Dinkes	11.559.900.820,00	10.545.843.510,00
2)	RSUD dr Soeselo Slawi	7.896.808.933,00	7.644.817.556,00
3)	RSUD Suradadi	5.194.050.000,00	3.877.590.000,00
Jumlah		24.650.759.753,00	22.068.251.066,00



k. Beban Pegawai BOS –LO

Jumlah Beban Pegawai BOS- LO untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp19.396.458.078,00 dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp19.001.690.276,00.

2. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp564.934.897.295,27 dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp497.685.999.482,73 dengan rincian disajikan dalam lampiran 5.31

a. Beban Bahan Pakai Habis

Jumlah Beban Bahan Pakai Habis untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp30.539.492.176,00 dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp13.512.021.915,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.148 Beban Bahan Pakai Habis

No.	Beban Bahan Pakai Habis	Saldo 2019 (Rp)	Saldo 2018 (Rp)
1)	Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	3.797.015.372,00	3.516.814.341,00
2)	Beban Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	12.989.600,00	4.198.200,00
3)	Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	15.299.956.048,00	2.604.685.229,00
4)	Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	238.650.200,00	173.214.600,00
5)	Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.417.341.603,00	1.076.034.190,00
6)	Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	3.161.300.745,00	3.281.545.789,00
7)	Beban Persediaan Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	31.404.000,00	33.881.000,00
8)	Beban Persediaan Pengisian Isi Tabung Gas	42.294.500,00	42.079.000,00
9)	Beban Bahan Pakai Habis Lainnya	4.971.847.577,00	2.779.569.566,00
10)	Beban Perlengkapan Komputer dan Printer	1.566.692.531,00	
Jumlah		30.539.492.176,00	13.512.021.915,00

b. Beban Persediaan Bahan/Material

Jumlah Beban Bahan Persediaan Bahan/Material untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp23.080.007.723,31 dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp23.388.966.303,34 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.149 Beban Persediaan Bahan/Material

No.	Beban Persediaan Bahan/ Material	Saldo 2019 (Rp)	Saldo 2018 (Rp)
1)	Beban Persediaan Bahan Baku Bangunan	2.772.131.470,00	4.619.049.291,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No.	Beban Persediaan Bahan/ Material	Saldo 2019 (Rp)	Saldo 2018 (Rp)
2)	Beban Persediaan Bahan/Bibit Tanaman	1.371.014.080,00	657.219.420,00
3)	Beban Persediaan Bibit Ternak	162.250.263,00	84.220.000,00
4)	Beban Persediaan Bahan Obat-obatan	10.765.782.124,31	11.859.919.796,34
5)	Beban Persediaan Bahan Kimia	1.030.362.908,00	862.423.494,00
6)	Beban Persediaan Makanan Pokok	456.547.950,00	322.540.000,00
7)	Beban Persediaan bahan/peralatan pelatihan	1.531.270.750,00	1.109.591.850,00
8)	Beban Bahan /Material Lainnya	4.314.696.578,00	3.874.002.452,00
9)	Beban Peralatan Kantor/ Rumah Tangga	675.951.600,00	
Jumlah		23.080.007.723,31	23.388.966.303,34

c. Beban Jasa Kantor

Jumlah Beban Jasa Kantor untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp110.149.036.633,00 dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp78.668.430.002,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.150 Beban Jasa Kantor

No.	Beban Jasa Kantor	Saldo 2019 (Rp)	Saldo 2018 (Rp)
1)	Beban Jasa telepon	856.070.622,00	817.601.867,00
2)	Beban Jasa air	818.131.434,00	765.352.879,00
3)	Beban Jasa listrik	41.523.583.501,00	40.792.659.834,00
4)	Beban Jasa Surat Kabar/Majalah	640.755.500,00	562.401.175,00
5)	Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet	2.253.030.466,00	1.571.919.503,00
6)	Beban Jasa Paket/Pengiriman	260.000,00	10.840.900,00
7)	Beban Jasa Sertifikasi	250.140.000,00	356.259.100,00
8)	Beban Jasa Transaksi Keuangan	12.863.416,00	
9)	Beban Jasa Kantor Lainnya	63.794.201.694,00	33.791.394.744,00
Jumlah		110.149.036.633,00	78.668.430.002,00

d. Beban Premi Asuransi

Jumlah Beban Premi Asuransi untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp6.454.302.178,00 dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.219.039.089,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.151 Beban Premi Asuransi

No.	Beban Premi Asuransi	Saldo 2019 (Rp)	Saldo 2018 (Rp)
1)	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan	6.248.293.150,00	1.024.553.897,00
2)	Beban Premi Asuransi Ketenagakerjaan	206.009.028,00	194.485.192,00
Jumlah		6.454.302.178,00	1.219.039.089,00

e. Beban Perawatan Kendaraan Bermotor



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Jumlah Beban Perawatan Kendaraan Bermotor untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp7.323.886.232,00 dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp6.729.868.412,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.152 Beban Perawatan Kendaraan Bermotor

No.	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	Saldo 2019 (Rp)	Saldo 2018 (Rp)
1)	Beban Jasa Service	1.662.003.367,00	1.204.091.355,00
2)	Beban Penggantian Suku Cadang	1.646.539.030,00	1.537.410.294,00
3)	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	3.583.619.406,00	3.529.073.310,00
4)	Beban Jasa KIR	6.110.000,00	10.503.075,00
5)	Beban Pajak Kendaraan Bermotor	246.939.579,00	232.085.828,00
6)	Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	178.674.850,00	216.704.550,00
Jumlah		7.323.886.232,00	6.729.868.412,00

f. Beban Cetak dan Penggandaan

Jumlah Beban Cetak dan Penggandaan untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp10.490.834.206,75 dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp8.603.553.438,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.153 Beban Cetak dan Penggandaan

No.	Beban Cetak dan Penggandaan	Saldo 2019 (Rp)	Saldo 2018 (Rp)
1)	Beban Cetak	7.458.596.663,75	5.885.987.423,00
2)	Beban Penggandaan	3.032.237.543,00	2.717.566.015,00
Jumlah		10.490.834.206,75	8.603.553.438,00

g. Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

Jumlah Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp1.454.041.370,00 dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.949.951.881,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.154 Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

No.	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	Saldo 2019 (Rp)	Saldo 2018 (Rp)
1)	Beban Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	3.000.000,00	15.000.000,00
2)	Beban Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	939.016.370,00	1.620.224.681,00
3)	Beban Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	471.485.000,00	314.727.200,00
4)	Beban Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas	40.540.000,00	
Jumlah		1.454.041.370,00	1.949.951.881,00

h. Beban Sewa Sarana Mobilitas



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Jumlah Beban Sewa Sarana Mobilitas untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp1.547.432.500,00 dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.319.035.550,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.155 Beban Sewa Sarana Mobilitas

No.	Beban Sewa Sarana Mobilitas	Saldo 2019 (Rp)	Saldo 2018 (Rp)
1)	Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.544.432.500,00	1.314.885.550,00
2)	Beban Sewa Sarana Mobilitas Air	3.000.000,00	4.150.000,00
Jumlah		1.547.432.500,00	1.319.035.550,00

i. Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Jumlah Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp3.201.876.800,00 dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp2.236.841.000,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.156 Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

No.	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Saldo 2019 (Rp)	Saldo 2018 (Rp)
1)	Beban Sewa Meja Kursi	847.236.300,00	755.635.000,00
2)	Beban Sewa Komputer dan Printer	9.000.000,00	
3)	Beban Sewa Generator	249.197.000,00	9.650.000,00
4)	Beban Sewa Tenda	1.785.194.200,00	335.270.000,00
5)	Beban Sewa Pakaian Adat/Tradisional	107.311.000,00	56.625.000,00
6)	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	203.938.300,00	1.079.661.000,00
Jumlah		3.201.876.800,00	2.236.841.000,00

j. Beban Makanan dan Minuman

Jumlah Beban Makanan dan Minuman untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp24.834.867.951,00 dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp22.422.912.890,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.157 Beban Makanan dan Minuman

No.	Beban Makanan dan Minuman	Saldo 2019 (Rp)	Saldo 2018 (Rp)
1)	Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai	2.925.473.072,00	2.362.890.115,00
2)	Beban Makanan dan Minuman Rapat	12.656.821.944,00	11.275.186.600,00
3)	Beban Makanan dan Minuman Tamu	1.933.554.775,00	1.028.044.150,00
4)	Beban Makanan dan Minuman Pelatihan	5.317.435.300,00	3.862.453.450,00
5)	Beban Makanan dan Minuman Lainnya	2.001.582.860,00	3.894.338.575,00
Jumlah		24.834.867.951,00	22.422.912.890,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

k. Beban Pakaian Dinas dan Atributnya

Jumlah Beban Pakaian Dinas dan Atributnya untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp569.066.500,00 dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp2.969.170.900,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.158 Beban Pakaian Dinas dan Atributnya

No.	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	Saldo 2019 (Rp)	Saldo 2018 (Rp)
1)	Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH	93.990.600,00	116.712.000,00
2)	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	40.662.000,00	58.135.000,00
3)	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	161.925.000,00	136.170.000,00
4)	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	105.453.700,00	2.364.270.500,00
5)	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	154.535.200,00	142.708.400,00
6)	Beban Pakaian Seragam Resmi (PSR)	12.500.000,00	95.044.000,00
7)	Beban Pakaian Dinas/Seragam Lainnya		56.131.000,00
Jumlah		569.066.500,00	2.969.170.900,00

l. Beban Pakaian Kerja

Jumlah Beban Pakaian Kerja untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp1.040.336.100,00 dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp752.875.350,00 berupa Beban pakaian Kerja Lapangan.

m. Beban Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu

Jumlah Beban Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp1.620.012.150,00 dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.261.747.299,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.159 Beban Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu

No.	Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	Saldo 2019 (Rp)	Saldo 2018 (Rp)
1)	Beban Pakaian Adat Daerah	99.413.300,00	134.250.000,00
2)	Beban Pakaian Batik Tradisional	524.791.800,00	139.594.999,00
3)	Beban Pakaian Olahraga	995.807.050,00	714.832.900,00
4)	Beban Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu Lainnya		273.069.400,00
Jumlah		1.620.012.150,00	1.261.747.299,00

n. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp33.147.323.543,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

dan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp28.947.885.047,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.160 Beban Perjalanan Dinas

No.	Beban Perjalanan Dinas	Saldo 2019 (Rp)	Saldo 2018 (Rp)
1)	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.812.941.301,00	4.485.035.687,00
2)	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.284.651.242,00	24.462.849.360,00
3)	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	49.731.000,00	
Jumlah		33.147.323.543,00	28.947.885.047,00

o. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp20.901.205.596,00 dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp27.624.004.334,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.161 Beban Pemeliharaan

No.	Beban Pemeliharaan	Saldo 2019 (Rp)	Saldo 2018 (Rp)
1)	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.747.310.957,00	2.705.862.509,00
2)	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.883.992.028,00	4.153.037.882,00
3)	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	12.119.080.618,00	20.600.293.443,00
4)	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.150.821.993,00	164.810.500,00
Jumlah		20.901.205.596,00	27.624.004.334,00

p. Beban Jasa Konsultasi

Jumlah Beban Jasa konsultasi untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp5.074.231.130,00 dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp7.144.346.785,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.162 Beban Jasa Konsultasi

No.	Beban Jasa Konsultasi	Saldo 2019 (Rp)	Saldo 2018 (Rp)
1)	Beban Jasa Konsultansi Penelitian	888.035.500,00	418.281.500,00
2)	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	3.425.544.950,00	3.874.337.235,00
3)	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan	56.210.900,00	186.015.000,00
4)	Beban Jasa Konsultansi Lainnya	704.439.780,00	2.665.713.050,00
Jumlah		5.074.231.130,00	7.144.346.785,00

q. Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Jumlah Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp6.353.337.495,00 dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp4.600.738.699,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.163 Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan teknis

No.	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	Saldo 2019 (Rp)	Saldo 2018 (Rp)
1)	Beban Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan	4.623.525.095,00	2.955.502.199,00
2)	Beban Sosialisasi	22.551.600,00	34.507.000,00
3)	Beban Bimbingan Teknis	1.686.790.800,00	1.583.859.500,00
4)	Beban Ujian	20.470.000,00	26.870.000,00
Jumlah		6.353.337.495,00	4.600.738.699,00

r. Beban uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat

Jumlah Beban Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp1.888.050.000,00 dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp2.239.760.000,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.164 Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

No.	Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	Saldo 2019 (Rp)	Saldo 2018 (Rp)
1)	Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	86.650.000,00	91.100.000,00
2)	Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat	1.801.400.000,00	2.148.660.000,00
Jumlah		1.888.050.000,00	2.239.760.000,00

s. Beban Barang dan Jasa BLUD

Jumlah Beban Barang dan Jasa BLUD untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp184.137.137.896,21 dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp173.379.969.046,39 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.165 Beban Barang dan Jasa BLUD

No.	Beban Barang dan Jasa BLUD	Saldo 2019 (Rp)	Saldo 2018(Rp)
1)	Dinkes	65.335.029.761,30	56.898.762.965,39
2)	RSUD dr Soeselo Slawi	107.047.662.027,00	102.819.924.219
3)	RSUD Suradadi	11.754.446.107,91	13.661.281.862,00
Jumlah		184.137.137.896,21	173.379.969.046,39

t. Beban Barang Ekstrakompatabel



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Jumlah Beban Barang Ekstrakompatabel untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp204.040.416,00 dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp19.674.515,00

u. Beban Barang Jasa BOS

Jumlah Beban Barang Jasa BOS untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp85.679.405.199,00 dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp83.642.707.027,00

v. Beban Barang dan Jasa Dana BOP PAUD

Jumlah Beban Barang dan jasa Dana BOP PAUD untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 tidak ada dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp148.800.000,00

w. Beban Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli

Jumlah Beban Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp5.244.973.500,00 dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp4.903.700.000,00

3. Beban Hibah

Jumlah Beban Hibah untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp71.201.506.281,00 sedangkan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp92.411.137.642,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.166 Beban Hibah

No.	Beban Hibah	Saldo 2019 (Rp)	Saldo 2018 (Rp)
1)	Beban Hibah kepada Pemerintah	2.188.565.000,00	10.557.557.342,00
2)	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	37.630.200.000,00	52.100.809.800,00
3)	Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	31.382.741.281,00	29.752.770.500,00
Jumlah		71.201.506.281,00	92.411.137.642,00

4. Beban Bantuan Sosial

Jumlah Beban Bantuan Sosial untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp23.895.091.000,00 dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp20.264.296.500,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5. 167 Beban Bantuan Sosial

No.	Beban Bantuan sosial	Saldo 2019 (Rp)	Saldo 2018 (Rp)
1)	Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	2.882.500.000,00	150.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No.	Beban Bantuan sosial	Saldo 2019 (Rp)	Saldo 2018 (Rp)
2)	Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat	20.899.400.000,00	19.914.800.000,00
3)	Beban Bantuan Sosial Barang/Jasa yang diserahkan kepada Masyarakat/Pihak ketiga	113.191.000,00	199.496.500,00
Jumlah		23.895.091.000,00	20.264.296.500,00

5. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp214.676.615.145,14 dan Tahun anggaran 2018 Rp201.333.648.287,61 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 168 Beban penyusutan dan Amortisasi

No	Beban Penyusutan dan Amortisasi	Saldo 2019 (Rp)	Saldo 2018 (Rp)
1)	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	74.411.331.509,78	64.404.371.635,41
2)	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	23.726.753.293,00	30.298.740.198,28
3)	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	116.206.050.398,00	106.259.529.582,00
4)	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	27.606.740,00	
5)	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	304.873.204,36	371.006.871,92
JUMLAH		214.676.615.145,14	201.333.648.287,61

6. Beban Penyisihan Piutang

Jumlah Beban Penyisihan Piutang untuk Tahun 2019 sebesar Rp12.492.088.718,03 dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp7.518.154.624,49 merupakan penyisihan piutang Kabupaten Tegal 2019 yang terdapat pada 7 (tujuh) OPD dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5. 169 Beban Penyisihan Piutang

No	SKPD	Saldo 2019(Rp)	Saldo 2018(Rp)
1)	RSUD dr Soeselo	7.550.354.715,00	3.328.604.033,00
2)	RSUD Suradadi	1.003.582.570,51	501.391.317,00
3)	Dinas Perhubungan	241.157.073,50	375.075.427,50
4)	Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	35.480.689,25	36.728.188,87
5)	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	7.670.250,00	12.458.250,00
6)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.642.000,00	15.075.250,00
7)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	69.148.796,29	676.282.856,84
8)	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.581.094.553,23	2.572.539.301,28
9)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	958.070,25	
Jumlah		12.492.088.718,03	7.518.154.624,49

7. Beban Transfer

Jumlah Beban Transfer untuk tahun 2019 sebesar Rp167.508.718.156,00 dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp447.935.121.964,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5. 170 Beban Transfer



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Beban Transfer	Saldo 2019 (Rp)	Saldo 2018 (Rp)
a.	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	6.857.836.340,00	7.385.046.100,00
b.	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	1.385.277.400,00	1.627.402.000,00
c.	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	158.150.452.000,00	437.853.770.000,00
d.	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.115.152.416,00	1.068.903.864,00
	JUMLAH	167.508.718.156,00	447.935.121.964,00

5.4.2. KEGIATAN NON OPERASIONAL

5.4.2.1. Defisit Non Operasional

Jumlah Defisit Non Operasional ini merupakan defisit atas penghapusan aset yaitu sebesar nilai buku aset saat dihapuskan, untuk tahun 2019 sebesar Rp50.124.563.468,46 dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp150.635.660,87.

5.4.3. POS LUAR BIASA

5.4.3.1. Beban Luar Biasa

Pos beban Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik kejadiannya tidak normal dan jarang terjadi serta diluar kendali entitas pemerintah daerah. Beban luar biasa Tahun 2019 sebesar Rp1.500.000,00 dan tahun anggaran 2018 sebesar Rp4.136.076.000,00 merupakan beban yang berasal dari belanja tidak terduga, rincian realisasi belanja tak terduga dijelaskan di dalam penjelasan Laporan Realisasi Anggaran.

5.5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi arus penerimaan kas dan pengeluaran kas Bendahara Umum Daerah (BUD) selama Tahun 2019 dan 2018, meliputi Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan, Aktivitas Pembiayaan dan Aktivitas Non Anggaran. Saldo akhir kas TA 2019 sebesar Rp90.449.928.313,96 dan TA 2018 sebesar Rp59.877.097.965,82 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.171 Laporan Arus Kas

Arus Kas dari :	2019 Realisasi (Rp)	2018 Realisasi (Rp)
1. Aktivitas Operasi	471.966.477.920,14	366.369.820.127,62
2. Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(442.775.374.745,00)	(413.263.876.664,00)
3. Aktivitas Pembiayaan	1.473.401.800,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Arus Kas dari :	2019 Realisasi (Rp)	2018 Realisasi (Rp)
4. Aktivitas Non Anggaran	(55.266.508,00)	22.130.968,40
Kenaikan /Penurunan Kas	30.609.238.467,14	(46.871.925.567,98)
Saldo Awal Kas	59.651.201.481,82	106.523.127.049,80
Saldo Akhir Kas	90.260.439.948,96	59.651.201.481,82
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	100.899.992,00	20.199.984,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	67.378.256,00	205.696.500,00
Saldo Akhir Kas lainnya	21.210.117,00	
Saldo Akhir Kas	90.449.928.313,96	59.877.097.965,82

5.5.1. Arus Kas dari Operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasi tahun 2019 surplus sebesar Rp471.966.477.920,14 dan tahun 2018 surplus sebesar Rp366.369.820.127,62 merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya.

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan selisih dari arus kas masuk dengan arus kas keluar dengan sebagai berikut:

Arus Masuk Kas

Arus Masuk Kas Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp2.755.004.594.116,29 dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp2.524.007.301.234,62 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5. 172 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas	2019 (Rp)	2018 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	122.835.291.901,00	106.989.918.258,00
Pendapatan Retribusi Daerah	25.319.216.421,00	18.066.219.045,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.395.196.773,00	12.576.924.389,00
Lain-lain PAD yang Sah	264.780.797.282,29	234.290.995.782,62
Dana Bagi Hasil Pajak	13.414.727.205,00	21.232.470.187,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	8.746.844.857,00	8.188.805.102,00
Dana Alokasi Umum	1.198.561.641.000,00	1.144.494.182.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Arus Masuk Kas	2019 (Rp)	2018 (Rp)
Dana Alokasi Khusus	365.945.635.277,00	339.287.872.985,00
Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
Dana Penyesuaian	44.577.009.000,00	317.703.162.997,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	173.568.253.580,00	167.207.542.937,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00
Bantuan Keuangan dari pemerintah daerah provinsi lainnya	32.790.052.264,00	10.472.690.000,00
Pendapatan Hibah	141.111.559.559,00	143.496.517.552,00
Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	340.958.368.997,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	2.755.004.594.116,29	2.524.007.301.234,62

Arus Keluar Kas

Arus Keluar Kas Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp2.283.038.116.196,15 dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp2.157.637.481.107,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.173 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Keluar Kas	2019 (Rp)	2018 (Rp)
Belanja Pegawai	1.133.760.553.898,00	1.108.018.481.665,00
Belanja Barang	578.593.810.142,15	484.444.957.020,00
Bunga	0,00	0,00
Subsidi	0,00	0,00
Hibah	39.818.765.000,00	92.525.895.948,00
Bantuan Sosial	23.895.091.000,00	20.264.296.500,00
Belanja Tak Terduga	1.500.000,00	4.136.076.000,00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	8.243.113.740,00	9.012.448.100,00
Transfer Bantuan keuangan	498.725.282.416,00	439.235.325.874,00
<i>Jumlah Arus Keluar Kas</i>	2.283.038.116.196,15	2.157.637.481.107,00

5.5.2. Arus Kas dari Investasi Aset Non Keuangan

Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan tahun 2019 defisit sebesar Rp442.775.374.745,00 dan tahun 2018 defisit sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Rp413.263.876.664,00 mencerminkan adanya pengadaan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah di masa yang akan datang. Arus kas bersih aktivitas investasi aset non keuangan merupakan selisih dari arus masuk kas dengan arus keluar kas yang terdiri dari :

Arus Masuk Kas

Arus Masuk Kas Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp967.107.913,00 dan Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp13.597.145.271,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.174 Arus Masuk Kas Dari Investasi Aset Non Keuangan

Arus Masuk Kas	2019 (Rp)	2018 (Rp)
Pencairan Dana Cadangan	0,00	12.840.541.100,00
Pendapatan Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	24.300.000,00	230.989.000,00
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	77.725.280,00	41.247.280,00
Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		6.100.000,00
Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya	32.150.000,00	28.520.000,00
Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya	677.033.000,00	238.520.000,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non permanen	155.899.633,00	211.227.891,00
Jumlah Arus Masuk Kas	967.107.913,00	13.597.145.271,00

Arus Keluar Kas

Arus Keluar Kas Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp443.742.482.658,00 dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp426.861.021.935,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.175 Arus Keluar Kas Dari Investasi Aset Non Keuangan

Arus Keluar Kas	2019 (Rp)	2018 (Rp)
Pembentukan Dana Cadangan		
Belanja Tanah	0,00	3.148.086.385,00
Belanja Peralatan dan Mesin	60.198.204.329,00	96.724.967.692,00
Belanja Gedung dan Bangunan	149.596.577.668,00	109.978.782.599,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	198.602.231.366,00	206.618.577.009,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	25.996.469.295,00	1.512.608.250,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	9.349.000.000,00	8.849.000.000,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	0,00	29.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas	443.742.482.658,00	426.861.021.935,00

5.5.3. Arus Kas dari Aktifitas Pembiayaan

Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan tahun 2019 surplus sebesar Rp1.473.401.800,00 dan tahun 2018 tidak ada mencerminkan adanya



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

pengeluaran pemerintah yang terkait dengan arus kas di masa yang akan datang. Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan merupakan selisih dari arus kas masuk dengan arus kas keluar atas aktivitas pembiayaan, yaitu:

Arus Masuk Kas

Arus Masuk Kas Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp1.473.401.800,00 dan Realisasi Tahun Anggaran 2018 tidak ada dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5. 176 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pembiayaan

Arus Masuk Kas	2019 (Rp)	2018 (Rp)
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri	1.473.401.800,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Luar Negeri	0,00	0,00
Penerimaan Utang Obligasi	0,00	0,00
Penerimaan Kembali/Pembayaran Piutang	0,00	0,00
Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	1.473.401.800,00	0,00

Penerimaan pinjaman Dalam Negeri merupakan Utang BLUD RSUD Suradadi pada Lembaga keuangan Bank yaitu Bank Mandiri sebesar Rp1.450.681.800,00 dan Utang Lebih Salur Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Tahun 2019 belum disetor ke Pemerintah Provinsi sebesar Rp22.720.000,00

Arus Keluar Kas

Arus Keluar Kas Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018 tidak ada.

5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran

Arus kas bersih dari aktivitas non anggaran mencerminkan saldo penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran. Realisasi aktivitas non anggaran TA 2019 sebesar (Rp55.266.508,00) dan TA 2018 sebesar Rp22.130.968,40 dengan rincian sebagai berikut:

Arus Masuk Kas

Arus Masuk Kas Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp157.351.749.541,00 dan Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp148.198.309.962,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.177 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Non Anggaran

Arus Masuk Kas	2019 (Rp)	2018 (Rp)
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		
~ luran wajib Pegawai	47.953.921.910,00	46.818.437.919,00
~ Tabungan Uang Muka Perumahan	884.874.000,00	911.625.000,00
~ Subsidi Askes	14.492.428.388,00	14.141.847.044,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Arus Masuk Kas	2019 (Rp)	2018 (Rp)
~ Pajak Penghasilan pasal 21 Karyawan	39.043.674.893,00	35.753.653.279,00
~ Pajak Penghasilan pasal 22	1.238.012.469,00	1.204.220.160,00
~ Pajak Penghasilan pasal 23	289.459.620,00	373.803.938,00
~ Pajak Penghasilan pasal 25	0,00	0,00
~ Pajak Penghasilan pasal 4 (2)	6.612.678.907,00	6.901.105.751,00
~ Pajak Penghasilan pasal 26	0,00	0,00
~ Pajak PPn	40.875.751.458,00	38.747.250.463,00
~ BPJS Ketenagakerjaan	5.940.747.912,00	3.307.854.162,00
Penerimaan Kiriman Uang (R/K SKPD)	20.199.984,00	38.512.246,00
Jumlah Arus Masuk Kas	157.351.749.541,00	148.198.309.962,00

Penerimaan Kiriman Uang (R/K SKPD) sebesar Rp20.199.984,00 merupakan Sisa Uang Persediaan (UP) TA 2018 pada Bendahara Pengeluaran SKPD, yang baru disetor kembali ke rekening umum BUD dalam Tahun 2019.

Arus Keluar Kas

Arus Keluar Kas Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp157.407.016.049,00 dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp148.176.178.993,60 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5 . 178 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Non Anggaran

Arus Keluar Kas.	2019 (Rp)	2018 (Rp)
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		
~ Iuran wajib Pegawai	47.953.921.910,00	46.818.437.919,00
~ Tabungan Uang Muka Perumahan	884.874.000,00	911.625.000,00
~ Subsidi Askes	14.492.428.388,00	14.141.847.044,00
~ Pajak Penghasilan pasal 21 Karyawan	39.043.674.893,00	35.753.653.279,00
~ Pajak Penghasilan pasal 22	1.238.012.469,00	1.204.220.160,00
~ Pajak Penghasilan pasal 23	289.459.620,00	373.803.938,00
~ Pajak Penghasilan pasal 25	0,00	0,00
~ Pajak Penghasilan pasal 4 (2)	6.612.678.907,00	6.901.105.751,00
~ Pajak Penghasilan pasal 26	0,00	0,00
~ Pajak PPn	40.875.751.458,00	38.747.250.463,00
~ BPJS Ketenagakerjaan	5.940.747.912,00	3.307.854.162,00
Pengeluaran Kiriman Uang (R/K SKPD)	77.466.492,00	20.199.984,00
~ Koreksi atas Kas BOS	(2.000.000,00)	(3.818.706,40)
Jumlah Arus Keluar Kas	157.407.016.049,00	148.176.178.993,60

Pengeluaran Kiriman Uang (R/K SKPD) sebesar Rp77.466.492.000,00 merupakan Sisa Uang Persediaan (UP) TA 2019 pada Bendahara Pengeluaran SKPD, yang baru disetor kembali ke rekening umum BUD dalam Tahun 2020.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Posisi Kas akhir TA 2019 sebesar Rp90.449.928.313,96 dan TA 2018 sebesar Rp59.877.097.965,82 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5. 179. Saldo Akhir Kas

Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)
Kenaikan /Penurunan Kas	30.609.238.467,14	(46.871.925.567,98)
Saldo Awal Kas BUD	41.645.810.899,00	82.457.061.138,00
Saldo Awal Kas di BLUD	15.923.709.895,82	21.043.264.770,80
Saldo Awal Kas BOS	2.081.680.687,00	3.022.801.141,00
Saldo Akhir Kas	90.260.439.948,96	59.651.201.481,82
Saldo Akhir Kas BUD (Kas Daerah)	51.565.336.774,00	41.645.810.899,00
Saldo Akhir Kas di BLUD	34.146.113.382,96	15.923.709.895,82
Saldo Akhir Kas BOS	4.548.989.792,00	2.081.680.687,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	100.899.992,00	20.199.984,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	67.378.256,00	205.696.500,00
Saldo Akhir Kas lainnya	21.210.117,00	
Saldo Akhir Kas	90.449.928.313,96	59.877.097.965,82

5.6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1. Ekuitas Awal

Jumlah ekuitas awal Tahun 2018 sebesar Rp3.151.695.467.737,44

5.6.2. Surplus/Defisit – LO

Surplus/Defisit-LO merupakan saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan sebesar Rp193.358.457.725,96

5.6.3. Koreksi-koreksi

Koreksi-koreksi sebesar (Rp2.745.637.013,37) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Koreksi Kas Sebesar Rp3.400.000,00 yaitu koreksi yang menambah saldo awal Kas pada Kas di bendahara BOS sebesar Rp3.440.000,00
2. Koreksi piutang sebesar Rp2.728.110.083,00 yaitu koreksi yang menambah ekuitas atas Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

- pada BPKAD sebesar Rp5.400.000,00 dan Piutang Denda Pajak pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sebesar Rp2.722.770.083,00.
3. Koreksi penyisihan piutang sebesar Rp1.158.568.626,65 yaitu koreksi yang mengurangi ekuitas atas Penyisihan Piutang BLUD Pada RSUD dr Soeselo Slawi sebesar Rp4.277.423.367,00, Penyisihan Piutang BLUD RSUD Suradadi sebesar Rp501.391.317,00, Penyisihan Piutang Retribusi Dinas Perhubungan sebesar Rp35.966.826,00, penyisihan Piutang Retribusi Dinas Pelayanan Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebesar Rp11.819.731.50, Penyisihan Piutang Lain-lain PAD pada Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar sebesar Rp15.075.250,00, Penyisihan Piutang Retribusi BPKAD sebesar Rp15.075.250,00, Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan BPKAD sebesar Rp634.900.000,00, penyisihan Piutang Lain-lain PAD (Bunga Deposito) pada BPKAD sebesar Rp29.148,77, penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Pada BPKAD sebesar Rp41.353.708,07, penyisihan Piutang Lainnya (dana bergulir) Pada BPKAD sebesar Rp181.351.733,00, dan koreksi yang menambah ekuitas pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah penyisihan Piutang Pajak sebesar Rp4.573.309.040,72 dan Penyisihan Piutang Lain-lain PAD denda Pajak sebesar Rp2.296.984.167,27
 4. Koreksi aset tetap sebesar Rp888.180.893,04 yaitu koreksi yang menambah ekuitas atas Hibah aset dari Pemerintah Pusat Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp892.702.000,00, Hibah Aset dari Pemerintah Pusat pada Dinas Pelayanan Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebesar Rp26.400.000,00, hibah aset dari Pemerintah Pusat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp56.122.000,00, koreksi pencatatan Aset Dinas Perhubungan sebesar Rp197.787.941,00 dan koreksi yang mengurangi aset pada dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.981.512.835,04
 5. Koreksi akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp7.437.149.241,72 yang menambah ekuitas reklasifikasi aset Konstruksi LPJU sesuai permendagri 108 tahun 2016 direklas dari KIB D (jalan, jaringan, dan irigasi) ke KIB C(Gedung bangunan) sebesar Rp47.644.573,00, koreksi atas pencatatan akumulasi penyusutan Aset tetap lainnya sebesar Rp269.760.500,00 dan yang mengurangi ekuitas berupa koreksi reklasifikasi antenna yang dari KIB C (Gedung Bangunan) Ke KIB B(Peralatan dan Mesin) sebesar Rp591.560.182,00, koreksi kapitalisasi Jalan sebesar Rp946.896.121,00 dan koreksi reklasifikasi rambu rambu sesuai Permendagri 108 tahun 2016 yang belum tercatat sebesar Rp5.638.461.353,72



6. Koreksi Investasi Jangka Panjang sebesar Rp Rp1.168.563.832,52 yang mengurangi nilai ekuitas pada penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PD BKK Jateng cabang Kabupaten Tegal
7. Koreksi Aset Lainnya sebesar Rp5.407.965.079,90 yang menambah ekuitas karena koreksi saldo Awal Akumulasi Penyututan Aset Lainnya sebesar Rp5.420.706.859,51, kurang catat Aset Rusak Berat sebesar Rp750.000,00, kurang catat Pembebanan Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp53.200.000,00 dan yang mengurangi ekuiatas karena lebih catat penghapusan aset Lainnya sebesar Rp44.249.488,00 dan koreksi atas Pembebanan TGR pada Piah ketiga sebesar Rp22.442.291,61
8. Koreksi Amortisasi Aset lainnya sebesar Rp174.564.504,34 yang mengurani ekuitas karena perhitungan kapitalisasi amortisasi Aset Tak berwujud pada Dinas Kesehatan sebesar Rp5.034.104,00 , RSUD dr Soeselo sebesar Rp74.602.305,34, RSUD Suradadi sebesar Rp24.563.052,08, Inspektorat sebesar Rp16.867.812,50 dan Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp53.497.230,42
9. Koreksi kewajiban jangka pendek Rp58.185.078,00 yang mengurangi ekuitas karena kurang catat Lebih salur Dana Bos sebesar Rp1.440.000,00 dan Utang Pada BLUD RSUD Suradadi sebesar Rp58.185.078,00

5.6.4. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir sebesar Rp3.342.308.288.450,03 merupakan jumlah Ekuitas Awal ditambah dengan Surplus/Defisit – LO ditambah dengan koreksi-koreksi



BAB VI INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. GAMBARAN UMUM DAERAH

Kondisi umum Kabupaten Tegal dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Tegal merupakan salah satu kabupaten di wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah dengan ibukota kabupaten berada di kota Slawi. Terletak di pesisir Utara bagian Barat dan sebagian wilayahnya berbatasan dengan Laut Jawa atau dikenal dengan pantai Utara (Pantura) yang berada pada persilangan arus transportasi Semarang-Tegal-Jakarta dan Jakarta-Tegal-Purwokerto. Secara geografis Kabupaten Tegal terletak pada posisi antara $108^{\circ}57'06''$ BT - $109^{\circ}21'30''$ BT dan $6^{\circ}50'41''$ LS - $7^{\circ}15'03''$ LS, dengan luas wilayah daratan $87.878,56$ ha atau $878,79$ km² dan Lautan seluas $121,50$ Km², Panjang garis pantai 30 km dan panjang perbatasan darat dengan daerah lain adalah 27 Km. Adapun batas wilayah Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut : batas wilayah sebelah Utara adalah Kota Tegal dan Laut Jawa, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pemalang, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Brebes dan Kota Tegal serta sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas.

Secara geografis wilayah Kabupaten Tegal terdiri dari 3 (tiga) katagori daerah, yaitu :

- Daerah pantai, dengan kemiringan lahan tipe datar/pesisir ($0-2^{\circ}$) seluas $24.547,52$ ha meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi dan Warureja;
- Daerah dataran rendah, dengan kemiringan lahan tipe bergelombang/dataran ($2-15^{\circ}$) seluas $35.847,22$ ha meliputi Kecamatan Adiwerna, Dukuhturi, Talang, Tarub, Pagerbarang, Dukuhwaru, Slawi, Lebaksiu sebagian wilayah Suradadi, Warureja, Kedungbanteng dan Pangkah;
- Daerah dataran tinggi/pegunungan, dengan kemiringan lahan tipe curam/berbukit-bukit ($15-40^{\circ}$) seluas $20.383,84$ ha dan tipe sangat curam/pegunungan ($>40^{\circ}$) seluas $7.099,97$ ha meliputi Kecamatan Jatinegara, Margasari, Balapulung, Bumijawa, Bojong, sebagian Pangkah dan Kedungbanteng.

Dari segi topografi, wilayah Kabupaten Tegal mempunyai kemiringan tanah yang bervariasi antara 0% hingga lebih dari 40% . Bila ditinjau ketinggiannya terhadap permukaan laut, secara garis besar wilayah Kabupaten Tegal terbagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu dataran rendah, kawasan dengan ketinggian $250-500$ mdpl, kawasan dengan ketinggian $500-750$ mdpl, dan kawasan dengan ketinggian di atas 750 mdpl.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Kabupaten Tegal beriklim tropis, dengan rata-rata curah hujan sepanjang tahun sebesar 114,03 mm, suhu udara rata-rata setiap tahunnya berkisar pada 26,5 - 28,8 °C, dengan kelembaban udara rata-rata 68 - 86 %, tekanan udara rata-ratanya adalah 1.009,9 mb, kecepatan angin rata-ratanya adalah 1,6 - 3 knot dan Sinar matahari rata-ratanya 41.603 joule/cm² serta penguapan rata-ratanya 150,11 mm/tahun.

Secara administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986, Kabupaten Tegal terdiri dari 18 kecamatan, 281 desa, 6 kelurahan, yaitu : Kecamatan Margasari (13 desa), Kecamatan Bumijawa (18 desa), Kecamatan Bojong (17 desa), Kecamatan Balapulang (20 desa), Kecamatan Pagerbarang (13 desa), Kecamatan Lebaksiu (15 desa), Kecamatan Jatinegara (17 desa), Kecamatan Kedungbanteng (10 desa), Kecamatan Pangkah (23 desa), Kecamatan Slawi (5 desa, 5 kelurahan), Kecamatan Dukuhwaru (10 desa), Kecamatan Adiwerna (21 desa), Kecamatan Dukuhturi (18 desa), Kecamatan Talang (19 desa), Tarub (20 desa), Kecamatan Kramat (19 desa, 1 kelurahan), Kecamatan Suradadi (11 desa), dan Kecamatan Warureja (12 desa).

2. Demografis

Pada tahun 2018 jumlah penduduk Kabupaten Tegal sebanyak 1.437.225 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki 714.305 jiwa dan perempuan 722.920 jiwa, dengan sex ratio sebesar 98,81 %. Rata-rata kepadatan penduduk sebesar 1.635 jiwa/km² dan laju pertumbuhan penduduk tahun 2018 sebesar 0,26%. Kecamatan yang berpenduduk paling banyak adalah Kecamatan Adiwerna yaitu 119.966 jiwa, dan yang paling sedikit adalah Kecamatan Kedungbanteng 40.512 jiwa. *(BPS)

3. Perekonomian

PDRB Kabupaten Tegal tahun 2018 berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 30.044.412.28 juta dan PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2018 mencapai Rp. 23.552.548,37 juta.

Perekonomian Kabupaten Tegal pada tahun 2018 mengalami percepatan dibandingkan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha Kabupaten Tegal tahun 2018 menurut harga konstan mencapai 5,51 persen, sedangkan tahun 2017 sebesar 5,38 persen. Pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha Kabupaten Tegal tertinggi berdasarkan harga konstan dicapai oleh kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,40 persen.

Adapun kategori-kategori lainnya berturut-turut mencatat pertumbuhan yang positif, diantaranya kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 3,63 persen, kategori pertambangan dan penggalian sebesar 6,75 persen, kategori industri pengolahan sebesar 7,73 persen, kategori pengadaan listrik dan gas sebesar 0,37 persen, kategori pengadaan air,



pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 1,27 persen, kategori konstruksi sebesar 5,35 persen, kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 5,19 persen, kategori transportasi dan pergudangan sebesar 7,40 persen, kategori informasi dan komunikasi sebesar 7,60 persen, kategori jasa keuangan dan asuransi sebesar 7,19 persen, kategori real estate sebesar 7,83 persen, kategori jasa perusahaan sebesar 8,43 persen, kategori administrasi, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 2,96 persen, kategori jasa pendidikan sebesar 9,43 persen, kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 6,93 persen dan kategori jasa lainnya sebesar 4,37 persen.

Pendapatan per kapita atas dasar harga berlaku (ribu rupiah) tahun 2016 sebesar 19.398,60 sedangkan pertumbuhan pendapatan perkapita atas dasar harga berlaku sebesar 8,01 persen. Pendapatan per kapita atas dasar harga konstan (ribu rupiah) tahun 2016 sebesar 14.877,68 sedangkan pertumbuhan pendapatan per kapita atas dasar harga konstan sebesar 6,03 persen*(BPS tahun 2017)

6.2. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tanggal 06 Oktober 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, telah ditetapkan susunan perangkat daerah yang terdiri dari:

- A. Sekretariat Daerah;
- B. Sekretariat DPRD;
- C. Inspektorat;
- D. Dinas Daerah;
- E. Badan Daerah; dan
- F. Kecamatan

Perangkat daerah tersebut di atas dibentuk dengan susunan sebagai berikut:

- A. Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal ;
- B. Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal;
- C. Inspektorat Daerah Kabupaten Tegal;
- D. Dinas Daerah Kabupaten Tegal, terdiri dari :
 - 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - 2. Dinas Kesehatan
 - 3. Dinas Pekerjaan Umum
 - 4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan
 - 5. Satpol PP
 - 6. Dinas Sosial
 - 7. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
 - 8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - 9. Dinas Lingkungan Hidup



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 12. Dinas Perhubungan
 13. Dinas Komunikasi dan Informatika
 14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 15. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
 16. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
 17. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
 18. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan
 19. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- E. Badan Daerah terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
 2. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
- F. Kecamatan terdiri atas:
1. Kecamatan Margasari
 2. Kecamatan Bumijawa
 3. Kecamatan Bojong
 4. Kecamatan Balapulang
 5. Kecamatan Pagerbarang
 6. Kecamatan Lebaksiu.
 7. Kecamatan Jatinegara
 8. Kecamatan Kedungbanteng
 9. Kecamatan Pangkah
 10. Kecamatan Slawi
 11. Kecamatan Dukuwaru
 12. Kecamatan Adiwerna
 13. Kecamatan Dukuhturi
 14. Kecamatan Talang
 15. Kecamatan Tarub
 16. Kecamatan Kramat
 17. Kecamatan Suradadi
 18. Kecamatan Warureja
- Dalam wilayah kecamatan tersebut dibentuk kelurahan sebagai perangkat kecamatan, yang terdiri dari :
1. Kelurahan Pekembaran
 2. Kelurahan Slawi Wetan
 3. Kelurahan Procot
 4. Kelurahan Kudaile
 5. Kelurahan Kagok
 6. Kelurahan Dampyak



BAB VII
PENUTUP

Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. yang merupakan laporan dengan penjelasan secara naratif, analisis atau daftar terinci memuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) . Diharapkan dapat membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2019.


BUPATI TEGAL,

Dra. UMI AZIZAH

Lampiran 2.1. Anggaran Pendapatan berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2019

No	URUSAN	ANGGARAN (Rp)
	PENDAPATAN	2.860.327.632.000,00
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	256.708.635.000,00
	Pendidikan	100.000.000,00
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100.000.000,00
	Kesehatan	255.588.551.000,00
	Dinas Kesehatan	83.085.705.000,00
	RSUD Dr.Soeselo	150.000.000.000,00
	RSUD Suradadi	22.502.846.000,00
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.000.000.000,00
	Dinas Pekerjaan Umum	1.000.000.000,00
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	16.384.000,00
	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	16.384.000,00
	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	3.700.000,00
	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat	0,00
	Satuan Polisi Pamong Praja	3.700.000,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	7.418.101.000,00
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	0,00
	Lingkungan Hidup	1.780.000.000,00
	Dinas Lingkungan Hidup	1.780.000.000,00
	Administrasi Kependudukan dan Capil	550.000.000,00
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	550.000.000,00
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00
	Perhubungan	3.293.256.000,00
	Dinas Perhubungan	3.293.256.000,00
	Penanaman Modal	1.794.845.000,00
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.794.845.000,00
3	Urusan Pilihan	22.966.144.141,00
	Kelautan dan Perikanan	300.000.000,00
	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	300.000.000,00
	Pariwisata	16.466.336.200,00
	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	16.466.336.200,00
	Pertanian	74.652.000,00
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	74.652.000,00
	Perdagangan	5.858.023.941,00
	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.858.023.941,00
	Perindustrian	267.132.000,00
	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	267.132.000,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	2.573.234.751.859,00
	Administrasi Pemerintahan	182.068.400,00
	Sekretariat Daerah	0,00
	Sekretariat DPRD	0,00

No	URUSAN	ANGGARAN (Rp)
	Kecamatan Bojong	0,00
	Kecamatan Kramat	35.750.000,00
	Kecamatan Pangkah	0,00
	Kecamatan Slawi	146.318.400,00
	Pengawasan	0,00
	Inspektorat	0,00
	Keuangan	2.573.052.683.459,00
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.458.974.683.459,00
	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	114.078.000.000,00

Lampiran 2.2. Anggaran Belanja berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2019

No	URUSAN	ANGGARAN (Rp)
	BELANJA	2.910.822.912.000,00
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1.694.358.890.919,00
	Pendidikan	881.252.464.908,00
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	881.252.464.908,00
	Kesehatan	510.729.276.000,00
	Dinas Kesehatan	264.241.260.000,00
	RSUD Dr.Soeselo	191.640.497.000,00
	RSUD Suradadi	54.782.519.000,00
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	45.000.000,00
	Kecamatan Pagerbarang	20.000.000,00
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	228.790.927.000,00
	Dinas Pekerjaan Umum	207.100.389.000,00
	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	10.922.197.000,00
	Sekretariat Daerah	70.000.000,00
	Kecamatan Kramat	1.373.000.000,00
	Kecamatan Slawi	8.315.341.000,00
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	1.010.000.000,00
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	45.361.700.011,00
	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	43.166.411.011,00
	Satuan Polisi Pamong Praja	2.076.969.000,00
	Dinas Sosial	58.320.000,00
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	60.000.000,00
	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	17.013.726.000,00
	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat	3.053.394.000,00
	Satuan Polisi Pamong Praja	10.941.278.000,00
	Sekretariat Daerah	365.001.000,00
	Kecamatan Adiwerna	69.950.000,00
	Kecamatan Balapulang	36.149.000,00
	Kecamatan Bojong	56.800.000,00
	Kecamatan Bumijawa	55.818.000,00
	Kecamatan Dukuhturi	63.213.000,00
	Kecamatan Dukuwaru	70.898.000,00
	Kecamatan Jatinegara	86.000.000,00
	Kecamatan Kedungbanteng	58.600.000,00
	Kecamatan Kramat	60.000.000,00
	Kecamatan Lebaksiu	95.310.000,00
	Kecamatan Margasari	60.631.000,00
	Kecamatan Pagerbarang	61.320.000,00
	Kecamatan Pangkah	96.948.000,00
	Kecamatan Slawi	114.680.000,00
	Kecamatan Suradadi	86.588.000,00
	Kecamatan Talang	83.000.000,00
	Kecamatan Tarub	67.148.000,00
	Kecamatan Warurejo	81.000.000,00

No	URUSAN	ANGGARAN (Rp)
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.350.000.000,00
	Sosial	11.210.797.000,00
	Dinas Sosial	7.012.566.000,00
	Sekretariat Daerah	3.728.160.000,00
	Kecamatan Adiwerna	28.750.000,00
	Kecamatan Balapulang	24.532.000,00
	Kecamatan Bojong	27.000.000,00
	Kecamatan Bumijawa	35.000.000,00
	Kecamatan Dukuhturi	28.200.000,00
	Kecamatan Dukuwaru	27.000.000,00
	Kecamatan Jatinegara	10.000.000,00
	Kecamatan Kedungbanteng	19.000.000,00
	Kecamatan Kramat	40.000.000,00
	Kecamatan Lebaksiu	35.000.000,00
	Kecamatan Margasari	33.000.000,00
	Kecamatan Pangkah	24.000.000,00
	Kecamatan Slawi	30.000.000,00
	Kecamatan Suradadi	35.000.000,00
	Kecamatan Talang	25.000.000,00
	Kecamatan Tarub	27.589.000,00
	Kecamatan Warurejo	21.000.000,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	141.003.500.000,00
	Tenaga Kerja	3.397.000.000,00
	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	3.397.000.000,00
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.755.129.000,00
	Dinas Sosial	20.000.000,00
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	8.356.729.000,00
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	110.000.000,00
	Sekretariat Daerah	50.000.000,00
	Kecamatan Adiwerna	9.000.000,00
	Kecamatan Balapulang	8.000.000,00
	Kecamatan Bojong	29.000.000,00
	Kecamatan Bumijawa	15.000.000,00
	Kecamatan Dukuhturi	20.000.000,00
	Kecamatan Dukuwaru	6.000.000,00
	Kecamatan Jatinegara	3.500.000,00
	Kecamatan Kedungbanteng	7.500.000,00
	Kecamatan Kramat	15.000.000,00
	Kecamatan Lebaksiu	12.500.000,00
	Kecamatan Margasari	10.000.000,00
	Kecamatan Pagerbarang	7.000.000,00
	Kecamatan Pangkah	12.000.000,00
	Kecamatan Slawi	19.900.000,00
	Kecamatan Suradadi	10.000.000,00
	Kecamatan Talang	10.000.000,00

No	URUSAN	ANGGARAN (Rp)
	Kecamatan Tarub	9.000.000,00
	Kecamatan Warurejo	15.000.000,00
	Pangan	2.209.000.000,00
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2.209.000.000,00
	Pertanahan	500.000.000,00
	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	500.000.000,00
	Lingkungan Hidup	45.636.107.000,00
	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	21.472.750.000,00
	Dinas Lingkungan Hidup	22.966.897.000,00
	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.032.860.000,00
	Kecamatan Slawi	163.600.000,00
	Administrasi Kependudukan dan Capil	12.632.279.000,00
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12.632.279.000,00
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	13.638.653.000,00
	Dinas Kesehatan	200.000.000,00
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	45.000.000,00
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	10.783.025.000,00
	Sekretariat Daerah	154.000.000,00
	Kecamatan Adiwerna	114.000.000,00
	Kecamatan Balapulang	89.000.000,00
	Kecamatan Bojong	69.000.000,00
	Kecamatan Bumijawa	92.000.000,00
	Kecamatan Dukuhturi	93.618.000,00
	Kecamatan Dukuhwaru	101.000.000,00
	Kecamatan Jatinegara	74.000.000,00
	Kecamatan Kedungbanteng	70.000.000,00
	Kecamatan Kramat	185.628.000,00
	Kecamatan Lebaksiu	113.000.000,00
	Kecamatan Margasari	75.000.000,00
	Kecamatan Pagarbarang	89.500.000,00
	Kecamatan Pangkah	96.000.000,00
	Kecamatan Slawi	749.308.000,00
	Kecamatan Suradadi	100.000.000,00
	Kecamatan Talang	133.000.000,00
	Kecamatan Tarub	103.574.000,00
	Kecamatan Warurejo	109.000.000,00
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.876.850.000,00
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	6.876.850.000,00
	Perhubungan	19.623.457.000,00
	Dinas Perhubungan	19.623.457.000,00
	Komunikasi dan Informatika	7.934.754.000,00
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	200.000.000,00
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	56.200.000,00
	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.398.554.000,00

No	URUSAN	ANGGARAN (Rp)
	Sekretariat Daerah	1.250.000.000,00
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	30.000.000,00
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.055.000.000,00
	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.055.000.000,00
	Penanaman Modal	6.934.062.000,00
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	25.000.000,00
	Dinas Kesehatan	25.000.000,00
	Dinas Pekerjaan Umum	10.000.000,00
	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	25.000.000,00
	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat	8.000.000,00
	Satuan Polisi Pamong Praja	15.000.000,00
	Dinas Sosial	14.400.000,00
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	20.000.000,00
	Dinas Lingkungan Hidup	15.000.000,00
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20.000.000,00
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	25.000.000,00
	Dinas Perhubungan	10.000.000,00
	Dinas Komunikasi dan Informatika	15.000.000,00
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.986.342.000,00
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	25.000.000,00
	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	10.000.000,00
	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	20.000.000,00
	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	350.000.000,00
	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	20.000.000,00
	Sekretariat DPRD	15.000.000,00
	Kecamatan Adiwerna	9.000.000,00
	Kecamatan Balapulang	5.000.000,00
	Kecamatan Bojong	11.000.000,00
	Kecamatan Bumijawa	15.000.000,00
	Kecamatan Dukuhturi	10.000.000,00
	Kecamatan Dukuhwaru	5.000.000,00
	Kecamatan Jatinegara	5.000.000,00
	Kecamatan Kedungbanteng	7.000.000,00
	Kecamatan Kramat	15.000.000,00
	Kecamatan Lebaksiu	8.000.000,00
	Kecamatan Margasari	6.820.000,00
	Kecamatan Pagerbarang	16.500.000,00
	Kecamatan Pangkah	8.500.000,00
	Kecamatan Slawi	23.000.000,00
	Kecamatan Suradadi	9.000.000,00
	Kecamatan Talang	10.000.000,00
	Kecamatan Tarub	9.000.000,00
	Kecamatan Warurejo	10.000.000,00
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	30.000.000,00
	Inspektorat	7.500.000,00

No	URUSAN	ANGGARAN (Rp)
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	20.000.000,00
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	15.000.000,00
	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	10.000.000,00
	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	15.000.000,00
	Kepemudaan dan Olah Raga	2.950.390.000,00
	Dinas Sosial	100.000.000,00
	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	2.728.490.000,00
	Sekretariat Daerah	40.000.000,00
	Kecamatan Balapulang	5.000.000,00
	Kecamatan Bojong	10.000.000,00
	Kecamatan Dukuhturi	7.500.000,00
	Kecamatan Dukuwaru	5.000.000,00
	Kecamatan Jatinegara	3.000.000,00
	Kecamatan Kedungbanteng	6.000.000,00
	Kecamatan Kramat	10.000.000,00
	Kecamatan Lebaksiu	5.100.000,00
	Kecamatan Margasari	7.800.000,00
	Kecamatan Pagerbarang	7.500.000,00
	Kecamatan Pangkah	5.000.000,00
	Kecamatan Slawi	10.000.000,00
	Statistik	360.000.000,00
	Dinas Komunikasi dan Informatika	300.000.000,00
	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	60.000.000,00
	Kebudayaan	4.483.535.000,00
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.002.620.000,00
	Dinas Kesehatan	200.000.000,00
	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	200.000.000,00
	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	220.000.000,00
	Sekretariat Daerah	100.000.000,00
	Kecamatan Adiwerna	48.000.000,00
	Kecamatan Balapulang	30.000.000,00
	Kecamatan Bojong	34.948.000,00
	Kecamatan Bumijawa	67.840.000,00
	Kecamatan Dukuhturi	59.127.000,00
	Kecamatan Dukuwaru	50.000.000,00
	Kecamatan Jatinegara	25.000.000,00
	Kecamatan Kedungbanteng	39.000.000,00
	Kecamatan Kramat	65.000.000,00
	Kecamatan Lebaksiu	32.000.000,00
	Kecamatan Margasari	31.500.000,00
	Kecamatan Pagerbarang	31.500.000,00
	Kecamatan Pangkah	30.000.000,00
	Kecamatan Slawi	49.000.000,00
	Kecamatan Suradadi	70.000.000,00
	Kecamatan Talang	45.000.000,00
	Kecamatan Tarub	25.000.000,00

No	URUSAN	ANGGARAN (Rp)
	Kecamatan Warurejo	28.000.000,00
	Perpustakaan	496.700.000,00
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	451.700.000,00
	Sekretariat DPRD	25.000.000,00
	Kecamatan Slawi	20.000.000,00
	Kearsipan	3.520.584.000,00
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3.375.584.000,00
	Sekretariat DPRD	30.000.000,00
	Sekretariat Daerah	40.000.000,00
	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	25.000.000,00
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	50.000.000,00
3	Urusan Pilihan	147.022.146.000,00
	Kelautan dan Perikanan	7.650.139.000,00
	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	7.650.139.000,00
	Pariwisata	15.276.836.000,00
	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	15.276.836.000,00
	Pertanian	43.976.456.000,00
	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	1.575.205.000,00
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	42.401.251.000,00
	Energi dan Sumberdaya Mineral	42.397.970.000,00
	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	4.267.000.000,00
	Dinas Perhubungan	38.130.970.000,00
	Perdagangan	22.153.771.000,00
	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	22.153.771.000,00
	Perindustrian	15.381.974.000,00
	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	15.221.974.000,00
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	160.000.000,00
	Transmigrasi	185.000.000,00
	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	185.000.000,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	928.438.375.081,00
	Administrasi Pemerintahan	125.253.583.200,00
	Dinas Perhubungan	100.000.000,00
	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	722.840.000,00
	Sekretariat Daerah	29.493.722.200,00
	Sekretariat DPRD	57.226.464.000,00
	Kecamatan Adiwerna	1.472.814.000,00
	Kecamatan Balapulang	1.168.627.000,00
	Kecamatan Bojong	1.432.032.000,00
	Kecamatan Bumijawa	1.207.774.000,00
	Kecamatan Dukuhturi	1.568.839.000,00
	Kecamatan Dukuhwaru	1.392.002.000,00
	Kecamatan Jatinegara	1.367.674.000,00
	Kecamatan Kedungbanteng	1.429.934.000,00
	Kecamatan Kramat	2.410.167.000,00
	Kecamatan Lebaksiu	1.186.495.000,00
	Kecamatan Margasari	1.773.901.000,00

No	URUSAN	ANGGARAN (Rp)
	Kecamatan Pagerbarang	1.619.772.000,00
	Kecamatan Pangkah	1.629.303.000,00
	Kecamatan Slawi	6.561.020.000,00
	Kecamatan Suradadi	1.484.980.000,00
	Kecamatan Talang	1.563.084.000,00
	Kecamatan Tarub	1.443.894.000,00
	Kecamatan Warurejo	1.442.992.000,00
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.313.253.000,00
	Inspektorat	2.167.000.000,00
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	75.000.000,00
	Pengawasan	5.949.820.000,00
	Inspektorat	5.949.820.000,00
	Perencanaan	13.235.743.000,00
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	70.000.000,00
	Dinas Kesehatan	20.000.000,00
	RSUD Suradadi	10.000.000,00
	Dinas Pekerjaan Umum	20.000.000,00
	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	65.000.000,00
	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat	36.000.000,00
	Satuan Polisi Pamong Praja	36.000.000,00
	Dinas Sosial	92.000.000,00
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	30.000.000,00
	Dinas Lingkungan Hidup	45.000.000,00
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	27.500.000,00
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	240.000.000,00
	Dinas Perhubungan	33.000.000,00
	Dinas Komunikasi dan Informatika	34.000.000,00
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	40.000.000,00
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	25.000.000,00
	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	175.000.000,00
	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	43.000.000,00
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	45.000.000,00
	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	45.000.000,00
	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	63.000.000,00
	Sekretariat Daerah	327.690.000,00
	Sekretariat DPRD	27.000.000,00
	Kecamatan Adiwerna	40.650.000,00
	Kecamatan Balapulang	33.766.000,00
	Kecamatan Bojong	52.500.000,00
	Kecamatan Bumijawa	41.000.000,00
	Kecamatan Dukuhturi	38.590.000,00
	Kecamatan Dukuhwaru	45.000.000,00
	Kecamatan Jatinegara	37.500.000,00
	Kecamatan Kedungbanteng	37.000.000,00
	Kecamatan Kramat	40.000.000,00

No	URUSAN	ANGGARAN (Rp)
	Kecamatan Lebaksiu	41.000.000,00
	Kecamatan Margasari	41.505.000,00
	Kecamatan Pagerbarang	38.500.000,00
	Kecamatan Pangkah	42.000.000,00
	Kecamatan Slawi	78.680.000,00
	Kecamatan Suradadi	36.520.000,00
	Kecamatan Talang	49.000.000,00
	Kecamatan Tarub	39.700.000,00
	Kecamatan Warurejo	43.000.000,00
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	173.000.000,00
	Inspektorat	30.000.000,00
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	10.492.642.000,00
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	10.000.000,00
	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	165.000.000,00
	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	40.000.000,00
	Keuangan	770.445.734.881,00
	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	30.000.000,00
	Sekretariat Daerah	75.000.000,00
	Kecamatan Adiwerna	16.000.000,00
	Kecamatan Pagerbarang	13.000.000,00
	Kecamatan Pangkah	20.000.000,00
	Kecamatan Slawi	62.885.000,00
	Kecamatan Talang	19.000.000,00
	Kecamatan Tarub	20.000.000,00
	Kecamatan Warurejo	12.000.000,00
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	754.814.105.881,00
	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	15.363.744.000,00
	Kepegawaian	13.553.494.000,00
	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	13.553.494.000,00

Lampiran 3.1. Realisasi Pendapatan berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2019

No.	URUSAN	ANGGARAN Rp	REALISASI Rp	LEBIH/(KURANG)	
				Rp	%
Urusan Wajib Pelayanan Dasar :					
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100.000.000,00	131.828.891,00	(31.828.891,00)	131,83
2	Dinas Kesehatan	83.085.705.000,00	81.580.125.373,20	1.505.579.626,80	98,19
3	Rumah Sakit Umum Dr. Soeselo Slawi	150.000.000.000,00	135.076.522.175,00	14.923.477.825,00	90,05
4	RSUD Suradadi	22.502.846.000,00	18.960.986.858,09	3.541.859.141,91	84,26
5	Dinas Pekerjaan Umum	1.000.000.000,00	961.550.485,00	38.449.515,00	96,16
6	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	16.384.000,00	220.770.830,00	(204.386.830,00)	1.347,48
7	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat	0,00	317.100,00	(317.100,00)	0,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja	3.700.000,00	3.777.000,00	(77.000,00)	102
	Sub Jumlah	256.708.635.000,00	236.935.878.712,29	19.772.756.287,71	92,30
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar :					
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	-	0,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	1.780.000.000,00	1.488.056.000,00	291.944.000,00	83,60
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	550.000.000,00	745.850.000,00	(195.850.000,00)	135,61
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	2.960.000,00	(2.960.000,00)	0,00
13	Dinas Perhubungan	3.293.256.000,00	2.507.436.857,00	785.819.143,00	76,14
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.794.845.000,00	2.125.311.210,00	(330.466.210,00)	118,41
	Sub Jumlah	7.418.101.000,00	6.869.614.067,00	548.486.933,00	92,61
Urusan Pilihan :					
15	Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan	300.000.000,00	315.406.950,00	(15.406.950,00)	105,14
16	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	16.466.336.200,00	12.063.686.445,00	4.402.649.755,00	73,26
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	74.652.000,00	213.784.117,00	(139.132.117,00)	286,37
18	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar	5.858.023.941,00	5.585.748.134,00	272.275.807,00	95,35
19	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	267.132.000,00	407.297.817,00	(140.165.817,00)	152,47
	Sub Jumlah	22.966.144.141,00	18.585.923.463,00	4.380.220.678,00	712,60
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang :					
20	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	-	0,00
21	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	-	0,00
22	Kecamatan Bojong	0,00	0,00	-	0,00
23	Kecamatan Kramat	35.750.000,00	35.750.000,00	-	100,00
24	Kecamatan Pangkah	0,00	0,00	-	0,00
25	Kecamatan Slawi	146.318.400,00	138.416.000,00	7.902.400,00	94,60
26	Inspektorat	0,00	0,00	-	0,00
27	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.458.974.683.459,00	2.369.089.418.568,00	89.885.264.891,00	96,34
28	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	114.078.000.000,00	124.022.483.342,00	(9.944.483.342,00)	108,72
	Sub Jumlah	2.573.234.751.859,00	2.493.286.067.910,00	79.948.683.949,00	96,89
	Jumlah	2.860.327.632.000,00	2.755.677.484.152,29	104.650.147.847,71	96,34

Lampiran 3.2. Realisasi Belanja berdasarkan Urusan Tahun 2019

No.	URUSAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/(KURANG)	
		Rp	Rp	Rp	%
	BELANJA	2.910.822.912.000,00	2.717.431.598.854,15	193.391.313.145,85	93,36
A	Urusan Wajib Pelayanan Dasar :	1.694.358.890.919,00	1.569.292.529.833,15	125.066.361.085,85	92,62
1	Pendidikan	881.252.464.908,00	855.021.655.907,00	26.230.809.001,00	97,02
1.1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	881.252.464.908,00	855.021.655.907,00	26.230.809.001,00	97,02
2	Kesehatan	510.729.276.000,00	449.726.509.210,15	61.002.766.789,85	88,06
2.1	Dinas Kesehatan	264.241.260.000,00	247.675.182.161,00	16.566.077.839,00	93,73
2.2	Rumah Sakit Umum Dr. Soeselo Slawi	191.640.497.000,00	151.954.935.510,00	39.685.561.490,00	79,29
2.3	RSUD Suradadi	54.782.519.000,00	50.035.231.539,15	4.747.287.460,85	91,33
2.4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	45.000.000,00	44.080.000,00	920.000,00	97,96
2.5	Kecamatan Pagerbarang	20.000.000,00	17.080.000,00	2.920.000,00	85,40
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	228.790.927.000,00	200.005.270.499,00	28.785.656.501,00	87,42
3.1	Dinas Pekerjaan Umum	207.100.389.000,00	180.474.820.144,00	26.625.568.856,00	87,14
3.2	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	10.922.197.000,00	9.139.543.847,00	1.782.653.153,00	83,68
3.3	Sekretariat Daerah	70.000.000,00	45.464.798,00	24.535.202,00	64,95
3.4	Kecamatan Kramat	1.373.000.000,00	1.368.030.000,00	4.970.000,00	99,64
3.5	Kecamatan Slawi	8.315.341.000,00	8.265.738.300,00	49.602.700,00	99,40
3.6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	1.010.000.000,00	711.673.410,00	298.326.590,00	70,46
4	Pemukiman	45.361.700.011,00	37.853.885.696,00	7.507.814.315,00	83,45
4.1	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	43.166.411.011,00	35.705.336.180,00	7.461.074.831,00	82,72
4.2	Satuan Polisi Pamong Praja	2.076.969.000,00	2.041.632.445,00	35.336.555,00	98,30
4.3	Dinas Sosial	58.320.000,00	54.288.500,00	4.031.500,00	93,09
4.4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	60.000.000,00	52.628.571,00	7.371.429,00	87,71
5	serta Perlindungan Masyarakat	17.013.726.000,00	16.198.084.978,00	815.641.022,00	95,21
5.1	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat	3.053.394.000,00	2.884.821.244,00	168.572.756,00	94,48
5.2	Satuan Polisi Pamong Praja	10.941.278.000,00	10.485.220.563,00	456.057.437,00	95,83
5.3	Sekretariat Daerah	365.001.000,00	295.834.700,00	69.166.300,00	81,05
5.4	Kecamatan Adiwerna	69.950.000,00	69.789.900,00	160.100,00	99,77
5.5	Kecamatan Balapulang	36.149.000,00	34.409.000,00	1.740.000,00	95,19
5.6	Kecamatan Bojong	56.800.000,00	54.249.000,00	2.551.000,00	95,51
5.7	Kecamatan Bumijawa	55.818.000,00	55.638.000,00	180.000,00	99,68
5.8	Kecamatan Dukuhturi	63.213.000,00	63.098.900,00	114.100,00	99,82
5.9	Kecamatan Dukuhwaru	70.898.000,00	70.897.000,00	1.000,00	100,00
5.10	Kecamatan Jatinegara	86.000.000,00	83.023.000,00	2.977.000,00	96,54
5.11	Kecamatan Kedungbanteng	58.600.000,00	54.056.850,00	4.543.150,00	92,25
5.12	Kecamatan Kramat	60.000.000,00	59.988.000,00	12.000,00	99,98

No.	URUSAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/(KURANG)	
		Rp	Rp	Rp	%
5.13	Kecamatan Lebaksiu	95.310.000,00	94.624.100,00	685.900,00	99,28
5.14	Kecamatan Margasari	60.631.000,00	60.178.800,00	452.200,00	99,25
5.15	Kecamatan Pagerbarang	61.320.000,00	59.707.000,00	1.613.000,00	97,37
5.16	Kecamatan Pangkah	96.948.000,00	96.598.000,00	350.000,00	99,64
5.17	Kecamatan Slawi	114.680.000,00	112.187.500,00	2.492.500,00	97,83
5.18	Kecamatan Suradadi	86.588.000,00	86.587.850,00	150,00	100,00
5.19	Kecamatan Talang	83.000.000,00	76.264.000,00	6.736.000,00	91,88
5.20	Kecamatan Tarub	67.148.000,00	66.226.750,00	921.250,00	98,63
5.21	Kecamatan Warurejo	81.000.000,00	80.994.800,00	5.200,00	99,99
5.22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.350.000.000,00	1.253.690.021,00	96.309.979,00	92,87
6	Sosial	11.210.797.000,00	10.487.123.543,00	723.673.457,00	93,54
6.1	Dinas Sosial	7.012.566.000,00	6.632.957.686,00	379.608.314,00	94,59
6.2	Sekretariat Daerah	3.728.160.000,00	3.390.221.657,00	337.938.343,00	90,94
6.3	Kecamatan Adiwerna	28.750.000,00	28.489.900,00	260.100,00	99,10
6.4	Kecamatan Balapulang	24.532.000,00	24.523.600,00	8.400,00	99,97
6.5	Kecamatan Bojong	27.000.000,00	26.308.800,00	691.200,00	97,44
6.6	Kecamatan Bumijawa	35.000.000,00	32.369.500,00	2.630.500,00	92,48
6.7	Kecamatan Dukuhhuri	28.200.000,00	27.677.000,00	523.000,00	98,15
6.8	Kecamatan Dukuhwaru	27.000.000,00	26.999.800,00	200,00	100,00
6.9	Kecamatan Jatinegara	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
6.10	Kecamatan Kedungbanteng	19.000.000,00	18.984.900,00	15.100,00	99,92
6.11	Kecamatan Kramat	40.000.000,00	39.947.000,00	53.000,00	99,87
6.12	Kecamatan Lebaksiu	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00
6.13	Kecamatan Margasari	33.000.000,00	32.049.800,00	950.200,00	97,12
6.15	Kecamatan Pangkah	24.000.000,00	23.736.000,00	264.000,00	98,90
6.16	Kecamatan Slawi	30.000.000,00	29.995.600,00	4.400,00	99,99
6.17	Kecamatan Suradadi	35.000.000,00	34.998.000,00	2.000,00	99,99
6.18	Kecamatan Talang	25.000.000,00	24.428.700,00	571.300,00	97,71
6.19	Kecamatan Tarub	27.589.000,00	27.435.800,00	153.200,00	99,44
6.20	Kecamatan Warurejo	21.000.000,00	20.999.800,00	200,00	100,00
B	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar :	141.003.500.000,00	128.446.415.046,00	12.557.084.954,00	91,09
1	Tenaga Kerja	3.397.000.000,00	3.057.795.400,00	339.204.600,00	90,01
1.1	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	3.397.000.000,00	3.057.795.400,00	339.204.600,00	90,01
2	Perlindungan Anak	8.755.129.000,00	8.030.670.687,00	724.458.313,00	91,73
2.1	Dinas Sosial	20.000.000,00	19.680.000,00	320.000,00	98,40
2.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	8.356.729.000,00	7.668.281.085,00	688.447.915,00	91,76
2.3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	110.000.000,00	100.578.452,00	9.421.548,00	91,43
2.4	Sekretariat Daerah	50.000.000,00	48.604.950,00	1.395.050,00	97,21
2.5	Kecamatan Adiwerna	9.000.000,00	7.600.000,00	1.400.000,00	84,44
2.6	Kecamatan Balapulang	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
2.7	Kecamatan Bojong	29.000.000,00	23.816.000,00	5.184.000,00	82,12
2.8	Kecamatan Bumijawa	15.000.000,00	9.039.000,00	5.961.000,00	60,26

No.	URUSAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/(KURANG)	
		Rp	Rp	Rp	%
2.9	Kecamatan Dukuhturi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
2.10	Kecamatan Dukuhwaru	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
2.11	Kecamatan Jatinegara	3.500.000,00	3.499.700,00	300,00	99,99
2.12	Kecamatan Kedungbanteng	7.500.000,00	7.480.000,00	20.000,00	99,73
2.13	Kecamatan Kramat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
2.14	Kecamatan Lebaksiu	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00
2.15	Kecamatan Margasari	10.000.000,00	9.650.000,00	350.000,00	96,50
2.16	Kecamatan Pagerbarang	7.000.000,00	6.440.000,00	560.000,00	92,00
2.17	Kecamatan Pangkah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00
2.18	Kecamatan Slawi	19.900.000,00	10.987.500,00	8.912.500,00	55,21
2.19	Kecamatan Suradadi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
2.20	Kecamatan Talang	10.000.000,00	8.955.000,00	1.045.000,00	89,55
2.21	Kecamatan Tarub	9.000.000,00	7.559.000,00	1.441.000,00	83,99
2.22	Kecamatan Warureja	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
3	Pangan	2.209.000.000,00	1.761.769.062,00	447.230.938,00	79,75
3.1	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2.209.000.000,00	1.761.769.062,00	447.230.938,00	79,75
4	Pertanahan	500.000.000,00	416.173.969,00	83.826.031,00	83,23
4.1	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	500.000.000,00	416.173.969,00	83.826.031,00	83,23
5	Lingkungan Hidup	45.636.107.000,00	41.434.355.170,00	4.201.751.830,00	90,79
5.1	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	21.472.750.000,00	20.087.246.158,00	1.385.503.842,00	93,55
5.2	Dinas Lingkungan Hidup	22.966.897.000,00	20.158.175.262,00	2.808.721.738,00	87,77
5.3	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.032.860.000,00	1.028.482.200,00	4.377.800,00	99,58
5.4	Kecamatan Slawi	163.600.000,00	160.451.550,00	3.148.450,00	98,08
6	Administrasi Kependudukan dan Sipil	12.632.279.000,00	11.987.254.248,00	645.024.752,00	94,89
6.1	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	12.632.279.000,00	11.987.254.248,00	645.024.752,00	94,89
7	Pemberdayaan Masyarakat	13.638.653.000,00	12.256.680.019,00	1.381.972.981,00	89,87
7.1	Dinas Kesehatan	200.000.000,00	172.055.471,00	27.944.529,00	86,03
7.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	45.000.000,00	44.779.800,00	220.200,00	99,51
7.3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	10.783.025.000,00	9.609.142.658,00	1.173.882.342,00	89,11
7.4	Sekretariat Daerah	154.000.000,00	152.034.940,00	1.965.060,00	98,72
7.5	Kecamatan Adiwerna	114.000.000,00	107.294.750,00	6.705.250,00	94,12
7.6	Kecamatan Balapulang	89.000.000,00	86.767.900,00	2.232.100,00	97,49
7.7	Kecamatan Bojong	69.000.000,00	60.974.000,00	8.026.000,00	88,37
7.8	Kecamatan Bumijawa	92.000.000,00	91.232.750,00	767.250,00	99,17
7.9	Kecamatan Dukuhturi	93.618.000,00	90.309.200,00	3.308.800,00	96,47
7.10	Kecamatan Dukuhwaru	101.000.000,00	100.999.600,00	400,00	100,00
7.11	Kecamatan Jatinegara	74.000.000,00	68.499.750,00	5.500.250,00	92,57

No.	URUSAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/(KURANG)	
		Rp	Rp	Rp	%
7.12	Kecamatan Kedungbanteng	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00
7.13	Kecamatan Kramat	185.628.000,00	182.950.000,00	2.678.000,00	98,56
7.14	Kecamatan Lebaksiu	113.000.000,00	112.834.700,00	165.300,00	99,85
7.15	Kecamatan Margasari	75.000.000,00	70.420.000,00	4.580.000,00	93,89
7.16	Kecamatan Pagerbarang	89.500.000,00	82.456.000,00	7.044.000,00	92,13
7.17	Kecamatan Pangkah	96.000.000,00	95.922.000,00	78.000,00	99,92
7.18	Kecamatan Slawi	749.308.000,00	673.497.350,00	75.810.650,00	89,88
7.19	Kecamatan Suradadi	100.000.000,00	99.985.750,00	14.250,00	99,99
7.20	Kecamatan Talang	133.000.000,00	85.844.700,00	47.155.300,00	64,54
7.21	Kecamatan Tarub	103.574.000,00	89.681.700,00	13.892.300,00	86,59
7.22	Kecamatan Warureja	109.000.000,00	108.997.000,00	3.000,00	100,00
8	Berencana	6.876.850.000,00	5.906.486.101,00	970.363.899,00	85,89
8.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	6.876.850.000,00	5.906.486.101,00	970.363.899,00	85,89
9	Perhubungan	19.623.457.000,00	18.343.115.728,00	1.280.341.272,00	93,48
9.1	Dinas Perhubungan	19.623.457.000,00	18.343.115.728,00	1.280.341.272,00	93,48
10	Komunikasi dan Informatika	7.934.754.000,00	7.183.312.791,00	751.441.209,00	90,53
10.1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	200.000.000,00	172.182.600,00	27.817.400,00	86,09
10.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	56.200.000,00	51.671.950,00	4.528.050,00	91,94
10.3	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.398.554.000,00	5.846.192.741,00	552.361.259,00	91,37
10.4	Sekretariat Daerah	1.250.000.000,00	1.093.040.500,00	156.959.500,00	87,44
10.5	Badan Pemencanaan Daerah dan Penelitian Pengembangan	30.000.000,00	20.225.000,00	9.775.000,00	67,42
11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.055.000.000,00	940.693.123,00	114.306.877,00	89,17
11.1	Kecil dan Menengah	1.055.000.000,00	940.693.123,00	114.306.877,00	89,17
12	Penanaman Modal	6.934.062.000,00	6.272.394.017,00	661.667.983,00	90,46
12.1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	25.000.000,00	-	25.000.000,00	-
12.2	Dinas Kesehatan	25.000.000,00	24.003.150,00	996.850,00	96,01
12.3	Dinas Pekerjaan Umum	10.000.000,00	9.999.500,00	500,00	100,00
12.4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	25.000.000,00	22.902.400,00	2.097.600,00	91,61
12.5	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat	8.000.000,00	7.300.000,00	700.000,00	91,25
12.6	Satuan Polisi Pamong Praja	15.000.000,00	14.414.000,00	586.000,00	96,09
12.7	Dinas Sosial	14.400.000,00	14.399.800,00	200,00	100,00
12.8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	20.000.000,00	19.699.800,00	300.200,00	98,50
12.9	Dinas Lingkungan Hidup	15.000.000,00	12.625.900,00	2.374.100,00	84,17
12.10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20.000.000,00	16.494.000,00	3.506.000,00	82,47
12.11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	25.000.000,00	24.999.400,00	600,00	100,00

No.	URUSAN	ANGGARAN Rp	REALISASI Rp	LEBIH/(KURANG)	
				Rp	%
12.12	Dinas Perhubungan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
12.13	Dinas Komunikasi dan Informatika	15.000.000,00	13.930.980,00	1.069.020,00	92,87
12.14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.986.342.000,00	5.446.814.447,00	539.527.553,00	90,99
12.15	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	25.000.000,00	20.231.500,00	4.768.500,00	80,93
12.16	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
12.17	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	20.000.000,00	19.899.350,00	100.650,00	99,50
12.19	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	350.000.000,00	307.700.350,00	42.299.650,00	87,91
12.20	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	20.000.000,00	18.513.640,00	1.486.360,00	92,57
12.21	Sekretariat DPRD	15.000.000,00	13.117.300,00	1.882.700,00	87,45
12.22	Kantor Camat Adiwerna	9.000.000,00	8.999.800,00	200,00	100,00
12.23	Kantor Camat Balapulang	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
12.24	Kantor Camat Bojong	11.000.000,00	10.420.000,00	580.000,00	94,73
12.25	Kantor Camat Bumijawa	15.000.000,00	11.326.000,00	3.674.000,00	75,51
12.26	Kantor Camat Dukuhturi	10.000.000,00	9.440.000,00	560.000,00	94,40
12.27	Kantor Camat Dukuhwaru	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
12.28	Kantor Camat Jatinegara	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
12.29	Kantor Camat Kd.Banteng	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00
12.30	Kantor Camat Kramat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
12.31	Kantor Camat Lebaksu	8.000.000,00	7.970.000,00	30.000,00	99,63
12.32	Kantor Camat Margasari	6.820.000,00	6.814.300,00	5.700,00	99,92
12.33	Kantor Camat Pagerbarang	16.500.000,00	13.834.300,00	2.665.700,00	83,84
12.34	Kantor Camat Pangkah	8.500.000,00	7.500.000,00	1.000.000,00	88,24
12.35	Kantor Camat Slawi	23.000.000,00	12.450.750,00	10.549.250,00	54,13
12.36	Kantor Camat Suradadi	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
12.37	Kantor Camat Talang	10.000.000,00	9.090.500,00	909.500,00	90,91
12.38	Kantor Camat Tarub	9.000.000,00	8.999.850,00	150,00	100,00
12.39	Kantor Camat Warureja	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
12.40	Badan penanggulangan Bencana Daerah	30.000.000,00	20.193.000,00	9.807.000,00	67,31
12.41	Inspektorat	7.500.000,00	7.250.000,00	250.000,00	96,67
12.42	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pembangunan	20.000.000,00	16.605.000,00	3.395.000,00	83,03
12.43	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	15.000.000,00	13.735.000,00	1.265.000,00	91,57
12.44	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	10.000.000,00	9.720.000,00	280.000,00	97,20
12.45	Badan Kepegawaian, Kependidikan dan Pelathan Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
13	Kepemudaan dan Olahraga	2.950.390.000,00	2.780.549.533,00	169.840.467,00	94,24
13.1	Dinas Sosial	100.000.000,00	98.663.800,00	1.336.200,00	98,66
13.2	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	2.728.490.000,00	2.573.397.033,00	155.092.967,00	94,32
13.3	Sekretariat Daerah	40.000.000,00	35.399.200,00	4.600.800,00	88,50
13.4	Kecamatan Balapulang	5.000.000,00	4.449.850,00	550.150,00	89,00

No.	URUSAN	ANGGARAN Rp	REALISASI Rp	LEBIH/(KURANG)	
				Rp	%
13.5	Kecamatan Bojong	10.000.000,00	9.830.000,00	170.000,00	98,30
13.6	Kecamatan Dukuhturi	7.500.000,00	7.010.000,00	490.000,00	93,47
13.7	Kecamatan Dukuhwaru	5.000.000,00	4.999.800,00	200,00	100,00
13.8	Kecamatan Jatinegara	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-
13.9	Kecamatan Kedungbanteng	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
13.10	Kecamatan Kramat	10.000.000,00	9.960.000,00	40.000,00	99,60
13.11	Kecamatan Lebaksiu	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	100,00
13.12	Kecamatan Margasari	7.800.000,00	7.389.850,00	410.150,00	94,74
13.13	Kecamatan Pagerbarang	7.500.000,00	7.180.000,00	320.000,00	95,73
13.14	Kecamatan Pangkah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
13.15	Kecamatan Slawi	10.000.000,00	6.170.000,00	3.830.000,00	61,70
14	Statistik	360.000.000,00	349.002.790,00	10.997.210,00	96,95
14.1	Dinas Komunikasi dan Informatika	300.000.000,00	295.961.381,00	4.038.619,00	98,65
14.2	Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan	60.000.000,00	53.041.409,00	6.958.591,00	88,40
15	Kebudayaan	4.483.535.000,00	4.019.660.888,00	463.874.112,00	89,65
15.1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.002.620.000,00	2.722.292.338,00	280.327.662,00	90,66
15.2	Dinas Kesehatan	200.000.000,00	176.233.300,00	23.766.700,00	88,12
15.3	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	200.000.000,00	149.058.000,00	50.942.000,00	74,53
15.4	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar	220.000.000,00	216.793.000,00	3.207.000,00	98,54
15.5	Sekretariat Daerah	100.000.000,00	61.150.000,00	38.850.000,00	61,15
15.6	Kantor Camat Adiwerna	48.000.000,00	38.679.250,00	9.320.750,00	80,58
15.7	Kantor Camat Balapulang	30.000.000,00	29.996.000,00	4.000,00	99,99
15.8	Kantor Camat Bojong	34.948.000,00	34.586.000,00	362.000,00	98,96
15.9	Kantor Camat Bumijawa	67.840.000,00	62.214.800,00	5.625.200,00	91,71
15.10	Kantor Camat Dukuhturi	59.127.000,00	51.410.000,00	7.717.000,00	86,95
15.11	Kantor Camat Dukuhwaru	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00
15.12	Kantor Camat Jatinegara	25.000.000,00	24.903.950,00	96.050,00	99,62
15.13	Kantor Camat Kd.Banteng	39.000.000,00	37.999.600,00	1.000.400,00	97,43
15.14	Kantor Camat Kramat	65.000.000,00	64.264.000,00	736.000,00	98,87
15.15	Kantor Camat Lebaksiu	32.000.000,00	27.710.000,00	4.290.000,00	86,59
15.16	Kantor Camat Margasari	31.500.000,00	30.516.250,00	983.750,00	96,88
15.17	Kantor Camat Pagerbarang	31.500.000,00	30.399.000,00	1.101.000,00	96,50
15.18	Kantor Camat Pangkah	30.000.000,00	29.440.000,00	560.000,00	98,13
15.19	Kantor Camat Slawi	49.000.000,00	48.761.650,00	238.350,00	99,51
15.20	Kantor Camat Suradadi	70.000.000,00	44.999.950,00	25.000.050,00	64,29
15.21	Kantor Camat Talang	45.000.000,00	40.349.000,00	4.651.000,00	89,66
15.22	Kantor Camat Tarub	25.000.000,00	19.904.950,00	5.095.050,00	79,62
15.23	Kantor Camat Warureja	28.000.000,00	27.999.850,00	150,00	100,00
16	Perpustakaan	496.700.000,00	464.718.820,00	31.981.180,00	93,56
16.1	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	451.700.000,00	429.782.400,00	21.917.600,00	95,15
16.2	Sekretariat DPRD	25.000.000,00	17.175.000,00	7.825.000,00	68,70
16.3	Kecamatan Slawi	20.000.000,00	17.761.420,00	2.238.580,00	88,81
17	Kearsipan	3.520.584.000,00	3.241.782.700,00	278.801.300,00	92,08

No.	URUSAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/(KURANG)	
		Rp	Rp	Rp	%
17.1	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3.375.584.000,00	3.144.048.700,00	231.535.300,00	93,14
17.2	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	25.000.000,00	21.251.500,00		
17.3	Sekretariat Daerah	40.000.000,00	16.294.500,00	23.705.500,00	40,74
17.4	Sekretariat DPRD	30.000.000,00	17.435.000,00	12.565.000,00	58,12
17.5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	50.000.000,00	42.753.000,00	7.247.000,00	85,51
C	URUSAN PILIHAN	147.022.146.000,00	133.068.263.615,00	13.953.882.385,00	90,51
1	Kelautan dan Perikanan	7.650.139.000,00	7.192.707.134,00	457.431.866,00	94,02
1.1	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	7.650.139.000,00	7.192.707.134,00	457.431.866,00	94,02
2	Pariwisata	15.276.836.000,00	14.060.819.056,00	1.216.016.944,00	92,04
2.1	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	15.276.836.000,00	14.060.819.056,00	1.216.016.944,00	92,04
3	Pertanian	43.976.456.000,00	40.199.433.811,00	3.777.022.189,00	91,41
3.1	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	1.575.205.000,00	1.498.634.953,00	76.570.047,00	95,14
3.2	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	42.401.251.000,00	38.700.798.858,00	3.700.452.142,00	91,27
4	Energi dan Sumberdaya Mineral	42.397.970.000,00	38.170.317.883,00	4.227.652.117,00	90,03
4.1	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	4.267.000.000,00	4.192.185.500,00	74.814.500,00	98,25
4.2	Dinas Perhubungan	38.130.970.000,00	33.978.132.383,00	4.152.837.617,00	89,11
5	Perdagangan	22.153.771.000,00	20.180.115.367,00	1.973.655.633,00	91,09
5.1	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar	22.153.771.000,00	20.180.115.367,00	1.973.655.633,00	91,09
6	Perindustrian	15.381.974.000,00	13.161.772.649,00	2.220.201.351,00	85,57
6.1	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	15.221.974.000,00	13.004.649.249,00	2.217.324.751,00	85,43
6.2	dan Penelitian Pengembangan	160.000.000,00	157.123.400,00	2.876.600,00	98,20
7	Transmigrasi	185.000.000,00	103.097.715,00	81.902.285,00	55,73
7.1	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	185.000.000,00	103.097.715,00	81.902.285,00	55,73
D	PENUNJANG	928.438.375.081,00	886.624.390.360,00	41.813.984.721,00	95,50
1	Administrasi Pemerintahan	125.253.583.200,00	112.356.444.244,00	12.897.138.956,00	89,70
1.1	Dinas Perhubungan	100.000.000,00	88.190.511,00	11.809.489,00	88,19
1.2	Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan	722.840.000,00	669.410.000,00	53.430.000,00	92,61
1.3	Sekretariat Daerah	29.493.722.200,00	26.357.920.269,00	3.135.801.931,00	89,37
1.4	Sekretariat DPRD	57.226.464.000,00	50.235.040.100,00	6.991.423.900,00	87,78
1.5	Kantor Camat Adiwerna	1.472.814.000,00	1.378.691.779,00	94.122.221,00	93,61
1.6	Kantor Camat Balapulang	1.168.627.000,00	1.064.365.879,00	104.261.121,00	91,08
1.7	Kantor Camat Bojong	1.432.032.000,00	1.266.886.468,00	165.145.532,00	88,47
1.8	Kantor Camat Bumijawa	1.207.774.000,00	1.047.082.030,00	160.691.970,00	86,70
1.9	Kantor Camat Dukuhturi	1.568.839.000,00	1.489.738.147,00	79.100.853,00	94,96
1.10	Kantor Camat Dukuhwaru	1.392.002.000,00	1.353.092.660,00	38.909.340,00	97,20
1.11	Kantor Camat Jatinegara	1.367.674.000,00	1.305.841.769,00	61.832.231,00	95,48
1.12	Kantor Camat Kd. Banteng	1.429.934.000,00	1.344.120.303,00	85.813.697,00	94,00
1.13	Kantor Camat Kramat	2.410.167.000,00	2.299.774.837,00	110.392.163,00	95,42

No.	URUSAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/(KURANG)	
		Rp	Rp	Rp	%
1.14	Kantor Camat Lebaksiu	1.186.495.000,00	1.122.076.063,00	64.418.937,00	94,57
1.15	Kantor Camat Margasari	1.773.901.000,00	1.664.993.475,00	108.907.525,00	93,86
1.16	Kantor Camat Pagerbarang	1.619.772.000,00	1.566.215.667,00	53.556.333,00	96,69
1.17	Kantor Camat Pangkah	1.629.303.000,00	1.455.403.052,00	173.899.948,00	89,33
1.18	Kantor Camat Slawi	6.561.020.000,00	6.098.841.205,00	462.178.795,00	92,96
1.19	Kantor Camat Suradadi	1.484.980.000,00	1.446.536.195,00	38.443.805,00	97,41
1.20	Kantor Camat Talang	1.563.084.000,00	1.330.863.814,00	232.220.186,00	85,14
1.21	Kantor Camat Tarub	1.443.894.000,00	1.339.294.726,00	104.599.274,00	92,76
1.22	Kantor Camat Warureja	1.442.992.000,00	1.395.265.216,00	47.726.784,00	96,69
1.23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.313.253.000,00	3.085.957.606,00	227.295.394,00	93,14
1.24	Inspektorat	2.167.000.000,00	1.881.818.973,00	285.181.027,00	86,84
1.25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	75.000.000,00	69.023.500,00	5.976.500,00	92,03
2	Pengawasan	5.949.820.000,00	5.590.954.123,00	358.865.877,00	93,97
2.1	Inspektorat	5.949.820.000,00	5.590.954.123,00	358.865.877,00	93,97
3	Perencanaan	13.235.743.000,00	12.193.985.449,00	1.041.757.551,00	92,13
3.1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	70.000.000,00	23.162.640,00	46.837.360,00	33,09
3.2	Dinas Kesehatan	20.000.000,00	18.947.000,00	1.053.000,00	94,74
3.3	RSUD Suradadi	10.000.000,00	1.685.000,00	8.315.000,00	16,85
3.4	Dinas Pekerjaan Umum	20.000.000,00	19.263.000,00	737.000,00	96,32
3.5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	65.000.000,00	57.790.000,00	7.210.000,00	88,91
3.6	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat	36.000.000,00	30.436.600,00	5.563.400,00	84,55
3.7	Satuan Polisi Pamong Praja	36.000.000,00	35.043.500,00	956.500,00	97,34
3.8	Dinas Sosial	92.000.000,00	87.364.000,00	4.636.000,00	94,96
3.9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	30.000.000,00	28.933.262,00	1.066.738,00	96,44
3.10	Dinas Lingkungan Hidup	45.000.000,00	29.738.950,00	15.261.050,00	66,09
3.11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	27.500.000,00	25.824.600,00	1.675.400,00	93,91
3.12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	240.000.000,00	188.101.417,00	51.898.583,00	78,38
3.13	Dinas Perhubungan	33.000.000,00	27.091.700,00	5.908.300,00	82,10
3.14	Dinas Komunikasi dan Informatika	34.000.000,00	33.374.750,00	625.250,00	98,16
3.15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	40.000.000,00	37.655.000,00	2.345.000,00	94,14
3.16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	25.000.000,00	24.530.000,00	470.000,00	98,12
3.17	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	175.000.000,00	166.839.807,00	8.160.193,00	95,34
3.18	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	43.000.000,00	41.582.950,00	1.417.050,00	96,70

No.	URUSAN	ANGGARAN Rp	REALISASI Rp	LEBIH/(KURANG)	
				Rp	%
3.19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	45.000.000,00	25.482.395,00	19.517.605,00	56,63
3.20	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	45.000.000,00	32.392.050,00	12.607.950,00	71,98
3.21	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	63.000.000,00	24.922.000,00	38.078.000,00	39,56
3.22	Sekretariat Daerah	327.690.000,00	275.994.320,00	51.695.680,00	84,22
3.23	Sekretariat DPRD	27.000.000,00	3.280.000,00	23.720.000,00	12,15
3.24	Kantor Camat Adiwerna	40.650.000,00	37.593.250,00	3.056.750,00	92,48
3.25	Kantor Camat Balapulang	33.766.000,00	33.513.150,00	252.850,00	99,25
3.26	Kantor Camat Bojong	52.500.000,00	35.346.750,00	17.153.250,00	67,33
3.27	Kantor Camat Bumijawa	41.000.000,00	34.415.500,00	6.584.500,00	83,94
3.28	Kantor Camat Dukuhturi	38.590.000,00	37.734.250,00	855.750,00	97,78
3.29	Kantor Camat Dukuhwaru	45.000.000,00	44.999.800,00	200,00	100,00
3.30	Kantor Camat Jatinegara	37.500.000,00	31.855.850,00	5.644.150,00	84,95
3.31	Kantor Camat Kd.Banteng	37.000.000,00	36.819.850,00	180.150,00	99,51
3.32	Kantor Camat Kramat	40.000.000,00	39.477.000,00	523.000,00	98,69
3.33	Kantor Camat Lebaksiu	41.000.000,00	38.460.000,00	2.540.000,00	93,80
3.34	Kantor Camat Margasari	41.505.000,00	40.227.150,00	1.277.850,00	96,92
3.35	Kantor Camat Pagerbarang	38.500.000,00	30.333.400,00	8.166.600,00	78,79
3.36	Kantor Camat Pangkah	42.000.000,00	39.690.000,00	2.310.000,00	94,50
3.37	Kantor Camat Slawi	78.680.000,00	67.532.450,00	11.147.550,00	85,83
3.38	Kantor Camat Suradadi	36.520.000,00	36.481.450,00	38.550,00	99,89
3.39	Kantor Camat Talang	49.000.000,00	29.827.000,00	19.173.000,00	60,87
3.40	Kantor Camat Tarub	39.700.000,00	26.766.838,00	12.933.162,00	67,42
3.41	Kantor Camat Warureja	43.000.000,00	42.999.850,00	150,00	100,00
3.42	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	173.000.000,00	158.261.050,00	14.738.950,00	91,48
3.43	Inspektorat	30.000.000,00	27.637.323,00	2.362.677,00	92,12
3.44	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	10.492.642.000,00	9.890.461.597,00	602.180.403,00	94,26
3.45	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	10.000.000,00	5.284.000,00	4.716.000,00	52,84
3.46	Badan pengelolaan Pendapatan Daerah	165.000.000,00	155.349.000,00	9.651.000,00	94,15
3.47	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah	40.000.000,00	33.484.000,00	6.516.000,00	83,71
4	Keuangan	770.445.734.881,00	744.916.056.068,00	25.529.678.813,00	96,69
4.1	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	30.000.000,00	22.305.000,00		
4.2	Sekretariat Daerah	75.000.000,00	68.702.500,00	6.297.500,00	91,60
4.3	Kecamatan Adiwerna	16.000.000,00	15.500.000,00	500.000,00	96,88
4.4	Kecamatan Pagerbarang	13.000.000,00	12.580.000,00	420.000,00	96,77
4.5	Kecamatan Pangkah	20.000.000,00	19.300.000,00	700.000,00	96,50
4.6	Kecamatan Slawi	62.885.000,00	55.883.250,00	7.001.750,00	88,87
4.7	Kecamatan Talang	19.000.000,00	17.134.900,00	1.865.100,00	90,18
4.8	Kecamatan Tarub	20.000.000,00	17.105.000,00	2.895.000,00	85,53

No.	URUSAN	ANGGARAN Rp	REALISASI Rp	LEBIH/(KURANG)	
				Rp	%
4.9	Kecamatan Warurejo	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00
4.10	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	754.814.105.881,00	730.469.598.630,00	24.344.507.251,00	96,77
4.11	Badan pengelolaan Pendapatan Daerah	15.363.744.000,00	14.205.946.788,00	1.157.797.212,00	92,46
5	Kepegawaian	13.553.494.000,00	11.566.950.476,00	1.986.543.524,00	85,34
5.1	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah	13.553.494.000,00	11.566.950.476,00	1.986.543.524,00	85,34

Lampiran 5.1 Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah :		TA 2019		TA 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
a)	Retribusi Pelayanan Kesehatan	182.004.000,00	187.990.500,00	163.620.500,00
b)	Retribusi Pelayanan Kebersihan /Persampahan	2.319.998.000,00	2.048.058.250,00	1.803.798.750,00
c)	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.000.000.000,00	477.161.000,00	342.625.000,00
d)	Retribusi Pelayanan Pasar	3.451.471.941,00	3.331.056.100,00	3.087.717.700,00
e)	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.616.040.000,00	1.498.720.000,00	1.591.980.000,00
f)	Retribusi Pemenksaan Alat Pemadam Kebakaran	3.700.000,00	3.777.000,00	3.515.000,00
g)	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	550.000.000,00	329.749.500,00	280.221.000,00
h)	Retribusi Pengolahan Limbah cair	32.000.000,00	43.300.000,00	44.100.000,00
i)	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	12.028.750.759,00	7.211.163.311,00	2.324.510.860,00
j)	Retribusi Tempat Pelelangan	285.000.000,00	240.567.850,00	212.988.260,00
k)	Retribusi Terminal	250.906.000,00	168.144.500,00	166.905.500,00
l)	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.000.000.000,00	1.008.528.300,00	861.648.300,00
m)	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	6.517.028.300,00	6.544.162.400,00	5.962.616.650,00
n)	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	1.746.845.000,00	2.089.563.210,00	956.307.225,00
o)	Retribusi Izin Gangguan (HO)	0,00	28.000,00	172.600,00
p)	Retribusi Izin Trayek	25.000.000,00	25.770.000,00	31.179.000,00
q)	Retribusi Izin Usaha Perikanan	2.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah		31.010.744.000,00	25.207.739.921,00	17.833.906.345,00

Lampiran 5.2. Lain - lain PAD yang sah

Lain – Lain PAD yang Sah :		TA 2019		TA 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
a)	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	44.000.000,00	134.175.280,00	306.856.280,00
b)	Hasil Penjualan Aset Lainnya		677.033.000,00	238.520.000,00
c)	Penerimaan Jasa Giro	7.000.000.000,00	4.560.452.080,00	4.650.582.910,00
d)	Penerimaan Bunga Deposito	16.500.000.000,00	13.184.908.079,00	16.830.238.549,00
e)	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	8.000.000,00	10.290.000,00
f)	Pendapatan Denda atas keterlambatan Pelaks. Pekerjaan	0,00	1.666.728.424,00	717.191.571,00
g)	Pendapatan Denda Pajak		1.214.033.185,00	1.005.760.695,00
h)	Pendapatan Denda Retribusi	550.000.000,00	745.850.000,00	873.171.400,00
i)	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda		-	55.500.000,00
j)	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan		116.005.600,00	686.800.500,00
k)	Pendapatan dari pengembalian	3.000.000.000,00	6.931.254.609,00	4.448.535.803,00
l)	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa		-	719.800.800,00
m)	Pendapatan BLUD	255.427.547.000,00	235.346.709.753,29	203.467.756.069,62
n)	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	116000000,00	87.458.692,00	29.858.005,00
o)	Pendapatan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	196.252.000,00	414.847.453,00	237.843.300,00
p)	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	41.906.000,00	25.452.100,00	11.867.700,00
q)	Penerimaan dari sumber mata air	267.750.000,00	455.375.240,00	545.798.480,00
r)	Pendapatan Sewa BLK	35.000.000,00	23722067,00	-
s)	Pendapatan Sewa LPK Nelayan	3.500.000,00	0,00	0,00
Jumlah Lain-lain PAD yang Sah		283.181.955.000,00	265.592.005.562,29	234.836.372.062,62

30.755.633.499,67

Lampiran 5.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK	TA 2019		TA 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
a) DAK Bidang Pendidikan (DAK FISIK)	19.097.533.000,00	18.684.592.209,00	7.583.681.440,00
b) DAK Bidang Kesehatan (DAK FISIK)	40.842.369.000,00	37.801.325.770,00	21.680.711.515,00
c) DAK Reguler Bidang Kelautan dan Perikanan (DAK FISIK)	701.814.000,00	698.800.000,00	536.636.000,00
d) Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD) (DAK NON FISIK)	22.414.200.000,00	22.414.200.000,00	21.123.000.000,00
e) Tunjangan Profesi Guru (DAK NON FISIK)	218.856.711.000,00	211.476.800.825,00	235.825.784.223,00
f) Tambahan Penghasilan Guru (DAK NON FISIK)	775.272.000,00	232.582.000,00	709.500.000,00
g) Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK NON FISIK)	27.492.725.000,00	27.492.723.266,00	-
h) DAK Bidang Infrastruktur Jalan	18.477.496.000,00	15.476.880.000,00	-
i) DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	1.440.420.000,00	1.234.406.000,00	3.257.054.410,00
j) DAK Bidang Pertanian	3.510.988.000,00	3.185.382.210,00	1.609.363.000,00
k) Tambahan DAK Fisik			16.308.067.000,00
l) Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)	2.452.323.000,00	2.452.322.672,00	2.159.943.420,00
m) Tunjangan Khusus Guru (DAK Non Fisik)	663.848.000,00	601.588.800,00	607.199.460,00
n) DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.756.250.000,00	2.712.500.000,00	979.800.000,00
o) DAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan	3.267.008.000,00	2.942.873.100,00	3.405.730.000,00
p) Bantuan Operasional Kesehatan (DAK NON FISIK)			18.738.437.248,00
q) Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK NON FISIK)			4.762.965.269,00
r) DAK Reguler bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana (DAK FISIK)	5.091.784.000,00	4.861.174.256,00	
s) DAK Reguler Industri Kecil dan Menengah (DAK Fisik)	5.713.410.000,00	4.486.173.666,00	
t) DAK Penugasan Bidang Air Minum (DAK FISIK)	3.282.803.000,00	2.955.510.503,00	
u) DAK penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DAK FISIK)	531.282.000,00	-	
v) Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (DAK non Fisik)	5.855.800.000,00	5.855.800.000,00	
w) Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (DAK Non Fisik)	380.000.000,00	380.000.000,00	
Jumlah Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	383.604.036.000,00	365.945.635.277,00	339.287.872.985,00

Lampiran 5.4 Gaji dan Tunjangan

Gaji dan Tunjangan		TA 2019		TA 2018
		Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi Rp
(1)	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	525.264.228.994,00	512.486.923.210,00	499.678.607.088,00
(2)	Tunjangan Keluarga	51.235.363.441,00	48.156.010.601,00	47.407.987.481,00
(3)	Tunjangan Jabatan	10.154.967.200,00	9.081.743.000,00	9.756.299.210,00
(4)	Tunjangan Fungsional	36.693.211.960,00	34.970.910.000,00	35.648.159.000,00
(5)	Tunjangan Fungsional Umum	7.837.059.200,00	6.455.770.320,00	6.586.490.000,00
(6)	Tunjangan Beras	25.713.201.969,00	23.802.922.516,00	24.623.568.543,00
(7)	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.697.215.390,00	2.717.840.572,00	1.149.903.167,00
(8)	Pembulatan Gaji	25.102.399,00	6.801.733,00	6.543.625,00
(9)	Iuran Jaminan kesehatan	15.476.319.993,00	14.496.562.786,00	14.141.847.044,00
(10)	Uang Paket	95.508.000,00	95.508.000,00	95.350.500,00
(11)	Tunjangan Badan Musyawarah	31.241.700,00	26.034.750,00	31.241.700,00
(12)	Tunjangan Komisi	61.387.200,00	51.156.000,00	61.295.850,00
(13)	Tunjangan Badan Anggaran	32.703.300,00	27.496.350,00	32.611.950,00
(14)	Tunjangan Badan Kehormatan	7.856.100,00	6.546.750,00	7.856.100,00
(15)	Tunjangan Alat kelengkapan Lainnya	224.538.300,00	19.777.275,00	18.772.425,00
(16)	Tunjangan Perumahan	7.156.800.000,00	6.205.020.988,00	6.874.230.542,00
(17)	Uang Jasa Pengabdian	477.540.700,00	455.490.000,00	16.179.786,00
(18)	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	252.000.000,00
(19)	Iuran BPJS Ketenagakerjaan	7.341.740.154,00	5.937.974.220,00	3.307.424.376,00
(20)	Belanja Tunjangan Reses	2.205.000.000,00	1.470.000.000,00	1.543.500.000,00
(21)	Belanja Tunjangan Transportasi	6.000.000.000,00	5.560.000.000,00	4.682.000.000,00
(22)	Tunjangan Profesi Guru	240.000.000.000,00	229.013.163.840,00	223.936.688.105,00
(23)	Tambahan Penghasilan Guru	1.554.964.000,00	531.250.000,00	647.862.500,00
(24)	Tunjangan Khusus Guru	684.380.000,00	571.289.700,00	643.315.200,00
Jumlah		942.363.450.000,00	902.539.312.611,00	881.149.734.192,00

Lampiran 5.5 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa	TA 2019		TA 2018
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi Rp
a) Belanja Bahan Pakai Habis	15.307.517.270,00	13.767.261.331,00	11.986.380.548,00
b) Belanja Bahan /Material	23.248.507.010,00	21.634.404.676,00	21.511.226.943,00
c) Belanja Jasa Kantor	121.139.893.076,00	111.234.430.145,00	82.899.821.165,00
d) Belanja Premi Asuransi	1.739.605.000,00	1.310.543.553,00	1.219.039.089,00
e) Belanja Jasa Perawatan Kendaraan Bermotor	8.557.518.050,00	7.259.984.380,00	6.609.632.391,00
f) Belanja Cetak dan Penggandaan	11.433.580.376,00	10.358.957.411,00	9.297.612.783,00
g) Sewa Rumah /Gedung/Gudang/ Parkir/Tanah	1.726.293.700,00	1.454.041.370,00	1.949.951.881,00
h) Sewa Sarana Mobilitas	1.699.238.500,00	1.547.432.500,00	1.319.035.550,00
i) Sewa Alat Berat	1.000.000,00		
j) Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.488.220.300,00	3.201.876.800,00	2.236.841.000,00
k) Belanja Makanan dan Minuman	27.639.300.450,00	24.843.567.951,00	22.422.912.890,00
l) Belanja Pakaian Dinas dan atributnya	589.297.800,00	569.066.500,00	2.969.170.900,00
m) Belanja Pakaian Kerja	1.077.022.400,00	1.040.336.100,00	752.875.350,00
n) Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	1.712.347.250,00	1.620.012.150,00	1.261.747.299,00
o) Belanja Perjalanan Dinas	41.982.598.218,00	33.170.455.634,00	28.947.885.047,00
p) Belanja Pemeliharaan	23.498.016.900,00	22.299.108.333,00	27.563.435.028,00
q) Belanja Jasa Konsultan	6.169.755.900,00	5.200.071.130,00	6.116.322.675,00
r) Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis	6.776.382.600,00	6.353.337.495,00	4.600.738.699,00
s) Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	1.943.935.200,00	1.888.050.000,00	2.239.760.000,00
t) Belanja Barang dan Jasa BLUD	232.924.785.000,00	186.994.407.780,15	159.387.603.522,00
u) Belanja Barang dan Jasa Dana BOP PAUD	-	-	148.800.000,00
v) Belanja Barang Jasa BOS	85.395.522.000,00	86.615.899.978,00	84.100.464.260,00
w) Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli	5.867.875.000,00	5.244.973.500,00	4.903.700.000,00
x) Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak ketiga	34.320.514.000,00	30.985.591.425,00	
Jumlah	658.238.726.000,00	578.593.810.142,15	484.444.957.020,00

Lampiran 5.6 Belanja Modal Peralatan dan mesin

Belanja Peralatan dan Mesin	TA 2019		TA 2018
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi Rp
a) Alat Besar Darat	-	-	1.697.086.450,00
b) Alat Bantu	251.068.000,00	225.146.450,00	418.730.000,00
c) Alat Angkutan Darat Bermotor	14.851.297.000,00	12.905.444.117,00	6.460.698.314,00
d) Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	-	-	3.800.000,00
e) Alat Bengkel Bermesin	88.500.000,00	76.874.250,00	-
f) Alat Bengkel Tak Bermesin	-	-	9.590.000,00
g) Alat Ukur	-	-	783.447.400,00
h) Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	-	-	106.267.000,00
i) Alat Kantor	3.600.103.700,00	3.309.278.340,00	2.649.466.050,00
j) Alat rumah Tangga	7.956.657.250,00	7.060.750.232,00	22.944.134.329,00
k) Komputer	14.361.190.900,00	15.895.028.856,00	5.377.626.879,00
l) Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	745.168.000,00	696.564.300,00	924.731.500,00
m) Alat Studio	637.909.250,00	612.145.175,00	702.646.500,00
n) Alat Komunikasi	810.824.150,00	804.959.300,00	516.580.000,00
o) Peralatan Pemancar	-	-	33.247.500,00
p) Alat Kedokteran	1.088.026.000,00	897.527.940,00	3.085.170.163,00
q) Alat Kesehatan	11.269.902.000,00	16.486.413.885,00	13.503.131.990,00
r) Unit-unit Laboratorium	795.180.000,00	742.509.180,00	1.056.252.195,00
s) Alat Peraga/Praktek Sekolah	184.317.000,00	96.740.000,00	35.601.808.177,00
t) Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	-	-	392.275.000,00
u) Alat Laboratorium Kimia Nuklir	9.000.000,00	7.725.000,00	-
v) Lat Laboratorium Lingkungan Hidup	150.000.000,00	148.275.750,00	-
w) Alat Keamanan dan Perlindungan	255.780.000,00	232.821.554,00	458.278.245,00
Jumlah	57.054.923.250,00	60.198.204.329,00	96.724.967.692,00

Lampiran 5.7 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja

BM - Bangunan Gedung Tempat Kerja		TA 2019		TA 2018
		Anggaran	Realisasi	Realisasi
		Rp	Rp	Rp
(1)	Bangunan Gedung Kantor	53.768.714.750,00	44.786.454.751,00	11.347.051.569,00
(2)	Bangunan Gudang	6.373.410.000,00	5.017.152.845,00	1.148.100.000,00
(3)	Bangunan Gedung Instalasi			148.035.600,00
(4)	Bangunan Gedung Laboratorium			124.000.000,00
(5)	Bangunan Kesehatan	33.155.064.000,00	30.140.374.903,00	17.456.245.707,00
(6)	Bangunan Gedung Tempat Ibadah			1.149.504.100,00
(7)	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	197.620.000,00	193.489.984,00	199.000.000,00
(8)	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	36.783.138.000,00	36.223.731.076,00	36.736.101.522,00
(9)	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	5.242.008.000,00	4.957.620.600,00	24.028.322.464,00
(10)	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	161.600.000,00	156.220.076,00	0,00
(11)	Bangunan Gedung Garasi/Pool	400.000.000,00	376.064.000,00	339.380.000,00
(12)	Bangunan Stasiun Bus	2.200.000.000,00	1.966.558.017,00	594.149.719,00
(13)	Bangunan Kandang Hewan/Ternak	0,00	0,00	198.500.000,00
(14)	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	-	-	45.513.636
(15)	Bangunan Tempat Kerja Lainnya	22.039.373.000	20.580.438.950	14.750.335.120
Jumlah		160.320.927.750,00	144.398.105.202,00	108.264.239.437,00

Tabel. 5.8. Rincian Kas BLUD

No	Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)
A	RSUD dr Soeselo Slawi	29.424.850.029,02	12.403.163.875,02
	terdiri dari:		
	a. Kas di BLUD	14.424.850.029,02	7.403.163.875,02
	b. Deposito BLUD	15.000.000.000,00	5.000.000.000,00
B	RSUD Suradadi	1.044.539.529,94	2.845.471,00
C	Dinkes (Kas di BLUD Puskesmas)	3.676.723.824,00	3.633.482.849,80
1	Puskesmas Adiwerna	99.029.932,80	37.648.672,80
2	Puskesmas Balapulang	268.881.179,00	145.573.217,00
3	Puskesmas Bangungalih	28.250.204,00	10.650.738,00
4	Puskesmas Bojong	1.919.839,00	230.508.320,00
5	Puskesmas Bumijawa	109.839.554,00	241.282.950,00
6	Puskesmas Danasari	20.301.802,00	4.450.063,00
7	Puskesmas Dukuhturi	33.643.245,00	114.738.807,00
8	Puskesmas Dukuhwaru	29.756.187,00	29.377.460,00
9	Puskesmas Jatibogor	60.957.240,00	117.376.903,00
10	Puskesmas Jatinegara	268.741.685,00	165.621.148,00
11	Puskesmas Kaladawa	63.906.474,00	145.266.084,00
12	Puskesmas Kalibakung	13.747.023,00	56.944.598,00
13	Puskesmas Kambangan	106.575.254,60	178.035.166,60
14	Puskesmas Kedungbanteng	4.756.536,60	10.577.950,60
15	Puskesmas Kesambi	106.024.027,00	34.329.301,00
16	Puskesmas Kesamiran	183.425.376,00	148.909.996,00
17	Puskesmas Kramat	55.629.610,80	36.515.103,00
18	Puskesmas Kupu	8.379.052,00	39.936.866,60
19	Puskesmas Lebaksiu	243.881.526,00	256.093.926,00
20	Puskesmas Margasari	264.002.908,00	262.099.192,00
21	Puskesmas Pagerbarang	174.713.971,00	288.557.816,00
22	Puskesmas Pagiyanten	67.640.883,00	104.848.149,00
23	Puskesmas Pangkah	28.289.054,40	30.952.734,40
24	Puskesmas Penusupan	240.621.632,80	204.832.424,80
25	Puskesmas Slawi	215.910.158,00	18.753.188,00
26	Puskesmas Suradadi	211.473.733,00	138.630.180,00
27	Puskesmas Talang	85.902.139,00	148.246.544,00
28	Puskesmas Tarub	277.948.423,00	20.279.133,00
29	Puskesmas Warureja	402.575.174,00	412.446.218,00
	Jumlah Total Kas di BLUD	34.146.113.382,96	16.039.492.195,82

Tabel. 5.9. Rincian Kas BLUD Puskesmas

NO	PUSKESMAS	Nama Rekening	No Rekening	Nama Bank
1	Danasari	Kas BLUD puskesmas danasari	66101000578300	BRI KC Slawi
2	Kesamiran	Kas BLUD puskesmas kesamiran	1114001356	Bank Jateng Capem Pasar Banjaran
3	Margasari	Kas BLUD puskesmas margasari	1157000469	Bank Jateng Capem Margasari
4	Kesambi	Kas BLUD puskesmas kesambi	66101000576308	BRI KC Slawi
5	Bumijawa	Kas BLUD puskesmas bumijawa	66101000571308	BRI KC Slawi
6	Bojong	Kas BLUD puskesmas bojong	66101000585307	BRI KC Slawi
7	Balapulang	Kas BLUD puskesmas balapulang	66101000580307	BRI KC Slawi
8	Kalibakung	Kas BLUD puskesmas kalibakung	66101000581303	BRI KC Slawi
9	Pagerbarang	Kas BLUD puskesmas pagerbarang	66101000577304	BRI KC Slawi
10	Lebaksiu	Kas BLUD puskesmas lebaksiu	66101000572304	BRI KC Slawi
11	Kambangan	Kas BLUD puskesmas kambangan	66101000573300	BRI KC Slawi
12	Jatinegara	Kas BLUD puskesmas jatinegara	66101000584301	BRI KC Slawi
13	Kedungbanteng	Kas BLUD puskesmas kedungbanteng	054501000466301	BRI KCP Adiwerna
14	Pangkah	Kas BLUD puskesmas pangkah	054501000464309	BRI KCP Adiwerna
15	Penusupan	Kas BLUD puskesmas penusupan	66101000575302	BRI Kanca Slawi
16	Slawi	Kas BLUD puskesmas slawi	1035010269	Bank Jateng Cabang Slawi
17	Adiwerna	Kas BLUD puskesmas adiwerna	054501000467307	BRI KCP Adiwerna
18	Pagiyanten	Kas BLUD puskesmas pagiyanten	1114001330	Bank Jateng Capem Pasar Banjaran
19	Talang	Kas BLUD puskesmas talang	010101001221306	BRI KC Tegal
20	Kaladawa	Kas BLUD puskesmas kaladawa	010101001224304	BRI KC Tegal
21	Dukuhturi	Kas BLUD puskesmas dukuhturi	010101001220300	BRI KC Tegal
22	Kupu	Kas BLUD puskesmas kupu	010101001217307	BRI KC Tegal
23	Dukuhwaru	Kas BLUD puskesmas dukuhwaru	66101000574306	BRI KC Slawi
24	Tarub	Kas BLUD puskesmas tarub	010101001218303	BRI KC Tegal
25	Kramat	Kas BLUD puskesmas kramat	010101001219309	BRI KC Tegal
26	Bangungalih	Kas BLUD puskesmas bangungalih	66101000570302	BRI KC Slawi
27	Suradadi	Kas BLUD puskesmas suradadi	010101001222302	BRI KC Tegal
28	Jatibogor	Kas BLUD puskesmas jatibogor	010101001223308	BRI KC Tegal
29	Warureja	Kas BLUD puskesmas warureja	010101001216301	BRI KC Tegal

Lampiran 5. 10. Rincian Piutang Pajak Berdasarkan Umur Piutang

Piutang Pajak Hiburan

Tahun	Saldo Piutang 2019 (Rp)	Umur Piutang	Penyisihan Piutang Tak Tertagih (%)	Penyisihan Piutang Tak Tertagih (%)	Saldo Piutang 2018 (Net Realizable Value) (Rp)
2014	608.675,00	2-5 Tahun	50,00	304.337,50	304.337,50
Jumlah	608.675,00			304.337,50	304.337,50

Piutang Pajak Reklame

Tahun	Saldo Piutang 2019 (Rp)	Umur Piutang	Penyisihan Piutang Tak Tertagih (%)	Penyisihan Piutang Tak Tertagih (%)	Saldo Piutang 2018 (Net Realizable Value) (Rp)
2019	18.267.874,00	>1 Tahun	0,50	91.339,37	18.176.534,63
2017	6.040.500,00	1-2 Tahun	10,00	604.050,00	5.436.450,00
Jumlah	24.308.374,00			695.389,37	23.612.984,63

Piutang Pajak Air Tanah

Tahun	Saldo Piutang 2019 (Rp)	Umur Piutang	Penyisihan Piutang Tak Tertagih (%)	Penyisihan Piutang Tak Tertagih (%)	Saldo Piutang 2018 (Net Realizable Value) (Rp)
2019	13.575.400,00	>1 Tahun	0,50	67.877,00	13.507.523,00
2018	4.563.300,00	1-2 Tahun	10,00	456.330,00	4.106.970,00
2017	11.261.490,00	1-2 Tahun	10,00	1.126.149,00	10.135.341,00
2016	4.263.000,00	2-5 Tahun	50,00	2.131.500,00	2.131.500,00
2015	3.189.000,00	2-5 Tahun	50,00	1.594.500,00	1.594.500,00
2014	1.244.900,00	2-5 Tahun	50,00	604.050,00	640.850,00
Jumlah	38.097.090,00			5.980.406,00	32.116.684,00

Piutang Sarang Burung Walet

Tahun	Saldo Piutang 2019 (Rp)	Umur Piutang	Penyisihan Piutang Tak Tertagih (%)	Penyisihan Piutang Tak Tertagih (%)	Saldo Piutang 2018 (Net Realizable Value) (Rp)
2014	21.924.000,00	2-5 Tahun	50,00	10.962.000,00	10.962.000,00
Jumlah	21.924.000,00			10.962.000,00	10.962.000,00

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan

Tahun	Saldo Piutang 2019 (Rp)	Umur Piutang	Penyisihan Piutang Tak Tertagih (%)	Penyisihan Piutang Tak Tertagih (%)	Saldo Piutang 2018 (Net Realizable Value) (Rp)
2019	7.791.584.519,00	>1 Tahun	0,50	38.957.922,60	7.752.626.596,41
2018	5.598.726.400,00	1-2 Tahun	10,00	559.872.640,00	5.038.853.760,00
2017	4.771.663.549,00	2-5 Tahun	50,00	2.385.831.774,50	2.385.831.774,50
2016	2.796.818.881,00	2-5 Tahun	50,00	1.398.409.440,50	1.398.409.440,50
2015	2.857.340.869,00	2-5 Tahun	50,00	1.428.670.434,50	1.428.670.434,50
2014	3.625.387.549,00	>5 Tahun	100,00	3.625.387.549,00	-
2013	4.722.443.251,00	>5 Tahun	100,00	4.722.443.251,00	-
2012	2.046.749.181,00	>5 Tahun	100,00	2.046.749.181,00	-
2011	2.238.668.259,00	>5 Tahun	100,00	2.238.668.259,00	-
2010	3.292.323.437,00	>5 Tahun	100,00	3.292.323.437,00	-
2009	3.486.313.133,00	>5 Tahun	100,00	3.486.313.133,00	-
2008	2.450.313.240,00	>5 Tahun	100,00	2.450.313.240,00	-
2007	2.395.193.545,00	>5 Tahun	100,00	2.395.193.545,00	-

2006	1.936.316.838,00	>5 Tahun	100,00	1.936.316.838,00	-
2005	1.585.618.417,00	>5 Tahun	100,00	1.585.618.417,00	-
2004	1.390.716.017,00	>5 Tahun	100,00	1.390.716.017,00	-
2003	1.282.694.484,00	>5 Tahun	100,00	1.282.694.484,00	-
2002	684.356.191,00	>5 Tahun	100,00	684.356.191,00	-
s/d 2001	544.435.151,00	>5 Tahun	100,00	544.435.151,00	-
Jumlah	55.497.662.911,00			37.493.270.905,10	18.004.392.005,91

Lampiran. 5.11. Rincian Piutang Lainnya

No	Uraian	2019(Rp)	2018(Rp)
1. Piutang Dari Pemberian Pinjaman			
A	Pokok Angsuran Pinjaman	7.580.786.244,00	7.735.104.812,00
1)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	532.696.478,00	551.829.134,00
2)	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.320.065.969,00	1.320.429.605,00
3)	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.434.405.291,00	3.509.646.926,00
4)	Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan	2.293.618.506,00	2.353.199.147,00
B	Jasa Angsuran Pinjaman	2.541.131.074,00	2.568.164.239,00
1)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	79.122.418,00	79.450.126,00
2)	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	878.666.612,00	878.666.612,00
3)	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.396.719.536,00	1.410.294.536,00
4)	Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan	186.622.508,00	199.752.965,00
Jumlah Piutang dari Pemberian Pinjaman (A+B)		10.121.917.318,00	10.303.269.051,00
2 Piutang Cadangan Pangan		191.614.050,00	
Jumlah Piutang Lainnya (1+2)		10.313.531.368,00	10.303.269.051,00

lampiran 5.12. Rincian Pokok Pinjaman Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

No	Uraian	2019
1	Pembinaan dan Bintek Penguatan Modal IK/IRT 2001	60.831.196,00
2	Peningkatan Teknologi Industri Kecil Th 2001	349.468.340,00
3	Pinj. Modal IK Emping Mlinjo & Sirup Jahe 2002	7.000.000,00
4	IK/IRT Shuttlecock dan Kaset 2002	35.250.000,00
5	Pinj. Modal Bahan Baku Logam 2003	413.332.800,00
6	Pinj. Modal Pengrajin Daur Ulang Plastik 2003	19.470.296,00
7	Pinj. Modal Pendaftaran HAKI Kab. Tegal 2003	17.538.500,00
8	Pinj. Modal Pendaftaran SNI PUD Kab. Tegal 2003	50.000.000,00
9	Pinj. Modal Pendaftaran Sporting Industri 2004	150.832.000,00
10	Pinj. Modal IK Batik ATBM 2004	51.592.600,00
11	Pinj. Modal IK Tahu 2004	7.702.000,00
12	Pinj. Modal Pengrajin Batik Tulis 2004	468.000,00
13	Pinj. Modal IK Emping Mlinjo 2004	(600.263,00)
14	Peningkatan Pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah (PPTKD) Kab. Tegal TA.2001	23.318.000,00
15	Peningkatan Pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah (PPTKD) Kab. Tegal TA.2002	111.937.500,00
16	Pinjaman Modal untuk TKI TA.2004	21.925.000,00
	Jumlah	1.320.065.969,00

Lampiran 5.13.Rincian Bunga Pinjaman Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

No	Uraian	2019
1	Pembinaan dan Bintek Penguatan Modal IK/IRT 2001	42.750.435,00
2	Peningkatan Teknologi Industri Kecil Th 2001	281.746.850,00
3	Pinj. Modal IK Emping Mlinjo & Sirup Jahe 2002	5.602.456,00
4	IK/IRT Shuttlecock dan Kaset 2002	26.278.187,00
5	Pinj. Modal Bahan Baku Logam 2003	293.228.551,00
6	Pinj. Modal Pengrajin Daur Ulang Plastik 2003	20.008.772,00
7	Pinj. Modal Pendaftaran HAKI Kab. Tegal 2003	23.990.517,00
8	Pinj. Modal Pendaftaran SNI PUD Kab. Tegal 2003	40.017.544,00
9	Pinj. Modal Pendaftaran Sporting Industri 2004	84.503.713,00
10	Pinj. Modal IK Batik ATBM 2004	42.890.803,00
11	Pinj. Modal IK Tahu 2004	6.169.371,00
12	Pinj. Modal Pengrajin Batik Tulis 2004	-
13	Pinj. Modal IK Emping Mlinjo 2004	600.263,00
14	Peningkatan Pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah (PPTKD) Kab. Tegal TA.2001	2.316.400,00
15	Peningkatan Pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah (PPTKD) Kab. Tegal TA.2002	5.487.750,00
16	Pinjaman Modal untuk TKI TA.2004	3.075.000,00
	Jumlah	878.666.612,00

Lampiran 5.14. Rincian Pokok Pinjaman Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Uraian	2019
1	Pemberian Kredit Pengadaan Pangan bagi KUD 2001	257.246.950,00
2	Peningkatan kemampuan koperasi pasar 2001	40.589.000,00
3	Pembinaan dan Pengembangan Koperasi 2001	53.518.750,00
4	Pengembangan usaha koperasi pesantren 2001	-
5	Peningkatan Pendptn Pengrajin IK/IRT (krupuk 2001)	43.465.317,00
6	Peningk. Pendptn. Pedag. Kecil Th. 2001	39.400.286,00
7	Pemberian kredit P.Pangan & didistribusi bagi koperasi 2002	57.341.671,00
8	Pemberian kredit P.Pangan & didistribusi bagi PKM 2002	154.341.667,00
9	Pemberdayaan koperasi 2002	85.641.500,00
10	Pemberdayaan PKM 2002	48.212.500,00
11	Peningk. Pendptn. Pedag. Kecil Th. 2002	146.035.567,00
12	Pinj. Modal Pengrajin Konveksi 2002	319.120.546,00
13	Pemberian kredit P.Pangan & didistribusi bagi koperasi 2003	114.602.500,00
14	Pemberian kredit P.Pangan & didistribusi bagi PKM 2003	113.491.867,00
15	Pemberdayaan koperasi 2003	133.317.570,00
16	Pemberdayaan PKM 2003	363.046.833,00
17	Peningk. Pendptn. Pedag. Kecil Th. 2003	137.801.477,00
18	Pinj. Modal Pengrajin Konveksi 2003	312.499.800,00
19	Pemberian kredit P.Pangan & didistribusi bagi koperasi 2004	-
20	Pemberian kredit P.Pangan & didistribusi bagi PKM 2004	397.822.600,00
21	Pemberdayaan koperasi 2004	157.189.000,00
22	Pemberdayaan PKM 2004	214.503.100,00
23	Peningk. Pendptn. Pedag. Kecil Th. 2004	245.216.790,00
Jumlah		3.434.405.291,00

Lampiran 5.15. Rincian Bunga Pinjaman Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Uraian	2019
1	Pemberian Kredit Pengadaan Pangan bagi KUD 2001	22.983.134,00
2	Peningkatan kemampuan koperasi pasar 2001	3.851.368,00
3	Pembinaan dan Pengembangan Koperasi 2001	5.707.395,00
4	Pengembangan usaha koperasi pesantren 2001	-
5	Peningkatan Pendptn Pengrajin IK/IRT (krupuk 2001)	48.474.584,00
6	Peningk. Pendptn. Pedag. Kecil Th. 2001	90.186.122,00
7	Pemberian kredit P.Pangan & didistribusi bagi koperasi 2002	3.989.998,00
8	Pemberian kredit P.Pangan & didistribusi bagi PKM 2002	20.224.833,00

9	Pemberdayaan koperasi 2002	10.375.000,00
10	Pemberdayaan PKM 2002	7.587.500,00
11	Peningk. Pendptn. Pedag. Kecil Th. 2002	170.241.300,00
12	Pinj. Modal Pengrajin Konveksi 2002	126.168.645,00
13	Pemberian kredit P.Pangan & didistribusi bagi koperasi 2003	8.200.000,00
14	Pemberian kredit P.Pangan & didistribusi bagi PKM 2003	15.875.000,00
15	Pemberdayaan koperasi 2003	14.850.000,00
16	Pemberdayaan PKM 2003	44.624.167,00
17	Peningk. Pendptn. Pedag. Kecil Th. 2003	147.847.369,00
18	Pinj. Modal Pengrajin Konveksi 2003	276.001.217,00
19	Pemberian kredit P.Pangan & didistribusi bagi koperasi 2004	-
20	Pemberian kredit P.Pangan & didistribusi bagi PKM 2004	47.810.000,00
21	Pemberdayaan koperasi 2004	42.576.877,00
22	Pemberdayaan PKM 2004	53.875.000,00
23	Peningk. Pendptn. Pedag. Kecil Th. 2004	235.270.027,00
Jumlah		1.396.719.536,00

Lampiran 5.16.Rincian Pokok Pinjaman Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan

No	Uraian	2019
1	Pengembangan Ternak Sapi 2001	113.825.318,00
2	Pengembangan Ternak Sapi 2002	97.878.635,00
3	Pengembangan Ternak Sapi 2003	249.356.958,00
4	Pengembangan Ternak Sapi 2004	163.833.455,00
5	Penngemukan Ternak DEG Tahun 2001	122.745.000,00
6	Pengemb. Usaha DEG Tahun 2002	97.540.000,00
7	Pengemb. Usaha DEG Tahun 2003	98.270.200,00
8	Pengemb. Usaha DEG Tahun 2004	99.309.920,00
9	Pengmb. Ternak kambing Tahun 2002	94.400.000,00
10	Pengmb. Ternak kambing Tahun 2003	94.299.000,00
11	Pengmb. Ternak kambing Tahun 2004	14.430.000,00
12	Pembibitan Ternak Domba Tahun 2003	124.655.600,00
13	Pembibitan Ternak Itik Tahun 2003	38.000.000,00
14	Pengemb. Usaha Ternak Burung Puyuh Th. 2003	90.630.000,00
15	Pengemb. Usaha Ternak Burung Puyuh Th. 2004	12.660.000,00
16	Pemberdayaan Petani Tambak Th. 2002	105.954.720,00
17	Pemberdayaan Ekonomi Nelayan Tahun 2002	118.161.000,00
18	Pemberdayaan Ekonomi Nelayan Tahun 2003	249.072.000,00
19	Pemberdayaan Ekonomi Nelayan Tahun 2004	19.318.000,00
20	Pedagang dan Pengolah Ikan Tahun 2002	29.452.000,00
21	Pemberdayaan Pengolah dan Pengepul Ikan 2003	71.023.000,00
22	Pedagang dan Pengolah Ikan Tahun 2003	8.259.000,00
23	Pedagang dan Pengolah Ikan Tahun 2004	86.936.000,00
24	Penberdayaan Budidaya Ikan Tawar Tahun 2001	290.000,00
25	Penberdayaan Pemancingan Tahun 2003	19.599.200,00
26	Penberdayaan UPR Tahun 2003	8.600.000,00
27	Penberdayaan Budidaya Ikan Tawar Tahun 2004	13.703.500,00
28	Pinj. Modal Pengusaha Backyard Tahun 2002	51.416.000,00
Jumlah		2.293.618.506,00

lampiran 5.17.Rincian Bunga Pinjaman Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan

No	Uraian	2019
1	Pengembangan Ternak Sapi 2001	1.669.608,00
2	Pengembangan Ternak Sapi 2002	11.151.000,00
3	Pengembangan Ternak Sapi 2003	25.468.500,00
4	Pengembangan Ternak Sapi 2004	21.061.400,00
5	Penngemukan Ternak DEG Tahun 2001	1.356.000,00
6	Pengemb. Usaha DEG Tahun 2002	10.850.000,00
7	Pengemb. Usaha DEG Tahun 2003	15.506.700,00
8	Pengemb. Usaha DEG Tahun 2004	5.807.500,00
9	Pengmb. Ternak kambing Tahun 2002	16.559.000,00
10	Pengmb. Ternak kambing Tahun 2003	15.435.000,00
11	Pengmb. Ternak kambing Tahun 2004	456.000,00
12	Pembibitan Ternak Domba Tahun 2003	18.985.200,00
13	Pembibitan Ternak Itik Tahun 2003	2.535.000,00
14	Pengemb. Usaha Ternak Burung Puyuh Th. 2003	11.298.000,00
15	Pengemb. Usaha Ternak Burung Puyuh Th. 2004	1.140.000,00

16	Pemberdayaan Petani Tambak Th. 2002	4.347.000,00
17	Pemberdayaan Ekonomi Nelayan Tahun 2002	-
18	Pemberdayaan Ekonomi Nelayan Tahun 2003	16.900.000,00
19	Pemberdayaan Ekonomi Nelayan Tahun 2004	1.785.000,00
20	Pedagang dan Pengolah Ikan Tahun 2002	-
21	Pemberdayaan Pengolah dan Pengepul Ikan 2003	2.225.000,00
22	Pedagang dan Pengolah Ikan Tahun 2003	-
23	Pedagang dan Pengolah Ikan Tahun 2004	-
24	Penberdayaan Budidaya Ikan Tawar Tahun 2001	-
25	Penberdayaan Pemancingan Tahun 2003	379.000,00
26	Penberdayaan UPR Tahun 2003	1.100.000,00
27	Penberdayaan Budidaya Ikan Tawar Tahun 2004	607.600,00
28	Pinj. Modal Pengusaha Backyard Tahun 2002	-
Jumlah		186.622.508,00

Lampian 5.18. Rincian Persediaan

No.	Uraian	2019 (Rp.)	2018 (Rp.)
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	986.177.909,00	1.067.890.032,00
2	Persediaan Alat Listrik dan Elektronik	428.848.547,00	71.512.128,00
3	Persediaan Materai	0,00	60.000,00
4	Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	154.861.362,00	295.923.390,00
5	Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	81.464.600,00	31.199.500,00
6	Persediaan Isi Tabung Gas	88.110.730,00	22.362.500,00
7	Persediaan Bahan Baku Bangunan	381.875.200,00	298.961.900,00
8	Persediaan Bahan/Bibit Tanaman	10.707.000,00	20.799.750,00
9	Persediaan Bibit Ternak	3.500.000,00	702.900.000,00
10	Persediaan Bahan Obat-Obatan	13.962.777.470,59	15.489.166.536,51
11	Persediaan Bahan Kimia	128.908.824,00	59.698.211,00
12	Persediaan Bahan Makanan Pokok	64.544.914,00	323.395.560,00
13	Persediaan Suku Cadang Sarana Mobilitas	126.982.540,00	165.859.392,00
14	Persediaan Bahan dan Alat Kesehatan Habis Pakai	2.081.023.081,29	2.028.956.423,74
15	Persediaan Bahan Radiologi	294.596.403,00	51.423.000,00
16	Persediaan Bahan Laboratorium	927.338.908,00	943.219.285,00
17	Persediaan Bahan Pemeliharaan Air Bersih	26.017.535,00	7.583.000,00
18	Persediaan Alat Kebersihan	123.543.150,00	108.404.062,00
19	Persediaan Plakat	51.884.800,00	17.198.500,00
20	Persediaan Blanko	1.747.401.024,00	2.129.196.516,00
21	Persediaan Bank Darah Rumah Sakit	91.975.360,00	40.949.950,00
22	Persediaan Haemodialisa	111.061.500,00	56.280.400,00
23	Persediaan Alat Kontrasepsi	810.756.172,00	1.104.554.081,00
24	Persediaan Cetakan	898.733.215,00	850.619.383,00
25	Persediaan Perlengkapan Ruang Pasien	192.500,00	145.000,00
26	Persediaan Perlengkapan Farmasi	378.996.994,00	421.014.589,00
27	Persediaan Buku Uji dan Plat Uji	121.941.710,00	242.134.145,00
28	Persediaan Papan IMB	21.960.000,00	19.228.670,00
29	Persediaan Logistik Bencana	127.543.600,00	6.494.250,00
30	Persediaan Karcis	672.115.769,25	667.973.555,00
31	Persediaan Aspal	1.440.191.500,00	652.152.209,00
32	Persediaan Perlengkapan Komputer	1.294.025.029,00	868.974.361,00
33	Persediaan Alat-Alat Rumah Tangga	2.985.600,00	12.734.800,00
34	Persediaan Barang yang akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga	149.139.645,00	339.872.861,00
35	Persediaan Smartcard	132.500.000,00	
Jumlah		27.924.682.592,13	29.118.837.940,25

522.309.555,00

38.006.714,25

560.316.269,25

Lampiran. 5.19. Persediaan Alat Tulis Kantor

No.	Uraian	2019 (Rp.)	2018 (Rp.)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	207.817.258	221.771.430,00
2	Dinas Kesehatan	7.765.070,00	7.159.896,00
3	Puskesmas Margasari	958.500,00	925.350,00
4	Puskesmas Kesambi	34.748.400,00	18.958.500,00
5	Puskesmas Bumijawa	4.802.000,00	0,00
6	Puskesmas Bojong	2.675.500,00	5.067.200,00
7	Puskesmas Balapulang	13.833.300,00	2.560.000,00
8	Puskesmas Kalibakung	5.255.700,00	5.082.000,00
9	Puskesmas Pagerbarang	2.649.900,00	3.922.000,00
10	Puskesmas Lebaksu	745.000,00	139.000,00
11	Puskesmas Kambangan	21.303.150,00	9.554.650,00
12	Puskesmas Jatinegara	5.222.550,00	9.419.010,00
13	Puskesmas Kedungbanteng	10.975.000,00	12.474.560,00
14	Puskesmas Pangkah	1.096.700,00	1.809.530,00
15	Puskesmas Penusupan	10.189.000,00	3.097.160,00
16	Puskesmas Slawi	13.968.950,00	36.845.250,00
17	Puskesmas Adiwerna	9.995.500,00	2.955.000,00
18	Puskesmas Pagiyanten	12.996.138,00	10.448.356,00
19	Puskesmas Talang	13.811.900,00	6.026.700,00
20	Puskesmas Kaladawa	1.872.950,00	1.129.140,00
21	Puskesmas Dukuhturi	1.161.000,00	5.286.000,00
22	Puskesmas Kupu	3.092.200,00	3.671.900,00
23	Puskesmas Dukuhwaru	1.156.700,00	1.210.000,00
24	Puskesmas Kramat	378.000,00	528.000,00
25	Puskesmas Bangungalih	9.328.800,00	1.802.779,00
26	Puskesmas Jatibogor	1.696.800,00	2.654.000,00
27	Puskesmas Warurejo	8.339.650,00	4.011.975,00
28	RSUD Dr.Soeselo	206.898.520,00	290.615.750,00
29	RSUD Suradadi	31.881.100,00	17.477.750,00
30	Dinas Pekerjaan Umum	3.170.100,00	17.768.180,00
31	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat	1.010.300,00	530.500,00
32	Satuan Polisi Pamong Praja	514.000,00	490.700,00
33	Dinas Sosial	6.196.200,00	8.503.700,00

No.	Uraian	2019 (Rp.)	2018 (Rp.)
34	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	3.424.350,00	6.765.815,00
35	Dinas Lingkungan Hidup	23.876.200,00	33.231.950,00
36	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	32.356.111,00	54.120.976,00
37	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	38.488.698,00	32.655.140,00
38	Dinas Perhubungan	3.904.175,00	3.814.470,00
39	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.353.320,00	2.899.200,00
40	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3.900.300,00	2.239.800,00
41	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	1.655.300,00	743.000,00
42	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	44.270.250,00	75.209.900,00
43	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7.721.600,00	6.712.200,00
44	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	8.477.700,00	0,00
45	Sekretariat Daerah	91.610.895,00	75.093.729,00
46	Sekretariat DPRD	24.431.274,00	29.726.500,00
47	Kecamatan Balapulang	638.400,00	0,00
48	Kecamatan Bojong	1.595.000,00	0,00
49	Kecamatan Dukuhwaru	802.150,00	
50	Kecamatan Jatinegara	540.200,00	392.600,00
51	Kecamatan Kedungbanteng	145.400,00	202.500,00
52	Kecamatan Lebaksiu	298.000,00	
53	Kecamatan Margasari	1.765.700,00	1.917.200,00
54	Kecamatan Pangkah	536.100,00	
55	Kecamatan Slawi	443.300,00	945.500,00
56	Kecamatan Talang	907.800,00	1.301.000,00
57	Kecamatan Warurejo	153.100,00	618.200,00
58	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.624.740,00	1.687.250,00
59	Inspektorat	1.052.000,00	1.516.700,00
60	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	4.129.510,00	4.366.000,00
61	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.325.400,00	9.551.086,00
62	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	19.976.000,00	3.396.000,00
60	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	2.269.100,00	195.000,00
JUMLAH		986.177.909,00	1.063.197.682,00

Lampiran 5.20. Rincian Persediaan Bahan obat-obatan

No.	Uraian	2019 (Rp.)	2018 (Rp.)
1	Dinas Kesehatan	8.185.280.906,23	9.293.184.554,54
2	Puskesmas Danasari	31.262.310,80	35.981.868,95
3	Puskesmas Kesamiran	31.680.878,67	37.885.622,82
4	Puskesmas Margasari	97.119.205,00	143.680.086,31
5	Puskesmas Kesambi	57.822.281,24	75.233.381,10
6	Puskesmas Bumijawa	127.092.517,78	151.225.004,60
7	Puskesmas Bojong	129.285.344,18	185.919.529,56
8	Puskesmas Balapulang	98.155.749,46	154.780.810,82
9	Puskesmas Kalibakung	71.023.786,47	79.908.727,98
10	Puskesmas Pagerbarang	63.998.563,55	87.360.165,20
11	Puskesmas Lebaksiu	78.501.900,44	88.910.560,37
12	Puskesmas Kambangan	81.184.242,28	40.293.409,79
13	Puskesmas Jatinegara	119.388.326,80	62.775.967,20
14	Puskesmas Kedungbanteng	65.401.651,90	62.458.488,61
15	Puskesmas Pangkah	41.469.555,55	78.037.895,00
16	Puskesmas Penusupan	67.337.444,53	75.293.458,32
17	Puskesmas Slawi	67.850.759,79	80.331.814,96
18	Puskesmas Adiwerna	106.545.957,76	123.972.162,05
19	Puskesmas Pagiyanten	66.944.110,89	98.578.162,93
20	Puskesmas Talang	62.190.090,10	86.505.360,95
21	Puskesmas Kaladawa	21.459.936,30	50.491.375,90
22	Puskesmas Dukuhturi	36.254.834,50	28.996.387,50
23	Puskesmas Kupu	55.708.900,70	60.120.116,16
24	Puskesmas Dukuhwaru	69.336.927,47	177.928.347,92
25	Puskesmas Tarub	94.539.861,20	87.761.054,70
26	Puskesmas Kramat	91.792.743,17	104.023.333,78
27	Puskesmas Bangungalih	57.142.173,99	62.264.307,80
28	Puskesmas Suradadi	43.464.148,75	38.526.497,60
29	Puskesmas Jatibogor	20.497.952,73	79.673.325,42
30	Puskesmas Warurejo	47.917.591,10	100.093.216,10
31	RSUD Dr.Soeselo	2.875.557.447,00	1.851.578.376,00
32	RSUD Suradadi	876.184.795,26	1.776.810.800,57
33	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	6.863.180,00	13.387.060,00
34	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	16.521.395,00	15.195.305,00
JUMLAH		13.962.777.470,59	15.489.166.536,51

Lampiran 5.21. Rincian Persediaan Cetakan

No.	Uraian	2019 (Rp.)	2018 (Rp.)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14.121.750,00	7.415.400,00
2	RSUD Dr.Soeselo	189.206.600,00	227.803.850,00
3	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	888.250,00	888.250,00
4	Dinas Sosial	561.400,00	153.900,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	362.300,00	404.000,00
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	222.021.700,00	196.957.543,00
7	Dinas Pehubungan	4.760.800,00	1.443.200,00
8	Dinas Komunikasi dan Informatika		56.850,00
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	29.655.345,00	36.190.550,00
10	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	210.000,00	
11	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	2.229.450,00	7.781.200,00
12	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	30.638.400,00	11.618.000,00
13	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	1.589.200,00	
14	Sekretariat Daerah	114.740.870,00	65.048.390,00
15	Sekretariat DPRD	35.712.000,00	17.546.000,00
16	Kecamatan Balapulang		100.000,00
17	Inspektorat		176.000,00
18	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.144.750,00	3.310.000,00
19	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	248.817.400,00	273.210.250,00
20	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	2.073.000,00	516.000,00
	JUMLAH	898.733.215,00	850.619.383,00

0,00

lampiran 5.22. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No.	Nama Organisasi Perangkat Daerah	SALDO 2019	SALDO 2018
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	362.449.014.884,00	339.798.883.881,00
2	Dinas Kesehatan	73.273.053.838,00	62.116.216.831,56
3	RSUD Dr.Soeselo	119.368.921.163,04	99.540.323.198,26
4	RSUD Suradadi	27.621.980.644,00	20.977.431.178,00
5	Dinas Pekerjaan Umum	919.127.595.326,00	804.236.938.533,00
6	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	26.560.851.145,00	13.928.122.217,72
7	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat	918.863.891,00	815.591.793,00
8	Satpol-PP	5.980.661.062,00	5.187.059.769,00
9	Dinas Sosial	7.626.679.882,00	6.460.681.197,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	6.647.685.367,00	5.967.319.365,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	27.215.523.227,00	23.870.284.410,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.793.357.496,00	5.621.757.436,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.636.310.543,00	2.443.394.389,00
14	Dinas Perhubungan	23.006.522.342,00	18.604.894.476,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.481.364.674,00	4.851.994.692,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.392.806.715,00	3.005.245.609,00
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.835.242.419,00	2.575.246.316,00
18	Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan	8.653.987.277,00	8.277.682.792,00
19	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	28.506.860.042,00	26.831.791.943,00
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	10.896.942.951,00	9.942.216.121,00
21	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	10.247.919.617,00	8.255.889.585,00
22	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	22.178.780.325,00	20.642.076.774,00
23	Sekretariat Daerah	31.771.504.512,00	29.509.226.331,00
24	Sekretariat DPRD	12.728.649.420,00	10.966.352.102,00
25	Kecamatan Adiwerna	911.283.189,00	791.741.552,00
26	Kecamatan Balapulang	1.201.301.915,00	1.106.291.595,00
27	Kecamatan Bojong	1.236.025.728,00	1.079.300.802,00
28	Kecamatan Bumijawa	1.158.346.499,00	1.040.020.136,00
29	Kecamatan Dukuhturi	983.585.833,00	898.101.612,00
30	Kecamatan Dukuhwaru	1.136.099.452,00	1.067.641.436,00
31	Kecamatan Jatinegara	1.379.341.205,00	1.235.958.952,00
32	Kecamatan Kedungbanteng	1.088.914.025,00	1.024.980.292,00
33	Kecamatan Kramat	1.982.368.768,00	1.549.778.230,00

No.	Nama Organisasi Perangkat Daerah	SALDO 2019	SALDO 2018
34	Kecamatan Lebaksiu	1.124.868.368,00	1.033.253.253,00
35	Kecamatan Margasari	1.287.167.348,00	1.111.238.602,00
36	Kecamatan Pagerbarang	976.838.487,00	848.108.783,00
37	Kecamatan Pangkah	1.253.894.966,00	1.068.295.618,00
38	Kecamatan Slawi	6.153.974.420,00	4.369.424.500,00
39	Kecamatan Suradadi	1.152.636.269,00	1.098.857.394,00
40	Kecamatan Talang	1.120.999.484,00	1.040.137.526,00
41	Kecamatan Tarub	786.312.183,00	957.564.972,00
42	Kecamatan Warureja	843.624.078,00	757.545.987,00
43	BPBD	6.596.174.786,00	5.726.482.472,00
44	Inspektorat	2.069.786.587,00	1.789.927.721,00
45	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	8.889.682.246,00	8.321.964.222,00
46	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	6.523.032.773,00	5.485.897.997,00
47	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.037.631.641,00	3.713.694.701,00
48	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	3.591.475.865,00	3.240.489.118,00
Jumlah		1.803.406.444.877,04	1.584.783.318.412,54

0,00

Lampiran 5.23. Daftar Aset Tidak Berwujud dan Akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2019

NO	NAMA BARANG	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	AMORTISASI s.d 2018	AMORTISASI s.d 2018 Setelah Koreksi	AMORTISASI 2019	AKUMULASI AMORTISASI	NILAI BUKU
DINAS KESEHATAN								
1	Software SIMPUS Dinkes	2000	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	-	33.000.000,00	-
2		2018	21.967.000,00	457.645,83	5.491.750,00	5.491.750,00	10.983.500,00	10.983.500,00
JUMLAH			54.967.000,00	33.457.645,83	38.491.750,00	5.491.750,00	43.983.500,00	10.983.500,00
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA								
3	Software Satpol	2012	3.399.000,00	3.399.000,00	3.399.000,00	-	3.399.000,00	-
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH								
4	Sistem Informasi Perpustakaan		63.745.000,00	63.745.000,00	63.745.000,00	-	63.745.000,00	-
RSUD DR SOESELO								
5	System Informasi Manajemen RSUD dan Billing System	2003	199.080.000,00	199.080.000,00	199.080.000,00	-	199.080.000,00	-
6	Modul Aplikasi Medical Record	2004	95.750.000,00	95.750.000,00	95.750.000,00	-	95.750.000,00	-
7	Modul Aplikasi Akuntansi Keuangan RSUD	2004	95.750.000,00	95.750.000,00	95.750.000,00	-	95.750.000,00	-
8	Program Jasa Pelayanan	2010	24.135.000,00	24.135.000,00	24.135.000,00	-	24.135.000,00	-
9	Software Mesin Antrian	2014	67.792.500,00	67.792.500,00	67.792.500,00	-	67.792.500,00	-
10	Sistem Operasi Windows	2013	9.340.078,00	9.340.078,00	9.340.078,00	-	9.340.078,00	-
11	Software Aplikasi Rekam Medik Elektronik	2015	162.180.000,00	128.392.500,00	162.180.000,00	-	162.180.000,00	-
12	Software Aplikasi e-renggar	2016	195.425.000,00	101.783.854,33	146.568.750,00	48.856.250,00	195.425.000,00	-
13	Software Aplikasi SIM RS	2013	813.540.000,00	464.233.354,17	460.263.263,67	117.758.912,11	578.022.175,78	235.517.824,22
14	Kaspersky Small Office Security (Anti Virus)	2019	3.502.400,00		-	875.600,00	875.600,00	2.626.800,00
JUMLAH			1.666.494.978,00	1.186.257.286,50	1.260.859.591,67	167.490.762,11	1.428.350.353,78	238.144.624,22
INSPEKTORAT								
15	Sistem Informasi Pengawasan	2006	33.062.550,00	33.062.550,00	33.062.550,00	-	33.062.550,00	-
16	Website Inspektorat	2015	35.330.000,00	27.233.541,67	35.330.000,00	-	35.330.000,00	-
17	Sistem Informasi Pengawasan	2015	38.275.000,00	29.503.645,83	38.275.000,00	-	38.275.000,00	-
JUMLAH			106.667.550,00	89.799.737,50	106.667.550,00	-	106.667.550,00	-

RSUD SURADADI									-
18	Software Aplikasi SIM RS	Oct 2016	184.622.000,00	55.149.041,67	79.712.093,75	34.969.968,75	114.682.062,50	69.939.937,50	
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH									-
19	Software Alat Presensi Pegawai	2016	47.162.500,00	24.563.802,08	35.371.875,00	11.790.625,00	47.162.500,00		-
20	Aplikasi Layanan Kepegawaian Terintegrasi (2)	2016	46.585.000,00	24.263.020,83	34.938.750,00	11.646.250,00	46.585.000,00		-
21	Aplikasi Layanan Kepegawaian Terintegrasi	2016	243.613.112,00	113.607.704,17	145.621.132,50	48.995.989,75	194.617.122,25	48.995.989,75	
JUMLAH			337.360.612,00	162.434.527,08	215.931.757,50	72.432.864,75	288.364.622,25	48.995.989,75	
DINAS PERHUBUNGAN									
22	SIM Pelayanan Angkutan	2019	10.000.000,00		-	2.500.000,00	2.500.000,00	7.500.000,00	
23	SIM Alat Perlengkapan Jalan	2019	47.251.435,00		-	11.812.858,75	11.812.858,75	35.438.576,25	
JUMLAH			57.251.435,00	-	-	14.312.858,75	14.312.858,75	42.938.576,25	
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA									
24	Website IKM Mocibae.Com	2019	40.700.000,00		-	10.175.000,00	10.175.000,00	30.525.000,00	
JUMLAH TOTAL			2.515.207.575,00	1.594.242.238,58	1.768.806.742,92	304.873.204,36	2.073.679.947,28	441.527.627,72	

Lampiran 5.24. Aset Lainnya

No.	Nama Organisasi Perangkat Daerah	SALDO 2019	SALDO 2018
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	30.171.397.205,00	140.675.199.181,66
2	Dinas Kesehatan	6.639.439.433,00	6.680.497.193,00
3	RSUD DR.Soeselo	520.000.000,00	520.000.000,00
4	RSUD Suradadi	229.892.450,00	229.892.450,00
5	Dinas Pekerjaan Umum	20.457.822.960,00	21.073.322.960,00
6	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	99.139.078,00	99.139.078,00
7	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat	66.372.500,00	107.572.500,00
8	Satpol-PP	129.630.216,00	145.630.216,00
9	Dinas Sosial	361.970.400,00	361.970.400,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	25.525.875,00	25.525.875,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	2.230.432.400,00	2.381.220.800,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	745.314.400,00	745.314.400,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9.625.000,00	9.625.000,00
14	Dinas Perhubungan	3.082.020.000,00	3.082.020.000,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	-
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	37.893.900,00	37.893.900,00
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	141.047.350,00	151.047.350,00
18	Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan	4.384.544.295,00	5.279.663.295,00
19	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	238.116.575,00	238.116.575,00
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.840.944.450,00	2.084.349.300,00
21	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	971.821.700,00	971.821.700,00
22	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	164.614.545,00	164.614.545,00
23	Sekretariat Daerah	4.103.073.700,00	9.250.233.815,00
24	Sekretariat DPRD	1.527.347.464,00	1.526.597.464,00
25	Kecamatan Adiwerna	466.981.595,00	466.981.595,00
26	Kecamatan Balapulang	336.667.395,00	336.667.395,00
27	Kecamatan Bojong	416.121.395,00	416.121.395,00
28	Kecamatan Bumijawa	157.632.545,00	157.632.545,00
29	Kecamatan Dukuhturi	339.966.395,00	339.966.395,00
30	Kecamatan Dukuhwaru	318.757.995,00	336.691.995,00
31	Kecamatan Jatinegara	348.694.395,00	348.694.395,00
32	Kecamatan Kedungbanteng	182.695.000,00	182.695.000,00
33	Kecamatan Kramat	970.737.395,00	1.003.737.395,00
34	Kecamatan Lebaksiu	355.883.295,00	355.883.295,00
35	Kecamatan Margasari	359.828.595,00	359.828.595,00
36	Kecamatan Pagerbarang	333.569.395,00	333.569.395,00
37	Kecamatan Pangkah	304.594.395,00	304.594.395,00
38	Kecamatan Slawi	143.988.146,00	143.988.146,00
39	Kecamatan Suradadi	403.787.395,00	403.787.395,00
40	Kecamatan Talang	357.550.403,00	357.550.403,00

No.	Nama Organisasi Perangkat Daerah	SALDO 2019	SALDO 2018
41	Kecamatan Tarub	680.275.395,00	688.197.645,00
42	Kecamatan Warureja	397.427.061,67	397.427.061,67
43	BPBD	1.250.000,00	1.250.000,00
44	Inspektorat	65.987.000,00	65.987.000,00
45	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	528.223.550,00	528.223.550,00
46	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	5.770.070,00	549.671.460,00
47	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	9.000.000,00	9.000.000,00
48	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	872.483.788,00	1.003.283.788,00
Jumlah		86.535.858.494,67	204.932.698.236,33

Lampiran 5.25. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain (Rusak Berat)

No.	Nama Organisasi Perangkat Daerah	SALDO 2019	SALDO 2018
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	180.000,00	61.647.960.337,20
2	Dinas Kesehatan	292.903.737,00	5.227.228.854,00
3	RSUD DR.Soeselo	520.000.000,00	520.000.004,51
4	RSUD Suradadi	224.444.570,00	224.444.570,00
5	Dinas Pekerjaan Umum	3.408.502.771,00	3.727.449.182,00
6	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	0,00	81.153.312,00
7	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat	51.375.000,00	185.109.000,00
8	Satpol-PP	88.091.666,00	113.991.666,00
9	Dinas Sosial	358.910.400,00	358.910.400,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	25.249.156,00	25.249.157,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	2.002.551.160,00	2.153.339.560,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	723.045.120,00	723.045.120,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9.625.000,00	20.688.316,00
14	Dinas Perhubungan	3.082.020.000,00	3.082.020.000,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	-
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	35.706.700,00	35.706.700,00
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	135.238.350,00	145.238.350,00
18	Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan	771.563.145,00	1.576.104.025,00
19	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	204.356.428,00	204.356.413,00
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	595.147.826,00	801.460.881,00
21	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	970.625.700,00	970.625.704,00
22	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	157.567.545,00	157.567.545,00
23	Sekretariat Daerah	3.540.096.994,00	10.538.943.607,00
24	Sekretariat DPRD	1.334.295.812,00	1.334.295.810,00
25	Kecamatan Adiwerna	426.155.778,00	426.155.775,00
26	Kecamatan Balapulang	312.451.467,00	312.451.463,00
27	Kecamatan Bojong	352.687.363,00	352.687.358,00
28	Kecamatan Bumijawa	154.556.020,00	154.556.020,00
29	Kecamatan Dukuhturi	332.758.639,00	332.758.640,00
30	Kecamatan Dukuhwaru	311.204.627,00	329.138.623,00
31	Kecamatan Jatinegara	341.486.627,00	341.486.623,00
32	Kecamatan Kedungbanteng	182.695.000,00	182.695.000,00
33	Kecamatan Kramat	367.553.427,00	400.553.423,00
34	Kecamatan Lebaksiu	330.333.295,00	330.333.295,00
35	Kecamatan Margasari	353.135.667,00	353.135.663,00
36	Kecamatan Pagerbarang	314.578.090,00	314.578.087,00
37	Kecamatan Pangkah	218.504.800,00	218.504.792,00
38	Kecamatan Slawi	132.594.805,00	132.594.804,00
39	Kecamatan Suradadi	395.211.088,00	395.211.083,00
40	Kecamatan Talang	317.174.975,00	317.174.971,00
41	Kecamatan Tarub	474.476.488,00	481.172.233,00
42	Kecamatan Warureja	351.124.356,00	351.124.351,00
43	BPBD	1.250.000,00	1.250.000,00
44	Inspektorat	65.987.000,00	65.987.000,00
45	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	270.672.270,00	270.672.270,00
46	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	4.642.042,00	1.652.991.088,00
47	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	0,00	9.000.000,00
48	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	823.884.900,00	954.684.908,00
	Jumlah	25.366.615.804,00	102.535.785.983,71

Lampiran 5.26. Utang Beban Listrik

No.	Uraian	2019 (Rp.)	2018 (Rp.)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	19.168.142,00	14.230.057,00
2	Dinas Kesehatan	23.757.325,00	19.560.029,00
3	RSUD dr Soeselo	-	-
4	RSUD Suradadi	50.547.791,00	-
5	Dinas Pekerjaan Umum	13.159.215,00	12.604.939,00
6	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	6.274.351,00	5.955.896,00
7	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat	1.540.840,00	1.065.192,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja	6.636.128,00	5.054.376,00
9	Dinas Sosial	2.731.938,00	2.442.552,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	4.155.902,00	2.859.425,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	6.898.400,00	5.138.607,00
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	5.983.489,00	6.231.227,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.362.145,00	4.016.552,00
14	Dinas Perhubungan	7.579.139,00	6.724.555,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.114.449,00	2.371.071,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.014.723,00	2.796.582,00
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	8.179.206,00	8.832.714,00
18	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	6.644.626,00	4.292.706,00
19	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	12.912.315,00	12.279.812,00
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	9.019.151,00	8.396.026,00
21	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	11.535.188,00	10.393.610,00
22	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	24.823.005,00	11.307.377,00
23	Sekretariat Daerah	48.866.797,00	41.462.806,00
24	Sekretariat DPRD	14.815.876,00	14.783.514,00
25	Kecamatan Adiwerna	594.322,00	581.160,00
26	Kecamatan Balapulang	356.500,00	324.340,00
27	Kecamatan Bojong	693.231,00	734.283,00
28	Kecamatan Bumijawa	589.558,00	475.006,00
29	Kecamatan Dukuhturi	788.075,00	790.773,00
30	Kecamatan Dukuwaru	221.221,00	246.446,00
31	Kecamatan Jatinegara	371.676,00	501.060,00
32	Kecamatan Kedungbanteng		-
33	Kecamatan Kramat	1.320.986,00	1.015.336,00
34	Kecamatan Lebaksiu	215.295,00	166.695,00
35	Kecamatan Margasari	885.092,00	931.360,00
36	Kecamatan Pagerbarang	1.645.536,00	936.733,00
37	Kecamatan Pangkah	3.120.385,00	2.219.316,00
38	Kecamatan Slawi	5.553.935,00	3.916.071,00
39	Kecamatan Suradadi	638.184,00	988.964,00
40	Kecamatan Talang	967.505,00	959.297,00
41	Kecamatan Tarub	143.242,00	586.059,00
42	Kecamatan Warureja	846.879,00	500.826,00

No.	Uraian	2019 (Rp.)	2018 (Rp.)
43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.751.664,00	1.533.396,00
44	Inspektorat	4.761.865,00	3.958.114,00
45	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	7.295.503,00	7.187.598,00
46	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.127.779.305,00	3.127.143.124,00
47	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	9.185.848,00	7.547.415,00
48	Badan Kepegawaian , Pendidikan dan Pelatihan Daerah	8.027.803,00	4.484.323,00
	Jumlah	3.475.473.751,00	3.370.527.320,00

Lampiran 5.27. Utang Beban Telepon

No.	Uraian	2019 (Rp.)	2018 (Rp.)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.716.040,00	214.895,00
2	Dinas Kesehatan	4.122.609,00	3.385.465,00
3	RSUD dr Soeselo	-	-
4	RSUD Suradadi	3.275.827,00	-
5	Dinas Pekerjaan Umum	721.553,00	737.280,00
6	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	273.200,00	-
7	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat	841.267,00	434.700,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-
9	Dinas Sosial	132.300,00	264.800,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	2.470.246,00	8.917.811,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	1.917.000,00	1.923.655,00
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	76.728,00	125.720,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.554.110,00	1.554.585,00
14	Dinas Perhubungan	-	-
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	97.436,00	698.000,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	857.033,00
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	108.000,00
18	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	-	2.433.228,00
19	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1.844.515,00	2.426.263,00
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	7.783.727,00	7.248.501,00
21	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	459.500,00	448.000,00
22	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	2.774.290,00	2.705.944,00
23	Sekretariat Daerah	-	6.448.498,00
24	Sekretariat DPRD	3.997.213,00	5.085.207,00
25	Kecamatan Adiwerna	512.000,00	474.070,00
26	Kecamatan Balapulang	25.500,00	25.435,00
27	Kecamatan Bojong	-	-
28	Kecamatan Bumijawa	-	-
29	Kecamatan Dukuhturi	46.448,00	569.239,00
30	Kecamatan Dukuhwaru	57.500,00	333.300,00
31	Kecamatan Jatinegara	-	33.055,00
32	Kecamatan Kedungbanteng	-	-
33	Kecamatan Kramat	1.045.150,00	450.500,00
34	Kecamatan Lebaksiu	432.820,00	56.920,00
35	Kecamatan Margasari	547.580,00	538.425,00
36	Kecamatan Pagerbarang	-	412.500,00
37	Kecamatan Pangkah	530.734,00	148.914,00
38	Kecamatan Slawi	1.973.440,00	1.910.570,00
39	Kecamatan Suradadi	-	573.340,00
40	Kecamatan Talang	-	-
41	Kecamatan Tarub	416.570,00	416.570,00
42	Kecamatan Warureja	492.000	-
43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	637.485,00	644.706,00

No.	Uraian	2019 (Rp.)	2018 (Rp.)
44	Inspektorat	187.392,00	307.786,00
45	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	162.428,00	293.691,00
46	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	866.815,00	1.315.591,00
47	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	136.823,00	262.479,00
48	Badan Kepegawaian , Pendidikan dan Pelatihan Daerah	2.996.588,00	3.117.071,00
	Jumlah	46.124.834,00	57.901.747,00

Lampiran 5.28. Utang Beban Air

No.	Uraian	2019 (Rp.)	2018 (Rp.)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.306.500,00	2.034.500,00
2	Dinas Kesehatan	1.539.000,00	2.946.000,00
3	RSUD dr Soeselo	-	-
4	RSUD Suradadi	-	-
5	Dinas Pekerjaan Umum	1.806.500,00	1.709.000,00
6	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	1.518.500,00	1.994.500,00
7	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat	69.500,00	70.000,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja	1.028.000,00	2.576.900,00
9	Dinas Sosial	1.029.750,00	1.527.250,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	117.500,00	1.338.750,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	343.000,00	226.000,00
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	653.500,00	748.000,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	509.000,00	1.625.500,00
14	Dinas Perhubungan	196.000,00	265.000,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	274.000,00	114.124,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	278.500,00	143.500,00
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	507.500,00
18	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	1.011.500,00	834.000,00
19	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	23.500.500,00	33.964.000,00
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.114.500,00	1.191.000,00
21	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	192.500,00	140.000,00
22	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.151.500,00	3.007.500,00
23	Sekretariat Daerah	15.356.000,00	15.867.500,00
24	Sekretariat DPRD	1.680.000,00	2.008.500,00
25	Kecamatan Adiwerna	311.500,00	668.000,00
26	Kecamatan Balapulang	325.000,00	304.000,00
27	Kecamatan Bojong	368.500,00	305.500,00
28	Kecamatan Bumijawa	-	-
29	Kecamatan Dukuhturi	70.000,00	69.500,00
30	Kecamatan Dukuhwaru	154.000,00	406.500,00
31	Kecamatan Jatinegara	552.500,00	710.000,00
32	Kecamatan Kedungbanteng	-	-
33	Kecamatan Kramat	-	-
34	Kecamatan Lebaksiu	794.500,00	246.000,00
35	Kecamatan Margasari	-	-
36	Kecamatan Pagerbarang	158.000,00	122.000,00
37	Kecamatan Pangkah	-	-
38	Kecamatan Slawi	3.114.000,00	468.500,00
39	Kecamatan Suradadi	-	-
40	Kecamatan Talang	-	-
41	Kecamatan Tarub	162.500,00	720.500,00
42	Kecamatan Warureja	6.255.000	-
43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	694.500,00	522.000,00

No.	Uraian	2019 (Rp.)	2018 (Rp.)
44	Inspektorat	100.500,00	2.696.000,00
45	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	781.000,00	657.500,00
46	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.378.000,00	1.661.500,00
47	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	74.500,00	69.500,00
48	Badan Kepegawaian , Pendidikan dan Pelatihan Daerah	1.501.500,00	1.122.500,00
	Jumlah	72.471.250,00	85.588.524,00

Lampiran 5.29. Utang Beban Internet

No.	Uraian	2019 (Rp.)	2018 (Rp.)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.634.500,00	4.158.000,00
2	RSUD Suradadi	1.100.000,00	-
3	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	2.262.000,00	2.356.704,00
4	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat	-	331.450,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	1.146.595,00	1.040.375,00
6	Dinas Sosial	1.542.800,00	1.009.300,00
7	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	20.265.280,00	19.910.910,00
8	Dinas Perhubungan	1.728.100,00	1.566.670,00
9	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.024.425,00	
10	Dinas Kelautan, Perikanan, Dan Peternakan	2.155.979,00	
11	Sekretariat Daerah	10.302.039,00	-
12	Kecamatan Balapulang	484.000,00	412.500,00
13	Kecamatan Bojong	531.300,00	557.200,00
14	Kecamatan Bumijawa	451.000,00	385.000,00
15	Kecamatan Dukuhturi	533.500,00	
16	Kecamatan Pagerbarang	423.500,00	
17	Kecamatan Lebaksiu		735.130,00
18	Kecamatan Pangkah		445.500,00
19	Kecamatan Suradadi	517.000,00	
20	Kecamatan Talang	483.200,00	486.200,00
21	Kecamatan Warureja		549.712,00
22	Inspektorat	1.872.000,00	1.615.000,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	981.500,00	981.500,00
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	7.006.000,00	7.348.000,00
25	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	9.064.000,00	9.064.000,00
	Jumlah	72.508.718,00	52.953.151,00

Lampiran 5.30 Beban Gaji dan Tunjangan

No.	Beban Gaji dan Tunjangan - LO	Saldo 2019(Rp)	Saldo 2018(Rp)
1)	Beban Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	512.486.923.210,00	499.678.607.088,00
2)	Beban Tunjangan Keluarga - LO	48.156.010.601,00	47.407.987.481,00
3)	Beban Tunjangan Jabatan - LO	9.081.743.000,00	9.756.299.210,00
4)	Beban Tunjangan Fungsional - LO	34.970.910.000,00	35.648.159.000,00
5)	Beban Tunjangan Fungsional Umum - LO	6.455.770.320,00	6.586.490.000,00
6)	Beban Tunjangan Beras - LO	23.802.922.516,00	24.623.568.543,00
7)	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	2.717.840.572,00	1.149.903.167,00
8)	Beban Pembulatan Gaji - LO	6.801.733,00	6.543.625,00
9)	Beban Iuran Jaminan Kesehatan - LO	14.496.562.786,00	14.141.847.044,00
10)	Beban Uang Paket - LO	95.508.000,00	95.350.500,00
11)	Beban Tunjangan Badan Musyawarah - LO	26.034.750,00	31.241.700,00
12)	Beban Tunjangan Komisi - LO	51.156.000,00	61.295.850,00
13)	Beban Tunjangan Badan Anggaran - LO	27.496.350,00	32.611.950,00
14)	Beban Tunjangan Badan Kehormatan - LO	6.546.750,00	7.856.100,00
15)	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya - LO	19.777.275,00	18.772.425,00
16)	Beban Tunjangan Perumahan - LO	6.205.020.988,00	6.874.230.542,00
17)	Beban Uang Jasa Pengabdian - LO	455.490.000,00	16.179.786,00
18)	Beban Penunjang Operasional Pimpinan DPRD - LO	393.120.000,00	252.000.000,00
19)	Beban Iuran BPJS Ketenagakerjaan - LO	5.937.974.220,00	3.307.424.376,00
20)	Beban Tunjangan Reses - LO	1.470.000.000,00	1.543.500.000,00
21)	Beban Tunjangan Transportasi	5.560.000.000,00	4.682.000.000,00
22)	Tunjangan Profesi Guru - LO	229.013.163.840,00	223.936.688.105,00
23)	Beban Tambahan Penghasilan Guru - LO	531.250.000,00	647.862.500,00
24)	Beban Tunjangan Khusus Guru - LO	571.289.700,00	643.315.200,00
Jumlah		902.539.312.611,00	881.149.734.192,00

Lampiran 5.31 Beban Barang dan Jasa

No.	Beban Barang dan Jasa	Saldo 2019(Rp)	Saldo 2018(Rp)
a.	Beban Bahan Pakai Habis	30.539.492.176,00	13.512.021.915,00
b.	Beban Persediaan Bahan/ Material	23.080.007.723,31	23.388.966.303,34
c.	Beban Jasa Kantor	110.149.036.633,00	78.668.430.002,00
d.	Beban Premi Asuransi	6.454.302.178,00	1.219.039.089,00
e.	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	7.323.886.232,00	6.729.868.412,00
f.	Beban Cetak dan Penggandaan	10.490.834.206,75	8.603.553.438,00
g.	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.454.041.370,00	1.949.951.881,00
h.	Beban Sewa Sarana Mobilitas	1.547.432.500,00	1.319.035.550,00
i.	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.201.876.800,00	2.236.841.000,00
j.	Beban Makanan dan Minuman	24.834.867.951,00	22.422.912.890,00
k.	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	569.066.500,00	2.969.170.900,00
l.	Beban Pakaian Kerja	1.040.336.100,00	752.875.350,00
m.	Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.620.012.150,00	1.261.747.299,00
n.	Beban Perjalanan Dinas	33.147.323.543,00	28.947.885.047,00
o.	Beban Pemeliharaan	20.901.205.596,00	27.624.004.334,00
p.	Beban Jasa Konsultasi	5.074.231.130,00	7.144.346.785,00
q.	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	6.353.337.495,00	4.600.738.699,00
r.	Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.888.050.000,00	2.239.760.000,00
s.	Beban Barang dan Jasa BLUD	184.137.137.896,21	173.379.969.046,39
t.	Beban Barang Ekstrakomptabel	204.040.416,00	19.674.515,00
u.	Beban Barang Jasa BOS	85.679.405.199,00	83.642.707.027,00
v.	Beban Barang dan Jasa Dana BOP PAUD	-	148.800.000,00
w.	Beban Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli	5.244.973.500,00	4.903.700.000,00
Jumlah		564.934.897.295,27	497.685.999.482,73